



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2024 - 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Kota Bengkulu merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan sasaran dan prioritasnya bertujuan untuk meningkatkan hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera;
- b. bahwa masa jabatan Walikota Bengkulu berakhir pada Tahun 2023, maka untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah pada masa transisi, perlu disusun rencana pembangunan daerah yang terarah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Ketiga huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5887), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republic Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Daerah;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom baru Baru;.
38. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

39. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 05);
40. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
42. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
5. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Bengkulu.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bengkulu yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Bengkulu dalam jangka waktu tertentu.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra- PD, adalah dokumen perencanaan PD Kota Bengkulu untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan 2026.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD Kota Bengkulu yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PENYUSUNAN RPD

Pasal 2

- (1) RPD memuat tujuan, sasaran strategi, arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 10 -

- (2) RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam melaksanakan pembangunan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
- (3) Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2026.

Pasal 3

- (1) RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu
- 3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu-isu Strategis Daerah

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1 Visi RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027
- 5.2 Visi RPJMD Kota Bengkulu 2018-2023
- 5.3 Misi Daerah
- 5.4 Tujuan dan Sasaran



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 11 -

**BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB VII. KERANGKA PENDAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

**BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH**

BAB IX. PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

9.2 Kaidah Pelaksanaan

- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

RPD Kota Bengkulu Tahun 2024 – 2026 berpedoman pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024.
2. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu 2021 – 2026.
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bengkulu Tahun 2007 – 2027.
4. Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2021 – 2041.

Pasal 5

Penjabaran RPD lebih lanjut dituangkan dalam:

1. RKPD;
2. Renstra PD; dan
3. Renja PD.

Pasal 6

RPD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Bengkulu.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 12 -

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 7**

- (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap RPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan RPD.

Pasal 8

- (1) Pengendalian RPD oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan RPD.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi RPD kepada Walikota, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian RPD diatur pada Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 9**

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap RPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan RPD; dan
 - c. hasil RPD.

Pasal 10

- (1) Evaluasi RPD oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen RPD, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala PD dalam rangka pencapaian RPD.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD periode berikutnya.
- (4) Tata cara evaluasi RPD sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Maret 2023

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

NAYU ALDILA PUTRI, SH

NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR ...8....



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NO.8 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. WR. SUPRATMAN KOMPLEK PERKANTORAN - BENTIRING

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan usaha Pemerintah Daerah secara sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah tentunya perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, serta sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan akan berakhirnya RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 atau periode keempat pelaksanaan RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2007-2027, Pemerintah Kota Bengkulu berkewajiban menyusun kembali perencanaan jangka menengah daerah Kota Bengkulu. Sejalan dengan kondisi di atas, Kebijakan Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom baru, menginstruksikan Bupati/ Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 merupakan kebijakan untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada tahun 2024. Selain itu pada

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 (9) ditegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan kepala daerah ditunjuk pejabat Gubernur/ Pejabat Bupati/ Pejabat Walikota sejak Tahun 2023 hingga pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak Tahun 2024.

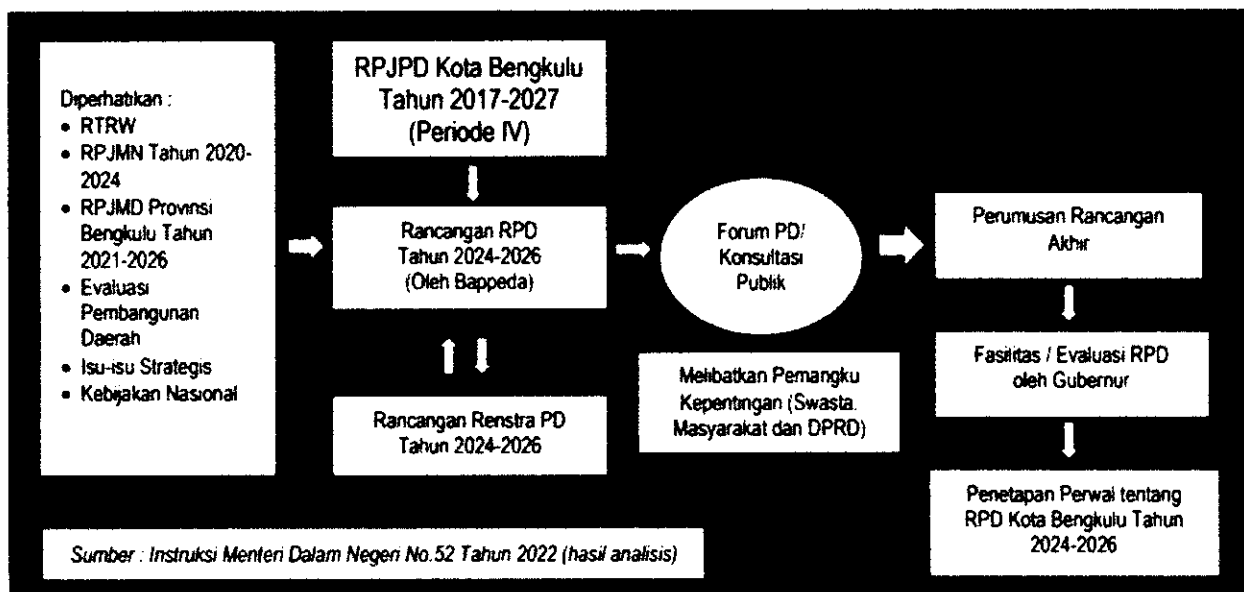
Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu Tahun 2024-2026, selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu selama periode Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi acuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah karena selain sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 juga dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai dokumen perencanaan strategik daerah, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas Daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kedudukan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 khususnya periode lima tahun keempat yaitu tahun 2023-2027. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024-2026 mengacu pada target RPJPD Kota Bengkulu di tahun berkenaan. Selain itu juga, arah kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah tetap memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas kebijakan serta pembangunan yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 ini senantiasa memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2007-2027, dan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi pembangunan, isu-isu strategis dan berbagai kebijakan/regulasi yang berlaku. Proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 dilakukan dengan pendekatan Teknokratik yakni pendekatan perencanaan dengan menggunakan metode, asumsi dan kerangka berpikir untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu juga, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah senantiasa mengedepankan keterlibatan berbagai pihak (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) sebagai upaya mengintegrasikan sumber daya daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu aktual yang dihadapi.

Proses dan tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Menteri Nomor 52 Tahun 2022 seperti gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1

Alur Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026



Rangkaian proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah di atas menunjukkan bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

1/10

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
33. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 05);

35. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
37. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 sebagai tahun transisi akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Rencana Pembangunan Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oleh karena itu penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 senantiasa berpedoman pada RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2017-2027, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020- 2024 dan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 dan dijabarkan ke dalam RKPD yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut:

The diagram illustrates the planning process flow in West Java Province. It shows the hierarchy of planning documents from national to provincial levels and the integration of various planning documents. The flow starts with RTRWN (National Spatial Planning) and RPJPN (National Medium-Term Development Plan) at the top left. These lead to RPIM Nasional (National Regional Development Plan) and RPJMD Provinsi (Provincial Medium-Term Development Plan) at the top center. These documents are then used to develop RKP (Regional Development Plan) and RKPD Provinsi (Provincial Regional Development Plan) at the top right. The process continues down to RPJPD (Provincial Medium-Term Development Plan) and RTRWD (Regional Spatial Planning) at the middle left. These lead to RPD 2023-2026 (Regional Development Plan 2023-2026) at the middle center. This RPD is then used to develop RKP Daerah (Regional Development Plan) at the middle right. The RKP Daerah is then used to develop RAPBD (Regional Annual Budget) and APBD (Annual Budget) at the bottom right. The process also involves Renstra PD (Provincial Strategic Plan) and Renja PD (Provincial Action Plan) at the bottom center, which are used to develop RKA (Regional Capital Allocation) and DPA (Regional Development Plan) at the bottom right. The diagram shows a complex network of relationships and dependencies between these various planning documents.

Hubungan antardokumen RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penyusunan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 juga memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPD Kota Bengkulu dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Tabel 1.1.
Keselarasan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 dengan RPJMD Provinsi Bengkulu
Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024

No	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bengkulu	Keterkaitan dengan Misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	Keterkaitan dengan 7 Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	MISI 2: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Bermanfaat yang Sebesar-besarnya bagi Kesejahteraan	PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
2	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi		
	Menurunnya Angka Kemiskinan		
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik		
	Meningkatnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas		
	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan		
3	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	MISI I Membangun Ekonomi dan Infrastruktur Secara Merata dan Berkeadilan untuk Mewujudkan	PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan PN 5:

A

No	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bengkulu	Keterkaitan dengan Misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	Keterkaitan dengan 7 Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024
		Pertumbuhan yang Berkualitas dan Inklusif	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur		
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik		
	Meningkatnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas		
	Menurunnya Risiko Bencana		
4	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	MISI 4: Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berbudaya, Toleransi dan Religius	PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		
	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan		
	Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat		
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk	MISI 5: Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelompok Disabilitas secara Terpadu	MISI 5: Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta kelompok disabilitas secara terpadu
	Meningkatnya Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dan		

No	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bengkulu	Keterkaitan dengan Misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	Keterkaitan dengan 7 Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024
	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk		
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis		PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
	Meningkatnya Harmoni Sosial, Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	MISI 4: Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berbudaya, Toleransi dan Religius	PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Bebas KKN	Misi 3: Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan, Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Profesional Serta Transformasi Pelayanan Publik	PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		

2. RPD Kota Bengkulu 2024-2026 dengan RPJPD Tahun 2007-2027

Arah Pembangunan dalam RPD mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu tahun 2007-2027. Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 mengikuti/mengacu pada sasaran pokok pembangunan tahap IV (Periode 2022-2027) dalam RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027.

Tabel 1.2
Keselarsan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 dengan RPJPD
Kota Bengkulu Tahun 2007-2027

NO	RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026	RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2007-2027
1.	Tujuan 1 Mewujudkan Pertumbuhan yang inklusif	Mewujudkan Kota Bengkulu yang berkualitas dan berdaya saing serta mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal melalui industri. Mewujudkan Kota Bengkulu menjadi pusat jasa dan perdagangan.
	Tujuan 2 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Mewujudkan Kota Bengkulu yang aman, nyaman, dan indah secara berkelanjutan.
	Tujuan 3 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan Kota Bengkulu yang agamis dan berbudaya. Mewujudkan Kota Bengkulu menjadi pusat layanan pendidikan
	Tujuan 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Akuntabel Dan Bebas KKN	Mewujudkan <i>Good Governance and Clean Governmen</i>

Selain itu, Program Prioritas RPD Kota Bengkulu Bengkulu Tahun 2024-2026 juga merupakan penjabaran dari Fokus Pembangunan RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 tahap IV, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Keselaran fokus Pembangunan RPJPD Tahun IV dengan Program Prioritas RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026

NO	Fokus Pembangunan RPJPD Kota Bengkulu Tahap IV (2022-2027)	Program Prioritas RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita mencapai tingkat kesejahteraan yang setara dengan kota/kabupaten yang berpenghasilan	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan

NO	Fokus Pembangunan RPJPD Kota Bengkulu Tahap IV (2022-2027)	Program Prioritas RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026
	menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan penduduk miskin yang lebih rendah.	
	Terwujudnya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing yang bertumpu pada kekuatan lokal serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.	
	Terwujudnya keseimbangan antara ruang terbuka yang hijau dengan area untuk pemukiman, perkantoran, dan bisnis.	Terwujudnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur
	Terjaganya kelestarian kawasan cagar alam dan kawasan pantai.	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas
	Terjaganya kelestarian kawasan cagar alam dan kawasan pantai.	Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana
	Tersedianya air bersih yang higienis mencukupi dan berkelanjutan.	
	Tertatanya jalan raya yang aman dan nyaman untuk pejalan kaki.	
	Tercapainya pemerataan pendidikan dalam konsep "education for all" (pendidikan untuk semua) sehingga seluruh warga masyarakat bisa mengakses pada layanan pendidikan.	Terwujudnya kualitas Pendidikan
	Tercapainya kualitas sumber daya manusia termasuk meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, juga meningkatnya kesejahteraan jiwa anggota masyarakat luas, meningkatnya produktivitas tenaga kerja serta menurunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).	Terwujudnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat
		Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak
		Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis
		Terwujudnya Perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	Terciptanya sistem pemerintahan yang baik terutama dalam rangka peningkatan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien serta produktif, di antaranya seperti, terciptanya etika birokrasi dan budaya kerja	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel

NO	Fokus Pembangunan RPJPD Kota Bengkulu Tahap IV (2022-2027)	Program Prioritas RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026
	sesuai prinsip <i>good governance</i> dan tuntasnya penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah	

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu 2024-2026 menjadi pedoman/acuan PD untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2024-2026. Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota. Selanjutnya, RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun

3. RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 dengan RTRW Kota Bengkulu Tahun 2021-2041

Tabel 1.4

Keterkaitan Tujuan anatar RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 dengan RTRW Kota Bengkulu Tahun 2021-2041

NO	Tujuan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026	Tujuan dan Kebijakan RTRW Kota Bengkulu Tahun 2021-2041
	Tujuan : 1. Mewujudkan Pertumbuhan yang inklusif 2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan 3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat	Tujuan : Mewujudkan Kota Bengkulu sebagai pusat industri, pendidikan, perdagangan dan jasa, dan pariwisata berskala nasional yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud penyusunan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 adalah:

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk periode tahun 2024-2026 sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

410

1.4.2. Tujuan penyusunan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan perencanaan penganggarnya;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Bengkulu;
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah;
5. Menjadi pedoman bagi lembaga DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD agar sejalan dengan aspirasi masyarakat serta prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan.

1.5. Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Dokumen Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RPD.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kinerja keuangan

tahun 2019-2022, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dianggap prioritas untuk diselesaikan.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran daerah yang akan dicapai dalam periode jangka menengah daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antarbidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, rumusan arah kebijakan dibuat pertahun sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tiap tahunnya..

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang penetapan indikator Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab dua ini menyajikan gambaran tentang kondisi umum daerah Kota Bengkulu sebagai bagian dari proses perencanaan. Kondisi umum Kota Bengkulu dianalisis melalui empat aspek, yaitu: (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek pelayanan umum, dan (4) aspek daya saing daerah. Penjelasan empat aspek tersebut disajikan berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Kepala Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Subbagian ini memberikan gambaran umum Kota Bengkulu dilihat dari aspek geografi dan demografi. Kedua aspek tersebut disampaikan secara sistematis mulai dari karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan aspek demografi. Gambaran aspek geografi dan demografi Kota Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

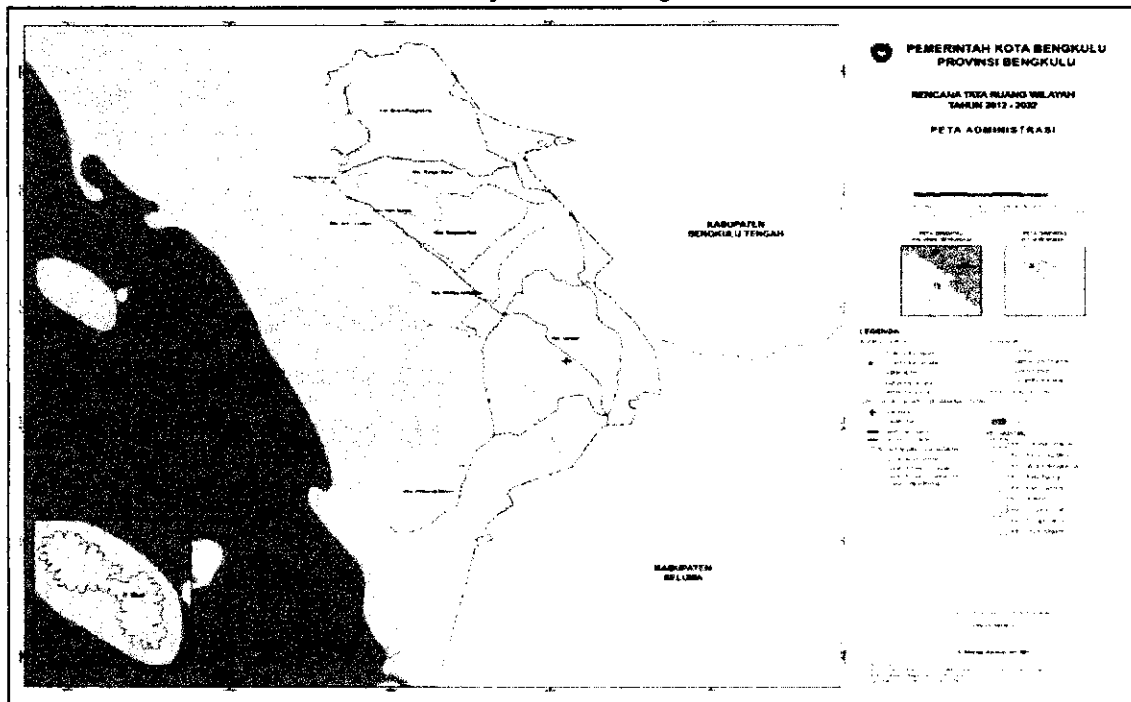
Karakteristik lokasi dan wilayah di Kota Bengkulu dapat dilihat dari beberapa hal meliputi: letak dan kondisi geografis, kondisi kawasan, geologi, hidrologi, dan klimatologi. Penjabaran kondisi tersebut dilengkapi dengan analisis terhadap data sekunder dan narasi kualitatif yang relevan.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Secara historis, Kota Bengkulu merupakan Ibukota Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Batas wilayah Kota Bengkulu juga diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kota Bengkulu dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah yang mencapai 151,70 kilometer persegi (km²). Secara administrasi, batas wilayah Kota Bengkulu terdiri dari:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Seluma;
 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Indonesia;

Gambar 2. 1
Peta Wilayah Kota Bengkulu



Sumber: RTRW Kota Bengkulu Tahun 2021-2041

Kota Bengkulu telah mengalami pemekaran wilayah, sebelum pemekaran memiliki 4 kecamatan yaitu Kecamatan Selebar, Gading Cempaka, Teluk Segara, dan Muara Bangkahulu. Pada tahun 2008, wilayah Kota Bengkulu bertambah 5 kecamatan yaitu Kampung Melayu, Ratu Agung, Ratu Samban, Singaran Pati dan Sungai Serut sehingga jumlah Kecamatan Kota Bengkulu menjadi 9 kecamatan dengan wilayah kecamatan di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Bengkulu Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Selebar	40,66	26,56
2	Kampung Melayu	45,07	29,66
3	Gading Cempaka	10,03	6,60

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
4	Ratu Agung	7,46	4,90
5	Ratu Samban	2,99	1,92
6	Singaran Pati	10,98	7,22
7	Teluk Segara	2,60	1,8
8	Sungai Serut	8,74	5,75
9	Muara Bangkahulu	23,41	15,40
Kota Bengkulu		151,7	100,00

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka Tahun 2022, BPS, 2022

Kecamatan dengan wilayah terluas merupakan Kecamatan Kampung Melayu yakni mencapai 45,07 km² atau 29,66 persen dari luas total Kota Bengkulu. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Teluk Segara yakni sekitar 2,60 km² atau 1,8 persen dari luas total Kota Bengkulu. Pembagian wilayah berdasarkan kecamatan dan kelurahan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Kota Bengkulu Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan
1	Selebar	6	Betungan, Bumi Ayu, Pagar Dewa, Pekan Sabtu, Sukarami, Sumur Dewa
2	Kampung Melayu	6	Kandang, Kandang Mas, Muara Dua, Padang Serai, Sumber Jaya, Teluk Sepang
3	Gading Cempaka	5	Cempaka Permai, Jalan Gedang, Lingkar Barat, Padang Harapan, Sidomulyo
4	Ratu Agung	8	Kebun Beler, Kebun Kenanga, Kebun Tebeng, Lempuing, Nusa Indah, Sawah Lebar, Sawah Lebar Baru, Tanah Patah
5	Ratu Samban	9	Anggut Atas, Anggut Bawah, Anggut Dalam, Belakang Pondok, Kebun Dahri, Kebun Geran, Padang Jati, Pengantungan, Penurunan

AL

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan
6	Singaran Pati	6	Dusun Besar, Jembatan Kecil, Lingkar Timur, Padang Nangka, Panorama, Timur Indah
7	Teluk Segara	13	Bajak, Berkas, Jitra, Kampung Bali, Kebun Keling, Kebun Roos, Malabero, Pasar Baru, Pasar Melintang, Pintu Batu, Pondok Besi, Sumur Meleleh, Tengah Padang
8	Sungai Serut	7	Kampung Kelawi, Pasar Bengkulu, Semarang, Suka Merindu, Surabaya, Tanjung Agung, Tanjung Jaya
9	Muara Bangkahulu	7	Bentiring, Bentiring Permai, Beringin Raya, Kandang Limun, Pematang Gubernur, Rawa Makmur, Rawa Makmur Permai

Sumber : Kota Bengkulu dalam Angka, BPS, 2022

Kota Bengkulu memiliki 9 kecamatan dan 67 kelurahan. Kecamatan Teluk Segara memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu sejumlah 13 kelurahan. Sementara itu, jumlah kelurahan paling sedikit terdapat di Kecamatan Gading Cempaka yaitu sejumlah 5 kelurahan.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Posisi Kota Bengkulu secara astronomis terletak di antara garis koordinat $3^{\circ}45'-3^{\circ}59'$ Lintang Selatan dan $102^{\circ}14'-102^{\circ}22'$ Bujur Timur. Sedangkan posisi Kota Bengkulu secara geografis terletak di pesisir barat pulau Sumatera. Jarak antara ibu kota kecamatan dengan ibu kota Kota Bengkulu di Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kota Bengkulu

No	Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kota Bengkulu (km)
1	Selebar	Pagar Dewa	18,83
2	Kampung Melayu	Padang Serai	22
3	Gading Cempaka	Jalan Gedang	11
4	Ratu Agung	Nusa Indah	10

No	Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kota Bengkulu (km)
5	Ratu Samban	Penurunan	10
6	Singaran Pati	Dusun Besar	10
7	Teluk Segara	Jitra	9
8	Sungai Serut	Surabaya	5
9	Muara Bangka Hulu	Pematang Gubemur	2

Sumber: Bengkulu Dalam Angka Kecamatan, BPS, 2022

Jarak antara ibu kota kecamatan dengan ibu kota Kota Bengkulu berkisar antara 2 hingga 22 km. ibu kota Kecamatan terjauh dengan ibu kota Kota Bengkulu adalah Kecamatan Kampung Melayu yaitu Padang Serai yang mencapai 22 km. Jarak paling dekat antara ibu kota Kecamatan dengan ibu kota Kota Bengkulu adalah ibu kota Kecamatan Muara Bangkahulu yaitu Pematang Gubemur yang hanya berjarak 2 km.

2.1.1.3 Geologi

Wilayah Kota Bengkulu secara umum tersusun oleh endapan permukaan (*surfifal deposits*) berumur kuarter, batuan sedimen dan gunung api (*sedimentary and volcanic rocks*), dan batuan terobosan berumur tersier. Batuan berumuran tersier dan kuarter didapat dari pembagian umur batuan berdasarkan ilmu geologi. Batuan tersier terbentuk dari 37-38 juta tahun yang lalu dan batuan kuarter terbentuk dari 0,01-1,8 juta tahun yang lalu.

Kondisi permukaan wilayah Kota Bengkulu dapat dijelaskan dengan penggunaan urutan stratigrafi. Stratigrafi merupakan studi mengenai sejarah, komposisi, umur relatif, distribusi pelapisan tanah, dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk menjelaskan sejarah Bumi. Urutan stratigrafi dari batuan termuda sampai tertua di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

- Undak Aluvium. Batuan ini merupakan endapan permukaan termuda, berumur holosen kuarter yang tersusun oleh pasir, lanau, lempung dan kerikil yang dibentuk oleh endapan sungai, pantai dan rawa. Batuan holosen kuarter terbentuk dari 0,01 juta tahun yang lalu. Endapan ini penyebarannya hampir di seluruh Kota Bengkulu, mulai dari bagian utara hingga bagian selatan, namun tidak mencapai batas kota di sebelah timur, dengan luas sekitar 62,8 persen.
- Aluvium. Batuan ini berumur holosen kuarter yang tersusun oleh bongkah, kerikil, pasir, lanau dan lumpur. Endapan permukaan ini penyebarannya hanya pada sebagian wilayah

Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut dan Kecamatan Singaran Pati (seluruh kawasan Danau Dendam Tak Sudah) dengan luasan berkisar 15 persen.

- c. Endapan Rawa. Endapan permukaan yang berumur holosen kuartar ini tersusun oleh pasir, lanau dan lumpur dengan sisa tumbuhan. Penyebarannya hanya terdapat pada bagian Utara Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kecamatan Singaran Pati, dengan luas total sekitar 3 persen.
- d. Batu Gamping Terumbu Karang. Endapan permukaan yang berumur plistosen kuartar ini tersusun oleh batu gamping terumbu. Batuan plistosen kuartar terbentuk dari 1,8 juta tahun yang lalu. Penyebarannya sporadis pada beberapa kecamatan, umumnya berbatasan langsung dengan laut, yaitu Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Ratu Samban, dan Kecamatan Ratu Agung.
- e. Formasi Bintuhan. Batuan ini merupakan batuan sedimen dan gunung api yang diduga berumur plistosen kuartar dan tersusun oleh konglomerat aneka bahan, breksi, batu gamping terumbu, batu lempung tufan, berbatu apung, kayu terkesikan. Umumnya terdapat di bagian Timur Kecamatan Muara Bangkahulu.
- f. Andesit. Andesit merupakan batuan terobosan, yang diduga berumur pliosen tersier. Penyebarannya di Kota Bengkulu umumnya di Kecamatan Selebar.

2.1.1.4 Hidrologi

Sistem jaringan sumber daya air meliputi sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kota. Sistem jaringan sumber daya air yang berada di wilayah kota yang terdiri dari:

1. Sumber air yang meliputi:
 - a. Air permukaan meliputi Sungai Air Bengkulu, Sungai Air Jenggalu, dan Sungai Air Hitam merupakan subDAS Air Bengkulu; dan
 - b. Air tanah merupakan Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada di wilayah kota.
2. Prasarana sumberdaya air yang meliputi :
 - a. Sistem jaringan irigasi terdiri dari:
 - D.I Tebat Besar Surabaya;
 - D.I Air Lagan;
 - D.I Air Kayu Angus;
 - D.I Air Napal; dan
 - D.I Air Betungan.

- b. Sistem pengendali banjir yaitu sistem pengendali banjir pada Sungai Air Bengkulu.
- c. Jaringan air baku untuk air bersih terdiri dari:
 - Sungai Musi Kabupaten Bengkulu Tengah – Air Bengkulu; dan
 - Sungai Nelas – Air Jenggalu.

2.1.1.5 Klimatologi

Kondisi iklim Kota Bengkulu tergolong iklim tropis basah dengan suhu udara berkisar antara 23 derajat Celsius (°C) hingga 32°C. Detail mengenai kondisi iklim Kota Bengkulu dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kondisi Iklim Kota Bengkulu per Bulan Tahun 2021

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Suhu Udara Maks (°C)	Suhu Udara Min (°C)	Suhu Udara Rata-Rata (°C)	Kelembapan Udara (%)	Kecepatan Angin (knot)	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	490.90	33.60	21.40	27.30	84.87	2,36	61,77
2	Februari	259.80	35.20	21.10	27.70	83.08	2.32	73.48
3	Maret	488.30	33.90	21.00	27.47	84.71	2.41	68.91
4	April	510.50	34.20	21.90	27.61	85.89	2.27	77.33
5	Mei	179.30	35.40	22.20	27.84	83.81	2.39	66.41
6	Juni	225.30	34.60	21.00	27.14	84.21	2.24	79.91
7	Juli	132.40	35.00	21.60	27.27	82.74	2.59	83.39
8	Agustus	118.60	33.80	19.80	27.41	82.44	2.50	92.26
9	September	295.00	33.10	20.90	26.81	84.89	2.83	72.04
10	Oktober	493.90	32.20	20.50	26.62	85.07	2.26	51.49
11	November	555.70	33.80	21.00	26.75	85.88	2.27	56.83
12	Desember	498.30	32.40	21.40	26.46	84.52	2.41	47.70

Sumber: Bengkulu Dalam Angka, BPS, 2022

Curah hujan bulanan di Kota Bengkulu pada tahun 2021 berkisar antara 118.60-555.70 milimeter (mm) dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Nopember dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus. Kondisi tersebut diikuti dengan temperatur suhu udara yang bervariasi mulai dari 19.80°C–35.40°C. Rata-rata suhu udara maksimum di Kota Bengkulu

mencapai 27.84°C, sedangkan rata-rata suhu minimum mencapai 26.46°C. Kelembapan udara maksimum di Kota Bengkulu terjadi pada bulan April, sedangkan kelembapan udara minimum terjadi pada bulan Februari. Kecepatan angin rata-rata mencapai 2,83 knot, sedangkan kecepatan angin terendah terjadi pada bulan Juni yang mencapai 2.24 knot. Lama penyinaran matahari di Kota Bengkulu berkisar antara 47.70–92.26 persen.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Perkembangan dan kemajuan pembangunan mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur administrasi untuk kepentingan pembangunan lahan terbangun dan nonterbangun. Penggunaan lahan pada wilayah Kota Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan di Kota Bengkulu

A.	Lahan Non-Terbangun		
	Danau	49,50	0,33
	Galian Pasir	63,70	0,42
	Kawasan Lindung	534,20	3,52
	Kebun Campuran	169,76	1,12
	Kebun Sawit	5738,94	35,45
	Kotam	8,41	0,06
	Lahan Terbuka	1068,17	7,03
	Pasir	32,40	0,21
	Rawa	30,03	0,20
	RTH	12,22	0,08
	RTNH	16,63	0,11
	Sawah	743,87	4,89
	Semak Belukar	992,64	6,53
	Sungai	298,79	1,97
	Tambak	8,47	0,06
	Tambak Ikan	92,41	0,60
	TPU	22,31	0,15
B.	Lahan Terbangun		
	Fasilitas Hankam	41,48	0,27
	Fasilitas Kesehatan	27,07	0,18
	Fasilitas Olahraga	58,83	0,39
	Fasilitas Pendidikan	220,37	1,45

A

	Fasilitas Peribadatan	23.29	0.15
	Industri	58.44	0.38
	Lembaga Pemasyarakatan	3.73	0.02
	Pelabuhan	7.10	0.05
	Perdagangan dan Jasa	624.02	4.11
	Perkantoran	25.75	0.17
	Perkantoran Pemerintah	151.37	1.00
	Permukiman	3542,80	23.31
	Terminal Bis	2.86	0.02
	Kilang Pertamina	6.30	0.04
	Bandar Udara	188.93	1.24
	Gardu Induk	0.77	0.01
	Kawasan Pariwisata	32.42	0.21

Sumber: Bapelitbang Kota Bengkulu, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan lahan Kota Bengkulu secara keseluruhan didominasi oleh lahan nonterbangun seluas 10.181,49 Ha (66,99%) yang terdiri dari Kebun Sawit sebesar 5738,94 Ha (35,45%) dan semak belukar sebesar 992,64 Ha (6,53%) berada di Kecamatan Selebar.

Sedangkan untuk lahan terbangun di Kota Bengkulu seluas 5015,51 Ha (33,01%) yang didominasi Kawasan permukiman sebesar 3542,80 Ha (23,31%) dan perdagangan dan jasa sebesar 624.02 Ha (4,11%) yang merata di Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Bengkulu dikategorikan berdasarkan pola ruang. Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang pada suatu wilayah. Pola ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu Tahun 2021 – 2041, meliputi:

1. Kawasan peruntukan lindung seluas lebih kurang 2.693 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga) hektar, kawasan peruntukan lindung meliputi:

118.

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan resapan air yang meliputi Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar dan Kecamatan Sungai Serut dengan luas lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) hektar.
- b. Kawasan perlindungan setempat meliputi:
- Sempadan pantai dengan luas lebih kurang 86 (delapan puluh enam) hektar, meliputi :
 - 1) Dataran sepanjang tepian laut ditetapkan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
 - 2) Dataran sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik curam atau terjal ditetapkan paling sedikit berjarak 50 (limapuluh) meter.
 - Sempadan sungai dengan luas lebih kurang 244 (dua ratus empat puluh empat) hektar, meliputi:
 - 1) Sempadan Sungai Air Jenggalu dan Sempadan Sungai Hitam ditetapkan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter di sisi kiri kanan sungai.
 - 2) Sempadan Sungai Air Bengkulu yang tidak bertanggung ditetapkan paling sedikit berjarak 25 (dua puluh lima) meter kiri dan kanan sungai.
- c. Kawasan konservasi, meliputi:
- Kawasan Suaka Alam (KSA) merupakan Cagar Alam Dusun Besar dengan luas lebih kurang 486 (empat ratus delapan puluh enam) hektar meliputi:
 - 1) Kecamatan Singaran Pati;
 - 2) Kecamatan Gading Cempaka;
 - 3) Kecamatan Selebar; dan
 - 4) Kecamatan Sungai Serut.
 - Kawasan Pelestarian Alam (KPA), meliputi:
 - 1) Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai, seluas lebih kurang 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Gading Cempaka, dan Kecamatan Ratu Agung.
 - 2) Taman Wisata Alam Danau Dendam Tak Sudah, seluas 89 (delapan puluh sembilan) hektar meliputi Kecamatan Singaran Pati.
- d. Kawasan cagar budaya seluas 7 (tujuh) hektar berupa benda cagar budaya yang meliputi:
- Situs Masjid Tak Beratap Nala dan Rumah Fatmawati di Kecamatan Ratu Samban;
 - Gerga Tabut Berkas, Gedung Pengadilan Kuno, Rumah Bekas Kediaman Bung Karno, Makam Sentot Ali Basyah, Benteng Marlborough, Tugu Robert Hamilton, Tugu Thomas

A

Parr, Makam Inggris, Masjid Jamik Bung Karno, Bangunan Kantor Pos Brokoto, Rumah Demang Taha, Rumah Demang Karim, Rumah Demang Kader, Rumah Demang Mursalin, Rumah Demang Manan, Eks Rumah Ka. Peln Pondok Besi, Rumah Dr. Abu Hanifah Bubungan Tiga Samping Bank Indonesia, Gedung BKOW, Rumah Kediaman Gubernur Bengkulu, Situs Gedung Nasional (KNID) Bubungan Tiga, Jel (Penjara Malabro), Rumah Sebrang Jell Milik Sinsui, Eks Sekolah China, Bunker Jepang Pangkal Jembatan, Rumah Tradisional Pak Arifin, Bangunan Eks Rumah Residen Abdullah, Rumah Residen Rejamat Gedung Kolam, Rumah Ka. PLN Gedung Kolam, Gereja Saint Yohannes Samping Rumah Gubernur, Gedung Eks Sekolah Milo (Bangunan Asli UNHAZ), Kawasan China Bazar/China Town, Titik Tri Angulasi Patok 1 Bencolen di atas Tulisan Tapak Paderi, Situs Tugu Azimut Kota Ben coolen Km 1, Klenteng/Vihara Kampung China, Bekas Bangunan Gudang Garam dan Kompleks Makam Inggris di Kecamatan Teluk Segara;

- Makam Syekh Burhanuddin (penyebarkan Islam di Kota Bengkulu) dan Karbala di Kecamatan Ratu Agung;
 - Bunker Kampung Klawi, Bunker Kampung Klawi 2 dan Bunker Kampung Klawi 3 di Kecamatan Sungai Serut;
 - Bunker Sukamerindu 1, Bunker Sukamerindu 4, Bunker Sukamerindu 6, Bunker Sukamerindu 9, Bunker Sukamerindu 10, Bunker Sukamerindu 12 dan Bunker Sukamerindu 13 di Kecamatan Sungai Serut;
- e. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah Kota Bengkulu, meliputi:
- Kawasan RTH publik seluas paling sedikit 20% (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. RTH publik seluas lebih kurang 726 (tujuh ratus dua puluh enam) hektar berupa:
 - 1) RTH Taman Kota/Kecamatan tersebar di seluruh kecamatan;
 - 2) RTH Pemakaman, meliputi:
 - Taman Makam Pahlawan (TMP) di Kecamatan Selebar; dan
 - Tempat Pemakaman Umum tersebar di seluruh kecamatan
 - 3) RTH Jalur Hijau diarahkan berada di seluruh Kecamatan;
 - 4) RTH Sabuk Hijau meliputi Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar, dan Kecamatan Kampung Melayu;

- 5) RTH Sempadan Jalur Kereta Api meliputi Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Selebar;
 - 6) RTH Taman Lingkungan diarahkan berada tersebar di seluruh kecamatan.
 - Kawasan RTH privat sebesar 10% (sepuluh) persen dari luas wilayah kota.
2. Kawasan peruntukan budidaya seluas lebih kurang 12.359 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan) hektar, kawasan peruntukan budidaya meliputi:
- a. Kawasan pertanian meliputi :
 - Kawasan tanaman pangan dengan luas lebih kurang 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hektar berlokasi di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Sungai Serut, dan Kecamatan Selebar.
 - Kawasan perkebunan dengan luas lebih kurang 54 (lima puluh empat) hektar berlokasi di Kecamatan Muara Bangkahulu.
 - Kawasan tanaman pangan ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan (KP2B) dengan luas lebih kurang 462 (empat ratus enam puluh dua) hektar berlokasi di Kecamatan Singaran Pati, dan Kecamatan Selebar.
 - b. Kawasan pertambangan dan energi yaitu Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik di Kecamatan Kampung Melayu dengan luas lebih kurang 71 (tujuh puluh satu) hektar.
 - c. Kawasan perikanan, meliputi:
 - Kawasan perikanan budidaya berupa perikanan darat dengan luas lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) hektar di Kecamatan Kampung Melayu;
 - Prasarana penunjang perikanan, meliputi:
 - 1) Prasarana penunjang perikanan tangkap berupa tempat pelelangan ikan Pulau Baai di Kecamatan Kampung Melayu; dan
 - 2) Prasarana penunjang perikanan budidaya berupa balai benih perikanan di Kecamatan Kampung Melayu.
 - d. Kawasan peruntukan industri dengan luas lebih kurang 1.218 (seribu dua ratus delapan belas) hektar meliputi:
 - Kecamatan Kampung Melayu; dan
 - Kecamatan Selebar.
 - e. Kawasan pariwisata, meliputi:

- Kawasan Wisata Pantai di Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, dan Kecamatan Ratu Samban dengan luas lebih kurang 44 (empat puluh empat) hektar;
 - Kawasan Danau Dendam Tak Sudah di Kecamatan Singaran Pati;
 - Pulau Tikus di Kecamatan Teluk Segara;
 - Kawasan Sungai Muara Jenggalu di Kecamatan Gading Cempaka dan Kecamatan Kampung Melayu; dan
 - Taman Remaja di Kecamatan Singaran Pati.
- f. Kawasan permukiman, meliputi :
- Kawasan Perumahan dengan luas lebih kurang 5.899 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) hektar meliputi Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar, Kecamatan Kampung Melayu.
 - Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan luas lebih kurang 2.359 (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan) hektar di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar, Kecamatan Kampung Melayu.
 - Kawasan Perkantoran dengan luas lebih kurang 223 (dua ratus dua puluh tiga) hektar, meliputi :
 - 1) Kawasan perkantoran pemerintah, meliputi:
 - perkantoran pemerintahan provinsi;
 - perkantoran pemerintahan kota; dan
 - perkantoran pemerintahan kecamatan dan kelurahan.
 - 2) Kawasan perkantoran swasta, meliputi Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar, dan Kecamatan Kampung Melayu.
 - Kawasan peribadatan, seluas lebih kurang 7 (tujuh) hektar meliputi Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, dan Kecamatan Gading Cempaka.
 - Kawasan Pendidikan seluas lebih kurang 248 (dua ratus empat puluh delapan) hektar meliputi Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk

- Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar, Kecamatan Kampung Melayu.
- Kawasan kesehatan dengan luas lebih kurang 55 (lima puluh lima) hektar meliputi Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Selebar dan Puskesmas tersebar diseluruh kecamatan;
 - Kawasan olahraga, dengan luas lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) hektar meliputi :
 - 1) Kawasan olahraga yang tersebar disetiap Kecamatan;
 - 2) Kawasan sirkuit seluas lebih kurang 60 (enam puluh) hektar di Kecamatan Selebar;
 - Kawasan Transportasi dengan luas lebih kurang 1049 (seribu empat puluh sembilan) hektar, meliputi:
 - 1) Kawasan bandara dengan luas lebih kurang 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) hektar di Kecamatan Selebar;
 - 2) Kawasan pelabuhan dengan luas lebih kurang 653 (enam ratus lima puluh tiga) hektar di Kecamatan Kampung Melayu; dan
 - 3) Kawasan terminal dengan luas lebih kurang 5 (lima) hektar.
 - Kawasan Sumberdaya Air seluas lebih kurang 106 (seratus enam) hektar meliputi Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kecamatan Kampung Melayu.
 - Kawasan Sektor Informal bertujuan untuk pengembangan ekonomi masyarakat di sektor informal di Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Teluk segara, Kecamatan Singaran Pati, dan Kecamatan Selebar.
- g. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hektar meliputi :
- Komplek Kompi Senapan B Yonif 144/Jaya Yudha Kecamatan Singaran Pati;
 - Polda Bengkulu Kecamatan Gading Cempaka;
 - Polres Bengkulu Kecamatan Teluk Segara;
 - Komplek Brigade Mobil Polri Kecamatan Sungai Serut;
 - Koramil 05–07 Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Muara Bangkahulu, dan Kecamatan Kampung Melayu;
 - Korem – 041/Garuda Emas Kecamatan Gading Cempaka;
 - Pangkalan TNI Angkatan Laut Kecamatan Kampung Melayu;

- Komando distrik militer 0407 di Kecamatan Gading Cempaka; dan
- Denpom II/I di Kecamatan Gading Cempaka.

2.1.2.2. Kawasan Rawan Bencana

Pemerintah Kota Bengkulu mengidentifikasi dua (2) potensi bencana di Kota Bengkulu yaitu: bencana tsunami dan banjir. Berdasarkan RTRW Kota Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu telah mengidentifikasi kawasan rawan bencana yang tersebar di beberapa wilayah dengan deskripsi sebagai berikut:

a. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Kawasan rawan bencana tsunami di Kota Bengkulu meliputi kawasan sepanjang pantai di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Sungai Serut, dan Kecamatan Kampung Melayu.

b. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir di Kota Bengkulu meliputi Kelurahan Tebeng, Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung, Kelurahan Bentiring, Kelurahan Rawa Makmur Kec Muarabangkahulu, Kelurahan Tanjung Jaya, Kelurahan Tanjung Agung, Kelurahan Sukamerindu, Kelurahan Semarang, Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut, Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka, Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu, dan Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban.

2.1.3. Demografi

Subbab demografi juga menjadi bagian penting dalam proses pembangunan suatu daerah. Subbab demografi mendiskripsikan ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta perubahan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Penyajian data demografi Kota Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:

2.1.3.1. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Bengkulu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk Kota Bengkulu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk selama 4 tahun terakhir sebesar 1,605 persen per tahun.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah	376.480	367.644	372.330	378.604	
Pertumbuhan (%)	2,36	1,19	1,87	1,00	
Densitas (Ribu jiwa/KM2)	2.485,17	2.435	2.185,63	2.495,74	
Sex Ratio	100,75	102	101,98	101,86	

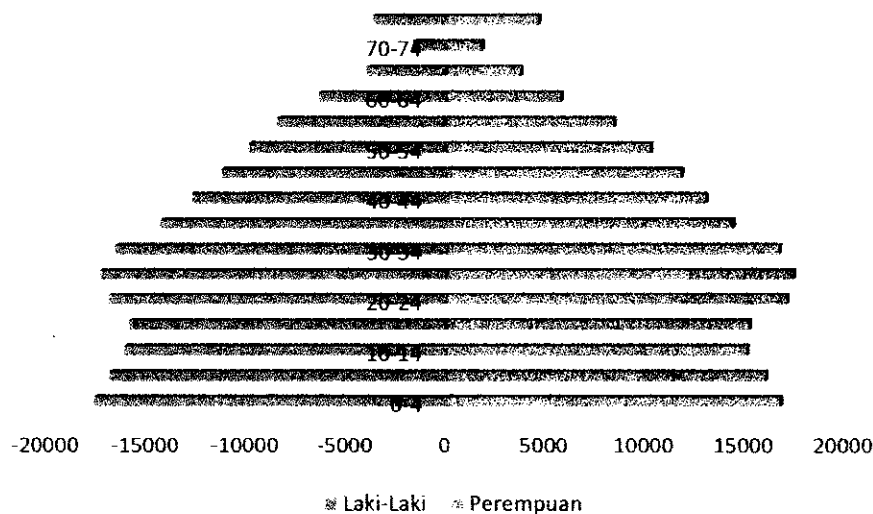
Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka Tahun 2022, BPS, 2022

Jumlah penduduk Kota Bengkulu dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan sebesar 8.423 jiwa. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2018 hingga 2021 terus mengalami penurunan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,605 persen.

2.1.3.2 Struktur Penduduk

Struktur penduduk merupakan komposisi penduduk dari suatu daerah yang dikelompokkan pada kriteria-kriteria tertentu. Analisis struktur penduduk di Kota Bengkulu didasarkan pada kriteria struktur umur, jenis kelamin, dan agama. Struktur penduduk Kota Bengkulu berdasarkan struktur umur dan jenis kelamin ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 2.2
Struktur Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2021



Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka, BPS, 2022

A

Komposisi penduduk Kota Bengkulu berdasarkan jenis kelamin menunjukkan grafik yang seimbang. Menurut komposisi penduduk berdasarkan kelompok umurnya, sebagian besar penduduk Kota Bengkulu merupakan kelompok umur muda, didominasi usia 30 hingga 34 tahun. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan bentuk piramida penduduk Kota Bengkulu yang termasuk dalam kategori ekspansif (piramida penduduk muda). Capaian ini mengindikasikan cukup tingginya tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk di Kota Bengkulu. Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan relatif besarnya rasio ketergantungan penduduk muda, sedangkan puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya rasio ketergantungan penduduk tua.

2.1.3.3 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk menggambarkan sebaran penduduk di suatu daerah. Gambaran distribusi penduduk penting untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk Kota Bengkulu saat ini masih belum merata. Konsentrasi penduduk terbesar Kota Bengkulu berada di Kecamatan Selebar sebesar 21,88% yang merupakan pusat permukiman penduduk sedangkan wilayah terpadat adalah Kecamatan Teluk Segara sebesar 7.959,42 jiwa/km².

Konsentrasi penduduk paling banyak setelah Kecamatan Selebar terdapat di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Singaran Pati. Kecamatan yang memiliki distribusi penduduk paling sedikit terdapat pada Kecamatan Ratu Samban. Kepadatan penduduk Kota Bengkulu berdasarkan kecamatan ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Bengkulu Tahun 2021

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Selebar	21,88	46,36	1786,95
2	Kampung Melayu	11,99	23,14	1961,02
3	Gading Cempaka	10,23	14,42	2685,16
4	Ratu Agung	13,26	11,02	4557,17
5	Ratu Samban	5,62	2,84	7490,49
6	Singaran Pati	10,83	14,44	2840,72
7	Teluk Segara	5,80	2,76	7959,42
8	Sungai Serut	6,69	13,53	1870,66
9	Muara Bangkahulu	13,70	23,18	2237,79
Kota Bengkulu			151,70	2495,74

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka, BPS, 2022

Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Selebar, Ratu Agung dan Muara Bangkahulu. Jumlah penduduk di ketiga kecamatan tersebut lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk di kecamatan lain. Konsentrasi penduduk umumnya mengikuti pusat pertumbuhan dan pusat pemerintahan. Jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ratu Samban dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi kedua sebesar 7.490,49 jiwa/km².

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Subbab ini mendeskripsikan aspek kesejahteraan rakyat yang terfokus pada tiga hal yaitu: fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menyajikan deskripsi kondisi ekonomi makro daerah Kota Bengkulu. Kondisi perekonomian difokuskan pada empat poin penting yaitu jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur ekonomi wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per kapita. Keempat poin tersebut merupakan unsur penting pembangunan ekonomi makro di Kota Bengkulu.

2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

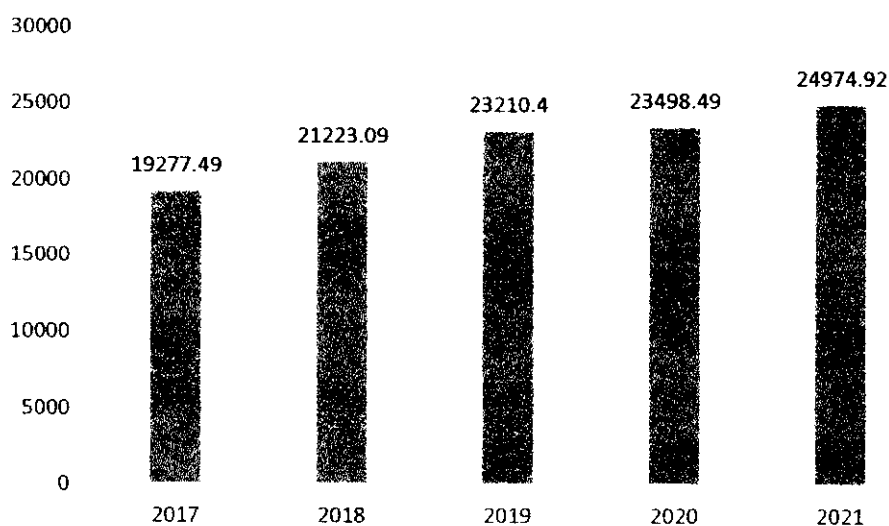
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB

juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

PDRB berfungsi untuk mengukur produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. PDRB memiliki dua basis perhitungan yaitu: *pertama*, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan; *kedua*, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Kedua basis perhitungan PDRB tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan. PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Bengkulu dalam kurun waktu empat tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Grafik 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Bengkulu
Tahun 2017-2021 (miliar rupiah)



Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka, BPS, 2022

Kota Bengkulu memiliki nilai PDRB yang relatif tinggi dan terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. PDRB Kota Bengkulu tahun 2017 dihitung berdasarkan harga berlaku berada pada kisaran 19.277,49 miliar dan naik sebesar 5697,43 persen menjadi 24.974,92 miliar pada tahun 2021. Kondisi perekonomian tersebut bisa dikategorikan kondusif bagi aktifitas produksi sehingga mampu mendorong tumbuhnya kegiatan perekonomian masyarakat Kota

Bengkulu. Data nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di Kota Bengkulu per kabupaten/ kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 8
PDRB ADHB Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017 – 2021
(milyar rupiah)

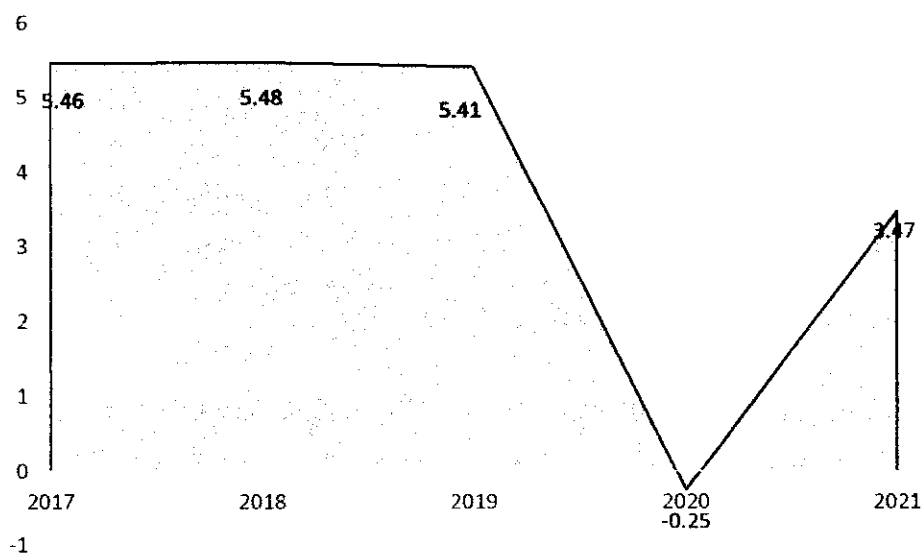
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bengkulu Selatan	5 302,90	5 707,51	5 819,78	6 196,48	
Rejang Lebong	8 685,05	9 368,98	9 537,30	10 091,53	
Bengkulu Utara	7 609,33	8 250,04	8 416,32	9 854,65	
Kaur	3 239,54	3 524,51	3 612,34	3 900,87	
Seluma	4 215,21	4 613,17	4 730,45	5 053,60	
Mukomuko	4 744,40	5 155,27	5 265,07	5 662,69	
Lebong	3 092,46	3 346,03	3 400,86	3 627,79	
Kepahiang	3 981,49	4 318,93	4 409,81	4 748,46	
Bengkulu Tengah	4 253,69	4 606,57	4 672,10	5 466,24	
Kota Bengkulu	21 223,09	23 210,40	23 498,49	24 974,92	

Sumber: Provinsi Bengkulu dalam angka ,BPS 2022

Kota Bengkulu merupakan wilayah administrasi dengan PDRB tertinggi di Provinsi Bengkulu yang mencapai 24.97 triliun pada tahun 2021. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bengkulu terus mengalami kenaikan sejak tahun 2017, dari 19,27 triliun menjadi 24,97 juta pada tahun 2021. Pertumbuhan PDRB juga dinilai menggunakan harga konstan. Berikut adalah pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu Atas Harga Konstan:

A

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu, Tahun 2017-2021



Sumber : Kota Bengkulu dalam Angka, BPS, 2022

Pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu Atas Harga Konstan mengalami fluktuasi. Penurunan terjadi pada tahun 2020 karena adanya kondisi pandemi COVID-19. Tahun 2021 mulai mengalami peningkatan PDRB sebesar 3,47. Faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu adalah pertumbuhan PDRB sektor potensial, seperti pertumbuhan PDRB perikanan, perdagangan, perindustrian dan jasa. Pada periode ke depan sektor pariwisata akan digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu. Data nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di Provinsi Bengkulu per Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
PDRB ADHK di Kota Bengkulu 2017-2021 (miliar rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bengkulu Selatan	3 444,03	3 615,03	3 624,59	3 742,51	
Rejang Lebong	5 791,95	6 078,95	6 083,03	6 274,23	
Bengkulu Utara	4 960,30	5 204,59	5 216,35	5 425,36	
Kaur	2 153,49	2 260,79	2 263,55	2 333,30	
Seluma	2 735,84	2 870,67	2 870,32	2 932,95	

Handwritten signature

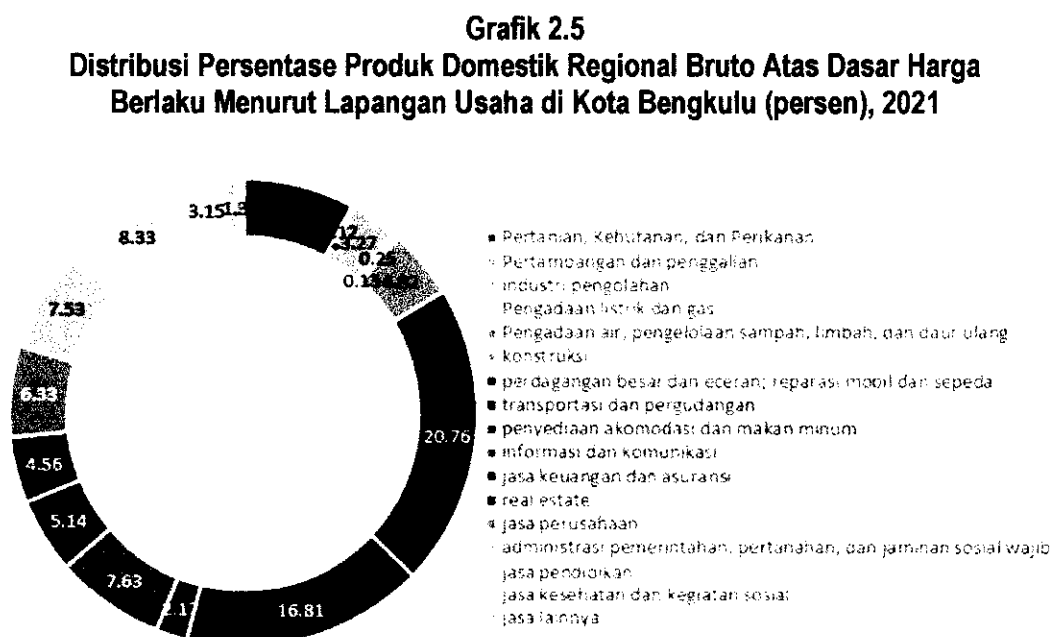
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mukomuko	3 166,01	3 325,26	3 326,06	3 429,92	
Lebong	2 023,99	2 124,50	2 126,72	2 192,26	
Kepahiang	2 673,15	2 803,86	2 805,56	2 894,35	
Bengkulu Tengah	2 750,44	2 887,02	2 885,34	2 951,44	
Kota Bengkulu	14 552,35	15 339,35	15 301,49	15 833,19	

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka, BPS 2022

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kota Bengkulu tertinggi dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 15,83 triliun pada tahun 2021, meningkat dari 13,79 triliun pada tahun 2017.

2.2.1.2. Struktur Ekonomi Wilayah

Nilai PDRB Kota Bengkulu dapat dilihat dari struktur penopangnya dengan menampilkan data kontribusi dari tiap sektor. Penopang PDRB Kota Bengkulu pada tahun 2021 terdiri dari 15 sektor. Kondisi struktur ekonomi di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:



Sumber : BPS, Bengkulu Dalam Angka 2022

Struktur perekonomian wilayah di Kota Bengkulu dilihat dari sektor lapangan usaha berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku yang memberikan distribusi persentase (kontribusi) terbesar adalah sektor perdagangan dan sektor transportasi yaitu sebesar 20,76 persen dan 16,81 persen dari total PDRB ADHB.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021

	Lapangan Usaha	2018	2019	2020*	2021**	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,03	2,67	0,45	3,11	
B	Pertambangan dan Penggalan	0,01	0,01	-0,11	0,03	
C	Industri Pengolahan	0,72	0,32	-1,97	2,42	
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,36	5,66	12,21	7,49	
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,31	3,51	0,84	1,58	
F	Konstruksi	5,74	6,16	2,46	1,96	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,14	7,26	-4,33	5,51	
H	Transportasi dan Pergudangan	6,41	6,93	-4,87	0,94	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,34	11,43	-0,57	1,90	
J	Informasi dan Komunikasi	7,84	7,65	4,32	6,25	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,02	-1,13	14,98	7,27	
L	Real Estate	3,18	3,44	1,04	0,17	
M,N	Jasa Perusahaan	5,37	5,15	-2,53	-0,97	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,08	3,68	2,93	3,04	
P	Jasa Pendidikan	2,61	2,94	1,66	3,03	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,54	9,24	6,47	11,82	
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,00	9,41	-0,15	1,26	
	PDRB	5,48	5,41	-0,25	3,47	

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka, BPS 2022

Potensi ekonomi Kota Bengkulu bila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2021 menurut lapangan usaha yang bertumbuh baik adalah sektor Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial dimana laju pertumbuhannya mencapai 11,82 persen yang diikuti dengan laju pertumbuhan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,49 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2017, 2018 dan 2019, laju pertumbuhan selalu didominasi oleh Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada tahun 2020 Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum turun hingga -0,57 dan tahun 2021 hanya 1,90. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya wabah Covid-19 yang sangat menghambat pergerakan penduduk.

Tabel 2.11
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021

	Lapangan Usaha	2018	2019	2020*	2021**	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,61	7,44	7,54	7,72	
B	Pertambangan dan Penggalian	0,13	0,12	0,12	0,12	
C	Industri Pengolahan	3,39	3,25	3,29	3,27	
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,12	0,13	
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,25	0,25	0,25	
F	Konstruksi	4,75	4,79	4,91	4,82	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,18	21,17	20,30	20,76	
H	Transportasi dan Pergudangan	17,78	18,13	17,34	16,81	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,07	2,18	2,19	2,17	
J	Informasi dan Komunikasi	7,15	7,25	7,56	7,63	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,62	4,30	4,86	5,14	
L	Real Estate	4,85	4,73	4,75	4,56	
M,N	Jasa Perusahaan	6,62	6,66	6,48	6,33	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,52	7,33	7,66	7,53	
P	Jasa Pendidikan	8,48	8,28	8,41	8,33	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,59	2,71	2,91	3,15	
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,26	1,31	1,31	1,30	
	PDRB	100	100	100	100	

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka, BPS 2022

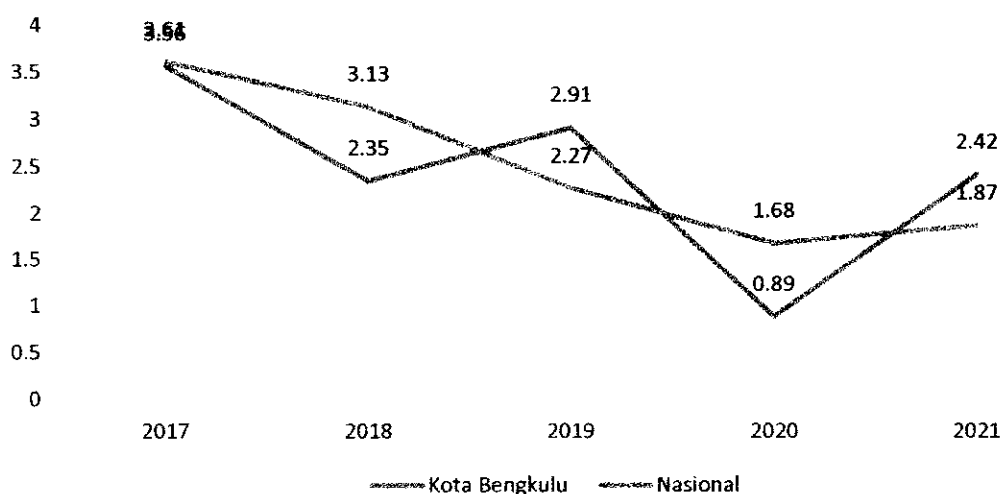
A

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 di atas, pada tahun 2021 perekonomian Kota Bengkulu didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 20,76 persen. Selain dominan, kategori ini juga meningkat peranannya dari tahun 2020 tercatat sebesar 20,30 persen. Peranan kategori ini lebih ditopang oleh perdagangan besar dan eceran selain perdagangan mobil, sepeda motor atau reparasi mobil dan sepeda motor. Kegiatan ini mencakup kegiatan jual beli barang dan jasa, baik yang bersifat formal maupun informal. Hal ini terlihat dari munculnya gerai minimarket modern yang semakin menjamur di Kota Bengkulu. Usaha perdagangan non-formal seperti warung dan kaki lima juga tumbuh di Kota Bengkulu.

2.2.1.3. Laju Inflasi

Kekuatan ekonomi sebuah daerah umumnya dinilai menggunakan indikator laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terlalu berarti jika inflasi di daerah tersebut berada pada angka yang tinggi. Berikut adalah data mengenai laju inflasi di Kota Bengkulu tahun 2017 hingga 2021 :

Grafik 2.6
Inflasi Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 (%)



Sumber : BPS Kota Bengkulu, 2022.

Laju inflasi pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017, pada tahun 2021 inflasi Kota Bengkulu mengalami kenaikan sebesar 1,53% hal ini diakibatkan masih belum terkendalinya perekonomian nasional disebabkan pandemi

Covid-19. Aktivitas pengendalian inflasi yang dilakukan TPID yang selalu berkomitmen menjaga momentum capaian inflasi yang rendah dan stabil sesuai dengan sasaran inflasi nasional melalui berbagai upaya pengendalian yang dilakukan.

Inflasi yang terjadi di Kota Bengkulu selama tahun 2021 adalah 2,42 persen dan inflasi ini lebih tinggi dibanding inflasi nasional yaitu 1,87 persen. Tingginya laju inflasi di Kota Bengkulu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap barang pokok dan penting. Pada Juni 2022 Kota Bengkulu mengalami inflasi sebesar 0,60 persen, angka ini lebih tinggi dibanding kondisi Juni 2021 yang mengalami inflasi sebesar 0,31 persen. Laju inflasi tahun kalender Juni 2022 sebesar 3,81 persen lebih tinggi dari bulan Juni 2021 dengan laju inflasi sebesar 1,30 persen. Sedangkan inflasi dari tahun ke tahun pada Juni 2022 sebesar 4,95 persen lebih tinggi dari bulan Juni 2021 sebesar 1,89 persen.

2.2.1.4. PDRB per kapita

PDRB berfungsi untuk mengukur produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. PDRB memiliki dua basis perhitungan yaitu: *pertama*, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan; *kedua*, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Berdasarkan harga konstant 2010, nilai PDRB Kota Bengkulu pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Dimana nilai dari PDRB ADHK Kota Bengkulu tahun 2021 mencapai 15.833,19 miliar rupiah mengalami kenaikan dibandingkan angka tahun 2020 yang hanya berada diangka 15.301,49 miliar rupiah. Selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan PDRB per Kapita di Kota Bengkulu sebesar 1,76 persen. Pertumbuhan PDRB per Kapita tahun 2021 ini meningkat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2020 yang terpuruk ke angka -1,50 persen akibat pandemi Covid-19. Kenaikan PDRB atas dasar harga konstan ini didorong oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dibandingkan tahun lalu. Berbagai sektor ekonomi mulai bangkit setelah sempat terpuruk pada tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19. Secara lengkap PDRB Kota Bengkulu dan PDRB Per Kapita Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kota Bengkulu
Tahun 2017-2021

Variabel/Variable	2018	2019	2020*	2021**	2022
Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion rupiah)					
- ADHB/ at current price	21.223,09	23.210,40	23.498,49	24.974,92	
- ADHK/ at 2010 Constant Price	14.552,35	15.339,35	15.301,49	15.833,19	
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand Rupiah)					
- ADHB/ at current price	56.372,42	63.132,81	63.112,01	65.965,82	
- ADHK/ at 2010 Constant Price	38.653,72	41.723,39	41.096,58	41.819,93	
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ xcGrowth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	3,12	7,94	-1,50	1,76	
Jumlah Penduduk (orang)/ <i>Population (People)</i> ¹⁾	376.480	367.644	372.330	378.604	
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen) / <i>Population Growth (Percent)</i>	2,29	-2,35	1,27	1,69	

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kota Bengkulu, 2022

2.2.1.5. Indeks Gini

Tabel 2.13
Gini Ratio Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Gini Ratio					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bengkulu	0.38	0.39	0.37	0.38	0,38	

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2022

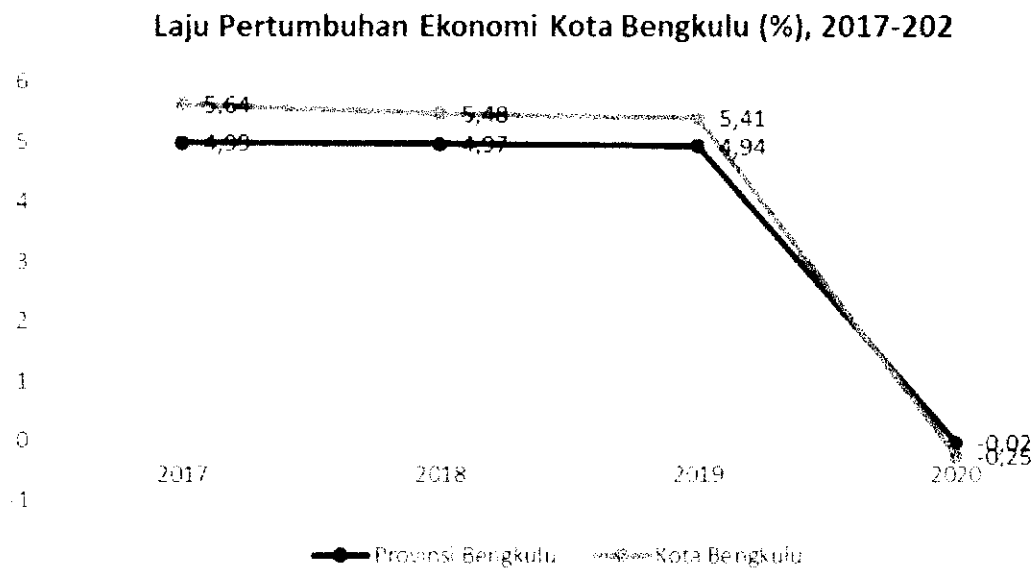
Kemerataan pendapatan penduduk ditunjukkan melalui angka koefisien gini, dimana angka koefisien gini berada antara angka 0 (nol) sampai 1 (satu) dan angka nol menunjukkan pemerataan pendapatan sempurna masyarakat dan angka 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Di tahun 2021, koefisien gini untuk Kota Bengkulu pada tahun 2021 adalah 0,38 persen tidak mengalami kenaikan atau penurunan jika di bandingkan dengan tahun 2020 yaitu juga diangka 0,38 persen. Jika dilihat dari target capaian RPJMD Kota Bengkulu untuk tahun 2021 adalah 0,34 masih dibawah koefisien gini Kota Bengkulu.

Handwritten signature

2.2.1.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memberi gambaran tentang pertumbuhan produksi maupun pengeluaran masyarakat suatu wilayah pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkait dengan pertumbuhan PDRB masing-masing sektor potensial, namun juga terkait dengan faktor tenaga kerja dan lingkungan hidup sebagai faktor pendukung. Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:

Grafik 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu (%), 2017-2020



Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2022.

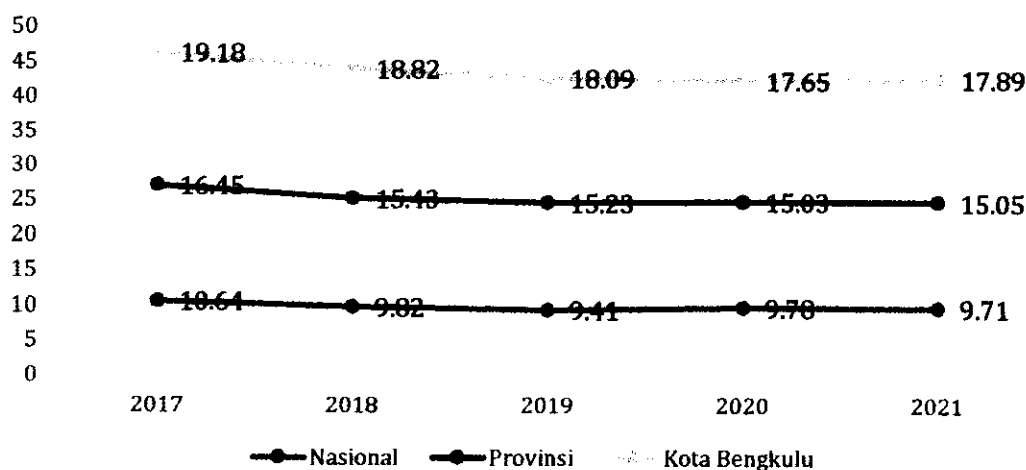
Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu tahun 2017-2019 hampir menyentuh angka 6 persen. Kota Bengkulu mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2017 sebesar 5,64 persen. Capaian tersebut merupakan capaian tertinggi di Provinsi Bengkulu dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2017 di angka 4,99 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2017). Angka tersebut dapat dimaknai bahwa secara umum kondisi perekonomian Kota Bengkulu merupakan yang terbaik dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di wilayah Provinsi Bengkulu. Sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar adalah perdagangan dan transportasi. Hingga pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu terpuruk di angka -0,25 persen dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu terpuruk di angka -0,02 persen akibat pandemi Covid-19.

A.

2.2.1.7. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan Kota Bengkulu. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Angka kemiskinan di Kota Bengkulu 2021 adalah sebesar 17,89 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 17,65 persen. Persentase angka kemiskinan Kota Bengkulu ini bila dibandingkan dengan Angka kemiskinan Provinsi yang tahun 2021 sebesar 15,05 persen dan angka kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen (data september 2021), masih lebih tinggi persentase angka kemiskinan Kota Bengkulu. Angka kemiskinan di Kota Bengkulu tahun 2021 mengalami kenaikan 1,36 persen hal ini dipengaruhi oleh masih belum stabilnya perekonomian nasional pasca dampak dari pandemi *Covid-19*. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi termiskin ke tujuh secara nasional di tahun 2021, sementara di Pulau Sumatera menempati posisi ke dua.

Grafik 2.8
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Bengkulu



Sumber : BPS 2021 dan BPS Provinsi Bengkulu, BPS Kota Bengkulu 2022

Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa atau proporsi penduduk miskin (PO) tetapi juga menyangkut kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) mengukur sejauh mana perbedaan antara rerata pengeluaran miskin dari garis kemiskinannya. Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan angka kemiskinan di Kota Bengkulu dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan dan penurunan ini pun diikuti dengan penurunan pada indeks

41

keparahan kemiskinan (P2) dimana tahun 2021 berada pada 0,87 turun dari tahun 2020 yang sebelumnya berada di angka 1,02. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Bengkulu juga mengalami penurunan dimana di tahun 2020 berada di angka 3,51 turun menjadi 3,31 di tahun 2021. Bila dilihat dari jumlah penduduk miskin terjadi penurunan penduduk miskin di Kota Bengkulu berkurang 2.180 jiwa dimana tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 69.120 jiwa menjadi 66.940 jiwa di tahun 2021.

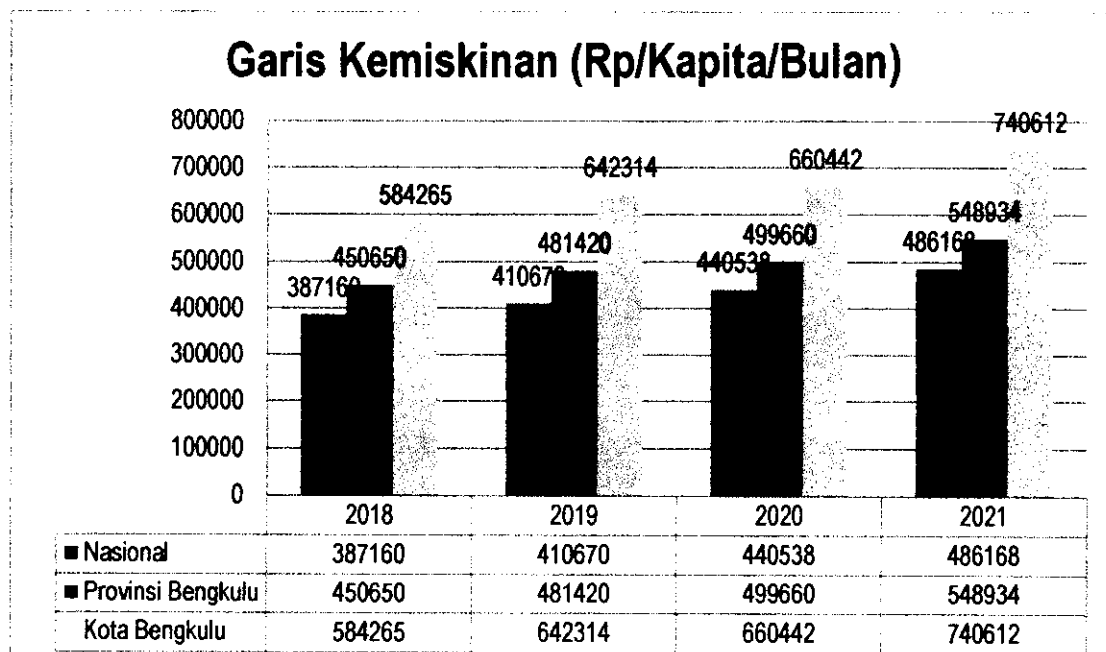
Tabel 2.14
Perkembangan Komponen Kemiskinan Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2021

Tingkat Kemiskinan (P0)	%	18,82	18,09	17.65	17,89
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	4,53	3,89	3,51	3,31
Indeks Keparahana Kemiskinan (P2)	%	1,38	1,22	1.02	0.87
Garis Kemiskinan	Rp.	642.314	660.442	702.578	740.612
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	70.440	69.200	69.120	66.940

Sumber : Bengkulu Dalam Angka, BPS 2022

Tingginya angka kemiskinan di Kota Bengkulu selalu jadi permasalahan dan pertanyaan, telah dikaji oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bengkulu. TKPKD menyimpulkan pada suatu pertanyaan yaitu mengapa garis kemiskinan Kota Bengkulu (Rupiah/Kapita/Bulan) jauh lebih besar dari garis kemiskinan Provinsi Bengkulu dan Nasional, bahkan bila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia pun garis kemiskinan Kota Bengkulu jauh lebih tinggi. Dimana Garis Kemiskinan Kota Bengkulu dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Seperti pada tahun 2021, garis kemiskinan Kota Bengkulu adalah sebesar 740.612 rupiah/kap/bln lebih tinggi 548.934 rupiah/kap/bln bila dibandingkan garis kemiskinan Provinsi dan 486.168 rupiah/kapita/bulan, dan lebih tinggi dari garis kemiskinan Nasional. Permasalahan ini pun oleh TKPKD Kota Bengkulu telah melalui berbagai rapat dan koordinasi dengan *stakeholder* terutama dengan BPS Kota Bengkulu sebagai sumber data yang digunakan Pemerintah. Secara lengkap garis kemiskinan Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Nasional dari tahun 2018 sampai 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.9
Perkembangan Garis kemiskinan Kota Bengkulu Tahun 2018-2021



Sumber : BPS, BPS Provinsi dan BPS Kota Bengkulu 2022

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

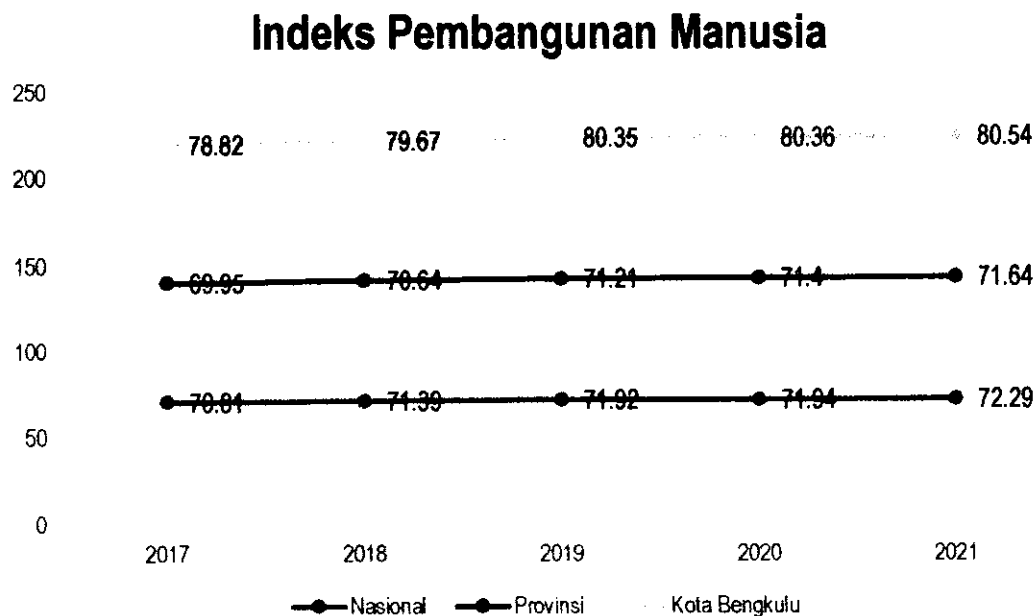
Fokus kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dalam mengukur aspek kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Pada konteks Kota Bengkulu, analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator meliputi: Indeks Pembangunan Manusia, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Usia Harapan Hidup, Persentase Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Rasio Penduduk yang Bekerja.

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia sejatinya menempatkan manusia sebagai sebuah bentuk tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan sekaligus manusia sebagai input dalam pembangunan yang dilakukan. Pembangunan yang dilakukan haruslah berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang dapat diukur berdasarkan tiga dimensi pembangunan yaitu pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Akumulasi terukur dari tiga komponen inilah yang membentuk indeks pembangunan manusia. IPM Kota Bengkulu di tahun 2021 berada pada nilai 80,54 naik dari tahun 2020 sebanyak 0,18 dari nilai 80,36 di tahun 2020.

Pencapaian IPM Kota Bengkulu ini diatas IPM Provinsi dan IPM Nasional. Hal ini membuat Kota Bengkulu masuk dalam kategori pencapaian IPM sangat Tinggi.

Grafik 2.10
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bengkulu Tahun 2017-2021



Sumber : BPS, BPS Provinsi dan BPS Kota Bengkulu, 2022

2.2.2.2. Harapan Lama Sekolah

IPM yang sangat tinggi di Kota Bengkulu ditunjang dari sisi pendidikan yaitu pada Harapan Lama Sekolah di Kota Bengkulu adalah sebesar 16,03 tahun di tahun 2021 yang naik 0,1 point bila dibanding tahun 2020 yang berada di angka 16,02 persen. Kenaikan sejumlah 0,06 ini juga terjadi pada harapan lama sekolah Provinsi Bengkulu yang ditahun 2020 pada 13,61 naik menjadi 13,67 di tahun 2021. Pada Rata-rata lama sekolah di Kota Bengkulu tahun 2021 berada di angka 11,80 tahun naik 0,2 persen dari tahun 2020 yang berada di angka 11,78. Kenaikan rata-rata lama sekolah Kota Bengkulu lebih tinggi dari kenaikan rata-rata lama sekolah Provinsi Bengkulu yang naik 0,03 dari tahun 2020 adalah 8,84 menjadi 8,87 di tahun 2021. Angka Harapan Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.15
Harapan Lama sekolah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Nasional
Tahun 2018 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	12,91	12,95	12,98	13,08	
2	Provinsi Bengkulu	13,58	13,59	13,61	13,67	
3	Kota Bengkulu	16,00	16,01	16,02	16,03	

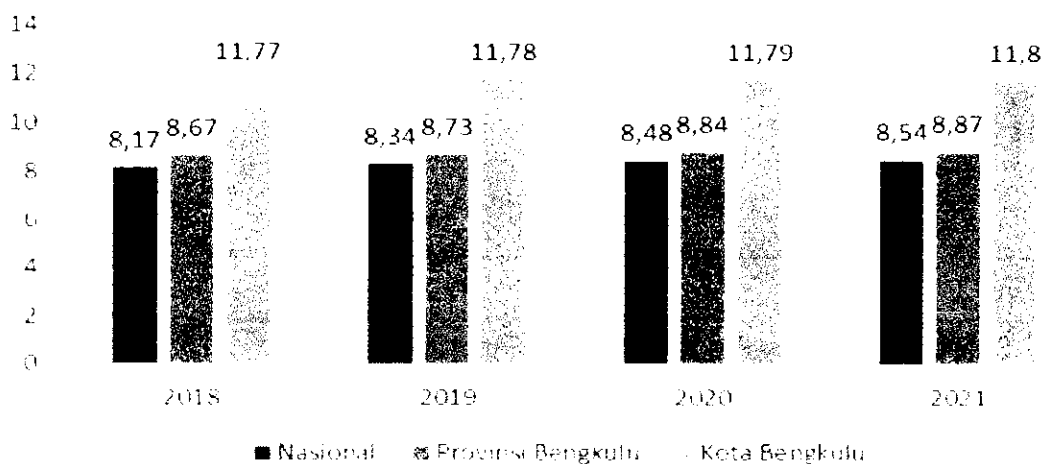
Sumber : BPS Kota Bengkulu, 2022

2.2.2.3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Akses terhadap layanan pendidikan juga dapat diukur dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur akses pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dalam menempuh pendidikan formal. RLS merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam menempuh pendidikan formal. Tingginya angka RLS menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diikuti oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Capaian RLS di Kota Bengkulu disajikan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 2.11
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018-2021 (tahun)

Rata rata Lama Sekolah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2018-2021



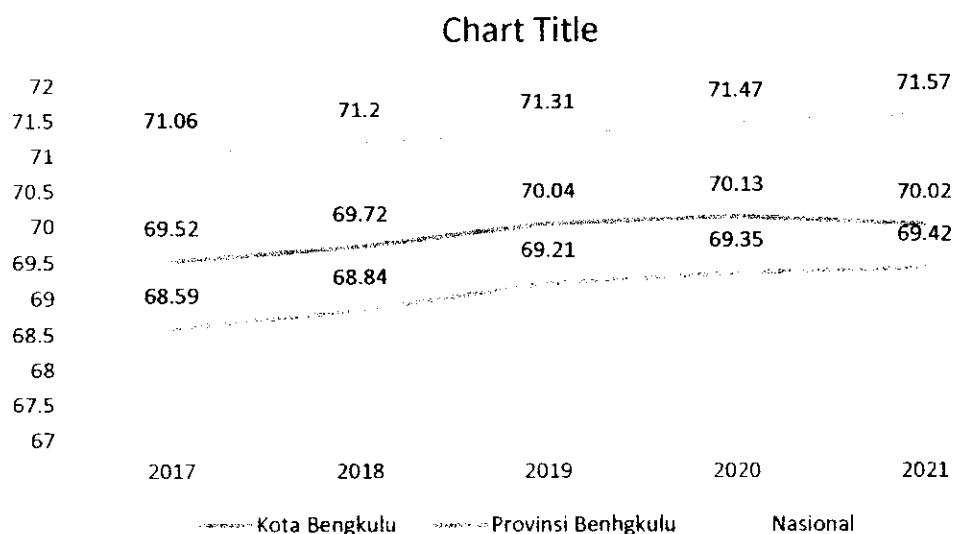
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2018-20122, BPS Pusat 2018-2022

Selama empat tahun terakhir, RLS Kota Bengkulu meningkat secara konsisten meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2021, capaian RLS hanya 11,8 tahun dan hanya meningkat sebesar 0,01 dari tahun 2020. Meskipun demikian, capaian tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan dengan capaian RLS Provinsi Bengkulu dan Nasional. Namun, layanan pendidikan formal di Kota Bengkulu dirasakan masih belum optimal dalam memberikan pelayanan yang komprehensif bagi seluruh penduduk usia sekolah di Kota Bengkulu.

2.2.2.4. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk terutama dari aspek kesehatan. UHH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Tingginya UHH menunjukkan adanya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, UHH yang rendah menjadi pertanda menurunnya kualitas kehidupan masyarakat. Perkembangan UHH Kota Bengkulu ditunjukkan pada grafik berikut :

Grafik 2.12
Perkembangan UHH Kota Bengkulu 2017-2021 (tahun)



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu 2022, BPS Pusat 2022

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa UHH Kota Bengkulu dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 meningkat hingga mencapai 70,20 tahun. Angka ini berarti setiap bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 70,20 tahun. UHH Kota Bengkulu meningkat sebanyak 0,07 tahun dibanding tahun

sebelumnya yang berada di angka 70,13 tahun. Peningkatan UHH di Kota Bengkulu ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain semakin baik akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. Dengan melihat data kenaikan yang belum signifikan ini maka beberapa aspek pelayanan masih perlu ditingkatkan.

2.2.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Stunting

Gizi buruk dan gizi kurang adalah suatu bentuk malnutrisi yang terjadi pada balita. Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi/malnutrisi tingkat berat pada anak. Gizi kurang hanya sebatas menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak, sedangkan gizi buruk menyebabkan beberapa kondisi klinis yang nampak memprihatinkan seperti busung lapar, kwashiorkor dan marasmus. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Tabel berikut memberikan gambaran perkembangan cakupan gizi kurang, gizi buruk dan stunting di Kota Bengkulu Tahun 2018 – 2022. Perawatan balita gizi buruk dan gizi kurang dilakukan 100 persen terhadap semua balita, intervensi terhadap stunting dilakukan secara spesifik dan sensitif.

Tabel 2.16
Perkembangan Cakupan Kasus Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Stunting Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Balita Gizi Kurang	5,3	0,4	0,5	0,78	0,81
2	Persentase Balita Gizi Buruk	0,025	0,249	0,088	0,078	0,11
3	Persentase Prevalensi Balita Stunting	11,85	4,68	1,4	0,86	0,75

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 2022

Prevalensi stunting berdasarkan data SSGI Tahun 2023 mengalami penurunan signifikan sebesar 9,2 persen dari 22,2 persen tahun 2021 menjadi 12,9 persen pada akhir tahun 2022.

4 N

2.2.2.6. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk pada usia produktif berusia 15-64 tahun yang terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja, sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang kegiatannya bersekolah atau mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Bengkulu, Kota Bengkulu Dalam Angka 2021, tahun 2020 diketahui bahwa persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja atau disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bengkulu adalah sebesar 65,99 persen. Berikut adalah data mengenai angkatan kerja Kota Bengkulu :

Tabel 2.17
Persentase Penduduk 15 tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan
di Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

Jenis Kegiatan	2018	2019	2020	2021	2022**
Angkatan Kerja	179.607	187.116	186.950	187.633	187.633
Bekerja	170.619	179.098	174.194	175.725	175.725
Pengangguran Terbuka	8.980	8.018	12.756	11.908	11.908
Bukan Angkatan Kerja	99.580	99.895	96.365	99.195	99.195
Sekolah	43.229	43.405	39.766	36.136	36.136
Mengurus Rumah Tangga	47.927	45.074	46.228	47.854	47.854
Lainnya	8.424	11.416	10.371	15.205	15.205

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka 2022, BPS Kota Bengkulu

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angkatan kerja di Kota Bengkulu relatif menunjukkan peningkatan dari tahun 2018-2021. Kenaikan relatif angkatan kerja ini berbanding dengan kenaikan bukan angkatan kerja secara berkesinambungan. Meskipun kenaikan bukan angkatan kerja 2021 tidaklah signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019, namun hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kota Bengkulu terus mengalami kenaikan, sehingga harus diantisipasi dengan baik agar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bengkulu terjaga.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kota Bengkulu memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian

yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat. Pengembangan seni budaya diharap dapat menjadi pendorong berkembangnya potensi daerah. Di bawah ini disampaikan data capaian pembangunan tentang grup kesenian serta gedung kesenian yang ada di Kota Bengkulu, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.18
Capaian Pembangunan Seni Budaya dan Olahraga Kota Bengkulu
Tahun 2018–2021

NO	Capaian Pembangunan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Grup Kesenian per 1 0.000 Penduduk	55	60	60	60	60
2	Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk	NA	NA	NA	NA	NA
3	Jumlah Klub Olahraga per 10.000 Penduduk	40	40	40	40	40
4	Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 penduduk	NA	NA	NA	NA	NA
5	Jumlah Bahasa Daerah	16	16	16	16	16
6	Jumlah Budaya yang dilestarikan	95	95	95	95	95
7	Benda Situs	8	8	8	8	8
8	Cagar Budaya yang dilestarikan	16	45	45	45	45

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, 2022

Pada Tahun 2018–2021 Jumlah Grup Kesenian dan Cagar Budaya tidak menunjukan perkembangan yang signifikan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum optimalnya perlindungan terhadap bentuk kebudayaan lokal, belum optimalnya aspek regulasi kebudayaan lokal, ketersediaan infrastruktur pelindung kebudayaan lokal, belum optimalnya internalisasi kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat, belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal serta kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan lokal.

Untuk urusan olahraga Kota Bengkulu mengalami masalah belum optimalnya partisipasi masyarakat berolahraga yang disebabkan oleh kurangnya pembinaan, keikutsertaan atlet kompetisi keluar daerah, kurangnya penyelenggaraan kompetisi olahraga, rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pelayanan umum. Pelayanan umum merupakan jasa pelayanan, baik barang maupun jasa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gambaran kondisi pelayanan umum menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam mencapai tujuan pembangunan. Penyajian penyelenggaraan pelayanan umum Kota Bengkulu difokuskan pada empat jenis urusan yaitu: (1) urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, (3) urusan pemerintahan pilihan, dan (4) urusan penunjang.

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Pemerintah daerah menyelenggarakan layanan urusan wajib pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan penyelenggaraan layanan publik yang bersifat mendasar untuk memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan wajib pelayanan dasar difokuskan pada beberapa bidang diantaranya : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

2.3.1.1. Pendidikan

Pemerintah daerah berusaha menyelenggarakan layanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah meningkatkan kualitas hidup individu maupun kelompok masyarakat suatu daerah. Salah satu dimensi utama dalam pembangunan sektor pendidikan adalah akses pendidikan. Pada konteks Kota Bengkulu, penyediaan akses pendidikan dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu: angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan harapan lama sekolah.

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan indikator akses yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Bengkulu Tahun 2018- 2021

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	87,95	89,74	88,07	85,92	-
2	Provinsi Bengkulu	85,67	86,88	87,07	85,00	-
3	Kota Bengkulu	287,2	291,6	287,8	286,4	-

Sumber : BPS, Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2022

Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan seluruh penduduk usia sekolah 7-15 tahun dapat mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Capaian APK di Kota Bengkulu mengalami tren fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan. APK Kota Bengkulu terlihat cukup baik meskipun mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun ke belakang. Fluktuasi tersebut dapat disebabkan oleh berubahnya jumlah penduduk usia sekolah secara cepat. Nilai APK Kota Bengkulu pada tabel di atas merupakan APK PAUD, SD dan SMP.

1. Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan dibidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya; kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan adanya keterbatasan si anak.

Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah pada tahun 2017 sebesar 0,03 persen sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,4 persen dan Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTS yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah pada tahun 2017 sebesar 0,05 persen sampai dengan tahun 2021 tetap sebesar 0,5 persen . Hal ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.20
Angka Putus Sekolah (APtS) Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

NO	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022**
1	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI	0,03	0,19	0,5	0,4	0,4
2	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,05	0,91	0,54	0,5	0,5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, 2022

2. Rasio Guru Murid

Rasio guru murid menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar; melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Jika melihat trend Rasio Guru Murid SD dan SMP dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu masih sangat membutuhkan tenaga pendidik dari jenjang Pendidikan SD dan SMP hal ini dapat dilihat dari Rasio Guru Murid dari table berikut dibawah ini :

Tabel 2.21
Rasio Guru Murid Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

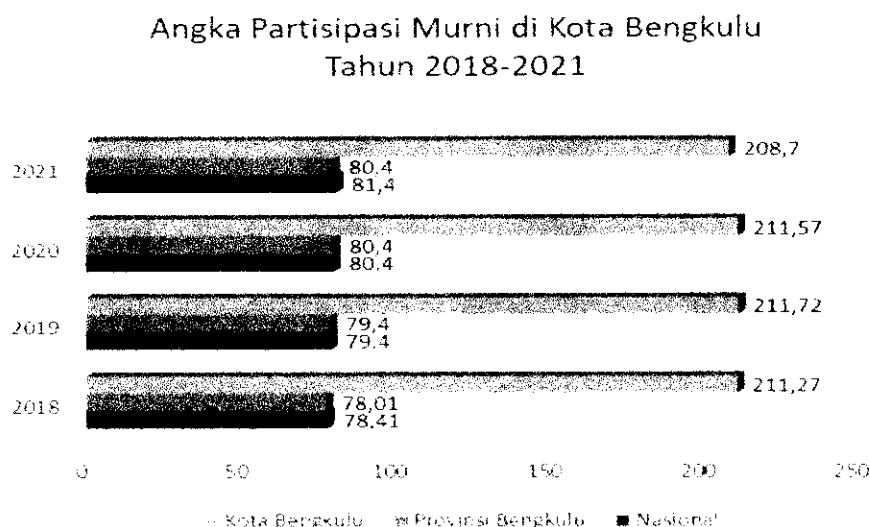
NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022**
1	SD	1:23	1:19	1:18	1:18	1:18
2	SMP	1:16	1:15	1:18	1:16	1:16

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, 2022

3. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang menggambarkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Fungsi dari APM adalah untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Capaian APM Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

Grafik 2.13
Angka Partisipasi Murni Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Nasional
Tahun 2018-2021 (%)

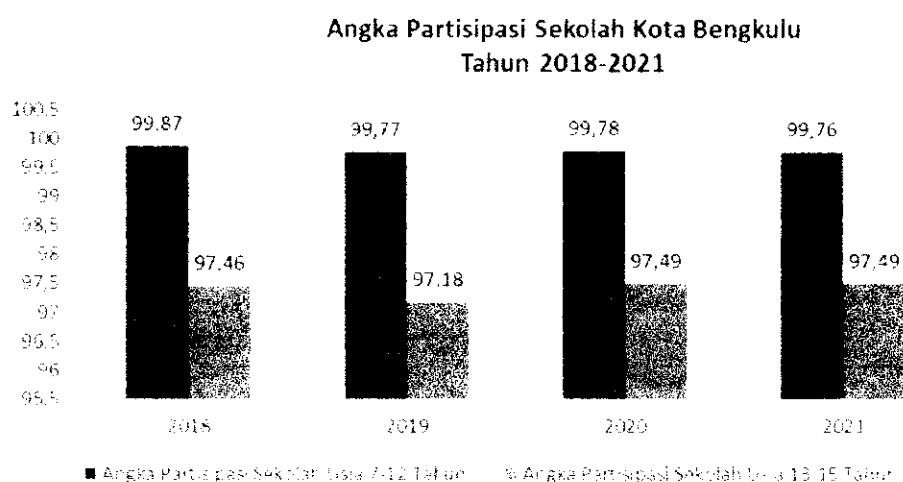


Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2018-2022, BPS Pusat 2018-2022

Pada grafik di atas, APM Kota Bengkulu merupakan APM PAUD, SD dan SMP. Sedangkan APM Provinsi dan Nasional merupakan APM SMA. Capaian APM Kota Bengkulu menunjukkan capaian yang baik di angka 208,7.

Perkembangan partisipasi penduduk berdasarkan kelompok umur termasuk bagian penting dalam mengukur akses pendidikan suatu daerah. Partisipasi penduduk berdasarkan kelompok umur dihitung dengan menggunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan indikator yang mengukur proporsi semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Tingginya APS menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan bagi kelompok umur.

Grafik 2.14
Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP Tahun 2018-2021 (%)



Sumber : BPS Kota Bengkulu, 2022

Capaian APS SD dan APS SMP Kota Bengkulu mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2021, capaian APS SD dan APS SMP Kota Bengkulu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan capaian di Provinsi Bengkulu dan Nasional. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan bagi seluruh kelompok umur di Kota Bengkulu membuka peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan bagi kelompok umur.

Indikator lain yang juga bisa digunakan sebagai ukuran berhasilnya penyelenggaraan pendidikan adalah angka kelulusan siswa. Angka kelulusan siswa merupakan persentase siswa yang lulus ujian akhir dibandingkan jumlah siswa pada awal tahun ajaran pendidikan. Angka kelulusan siswa tingkat SD dan SMP di Kota Bengkulu dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.22
Persentase Kelulusan Siswa di Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,97	99,81	99,95	99,6	-
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	98,95	100	99,46	99,5	-

Sumber : LKJIP Kota Bengkulu Tahun 2021, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa angka kelulusan siswa tingkat SD dan SMP sudah baik yaitu di angka 98-100 persen. Di satu sisi, angka kelulusan tersebut menunjukkan bahwa layanan

A

pendidikan (jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota) di Kota Bengkulu sudah sangat baik meski masih fluktuatif. Oleh karena itu, kelulusan siswa harus menjadi perhatian pemerintah agar tingkat kelulusan bisa ditingkatkan.

Indikator lain yang juga digunakan untuk mengukur capaian sektor pendidikan dari sisi dampak adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini mengukur seberapa jauh suatu pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sehingga berpengaruh terhadap lamanya harapan lama sekolah penduduk usia sekolah. Angka HLS Kota Bengkulu dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Tabel 2.23
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Nasional
Tahun 2018-2021

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	12,91	12,95	12,98	13,08	-
2	Provinsi Bengkulu	13,58	13,59	13,61	13,67	-
3	Kota Bengkulu	16,00	16,01	16,02	16,03	-

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik), 2022

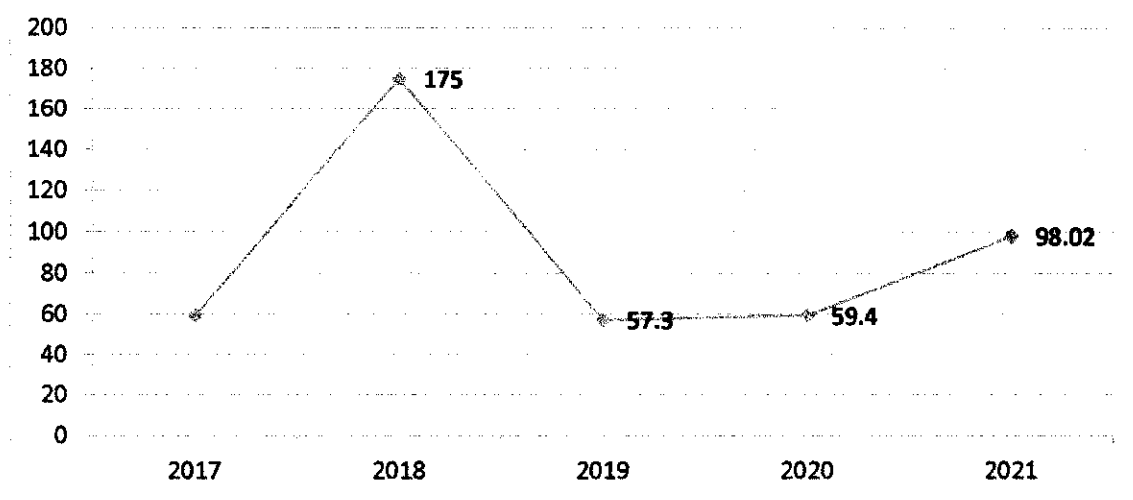
Berdasarkan trend perkembangan selama empat tahun, HLS Kota Bengkulu terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu mampu memperbaiki akses terhadap layanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga menjadi tolok ukur semakin membaiknya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai jenjang pendidikan.

2.3.1.2. Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kondisi riil kesehatan penting untuk dijelaskan agar diperoleh gambaran yang proporsional dari dua dimensi yaitu dimensi kualitas dan dimensi akses. Dimensi akses menjadi sebab dari dimensi kualitas kesehatan.

Gambaran kualitas pelayanan kesehatan di Kota Bengkulu dapat dilihat dari capaian dua indikator yaitu tingkat kematian dan tingkat kesakitan masyarakat. Tingkat kematian ditunjukkan dari angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian balita (AKBa). AKI bermanfaat dalam rangka pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi kaum ibu, khususnya pelayanan kehamilan. Tingginya AKI berdampak pada rendahnya derajat kesehatan di suatu daerah. Capaian AKI Kota Bengkulu disajikan sebagai berikut :

Grafik 2.15
Angka Kematian Ibu per 100.000 Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2018-2021



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 2022

Pada tahun 2018, AKI Kota Bengkulu mencapai 175 orang per 100.000 penduduk di tahun 2019. Tahun 2020 dan 2021 meningkat menjadi 59,4 dan 98,02. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas kesehatan dari sisi AKI di Kota Bengkulu masih rendah. Penyebab dari persoalan tersebut adalah penanganan yang belum optimal, data terkait penyakit ibu hamil yang belum memadai, dan pendarahan.

Angka kematian ibu salah satunya disebabkan oleh pelayanan kehamilan yang belum maksimal seperti ditunjukkan oleh cakupan kunjungan ibu hamil K4. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 merupakan cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Aspek tersebut digunakan untuk melihat perkembangan jumlah ibu dalam mengakses layanan kesehatan khususnya layanan ibu hamil. Semakin tinggi angka cakupan kunjungan ibu hamil, maka semakin menurun potensi kematian ibu hami. Sebaliknya, semakin rendah cakupan kunjungan ibu hamil, maka semakin tinggi potensi kematian ibu hamil.

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga professional untuk ibu hamil selama masa kehamilannya, yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan. Pelayanan antenatal merupakan upaya untuk menjaga kesehatan ibu pada masa kehamilan sekaligus upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu maupun perinatal. Cakupan pelayanan kebidanan dibagi menjadi 3 indikator yaitu cakupan pelayanan K1, K4 dan pemberian vitamin zat besi bagi ibu hamil.

Cakupan pelayanan K1 di Kota Bengkulu kurun waktu 2018 – 2021 meningkat. Pada tahun 2018, persentase ibu hamil yang melakukan kunjungan K1 adalah 98,8%, kemudian menurun menjadi 94,1% di tahun 2020 dan Kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 98,6%. Namun, kunjungan pemeriksaan kehamilan cenderung menurun pada kunjungan K4. Tahun 2018, kunjungan K4 ibu hamil tercatat sebesar 86,1%, lebih rendah dari kunjungan K1 pada tahun yang sama. Kunjungan K1 kemudian menurun menjadi 98,6% pada tahun 2021. Ini menggambarkan kondisi bahwa semakin besar usia kandungan, kesadaran ibu hamil untuk melakukan kunjungan K4 juga semakin rendah. Hal ini tentunya tidak baik bagi kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandung. Selain itu, cakupan pemberian vitamin zat besi kepada ibu hamil baru mencapai 89,9% pada tahun 2021.

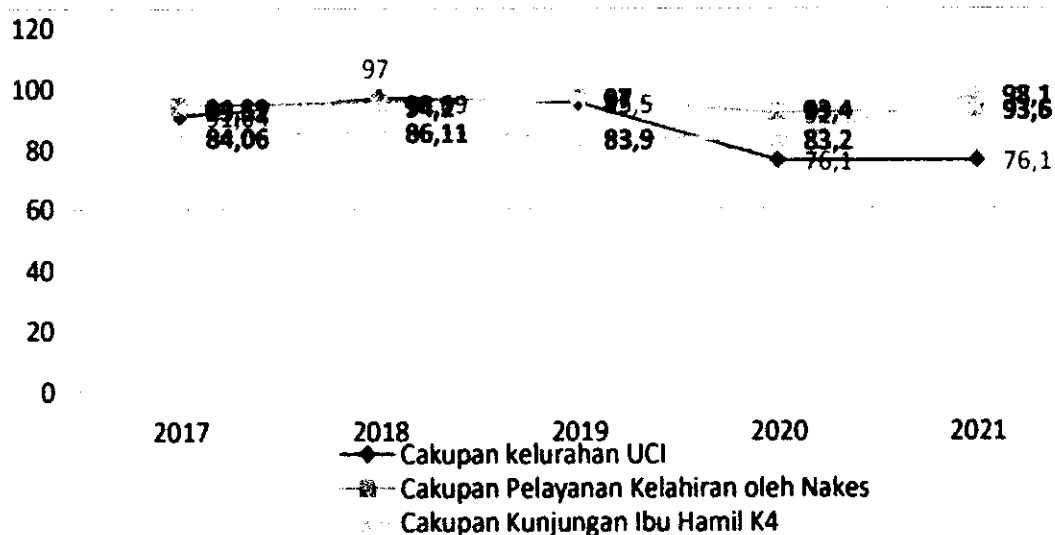
Tabel 2.24
Cakupan Pelayanan Kesehatan Kehamilan di Kota Bengkulu tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022**
Jumlah Ibu Hamil	7.489	7.524	7.553	6.856	6.856
Jumlah Kunjungan K1	7.400	7.413	7.107	6.762	6.762
Jumlah Kunjungan K4	6.449	6.310	6.279	6.161	6.161
Jumlah yang mendapat Zat Besi	6.352	6.317	6.279	6.161	6.161
Cakupan Pelayanan K1 (%)	98,8	98,5	94,1	98,6	98,6
Cakupan Pelayanan K4 (%)	86,1	83,9	83,1	89,9	89,9
Cakupan Pemberian Zat Besi (%)	84,8	84,0	83,1	89,9	89,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 2022

Selain pelayanan kunjungan K1, K4 dan pemberian vitamin zat besi, persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis juga terus meningkat. Pada tahun 2013, sebanyak 93,52% ibu melahirkan dibantu oleh tenaga medis dan meningkat menjadi 93,6% pada tahun 2021.

Tabel 2.16
Cakupan Pelayanan Melahirkan di Kota Bengkulu tahun 2018 – 2021(%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 2022.

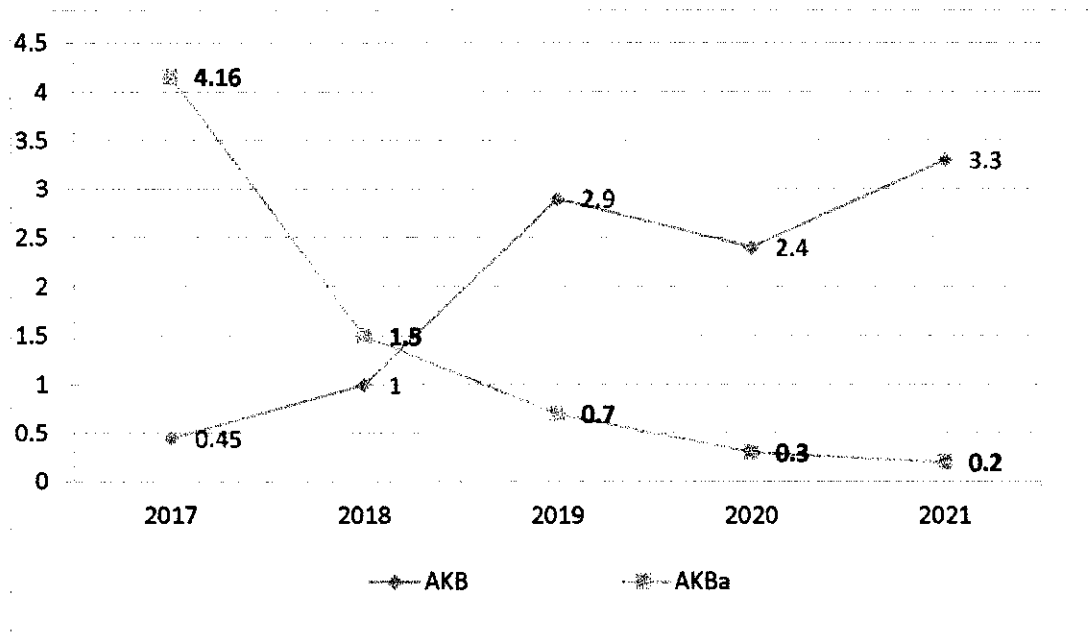
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kota Bengkulu menunjukkan tren yang fluktuatif tetapi cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan kunjungan ibu hamil K4 belum optimal. Penyebab persoalan tersebut adalah rendahnya kesadaran masyarakat terutama ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan modern. Faktor ekonomi yang berkaitan dengan biaya pemeriksaan menjadi hal lain yang menyebabkan belum optimalnya cakupan K4.

Salah satu indikator utama kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan naik turunnya angka kematian bayi, diantaranya : 1) masih ada ibu dengan penyakit penyerta yang ingin hamil tanpa direncanakan dengan baik; 2) masih rendahnya kepedulian dan keterampilan petugas dalam penatalaksanaan ibu hamil dan bayi; 3) kurangnya kepedulian keluarga terhadap ibu hamil dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perawatan bayi; 4) wanita usia subur (WUS) yang menderita Kurang Energi Kronis (KEK) dan anemia kurang mendapat perhatian sehingga saat hali akan menimbulkan risiko bagi janin yang dikandung.

Perkembangan AKB di Kota Bengkulu menunjukkan tren menurun dan AKBa mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dimana angka kematian bayi tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang berada diangka 2,4 per 1000 kelahiran hidup menjadi 3,3 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan AKBa menggambarkan kondisi serta faktor yang mempengaruhi

kesehatan anak seperti keadaan gizi, penyakit menular, pendidikan ibu, pelayanan KIA/Posyandu dan faktor lingkungan. AKBa tahun 2021 adalah sejumlah 0,2 dimana terjadi 1 kasus balita meninggal dari 1000 kelahiran hidup.

Grafik 2.17
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Kota Bengkulu
Tahun 2017-2021



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2022

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan angka kematian bayi di Kota Bengkulu mengalami peningkatan. peningkatan ini perlu mendapat perhatian dari pihak terkait dan diperlukan usaha dari pihak terkait untuk terus berupaya menurunkan angka kematian bayi.

Perkembangan AKB di Kota Bengkulu menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun. Sebaliknya, AKABa mengalami penurunan yang sangat signifikan. Meskipun keduanya mengalami penurunan, tetapi dari sisi jumlah sangat tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh layanan kesehatan bayi dan balita yang belum maksimal karena cakupan kelurahan UCI (*Universal Child Immunisation*) belum memadai. UCI merupakan gambaran suatu kelurahan dimana ≥ 80 persen dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Semakin tingginya angka cakupan kelurahan UCI, maka akan berdampak pada peningkatan kesehatan anak-anak di suatu daerah.

Handwritten signature

Tabel 2.25
Cakupan Kelurahan/Kelurahan UCI Tahun 2018-2022 (%)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bengkulu	97	95,5	76,1	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu 2022

Cakupan kelurahan yang telah menjalani UCI di Kota Bengkulu mengalami perkembangan yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan kelurahan yang melaksanakan imunisasi dasar secara lengkap di Kota Bengkulu sudah optimal. Pada tahun 2020 cakupan kelurahan UCI menurun yang akibatkan adanya pandemi Covid-19 dan tahun 2021 Kota Bengkulu berhasil mencapai 100 persen cakupan kelurahan UCI. Jenis penyakit yang sering dialami masyarakat Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26
Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kota Bengkulu, 2018-2022

Nama Penyakit	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)	40476	33959	1368	4603	
Gastritis	10772	9150	7281	10546	
Radang Sendi Serupa Rematik	7514	6672	3513	3823	
Penyakit Kulit Alergi	6546	4782	2849	3889	
Penyakit Tekanan Darah Tinggi	5149	6846	8324	14692	
Diare (termasuk tersangka kolera)	4951	5167			
Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal	4844	3299	4797	4797	
Tonsilitis	4230	4073			
CEPALGIA	3237	2990			
Penyakit Kulit Infeksi	3235	2525	1178		
Influenza			3268	5135	
Karies Gigi			2870		
Diabetes Melitus Tipe 2			1165	1726	
Radang Sendi Osteoarthritis				2450	
Diabetes Melitus Tipe 1				2094	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu 2022

Penyakit ISPA merupakan penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Kota Bengkulu pada tahun 2018 dan 2019, dan menurun drastis pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dimana masyarakat yang mengalami ISPA tidak memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena kekhawatiran didiagnosa menderita Covid-19. Gastritis dan penyakit kulit infeksi

A

juga banyak terjadi di kalangan masyarakat. Secara umum, masih tingginya angka kejadian beberapa penyakit disebabkan oleh pola hidup sehat yang belum dianut oleh masyarakat.

Kualitas kesehatan masyarakat Kota Bengkulu secara umum masih perlu ditingkatkan. Dimensi kualitas tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas akses kesehatan. Dimensi akses kesehatan dapat dijelaskan berdasarkan aspek ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan. Kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan pencapaian akses dan kualitas kesehatan masyarakat.

Aspek ketersediaan tenaga kesehatan ditunjukkan dari ketersediaan tenaga kesehatan yang dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio ketersediaan dokter per 1000 penduduk seringkali dijadikan ukuran untuk melihat seberapa besar jangkauan tenaga kesehatan dalam melayani penduduk. Pada konteks Kota Bengkulu, ketersediaan tenaga kesehatan dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 2.27
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Bengkulu Tahun 2021

Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Apoteker	TTK	Perawat	Bidan	Gizi	Keperawatan	Keasmas
137	315	33	45	100	641	160	81	33	125

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu 2022

Aspek sarana dan prasarana kesehatan juga termasuk unsur yang penting dalam pembangunan sektor kesehatan. Ketersediaan sarana seperti rumah sakit turut mempengaruhi kinerja dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah. Pada konteks Kota Bengkulu, capaian ketersediaan sarana kesehatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 28
Rasio Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan per 1.000 Penduduk Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2018	2020	2021	2022**
Rumah Sakit	0,021	0,02	0,022	0,023	0,023
Puskesmas	0,053	0,493	0,05	0,053	0,053
Klinik	0,645	0,623	0,485	0,509	0,509
Puskesmas Pembantu	0,143	0,14	0,137	0,143	0,143
Posyandu	0,6	0,589	0,579	0,602	0,602

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 2022

Rasio sarana dan prasarana kesehatan per 1.000 penduduk seperti rumah sakit di Kota Bengkulu juga belum memadai. Rasio rumah sakit terhadap 1.000 penduduk di Kota Bengkulu masih lebih tinggi dibandingkan dengan rasio rumah sakit di Provinsi Bengkulu. Meskipun demikian, angkanya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik di Kota Bengkulu belum terlalu memadai. Penurunan tersebut disebabkan karena tidak adanya penambahan rumah sakit dan, namun pertumbuhan penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selain itu, untuk indikator bidang kesehatan yang bersifat proses atau upaya yang sudah dilakukan Pemkot Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Indikator Bidang Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2018–2022

		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	90	100	100	100	100
2	Persentase Puskesmas Perawatan	15	15	15	0	0
3	Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	242,24	254,0	86,0	94,0	94,0
4	Angka Kejadian DBD per 100.00 penduduk	114,5	78,2	45,0	31,2	31,2
5	Angka Kejadian Malaria per 100.000 penduduk	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
6	Angka Kematian Balita	1,5	3,9	2,7	3,43	3,43
7	Angka Kesakitan	-	-	112,973	112,765	112,765
8	Cakupan Pelayanan Nifas	93,4	97,0	93,4	93,6	93,6
9	Cakupan Pemberian MP-ASI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 0-28 hari	100	100	98,0	100	100
11	Prevalensi HIV	84	87	70	67	67
12	Pravelensi TBC	228	915	973	358	358
13	Cakupan Penemuan dan Penanganan DBD	431	301	177	117	117
14	Persentase Orang dengan TB mendapat Pelayanan TB Sesuai Standar	100	100	43,24	27,53	27,53
15	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Miskin Kota Bengkulu Tahun 2017-2021	N/A	N/A	N/A	N/A	NA

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa beberapa indikator kesehatan yang sifatnya proses mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Angka kejadian DBD dan Malaria merupakan dua indikator yang mengalami perbaikan hingga pada tahun 2021. Artinya, terjadi penurunan jumlah penderita DBD dan Malaria secara signifikan.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pemerintah daerah di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa sektor. Beberapa sektor yang termasuk dalam kategori urusan ini meliputi: jalan dan jembatan, layanan air minum, bangunan dan penataan ruang, drainase serta kebencanaan. Analisis capaian kinerja terhadap beberapa sektor tersebut dilihat dari aspek ketersediaan dan kualitas.

1. Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Bengkulu masih sangat diperlukan, mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan Kota Bengkulu. Dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan bahwa jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, artinya infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah, hal ini disebabkan perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan barang. Panjang jalan Kota Bengkulu dan kondisi jembatan di Kota Bengkulu terus mengalami perbaikan dan karena itu juga infrastruktur selalu menjadi prioritas pada setiap tahun anggaran di Pemerintah Kota Bengkulu.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2021 terlihat pada tabel panjang jalan berdasarkan kondisi jalan yang ada dimana total panjang jalan adalah 942.567 km. Pada tahun 2021 terlihat bahwa kondisi jalan baik mengalami peningkatan dari tahun 2020 sejumlah 460,216 km menjadi 591,084 km, sedangkan kondisi jalan sedang, rusak ringan dan rusak berat mengalami penurunan. Untuk kondisi jalan Kota Bengkulu bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (km) Tahun 2018-2022

No	Kondisi Jalan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022**
1	Baik	439,673	490,552	460,216	591,084	591,084
2	Sedang	323,632	288,948	301,955	232,720	232,720
3	Rusak ringan	152,651	123,305	138,459	114,535	114,535
4	Rusak Berat	26,611	39,762	41,937	4,234	4,234
Jumlah		942,567	942,567	942,567	942,567	942,567

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, 2022

Berdasarkan data dari BPS, Kota Bengkulu Dalam Angka Tahun 2021 terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah panjang jalan berdasarkan permukaan jalan aspal dimana Tahun 2020 panjang permukaan jalan aspal sebesar 698,23 km meningkat menjadi 937,962 km.

Tabel 2.31
Panjang Jalan Kota Bengkulu Menurut Jenis Permukaan Jalan (km)
Tahun 2018-2021

No	Jenis Permukaan Jalan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022**
1	Aspal	490,16	509,39	698,23	937,962	937,962
2	Kerikil	451,00	426,34	237,75	4,605	4,605
3	Tanah	1,41	6,84	6,59	-	-
4	Lainnya	0	0	0	-	-
Jumlah		942,567	942,567	942,567	942,567	942,567

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka, 2021

Untuk Jembatan, di Kota Bengkulu tidak terdapat banyak jembatan, hanya terdapat 14 titik Jembatan dan berdasarkan data semua jembatan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2021. Sebesar 64,2 persen dari total jembatan dalam kondisi baik sedangkan 35,7 persen sisanya dalam kondisi sedang sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.32
Kondisi Jembatan di Kota Bengkulu Tahun 2019-2021

1	Jembatan Air Babat Besar	Baik	Baik	Baik	BPJN/Provinsi	

A.

2	Jembatan Jl. Kalimantan Air Bengkulu	Baik	Baik	Baik	BPJN/Provinsi
3	Jembatan Jl. Samsul Bahrun Air Bengkulu	Baik	Baik	Baik	Provinsi
4	Jembatan Jl. Bentiring Air Bengkulu	Baik	Baik	Baik	BPJN
5	Jembatan Jl. Pahlawan Air Bengkulu	Baik	Baik	Baik	Provinsi
6	Jembatan Air sungai Hitam	Baik	Baik	Baik	Provinsi
7	Jembatan Wisata Pantai Panjang	Baik	Baik	Baik	Provinsi
8	Jembatan Air pulau baai	Baik	Baik	Baik	BPJN
9	Jembatan kuala alam	Baik	Sedang	Sedang	Kota
10	Jembatan Air gedang	Baik	Baik	Baik	Provinsi
11	Jembatan Jl. Lokal	Baik	Baik	Baik	BPJN
12	Jembatan Air muara kurung	Sedang	Sedang	Sedang	BPJN/Provinsi
13	Jembatan Air Surabaya I	Sedang	Sedang	Sedang	BPJN/Provinsi
14	Jembatan Air Surabaya II	Sedang	Sedang	Sedang	BPJN/Provinsi

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, 2021

2. Bangunan dan Penataan Ruang

Kondisi bangunan di Kota Bengkulu saat ini masih banyak yang tidak sesuai dengan standar dan kualifikasi yang telah ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas bangunan di Kota Bengkulu hingga saat ini masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pengawasan bangunan yang belum optimal. Berikut jumlah bangunan Kota Bengkulu yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tabel 2.33
Jumlah Perizinan yang diberikan terkait Penataan Ruang (Unit)
Di Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

No	Jenis Perizinan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	3.147	6.291	2.646	9.390	

Sumber : Data DPM-PTSP Kota Bengkulu, 2022

Jumlah bangunan di Kota Bengkulu yang memiliki IMB mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Penurunan jumlah bangunan yang memiliki IMB terjadi pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlu ditingkatkannya tata ruang yang sesuai dengan aturan. Pemberian pelayanan perizinan tata ruang yang belum optimal dan belum adanya penegakan hukum bagi pelanggar pemanfaatan tata ruang menyebabkan tingginya pelanggaran tata ruang. Hal itu disebabkan oleh upaya perencanaan dan pengendalian tata ruang yang belum optimal.

3. Air Minum

Kemudahan akses air layak bagi masyarakat atau rumah tangga akan sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan Sumber air Utama yang digunakan rumah tangga di Tahun 2020 terlihat bahwa terbanyak sumber air utama masyarakat Kota Bengkulu menggunakan sumur bor atau pompa sebanyak 37,22 persen, menggunakan sumur atau mata air terlindung berada di urutan dua sebanyak 31,41 persen. Tidak ada masyarakat yang menggunakan air kemasan atau isi ulang dan air sumber lainnya (termasuk air permukaan seperti sungai, danau, waduk, kolam, irigasi maupun air hujan) untuk mandi, cuci dan lain-lain Tahun 2021.

Tabel 2.34
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/Dll Tahun 2021

Karakteristik	Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/dll						Jumlah
	Air kemasan/ Isi ulang	Leding	Sumur bor/ Pompa	Sumur/ Mata air terlindung	Sumur/ Mata air tidak terlindung	Lainnya*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Jenis Kelamin KRT							
Laki-laki	0,00	24,00	34,54	33,06	8,39	0,00	100,00
Perempuan	0,00	17,09	55,76	19,96	7,20	0,00	100,00
Kuintil Pengeluaran							
40 Persen Terbawah	0,00	18,33	34,11	38,44	9,12	0,00	100,00
40 Persen Tengah	0,00	21,33	37,44	29,97	11,26	0,00	100,00
20 Persen Teratas	0,00	31,59	40,67	24,99	2,76**	0,00	100,00
Pendidikan Tertinggi KRT							
SD ke bawah	0,00	12,36	30,62	42,57	14,44	0,00	100,00
SMP ke atas	0,00	25,82	38,86	28,62	6,69	0,00	100,00
Kota Bengkulu	0,00	23,13	37,22	31,41	8,24	0,00	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu Tahun 2021

Peningkatan akses air layak bagi masyarakat ini terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu melalui peningkatan kinerja dari BUMD daerah yaitu BUMD PDAM Kota Bengkulu. Untuk penggunaan air oleh masyarakat melalui berlangganan PDAM di Kota Bengkulu mengalami tren yang fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jumlah pelanggan air PDAM pada tahun 2020 yaitu mencapai angka 35.245 SR atau sebanyak 385.630 jiwa. Secara umum masyarakat Kota Bengkulu masih belum mengoptimalkan penggunaan air PDAM karena memang saat ini PDAM Kota Bengkulu masih bermasalah dengan sediaan air baku yang akan didistribusikan ke

masyarakat. Meskipun demikian Pemerintah Kota Bengkulu melalui Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM Kota Bengkulu terus melakukan pembenahan dan berusaha meningkatkan jumlah cakupan masyarakat yang mendapatkan Sambungan Rumah (SR) PDAM dan terus berupaya mencari cara mencukupi air baku berkualitas pada PDAM Kota Bengkulu.

Tabel 2.35
Persentase Rumah Tangga Dengan Sambungan PDAM di Kota Bengkulu
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Jiwa	Jumlah Pelanggan	Persentase
1	2018	377.000	32.950 SR	43.7
2	2019	384.540	35.563 SR	46.24
3	2020	385.630	35.245 SR	45.80
4	2021**	385.630	35.245 SR	45.80
5	2022**	385.630	35.245 SR	45.80

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Untuk penggunaan air minum di Kota Bengkulu berdasarkan data indikator kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPS Kota Bengkulu, sumber air minum utama yang terbanyak digunakan adalah Air isi ulang sebanyak 56,23 persen kemudian diikuti dengan sumur air terlindung sebanyak 17,61 persen. Dari data ini terlihat bahwa sebagian besar masyarakat menggunakan air isi ulang sebagai air minum sedangkan air kemasan bermerk hanya 3,64 persen.

Tabel 2.36
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2021

Sumber Air						
Air Isi Ulang	Air Kemasan Bermerk	Ledeng	Sumur Bor/Pompa	Sumur Terlindung	Sumur/ Mata Air Tidak terlindung	Mata Air Terlindung
56,23	3,64	5,06	9,8	17,61	7,01	0,66

Sumber : BPS Kota Bengkulu, 2020

Sanitasi yang mencakupi bidang air limbah, persampahan dan drainase merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan

masyarakat. Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam pengelolaan sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan partisipatif untuk mencapai target layanan sektor sanitasi yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sanitasi maupun peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Pusat maupun Daerah. Pengembangan sanitasi Kota Bengkulu bertujuan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur serta pelayanan sanitasi menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Koordinasi mendalam antar dinas/ SKPD perlu dilakukan untuk dapat melaksanakan pengembangan sanitasi secara terpadu dan berkesinambungan sebagai bentuk percepatan pembangunan sanitasi kota. Kegiatan sector sanitasi pada Pemerintah Kota Bengkulu telah berjalan baik, ditandai dengan telah dibentuknya POKJA PKP melalui SK Walikota Bengkulu No.9 tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu. Masyarakat dengan sanitasi layak di Kota Bengkulu pada periode tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan akan tetapi tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 74,38 persen dan meningkat kembali hingga 76,8 persen tahun 2021.

Tabel 2.37
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) di Kota Bengkulu
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kota Bengkulu	72 %	75 %	74,38 %	76,8%	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa pemeliharaan jaringan drainase merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan drainase kota agar dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Pengertian pemeliharaan adalah semua pekerjaan rutin dan berulang yang diperlukan untuk memelihara suatu fasilitas sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi maksimal sesuai dengan perencanaan. Untuk itu dalam perencanaan drainase terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan perlu pertimbangan seperti : pendangkalan saluran (sedimentasi), limbah, sampah dan pasang surut air laut, dan pada tempat-tempat tertentu seperti pada pertemuan drainase dengan badan air (*receiving waters*) khususnya di dekat pantai perlu direncanakan bangunan kolam pengumpul yang dilengkapi dengan pumping station karena aliran secara gravitasi sudah tidak mungkin dilakukan secara optimal. Kota Bengkulu termasuk salah

A-

satu kota pantai, Secara hidrolis Kota Bengkulu menerima banjir kiriman, banjir genangan dan banjir pasang air laut, berhubung kondisi topografi yang relatif datar maka banjir ini tidak dapat dibuang dengan gravitasi.

Tabel 2.38
Luas jaringan Irigasi Kota Bengkulu 2018 – 2022 (Ha)

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Bengkulu	267	282	303	293	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur pertanian yang penting untuk menunjang kebutuhan air pada lahan pertanian. Capaian pembangunan jaringan irigasi Kota Bengkulu selama tahun 2017 hingga 2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 dan 2020 jaringan irigasi Kota Bengkulu dalam kondisi baik kembali meningkat mencapai luasan 303 Ha tahun 2020. Peningkatan kondisi jaringan irigasi Kota Bengkulu ini harus terus ditingkatkan guna memenuhi target dan kebutuhan irigasi pertanian di Kota Bengkulu karena meski Kota Bengkulu adalah wilayah perdagangan dan jasa namun ketahanan pangan juga harus tetap diperhatikan. Pada tahun 2021 terjadi penurunan jaringan irigasi dalam kondisi baik, hal ini disebabkan oleh refocusing anggaran sehingga dana perawatan dan perbaikan irigasi berkurang.

Tabel 2.39
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Kota Bengkulu 2018 – 2022 (%)

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Bengkulu	79,01	79,98	80,00	79,78	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Persentase drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kota Bengkulu selama periode tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan komitmen Kota Bengkulu untuk memperbaiki infrastruktur dasar di Kota Bengkulu. Pada tahun 2020, drainase dalam kondisi baik di Kota Bengkulu adalah sejumlah 80,00 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan infrastruktur pengendali banjir maupun longsor semakin meningkat. Namun saat ini drainase di Kota Bengkulu masih belum merata di setiap

kecamatan. Diperlukan peningkatan ketersediaan sistem drainase sehingga dapat mencegah kelebihan air yang mengikis lapisan tanah dan memicu terjadinya banjir dan tanah longsor.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman termasuk urusan pelayanan yang penting dalam proses pembangunan. Perumahan yang baik dan sehat turut menunjang kehidupan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam penyediaan infrastruktur perumahan rakyat dan permukiman adalah ketersediaan rumah layak huni.

Tabel 2.40
Rumah Tidak Layak Huni (Unit) yang di Intervensi di Kota Bengkulu
Tahun 2018-2021

No	Jenis Permukaan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	RTLH	56	149	60	26	

Sumber: Data Dinasperkim Kota Bengkulu, 2021.

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diintervensi di Kota Bengkulu mengalami penurunan dalam periode 2 tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan karena kebijakan refocusing anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan penanganan RTLH masih perlu untuk ditingkatkan dengan memperhatikan faktor-faktor penunjang seperti sarana dan prasarana air bersih, sanitasi yang layak serta jalan lingkungan agar jumlah RTLH di Kota Bengkulu dapat terus ditekan.

Tabel 2.41
Lokasi Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Bengkulu Tahun 2021

1	Benting Permai	3 RT	13,65
2	Betungan	3 RT	24,48
3	Bumi Ayu	2 RT	2,87
4	Dusun Besar	2 RT	6,91
5	Kandang Limun	3 RT	9,5
6	Kandang Mas	3 RT	19,19
7	Kebun Tebeng	3 RT	14,13
8	Lempuing	4 RT	10,74
9	Lingkar Timur	3 RT	4,55
10	Padang Serai	4 RT	23,02

A.

11	Padang Namgka	1 RT	1,07
12	Pagar Dewa	2 RT	7,00
13	Panorama	3 RT	13,99
14	Pasar Bengkulu	1 RT	0,93
15	Penurunan	3 RT	4,63
16	Rawa Makmur	2 RT	6,60
17	Rawa Makmur Permai	4 RT	18,92
18	Sawah Lebar	3 RT	15,78
19	Sawah Lebar Baru	10 RT	20,74
20	Sumber Jaya	5 RT	13,03
21	Tanah patah	3 RT	12,55
22	Teluk Sepang	6 RT	13,46
TOTAL		73 RT	257,74

Sumber : SK Walikota Nomor 81 Tahun 2021

Kawasan kumuh Kota Bengkulu tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bengkulu. Luasan kawasan kumuh di Kota Bengkulu pada tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 81 Tahun 2021 yang merupakan hasil pendataan tahun 2020 seluas 257,74 Ha yang tersebar di 73 RT. Masih banyaknya kawasan kumuh di Kota Bengkulu mengindikasikan bahwa cakupan rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya fasilitas pendukung perumahan seperti jalan lingkungan, akses terhadap air bersih dan sanitasi layak.

Tabel 2.43
Rasio Elektrifikasi di Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

Wilayah	Persentase Rumah Tangga Penerangan Listrik				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bengkulu	99,83	99,38	100	99,95	99,95

Sumber : BPS Kota Bengkulu, 2022

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi wilayah yang aman dan tertib menjadi jaminan bagi kehidupan masyarakat yang sejahtera. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman dapat memberikan suasana kondusif bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitas. Dalam konteks ini, isu tindak kejahatan dan kriminalitas menjadi hal penting yang harus diselesaikan.

47

Penciptaan ketentraman, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Upaya penciptaan ini dilakukan secara Bersama dengan melibatkan masyarakat melalui pembentukan dan pengaktifan Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang di Kota Bengkulu masuk pada 8 Tekad Kota Bengkulu. Kondisi jumlah pelayanan poskamling di Kota Bengkulu dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami jumlah fluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata cakupan pelayanan Poskamling selama tahun 2017-2021 adalah sejumlah 46,83persen. Secara lengkap cakupan pelayanan Poskamling dari Tahun 2017–2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.42
Cakupan Pelayanan Poskamling di Kota Bengkulu Tahun 2018 – 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Pelayanan Poskamling	59,53	46,83	46,83	46,83	

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Bengkulu, 2022

Perkembangan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat juga dapat dilihat melalui jumlah pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan demonstrasi. Kondisi capaian pelanggaran Perda dan demonstrasi di Kota Bengkulu sebagai berikut:

Tabel 2.43
Jumlah Pelanggaran Perda dan Demonstrasi Kota Bengkulu
Tahun 2018-2022 (Kasus)

Jenis Data	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pelanggaran Perda	99	77	75	49	
Jumlah Demo	0	2	1	1	

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Bengkulu, 2022

Pemerintah Kota Bengkulu berusaha mengurangi konflik masyarakat dengan membina lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat (LSM/Ormas) sebagai mitra pemerintah. Pembinaan kepada LSM/ormas menjadi penting untuk membantu pemerintah memberdayakan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pembinaan LSM/ormas, maka partisipasi sosial masyarakat dapat meningkat.

Kinerja pelanggaran perda pada tahun 2018 hingga 2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Bengkulu menghadapi pelanggaran perda tertinggi yakni mencapai 99 kasus pelanggaran perda, dan menurun pada tiga tahun terakhir hingga mencapai 49 kasus pelanggaran perda pada tahun 2021. Walaupun mengalami tren penurunan pada tiga tahun terakhir, kondisi ini masih menunjukkan bahwa pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bengkulu belum optimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan penegakan Perda ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3) dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi Perda.

Capaian pembangunan urusan ketentraman dan ketertiban umum juga dapat ditinjau dari penyelesaian kasus K3. Apabila kasus K3 semakin sedikit yang diselesaikan, maka kinerja sektor K3 dinilai belum optimal. Capaian penyelesaian kasus K3 di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 44
Jumlah Kasus Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3) yang diselesaikan di Kota Bengkulu Tahun 202018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	99	77	74	49	
2	Jumlah Pelanggaran K3	99	77	74	49	
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100	100	100	100	

Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPD Kota Bengkulu, 2022

Dari tabel tersebut terlihat bahwa keseluruhan kasus K3 pada empat tahun terakhir sudah ditangani. Walaupun angka kasus K3 semakin menurun, namun angka 49 kasus pada tahun 2021 masih cukup tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu masih mengalami masalah tingginya kasus K3. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan penegakan Perda K3 dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi Perda tentang pentingnya ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kota Bengkulu.

2.3.1.6. Sosial

Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan urusan sosial dalam pelayanan dasar. Kewajiban tersebut merupakan kepanjangan dari UU nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam prakteknya, urusan sosial lebih fokus pada penanganan dampak atau

fenomena sosial yang membutuhkan intervensi sosial seperti pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Tabel 2. 45
Jumlah dan Penanganan PPKS di Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PPKS	25.419	25.419	28.935	28.935	N/A
2	Jumlah PPKS yang tertangani	13.528	15.827	11.750	17.121	N/A

Sumber : Dinas Sosial Kota Bengkulu, 2022

Jumlah PPKS di Kota Bengkulu mengalami tren peningkatan. Jenis PPKS terbesar di Kota Bengkulu adalah keluarga miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlanter. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Kota Bengkulu mengalami permasalahan tinggi penduduk PPKS. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor yaitu: belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial, belum optimalnya ketersediaan pelayanan sosial dalam menjangkau penerima layanan, belum optimalnya jumlah dan kompetensi pekerja sosial, rendahnya kuantitas lembaga sosial, belum optimalnya penanganan dan pemberian bantuan lanjut usia terlanter, rendahnya pendapatan PPKS, belum optimalnya pembinaan kepada anak cacat, dan penyandang disabilitas, belum optimalnya fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, belum optimalnya fasilitasi program keluarga harapan serta belum optimalnya pendampingan wanita rawan sosial ekonomi.

Pemerintah Kota Bengkulu berusaha untuk menangani PPKS. Hal ini berhubungan langsung dengan fenomena kemiskinan di Kota Bengkulu, dimana pada tahun 2021 Kota Bengkulu termasuk salah satu dari empat kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem. di Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah memberikan bantuan sosial PPKS dan pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya melalui panti sosial. Capaian PPKS yang ditangani oleh Pemerintah Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Perkembangan urusan sosial juga dapat ditinjau dari aspek kebencanaan. Bencana yang berpotensi melanda Kota Bengkulu adalah bencana kebakaran, gempa, banjir, dan tsunami. Bencana kebakaran termasuk bencana yang sering terjadi di Kota Bengkulu mengingat pertumbuhan penduduk dan tingginya aktivitas pembangunan perumahan di Kota Bengkulu. Sarana prasarana pemadam kebakaran merupakan hal penting dalam penanggulangan bencana

kebakaran. Jumlah armada pemadam kebakaran Kota Bengkulu tahun 2022 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Jumlah Armada Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu Tahun 2021

Armada	Jumlah	Kondisi
<i>Brandweer</i>	9	Rusak ringan dan rusak berat
<i>Brandweer</i>	2	Baik
Tengki	3	Rusak ringan
<i>Rescue</i>	1	Rusak ringan
Mobil Tangga	1	Rusak ringan
Mobil Operasional	2	Baik
Mobil Komando	1	Rusak ringan
Jumlah Total	19	

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, 2022

Kota Bengkulu memiliki armada kebakaran yang terdiri dari *brandweer*, tengki, *Rescue* dan mobil tangga. Jumlah armada tertinggi yang dimiliki Kota Bengkulu yaitu *brandweer*. Sebagian besar armada *brandweer* dalam kondisi rusak ringan atau sebesar 77,8 persen dari jumlah total *brandweer*, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak berat. Seluruh armada tangga, *rescue*, mobil tangga dan mobil komando Kota Bengkulu dalam kondisi rusak ringan, sedangkan armada mobil operasional dalam kondisi baik.

Kondisi armada pemadam kebakaran Kota Bengkulu mengindikasikan bahwa diperlukan peningkatan pengelolaan sarana prasarana pemadam kebakaran. Secara umum, Kota Bengkulu masih mengalami tingginya bencana kebakaran. Kondisi tersebut disebabkan karena masih minimnya pemahaman penduduk tentang pencegahan dini bencana kebakaran dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung seperti mobil pemadam kebakaran.

Tabel 2.47
Ancaman Bencana di Kota Bengkulu

No	Jenis bencana	Tingkat Ancaman
1.	Banjir	Sedang
2	Cuaca Ekstrem	Tinggi
3	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah
4	Gelombang Ekstrem Abrasi	Sedang

No	Jenis bencana	Tingkat Ancaman
5	Gempa Bumi	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang
7	Kegagalan Teknologi	Sedang
8	Kekeringan	Sedang
9	Konflik Sosial	Rendah
10	Tanah Longsor	Sedang
11	Tsunami	Tinggi

Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPD Kota Bengkulu, 2022

Ancaman bencana di Kota Bengkulu bervariasi mulai dari tingkat rendah hingga tinggi. Kota Bengkulu memiliki ancaman bencana cuaca ekstrim, gempa bumi dan tsunami yang tinggi. Kesiapsiagaan bencana di Kota Bengkulu menjadi penting dilakukan. Saat ini, kesiapsiagaan bencana di Kota Bengkulu belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas terkait, kondisi ini disebabkan beberapa sebab yaitu: belum optimalnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, masih lemahnya koordinasi antar dinas terkait dan masyarakat jika terjadi Pra Bencana, belum ada peraturan daerah (perda) tentang bangunan tahan gempa, tempat evakuasi tsunami belum memadai, masih lemahnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana, belum optimalnya Forum Pengurangan Resiko Bencana di Kota Bengkulu yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, rambu-rambu evakuasi bencana masih kurang, belum lengkapnya sarana tempat evakuasi sementara (TES) bencana (gempa, tsunami dan banjir) di Kota Bengkulu, kondisi jalur evakuasi yang belum memadai, sirine peringatan dini bencana yang masih kurang, peralatan bencana yang belum optimal, dan terbatasnya sekolah dan kelurahan tanggap bencana di Kota Bengkulu.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Produktivitas perekonomian daerah dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja. Faktor ini memiliki beberapa indikator yang mampu digunakan untuk melihat kondisi baik atau buruknya ketenagakerjaan di suatu daerah. Pada umumnya, terdapat indikator penting seperti angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berikut adalah penjelasan dari berbagai indikator tersebut di Kota Bengkulu :

2.3.2.1.1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk pada usia produktif berusia 15-64 tahun yang terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja, sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Data mengenai angkatan kerja menjadi basis bagi penyusunan berbagai data ketenagakerjaan lainnya, seperti tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja dan berbagai data lain yang mampu dijadikan dasar bagi perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Berikut adalah data mengenai angkatan kerja Kota Bengkulu:

Tabel 2.48
Jumlah Penduduk 15 tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan
di Kota Bengkulu Tahun 2018-2021

Jenis Kegiatan	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	179.607	187.116	186.950	187.633	
Bekerja	170.619	179.098	174.194	175.725	
Pengangguran Terbuka	8.980	8.018	12.756	11.908	
Bukan Angkatan Kerja	99.580	99.895	96.365	99.195	
Sekolah	43.229	43.405	39.766	36.136	
Mengurus Rumah Tangga	47.927	45.074	46.228	47.854	
Lainnya	8.424	11.416	10.371	15.205	

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka 2022

Angkatan kerja di Kota Bengkulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam lima tahun terakhir. Kenaikan angkatan kerja ini berbanding lurus dengan kenaikan bukan angkatan kerja secara berkesinambungan. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kota Bengkulu terus mengalami kenaikan, sehingga harus diantisipasi dengan baik, agar tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Bengkulu terjaga.

Data mengenai angkatan kerja dapat dirinci secara lebih detil berdasarkan jenjang pendidikan angkatan kerja. Data tersebut dijadikan bagi dasar penyusunan intervensi kebijakan ketenagakerjaan berbasis jenjang pendidikan yang ditamatkan. Jenjang pendidikan berpengaruh positif pada keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Berikut adalah data mengenai pembagian angkatan kerja berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan:

Tabel 2. 49
Persentase penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan (%)
Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
SD ke bawah	27.753	24.760	25.464	26.582	
SMP	29.489	22.821	24.184	23.022	
SMA	70.398	79.419	75.186	72.273	
Universitas	42.979	52.098	49.360	53.848	
Total	170.619	179.098	174.194	175.725	

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2018-2022

Data dua tahun terakhir menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja dengan Pendidikan SMA dan Universitas merupakan kelompok tertinggi. Sementara kelompok Pendidikan universitas mengalami peningkatan dari tahun 42.979 di tahun 2018 dan meningkat 53.848 di tahun 2021. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja jenjang pendidikan SMA dan Universitas harus diintervensi dengan kebijakan yang baik. Salah satu hal yang bisa dijalankan adalah penyesuaian keterampilan tenaga kerja jenjang pendidikan SMA dan Universitas dengan permintaan pasar, agar tenaga kerja dapat terserap dengan baik.

2.3.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka berkorelasi positif terhadap ketersediaan lapangan kerja dan keterampilan tenaga kerja. Besarnya tingkat pengangguran terbuka seringkali disebabkan oleh rendahnya serapan tenaga kerja di suatu daerah. Data mengenai tingkat pengangguran terbuka menjadi indikator paling penting di bidang ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bengkulu mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 6,61 persen menjadi sebesar 4,29 persen di tahun 2019. Akan tetapi di tahun 2020 TPT Kota Bengkulu mengalami kenaikan menjadi 6,82 persen akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh sendi kehidupan dan perekonomian, dan kembali menurun pada tahun 2021 seiring dengan semakin membaiknya kondisi setelah pandemi. Berikut adalah data mengenai TPT di Kota Bengkulu.

Tabel 2. 50
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bengkulu Tahun 2018 -2022

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,00	4,29	6,82	6,34	

Sumber: BPS Kota Bengkulu 2017-2021

Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan TPT sebesar 5 persen dan 4,29. Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 2.53 persen menjadi 6,82. Penurunan terjadi pada 2021 sebesar 0.48 persen. Fluktuasi TPT ini mengindikasikan bahwa kebijakan penurunan pengangguran belum mampu menysasar akar masalah dengan baik. Pemetaan masalah dengan metode yang benar diperlukan untuk mengetahui penyebab fluktuasi TPT di Kota Bengkulu.

Laju penurunan TPT yang fluktuatif juga menunjukkan bahwa upaya untuk menekan tingkat pengangguran terbuka belum optimal. Persoalan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: 1) belum optimalnya pengembangan wirausaha sosial karena kurangnya motivasi masyarakat berwirausaha bidang pariwisata, industri dan jasa, dan 2) belum optimalnya peningkatan kompetensi tenaga kerja, karena kurangnya kualifikasi tenaga kerja dengan pengembangan sektor perdagangan, jasa dan wisata dan kurangnya optimalisasi balai latihan kerja. Kebijakan penurunan TPT ini harus terus dijalankan secara konsisten dan berpijak pada logika yang inovatif, agar TPT dapat ditekan lebih maksimal ke angka yang lebih rendah secara kontinyu. Peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja secara berkesinambungan diperlukan untuk merealisasikan cita-cita tersebut.

2.3.2.1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan mencari pekerjaan). Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (BPS). Tingkat partisipasi kerja di Kota Bengkulu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari tahun 2017 sebesar 63,48 persen menjadi sebesar 65,99 persen pada tahun 2020, dan sedikit menurun pada 2021 menjadi 65,42 persen. Berikut adalah uraian data TPAK Kota Bengkulu.

Tabel 2.51
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bengkulu Tahun 2018 -2022 (%)

Data	2018	2019	2020	2021	2022
TPAK	64,33	65,19	65,99	65,44	

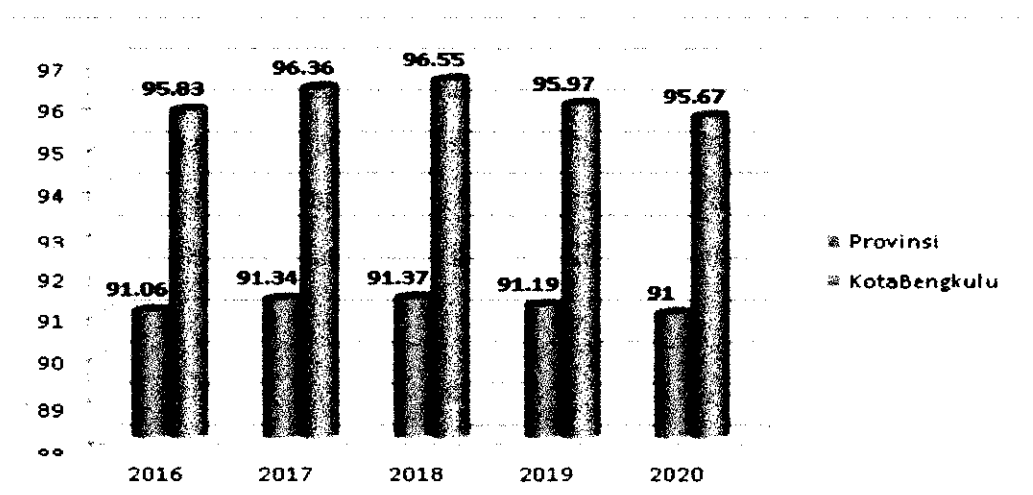
Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2022

TPAK Kota Bengkulu menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0.55 persen. Fluktuasi penurunan TPAK ini mengindikasikan bahwa lapangan kerja yang tersedia belum mampu menampung angkatan kerja Kota Bengkulu yang semakin besar. Diperlukan peningkatan investasi padat karya untuk meningkatkan TPAK Kota Bengkulu secara berkesinambungan. Fluktuasi TPAK ini juga mengindikasikan bahwa masih diperlukannya pelatihan calon pencari kerja, agar sebagian besar angkatan kerja dapat terserap ke dunia kerja secara optimal.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan pembangunan yang responsif terhadap isu-isu perempuan perlu dikembangkan di daerah. Permasalahan pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan urusan yang cukup kompleks. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu indikator berdayanya masyarakat suatu daerah. Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu, Indeks Pembangunan Gender Kota Bengkulu Tahun 2020 berada di angka 95,67 mengalami penurunan dari tahun 2019 yang berada di angka 96,97. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Bengkulu tahun 2020 sebesar 91.00 lebih kecil dari Kota Bengkulu.

Grafik 2.18
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bengkulu Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2021

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG berfungsi untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG

(Handwritten mark)

berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada konteks Kota Bengkulu, capaian IPG mengalami tren peningkatan. Capaian IPG Kota Bengkulu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu dan nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan pembangunan gender di Kota Bengkulu sudah optimal. Peningkatan IPG tersebut disebabkan adanya pemerataan pendidikan antara perempuan dan laki-laki di Kota Bengkulu.

Pemerintah Kota Bengkulu juga mempertimbangkan indikator kesejahteraan perempuan di samping IPG, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dibanding dengan laki-laki dalam berbagai aktivitas publik dan kontribusinya dalam pendapatan. Capaian IDG dapat dihitung dari tiga aspek yaitu: keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi, sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Tabel 2.52
Komponen Indeks Pemberdayaan Gender

No	Komponen IDG	2018	2019	2020	2021	2022
1	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	25,71	25,71	25,71	25,71	
2	Perempuan sebagai tenaga manajemen, profesional, Administrasi, teknis	47,41	52,75	48,47	49,14	
3	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	32,98	33,16	33,14	33,01	
4	IDG pemberdayaan	76,61	80,35	77,68	77,67	

Sumber: BPS Provins Bengkulu, 2022

IDG memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Capaian IDG Kota Bengkulu mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2021 mengalami penurunan 0,01% dibandingkan Tahun sebelumnya. Hal ini disumbang oleh angka Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja yang menurun diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Namun capaian IDG Kota Bengkulu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pembanding lainnya. Kondisi tersebut mengindikasikan pembangunan gender di Kota Bengkulu

sudah optimal. Peningkatan IDG tersebut disebabkan peningkatan partisipasi perempuan di bidang tenaga profesional pada sektor swasta dan sumbangan pendapatan perempuan yang meningkat. Kondisi tersebut tetap penting untuk dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

2.3.2.1.5 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)

Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang bekerja untuk pemerintah baik pada pemerintah pusat maupun daerah. Proses penerimaan pegawai negeri ini mengikuti ketentuan pemerintah dan berlaku di seluruh Indonesia dan dapat bekerja di berbagai tingkat pemerintahan setelah lulus tanpa memandang perbedaan gender. Demikian juga pegawai negeri sipil yang bekerja untuk Kota Bengkulu. Komposisi pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.53
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Bengkulu Tahun 2018-2021

1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil			4.522	4.522	4.522
2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Laki-laki			1.458	1.458	1.458
3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan			3.054	3.054	3.054
Persentase Laki-laki				32	32	32
Persentase Perempuan				68	68	68

Sumber: BKPSDM *Tahun 2021 adalah data per Desember 2022

Tahun 2021 jumlah pegawai negeri sipil perempuan sudah mencapai 68 persen atau dengan kata lain dua per tiga dari total pegawai negeri sipil Kota Bengkulu adalah perempuan. Hal ini menggambarkan tidak adanya perbedaan gender dalam penerimaan pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kota Bengkulu. Sampai saat ini belum ada ketentuan resmi mengenai komposisi pegawai negeri yang ideal antara laki-laki dan perempuan.

Pada sektor perlindungan anak dan perempuan, Kota Bengkulu masih memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini dapat disebabkan oleh masih kurangnya pendampingan, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta belum optimalnya kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak. Fasilitas terhadap korban

A.

dalam rumah tangga (KDRT) sebenarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP) KDRT. Namun, ada 2 situasi/keadaan yang bisa terjadi diantaranya:

- Korban KDRT tidak melanjutkan kembali kasusnya ke ranah hukum atau tidak koordinasi dengan P2TP2A tentang kelanjutan kasus setelah dimediasi dengan tenaga pendamping KDRT (psikolog) dan pembuka agama.
- Korban KDRT menginginkan tindak lanjut kasus sampai ke ranah hukum hingga penjatuhan vonis kepada tersangka KDRT setelah dimediasi dengan tenaga pendamping.

Data KDRT di Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 54
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Bengkulu Tahun 2018 -2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah KDRT	43	37	67	69	34
2	Rasio KDRT	0,011	0,035	0,062	0,077	0,038

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu, 2022

2.3.2.3. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi prioritas di Kota Bengkulu yaitu permasalahan persampahan kota, pada tahun 2021 jumlah sampah yang mampu ditangani Pemerintah Kota Bengkulu adalah sejumlah 453 M³/hari. Ratusan ton sampah itu berasal dari sampah rumah tangga maupun pasar, yang terdiri atas sampah organik dan non organik. Pengangkutan ratusan ton sampah di 38 TPS di tiap kelurahan se- Kota Bengkulu dijalankan mengerahkan Mobil Amroll 12 unit dan dump truck 14 unit, L300 1 Unit dan roda tiga 1 unit dan dibantu pihak swasta dengan - 56 - menggunakan 40 mobil carry. Permasalahan sampah yang muncul karena kapasitas TPA Air Sebakul yang overload untuk menampung sampah dan kendaraan operasional banyak yang rusak.

Tabel 2.55
Jumlah Sampah Yang Ditangani DLH (M³/Hari) Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Sampah yang ditangani (M3/hari)	264	270	452	453	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, 2022

Sampah di Kota Bengkulu mengalami peningkatan. Peningkatan timbunan sampah terjadi karena dua faktor, yaitu: 1) belum optimalnya upaya pengurangan dan penanganan sampah karena kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah, kurangnya SDM penanganan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah. 2) Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah di lingkungan pemukiman, karena kurangnya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan kurangnya pendampingan pengelolaan sampah mandiri.

Tabel 2.56
Indeks kualitas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kualitas Air	49,94	50,04	50,14	50,24	50,34
2	Indeks Kualitas Udara	87,53	87,63	87,73	90,18	90,28
3	Indeks Kualitas Tutupan Hutan	52,18	52,89	53,59	70,21	70,58
4	Indeks Kualitas Air Laut	27,35	28,97	30,59	70,09	70,69
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,25	54,88	55,51	70,18	70,47

Sumber : DLH Kota Bengkulu, 2022

2.3.2.4. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kota Bengkulu dapat ditinjau dari beberapa indikator. Kinerja layanan di bidang tersebut dapat dinilai dari kondisi/capaian pada level akses. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat fluktuasi beberapa kondisi/capaian antara lain adalah jumlah kendaraan, arus penumpang di beberapa pusat pelayanan perhubungan, arus bagasi, barang dan paket pos, rasio ijin trayek, dan jumlah uji KIR kendaraan umum.

Tabel 2. 57
Jumlah Kendaraan Berdasarkan Jenis Kendaraan di Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

No	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Mobil Penumpang	47.621	49.079	52.152	51.293	
2	Mobil Bus	889	908	922	914	
3	Truk	21.287	21.391	22.017	22.112	
4	Sepeda Motor	269.117	275.450	281.923	285.499	
	Total	338.914	346.828	357.014	359.818	

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka, 2021- 2022

Jumlah kendaraan di Kota Bengkulu pada periode 2018-2021 terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah kendaraan jenis truk dan sepeda motor terus terjadi peningkatan, sementara jenis mobil penumpang dan mobil bus terjadi fluktuasi. Sementara arus penumpang dan jumlah penerbangan di bandara Fatmawati Soekarno dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bengkulu selama tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan grafik yang fluktuatif. Jumlah ijin trayek tertinggi pada tahun 2018 meningkat 18,87 persen dari tahun sebelumnya. Rasio ijin trayek Kota Bengkulu mengalami grafik yang fluktuatif. Rasio ijin trayek mengalami penurunan rasio pada tahun 2020. Pemerintah Kota Bengkulu perlu berupaya agar kesadaran masyarakat pengguna trayek semakin meningkat.

Tabel 2. 58
Rasio Ijin Trayek yang Dikeluarkan Kota Bengkulu Tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan	107	32	8	0	
Jumlah Penduduk	376,480	385,100	371,820	374,690	
Rasio Ijin Trayek	1: 3.518	1: 12.034	1: 46.477	0	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, 2022

2.3.2.5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

Pengendalian penduduk merupakan usaha mempengaruhi pola perkembangbiakan penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan melalui suatu kebijakan kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Manfaat dari laju pertumbuhan penduduk adalah untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar periode waktu.

Pengendalian penduduk dapat dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan program nasional untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Beberapa indikator dapat digunakan untuk melihat keberhasilan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diantaranya: cakupan peserta KB aktif, Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBD), dan persentase alat

kontrasepsi yang digunakan penduduk. Cakupan KB aktif merupakan perbandingan antara jumlah peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS). Cakupan peserta KB aktif di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 59
Cakupan Peserta KB Aktif Penduduk di Kota Bengkulu tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah peserta Program KB Aktif	41.024	33.547	36.664	35.699	27.820
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	52.779	47.551	48.661	48.759	52.823
3	Cakupan Peserta KB Aktif	77,73	70,55	75,34	73,21	52,7

Sumber : DP3AP2KB, 2022

Cakupan peserta KB aktif di Kota Bengkulu menunjukkan tren yang fluktuatif. Data tahun 2022 masih bersifat sementara. Pada tahun 2021, baru 73,21 persen PUS di Kota Bengkulu yang berpartisipasi sebagai peserta KB aktif. Dengan capaian tersebut pemerintah Kota Bengkulu akan terus meningkatkan cakupan peserta KB sebagai upaya pengendalian penduduk.

Tabel 2.60
Rasio Akseptor KB Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Akseptor KB	6.364	5.264	2.831	2.845	419
2	Jumlah Pasangan usia Subur	11.993	11.603	10.800	10.312	6428
3	Rasio Akseptor KB	53,1	45,4	26,21	27,59	6,52

Sumber : DP3AP2KB, 2022

Cakupan peserta KB dapat didukung oleh sarana dan prasarana pendukung KB yang memadai, seperti fasilitas kesehatan (faskes) Keluarga Berencana dan jaringan KB di puskesmas pembantu (pustu). Kondisi faskes KB dan jaringan KB di pustu di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 61
Daftar Nama Fasilitas Kesehatan Yang Melayanai KB Serta Jaringan dan Jejaring Se Kota Bengkulu Tahun 2022

A.

NO	KECAMATAN	FASKES KB		JARINGAN/ JEJARING		
1	SELEBAR	1.	PKM BETUNGAN	1.	PUSTU	BETUNGAN ASRI
				2.	PUSTU	PEKAN SABTU
		2.	PKM BASUKI RAHMAD	1.	PUSTU	SUKARAMI
				2.	PUSTU	PAGAR DEWA
				3.	PUSTU	BUMI AYU
				4.	PUSTU	ALFATINDO
				5.	PUSTU	SUMUR DEWA
2	GADING CEMPAKA	3.	RSUD M.YUNUS	-		
		4.	RSJKO	-		
		5.	GRAHA HUSADA	-		
		6.	PKM LINGKAR BARAT	-	PUSTU	PEPABRI
		7.	PKM JALAN GEDANG	1.	PUSTU	KOMPLEK BI
		8.	PKM SIDOMULYO BARU	-	PUSTU	SIDOMULYO
3	TELUK SEGARA	9.	BHAYANGKARA POLRI	-		
		10.	KLINIK BIDDOKES POLDA	-		
		11.	PKM PASAR IKAN	1.	PUSTU	PONDOK BESI
				2.	PUSTU	JITRA
				3.	PUSTU	BERKAS
				4.	PUSTU	PASAR MELINTANG
		12.	PKM KAMPUNG BALI	1.	PUSTU	BAJAK
				2.	PUSTU	TENGAH PADANG
				3.	PUSTU	PINTU BATU
		13.	SINT CAROLUS			
4	M. BANGKAHULU	14	PKM RATU AGUNG	1.	PUSTU	KANDANG LIMUN
				2.	PUSTU	PINANG MAS
		15	PKM KORPRI	3.	PUSTU	TUGU HIU
		16	PKM BERINGIN RAYA	-	PUSTU	RAWA MAKMUR
5	KAMPUNG MELAYU	17	KLINIK RAFLESIA LANAL			
		18	PKM PADANG SERAI	-	PUSTU	TELUK SEPANG

4/11

NO	KECAMATAN	FASKES KB		JARINGAN/ JEJARING		
		19	PKM KANDANG	-	PUSTU	PERUMDAN
6	RATU AGUNG	20	RS .TIARA SELLA	-		
		21	PKM NUSA INDAH	1.	PUSTU	KEBUN BELER
				2.	PUSTU	KEBUN KENANGA
				3.	KLINIK	ASYIFA
		22	PKM SAWAH LEBAR	4.	PUSTU	KEBUN TEBENG
				5.	PUSTU	KEBUN KIWAT
		23	ASY SYFA			
		24	PKM LEMPUING	-		
7	RATU SAMBAN	25	RSU KOTA	-		
		26	RS RAFFLESIA	-		
		27	PKM PENURUNAN	1.	PUSTU	SUKAJADI
				2.	PUSTU	PADANG JATI
				3.	PUSTU	BELAKANG
		28	PKM ANGGUT ATAS	1.	PUSTU	ANGGUT DALAM
				2.	PUSTU	KEBUN DAHRI
				3.	PUSTU	PONDOK
				4.	PUSTU	PENGANTUNGAN
8	SUNGAI SERUT	29	PKM SUKAMERINDU	1.	PUSTU	SURABAYA
				2.	PUSTU	SEMARANG
				3.	PUSTU	TANJUNG AGUNG
				4.	PUSTU	SENTIONG
				5.	PUSTU	KAMPUNG KELAWI
				6.	PUSTU	PASAR BENGKULU
9	SINGARAN PATI	30	RS DKT			
		31	PKM JEMBATAN KECIL	1.	PUSTU	DARUSSALAM
				2.	PUSTU	PANORAMA
		32	PKM LINGKAR TIMUR	1.	PUSTU	TIMUR INDAH
				2.	PUSTU	BTN PDK

Sumber : DP3AP2KB, 2022

Kota Bengkulu memiliki fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana berjumlah 32 instansi dan jejaring 45 pustu. Kecamatan dengan fasilitas kesehatan KB terbanyak dimiliki oleh Kecamatan Gading Cempaka dengan jumlah tujuh faskes. Kecamatan dengan jejaring berupa pustu terbanyak

A.

terdapat pada Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Selebar, dan Kecamatan Teluk Segara dengan masing-masing tujuh pustu.

2.3.2.6. Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kota Bengkulu turut mengembangkan layanan bidang komunikasi dan informatika. Perangkat komunikasi dan informatika mampu menghasilkan produk-produk digital yang semakin berkembang dengan kinerja lebih efisien dan efektif. Pada konteks Kota Bengkulu, capaian penduduk yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.62
Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke atas menurut Karakteristik dan penggunaan Teknologi Informasi Tahun 2019

Karakteristik	Menggunakan Telpon seluler (HP)/nirkabel atau computer (PC/desktop/laptop/ notebook, tablet)	Mengakses Internet (termasuk facebook, teitteer,bbm, whatapps)
Jenis Kelamin ART		
Laki-Laki	93,09	69,73
Perempuan	89,89	65,42
Kuintil Pengeluaran		
40 % Terbawah	84,17	46,03
40 % Tengah	94,98	79,87
20 % Teratas	98,54	84,34
Pendidikan Tertinggi ART		
SD Kebawah	79,20	42,98
SMP Keatas	97,85	80,27
Total	91,52	67,62

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu, 2020

Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi telah menjadi media baru dalam berkomunikasi dan berinteraksi oleh masyarakat. Media *online* juga kini sangat membantu kegiatan individu dan rumah tangga. Hal tersebut mempengaruhi perubahan budaya masyarakat karena perkembangan pola pikir, dan lingkungan. Website merupakan sarana komunikasi dan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi berupa website dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efesiensi, efekstifitas, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di Kota Bengkulu tidak terlepas dari bertambahnya stasiun BTS sehingga komunikasi bertambah lancar.

Tabel 2.63
Jumlah Base Transreceiver Station (BTS) Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

Kota Bengkulu	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah BTS	235	249	273	297	

Sumber ; Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu, 2022

2.3.2.7. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi merupakan salah satu organisasi perekonomian yang diharapkan dapat memberikan peran yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian rakyat. Persentase koperasi aktif dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami peningkatan.

Tabel 2.64
Jumlah dan Persentase Koperasi aktif, Koperasi tidak aktif Tahun 2018-2021

Jenis Koperasi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Koperasi Aktif	793	796	802	814	
Koperasi Tidak Aktif	114	114	116	114	
Jumlah Koperasi	907	910	918	928	
Persentase Koperasi Aktif	87,43	87,47	187,36	87,71	

Sumber: Data Sektoral Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu

Tabel 2.65
Jumlah UMKM Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

Jenis UMKM	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah UMKM	4.251	4.322	4.322	4.322	

Sumber: Data Sektoral Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu

Jumlah UMKM di Kota Bengkulu Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 justru tidak terjadi penambahan UMKM yang terdaftar. Hal ini diasumsikan karena adanya pandemi yang terjadi sejak akhir 2019 dan efek pandemi Covid-19 yang memberikan dampak pada seluruh sektor kehidupan terutama berdampak pada ekonomi kerakyatan. Selain itu, karena adanya aturan PSBB, jaga jarak yang membuat makin maraknya penjualan yang dilangsungkan secara online oleh masyarakat.

Tabel 2.66
Perkembangan Data UKM Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

Tahun	Indikator	Jenis Usaha			Jumlah
		Perdagangan	Industri	Aneka Jasa	
2018	Pelaku Usaha UKM	3.399	600	252	4.251
	Tenaga Kerja (Org)	5.141	1.017	510	6.668
2019	Pelaku Usaha UKM	3.464	252	606	4.322
	Tenaga Kerja (Org)	5.176	505	991	6.672
2020	Pelaku Usaha UKM	3.464	252	606	4.322
	Tenaga Kerja (Org)	5.176	505	991	6.672
2021	Pelaku Usaha UKM	3.464	252	606	4.322
	Tenaga Kerja (Org)	5.176	505	991	4.322
2022	Pelaku Usaha UKM	38.829		1.513	40.342
	Tenaga Kerja (Org)				

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2022

2.3.2.8. Penanaman Modal

Penanaman modal menjadi indikator yang berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pada urusan wajib non-pelayanan dasar penanaman modal, indikator yang sering digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan pada umumnya seperti realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), tingkat serapan tenaga kerja dan berbagai indikator penting lainnya. Pada tahun 2021, total investasi perusahaan penanaman modal asing di Kota Bengkulu sebesar 9,55 miliar rupiah, turun sebesar 98,4 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 600,19 Milyar rupiah. Sama dengan penanaman modal asing, nilai investasi perusahaan penanaman modal dalam negeri ditahun 2021 juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dari 481,48 Milyar rupiah ditahun 2020, turun sebesar 30,69 persen menjadi 694,71 Milyar rupiah ditahun 2021. Hal ini merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang masih melanda pada tahun 2021. Jika dibandingkn dengan kabupaten lainnya di provinsi Bengkulu nilai investasi di kota Bengkulu jauh lebih banyak.

Tabel 2.67
Jumlah dan Nilai Investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing
Kota Bengkulu (Juta Rupiah), 2020 – 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Investasi	2020 Nilai Investasi	Jumlah Investasi	2021 Nilai Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Bengkulu	27	600.197,92	60	9.551,7
Provinsi Bengkulu	125	2.768.973,12	195	23.716,8

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2022

47.

Sedangkan jumlah perusahaan penanaman modal dalam negeri di Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini, dimana terjadi penurunan nilai investasi pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Tabel 2.68
Jumlah dan Nilai Investasi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
Kota Bengkulu (Juta Rupiah), 2020 – 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Investasi	2020 Nilai Investasi	Jumlah Investasi	2021 Nilai Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Bengkulu	183	481.484,70	462	694.715,70
Provinsi Bengkulu	511	5.240.718,60	1.031	4.923.457,30

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2022

2.3.2.9. Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi Kepemudaan adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Organisasi kepemudaan ini berdisirir Bersama dengan visi dan struktur kepemimpinan, budaya dan modal aktualisasi ide dan gagasannya. Dari Tahun 2018 terdapat 44 OKP di Kota Bengkulu. Berikut perkembangan jumlah organisasi pemuda di Kota Bengkulu periode 2018-2022.

Bengkulu memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan aspek kepemudaan dan olahraga. Pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya memajukan sumber daya manusia (SDM) Kota Bengkulu. Generasi pemuda merupakan potensi dan asset pembangunan daerah yang memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan dan pembaharu dalam kehidupan masyarakat. Pemuda penting untuk dibimbing dan dibina untuk aktif memerankan fungsinya tersebut. Pada konteks ini, pembinaan pemuda dapat dilakukan pada tataran organisasi pemuda agar menjadi lebih aktif.

Tabel 2.69
Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Bengkulu

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	44	44	44	44	44
2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	5	6	2	3	3
3.	Jumlah Kegiatan Olahraga	2	7	5	1	2
4.	Jumlah Lapangan Olahraga	30	32	32	32	32

Sumber : Dispora Kota Bengkulu, 2022

Wirausaha muda juga dapat dijadikan indikator pembangunan sektor kepemudaan. Wirausaha Muda bertujuan untuk mengubah pola pikir kalangan pemuda agar mau melakukan kewirausahaan, sehingga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada ketersediaan lapangan kerja. Pemerintah Kota Bengkulu juga mengurus urusan olahraga. Pada bidang olahraga, Kota Bengkulu mengalami masalah belum optimalnya partisipasi masyarakat berolahraga. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas terkait, kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, belum optimalnya pembinaan terhadap atlet-atlet muda, kurangnya keikutsertaan atlet-atlet kompetisi ke luar daerah, kurangnya penyelenggaraan kompetisi olahraga, rendahnya ketersediaan sarana dan prasana olahraga, dan kurangnya kuantitas sarana olahraga *indoor* maupun *outdoor* (Gedung olahraga, kolam renang, arena memanah, arena berkuda, tempat futsal, stadion, Lapangan basket).

Sebagai sarana untuk mencapai prestasi tertentu harus direncanakan dan dibina dengan baik. Pembinaan olahraga adalah system pembibitan yang meibatkan individu atlet dalam membangun keprofesionalan diri melalui system yang telah ditetapkan dengan tujuan prestasi. Pada tahun 2021 Kota Bengkulu sudah memiliki 11 Cabang Olahraga yang dibina secara khusus dengan para pelatih yang berlisensi. Berikut data cabang olah raga dan atlit yang dibina Kota Bengkulu Tahun 2021.

Tabel. 2.70
Data Cabang Olahraga dan Atlit Binaan Dispora Kota Bengkulu Tahun 2021

NO	Cabang Olahraga	Jumlah Atlit	Jumlah Pelatih		
			Memiliki Lisensi	Belum Memiliki Lisensi	Total
1	Atletik	150	2	1	3
2.	Sepak Bola	22	10	10	20
3	Bola Voly	24	5	5	10
4	Bola basket	24	3	5	8
5	Pencak Silat	21	6	4	10
6	Bulu Tangkis	8	2	6	8
7	Tenis Lapangan	8	4	4	8
8	Tenis Meja	6	2	5	7
9	Karate	450	9	6	25
10	Taekwondo	450	6	4	10
11	Panahan	300	5	-	5

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa saat ini atlet binaan di Kota Bengkulu ada 1.463 Atlet dengan 104 pelatih. Atlet terbanyak dari cabang olahraga karate sebanyak 450 orang, Taekwondo 450 orang dan yang paling sedikit atlet Tenis meja sebanyak 6 Orang atlet.

2.3.2.10. Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Bengkulu mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2019 namun di tahun 2020 terjadi penurunan skor PPH menjadi 82,1. Skor PPH Kota Bengkulu pada dua tahun terakhir mengindikasikan masih diperlukannya optimalisasi pola konsumsi pangan masyarakat. Upaya tersebut dapat dijalankan dengan pengembangan diversifikasi pangan lokal non-beras secara berkesinambungan.

Tabel 2.71
Pola Pangan Harapan Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

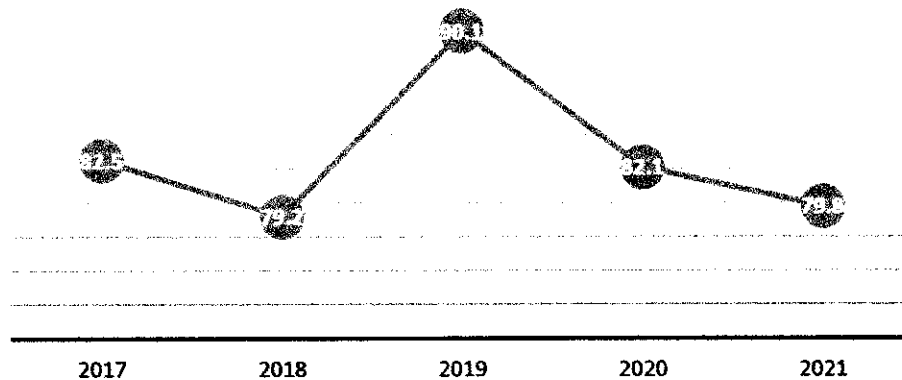
No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Target	79,20	79,40	79,60	79,80	80
2	Realisasi	79,20	90,10	84,20	84,20	82,50

Tabel 2.72
Ketersediaan Pangan Utama Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Target	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12
2	Realisasi	1,28	1,34	1,30	1,54	-

Grafik 2. 19
Skor Pola Pangan Harapan Kota Bengkulu Tahun 2018-2021

18.



Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, 2022

2.3.2.11. Statistik

Urusan statistik berkaitan dengan ketersediaan data untuk masyarakat. Ketersediaan data akan memudahkan masyarakat dan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah. Analisis kinerja pada urusan wajib statistik berkaitan dengan ketersediaan buku Kota Bengkulu Dalam Angka dan PDRB Kota Bengkulu. Jenis data yang ditampilkan meliputi: geografi dan iklim, pemerintahan, kependudukan dan ketanagakerjaan, sosial, pertanian, industri pertambangan dan energi, perdagangan, hotel dan pariwisata, transportasi dan komunikasi, keuangan daerah dan harga. Buku tersebut merupakan sumber data dan informasi terkait Kota Bengkulu dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan.

Ketersediaan Buku PDRB Kota Bengkulu juga penting karena berperan dalam memberikan Gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Bengkulu. Meskipun tidak setiap tahun dipublikasikan, buku Kota Bengkulu Dalam Angka dan PDRB Kota Bengkulu sudah ada. Selain belum dipublikasikan secara rutin, pembaharuan dan kelengkapan data juga perlu diperhatikan dalam penyusunan selanjutnya.

Handwritten signature

2.3.2.12. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu layanan publik yang penting karena menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Keberadaan pustaka dapat meningkatkan minat baca dan juga tingkat literasi yang tinggi. Kota Bengkulu terus berupaya untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat dengan menyediakan pustaka-pustaka mulai dari tingkat Kelurahan Pemerintah berusaha memajukan kebudayaan nasional sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa melalui penyelenggaraan perpustakaan. Perpustakaan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat dan menumbuhkan budaya gemar membaca masyarakat. Koleksi buku dan judul buku yang tersedia di perpustakaan Kota Bengkulu mengalami tren peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat yang mengalami stagnasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas pengelola perpustakaan belum optimal. Beberapa jenis perpustakaan yang dilaksanakan di Kota Bengkulu adalah perpustakaan keliling, perpustakaan digital, dan perpustakaan *fun*.

Perkembangan perpustakaan dapat ditunjukkan dari jumlah kunjungan perpustakaan. Semakin tinggi jumlah kunjungan perpustakaan, maka kinerja perpustakaan dapat dinilai lebih baik. Berikut gambaran kondisi kepustakaan di Kota Bengkulu periode tahun 2018-2022.

Tabel 2.72
Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Perpusda	1	1	1	1	1
2	Perpus Sekolah	SD 113 SMP 52	SD 113 SMP 52	SD 113 SMP 52	SD 113 SMP 52	SD 113 SMP 52
3	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	1427	950	1043	500	500
4	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	4800 jdl	5492 jdl	5492 jdl	5492 jdl	5492 jdl
5	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	11902 eks	15492 eks	15492 eks	15492 eks	15492 eks
6	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	4800 jdl 11902 eks	5492 jdl 15492 eks	5492 jdl 15492 eks	5492 jdl 15492 eks	5492 jdl 15492 eks

A.

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2022

2.3.2.13. Pertanahan

Tanah dan bangunan tempat tinggal merupakan salah satu sumber daya penting dalam pembangunan. Kepemilikan atas tanah dan bangunan dijadikan sebagai salah satu indikasi dari kesejahteraan masyarakat. Status kepemilikan tanah dan bangunan yang jelas di suatu daerah dapat meminimalisir terjadinya konflik atau sengketa tanah. Kondisi status kepemilikan tanah dan bangunan di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 73
Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kota Bengkulu Tahun 2021 (%)

Wilayah	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	Jumlah
Kota Bengkulu	66,98	33,02	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu 2021

Mayoritas kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati di wilayah Kota Bengkulu berstatus milik sendiri, yaitu sebanyak 66,98 persen, berstatus bukan milik sendiri (termasuk kontrak, sewa, rumah dinas, rumah adat) sebanyak 33,02 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat di Kota Bengkulu sudah cukup sejahtera ditinjau dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal.

2.3.2.14. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang memberikan kontribusi langsung terhadap masyarakat. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 2. 74
Persentase Penerbitan KTP Elektronik dan Akta Kelahiran Kota Bengkulu Tahun 2018 -2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022

Penerbitan KTP-EI (%)	97,73	94,11	97,94	97,53	
Penerbitan Akta Kelahiran (%)	88,41	43,5	89,6	89,67	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, 2021

Penerbitan KTP elektronik Kota Bengkulu mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 97,53 persen dan untuk Penerbitan Akta Kelahiran mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 89,67 persen. Capaian ini mengindikasikan di Kota Bengkulu telah meningkatnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan.

Tabel 2.75
Penerbitan Jumlah Akte Kematian Tahun 2018-2022

No	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Akte Kematian	NA	1.067 dok	2.266 dok	3.740 dok	

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bengkulu

Pelaksanaan penerbitan akte kematian diterbitkan berdasarkan laporan warga melalui perangkat kelurahan, selanjutnya pada malam ketiga akte kematian tersebut diserahkan kepada pihak keluarga yang meninggal, penerbitan akte kematian di Kota Bengkulu dari Tahun 2019-2021 menunjukkan tren peningkatan dari Tahun ke Tahun

Tabel 2.76
Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kartu Identitas Anak (KIA)	NA	20.933 dok 18,79 %	10.745 dok 27,39 %	19.574 dok 42,59 %	

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bengkulu

2.3.2.15. Kearsipan

Urusan kearsipan di Kota Bengkulu diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Pengelolaan arsip secara baku sudah dilakukan di Kota Bengkulu. Pembakuan dalam pengelolaan arsip merupakan hal penting. Apabila tidak adanya prosedur dan standar yang jelas, maka akan menimbulkan inkonsistensi dan kesalahan interpretasi. Masalah yang dialami salah satunya belum optimalnya kualitas kearsipan. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya keterbukaan informasi publik, belum optimalnya layanan sistem pemerintahan berbasis

17

elektronik, dan belum optimalnya kualitas layanan informasi kearsipan. Pada tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mulai menjalankan aplikasi SRIKANDI yang akan diterapkan di seluruh perangkat daerah Kota Bengkulu.

Tabel 2.77
Data Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

NO	NAMA OPD	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERSENTASE JUMLAH PD YANG MENGELOLA ARSIP SECARA BAKU (%)
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(Jumlah PD yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan secara baku/Jumlah seluruh PD) X 100%	2.56

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2022

Tabel 2.78
Hasil Pengawasan Kearsipan yang Diverifikasi oleh ANRI Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

NO.	TAHUN	NILAI PEROLEHAN	KATEGORI
1	2018	33	BURUK
2	2019	31,82	C (KURANG)
3	2020	31,82	C (KURANG)
4	2021	18,4	D (SANGAT KURANG)
5	2022	49,98	C (KURANG)

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2022

Tabel. 79
Sarana Prasarana Kearsipan untuk Pengelolaan Arsip

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Alat penghancur kertas	-	-	-	-	Ada
2	CCTV	-	-	-	-	Ada
3	Server, PC Unit, Scanner, dan Printer	-	-	-	-	Ada

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2022

2.3.3. Urusan Pelayanan Pilihan

Urusan pilihan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kekhasan, kondisi, serta potensi unggulan pada daerah tersebut. Beberapa urusan pilihan pemerintah daerah adalah: pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, dan perindustrian. Kondisi perkembangan urusan pilihan Kota Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:

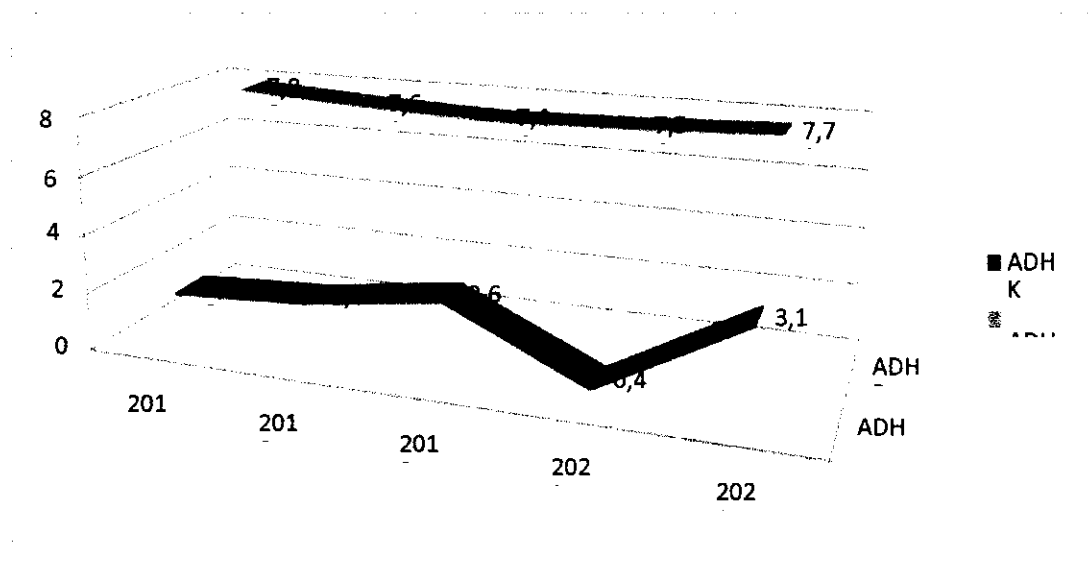
2.3.3.1. Pertanian

Sektor pertanian di Kota Bengkulu meskipun bukan merupakan sektor unggulan namun masih memberikan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu yang dapat dilihat dari kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bengkulu dimana pada tahun 2021, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini memberikan kontribusi sejumlah 7,72 persen dari total PDRB menurut lapangan usaha. Distribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB ADHB lapangan usaha ini merupakan distribusi keempat tertinggi setelah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pengadaan listrik dan gas, dan jasa keuangan dan asuransi.

PDRB ADHK kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 yang semula 0,45 persen meningkat menjadi 3,11. Secara lengkap kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Grafik 2. 20

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 (%)



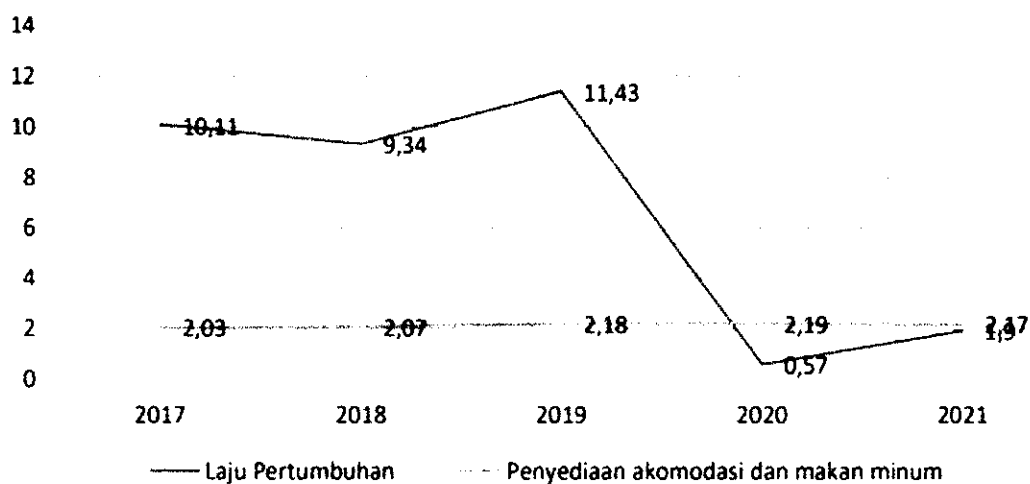
Sumber : PDRB Kota Bengkulu menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

2.3.3.2. Pariwisata

Sumber daya Pariwisata di Kota Bengkulu merupakan potensi ekonomi yang harus terus dikembangkan dan ditingkatkan sehingga mampu menjadi peluang perekonomian bagi masyarakat. Objek wisata Kota Bengkulu antara lain berupa wisata alam yaitu : (1) Pantai Panjang , (2) Pantai Tapak Padri, (3) Pantai Jakat, (4) Danau Dendam Tak Sudah, sedangkan wisata budaya dan sejarah di Kota Bengkulu antara lain : (1) Perayaan Tabot, (2) Benteng Marlborough, (3) Rumah Pengasingan Bung Karno dan Rumah Fatmawati, (4) Makam Sentot Alibasyah, (5) Mesjid Jamik, (6) Monumen Tomas Parr & Hamilton. Kinerja sektor pariwisata ini dalam kontribusi terhadap PDRB dapat dilihat pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang berhubungan dengan Hotel dan restoran. Distribusi PDRB ADHB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang identik dengan kepariwisataan di Kota Bengkulu terus mengalami peningkatan.

Grafik 2.21
Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Dan Laju
Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota
Bengkulu Tahun 2017-2021 (%)

4/11



Sumber : PDRB Kota Bengkulu menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022

Kontribusi sektor pariwisata yang dibaca melalui sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB mengalami penurunan dimana pada tahun 2021, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 2,17 persen dari total PDRB ADHK dengan laju pertumbuhan sebesar 1,90 persen. Peningkatan pengembangan destinasi wisata berkorelasi positif dengan kenyamanan wisatawan yang diwujudkan melalui peningkatan terhadap rata-rata lama menginap wisatawan di Kota Bengkulu. Rata-rata lama menginap wisatawan juga dipengaruhi oleh banyaknya akomodasi hotel dan jumlah destinasi wisata. Pada tahun 2018, Hotel berbintang yang ada di Kota Bengkulu adalah sebanyak 10 Hotel bertambah menjadi 2 Hotel berbintang. Berikut adalah data yang memuat jumlah akomodasi, jumlah kamar dan jumlah tempat tidur yang bisa diakses wisatawan Kota Bengkulu dari tahun 2018-2020 :

Tabel 2.80
Jumlah Hotel, Tingkat Hunian dan Lama Menginap di Kota Bengkulu

Wilayah	Jumlah Hotel					
	Non Bintang			Bintang		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kota Bengkulu	66	74	-	10	12	-
Klasifikasi Hotel	Rata-rata Lama Menginap (Hari)			Tingkat Penghunian Kamar (Persen)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Bintang	1.80	1.84	1.61	58.91	62.31	37.69
Non Bintang	1.30	-	-	20.11	-	-
Keseluruhan	1.24	-	-	25.99	-	-

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2020

Kenaikan jumlah akomodasi hotel berbintang maupun hotel non bintang yang tentunya diikuti dengan peningkatan jumlah kamar dan tempat tidur ini mengindikasikan bahwa Kota Bengkulu memiliki potensi wisata yang baik untuk dikembangkan. Kenaikan jumlah hotel juga berkorelasi positif terhadap serapan tenaga kerja sektor perhotelan. Lama menginap di Kota Bengkulu pada hotel Bintang di Tahun 2019 rata-rata adalah sebesar 1,84 hari atau 2 hari dengan tingkat hunian hotel 62,31 persen.

Penurunan terjadi di tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19, pada tahun 2020 bulan Februari data hunian hotel bintang adalah sebesar 58,41 persen yang merupakan data hunian tertinggi di tahun 2020. Titik terendah dari persentase hunian hotel Bintang di Kota Bengkulu tahun 2020 ada di bulan April. Di tahun 2020, masa Pandemi Covid-19 terjadi penurunan hunian di Hotel Bintang pada bulan Maret 2020 dan mulai naik kembali perlahan di Mei tahun 2020.

Tabel:2.81
Jumlah Wisatawan Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

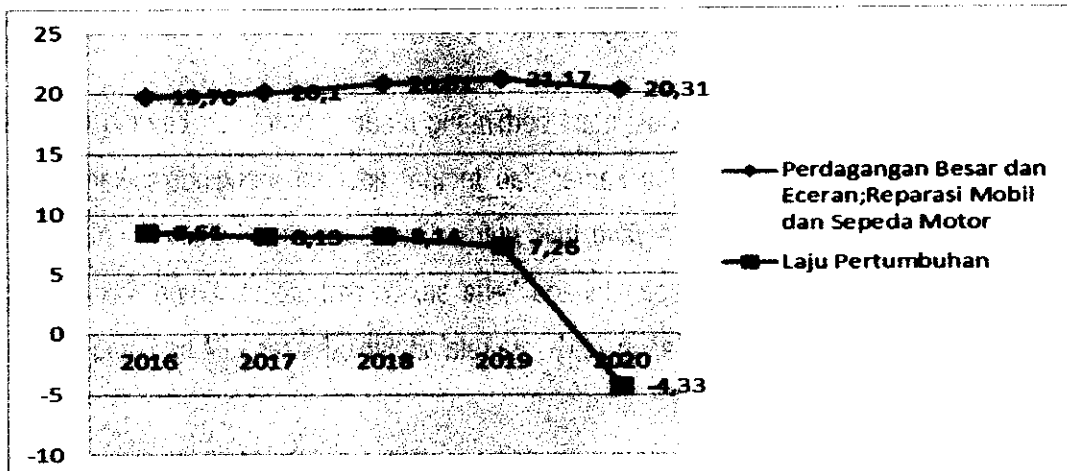
No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wisatawan Nusantara	600.429	690.493	225.553	379.403	
2	Wisatawan Mancanegara	952	1.066	320	348	
Jumlah Wisatawan		601.381	691.559	225.873	379.751	

Sumber : Dinas Pariwisata, 2022

2.3.3.3. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting terhadap kemajuan daerah. Sektor ini masuk dalam salah satu urusan pilihan yang perlu diperhatikan oleh daerah yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor tersier. Indikator dalam melihat kemajuan sektor ini adalah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Capaian kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 22
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Sektor Perdagangan Kota Bengkulu Tahun 2016-2020



Sumber : PDRB Kota Bengkulu menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021

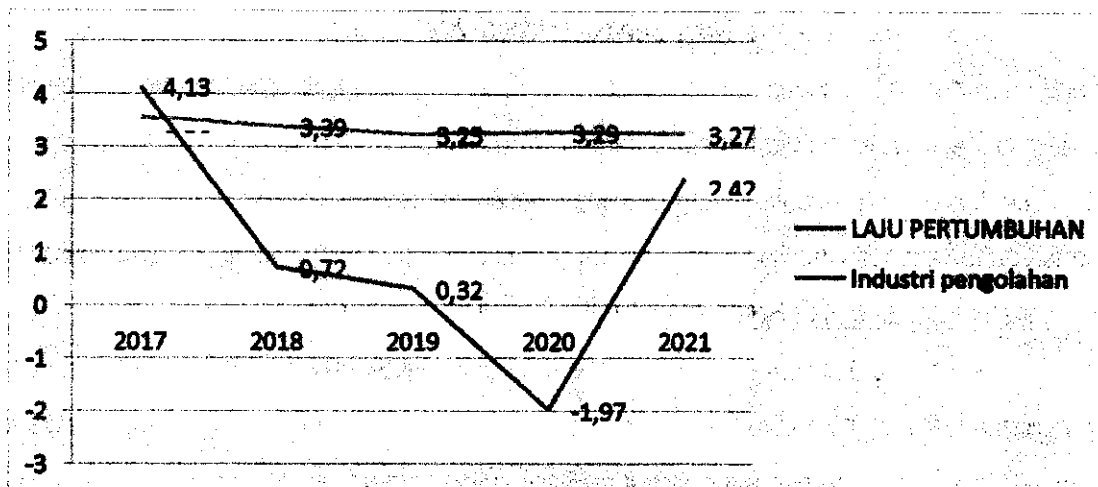
Kontribusi PDRB sektor perdagangan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sumbangan atau peranan sektor ini terhadap perekonomian daerah Kota Bengkulu berjalan optimal. Namun kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi masih dapat ditingkatkan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu: 1) stok dan kelancaran distribusi barang perdagangan yang dipengaruhi oleh kualitas sarana infrastruktur transportasi distribusi barang perdagangan dan stabilitas harga barang pokok dan barang penting, 2) omzet pedagang kecil dan menengah yang dipengaruhi oleh kapasitas SDM pedagang kecil dan menengah, jaringan pemasaran produk perdagangan, sarana prasarana perdagangan dan tertib niaga, kualitas manajemen usaha, akses permodalan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan.

2.3.3.4. Perindustrian

Sektor perindustrian merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat berkembang di Kota Bengkulu. Sektor ini diharapkan dapat bertumbuh dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk. Sektor perindustrian memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Bengkulu dari tahun 2017 sampai 2021 sebagai berikut:

Grafik 2.23
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Bengkulu Tahun 2017-2021

A



Sumber : PDRB Kota Bengkulu menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022

Kontribusi PDRB sektor perindustrian mengalami tren peningkatan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sumbangan sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah Kota Bengkulu berjalan optimal, namun masih bisa ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Faktor terpenting yang harus diperhatikan adalah nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM) yang dipengaruhi oleh kapasitas SDM dan kelembagaan IKM, orientasi pasar terhadap produk olahan perikanan, pengembangan produk unggulan daerah, pengembangan inovasi dan penerapan teknologi tepat guna pengolahan komoditas lokal dan pengembangan sentra-sentra IKM pendukung wisata.

2.3.3.5. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Letak Kota Bengkulu yang berada di pantai barat Pulau Sumatera memberikan keuntungan tersendiri dalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan.

Tabel 2.84
Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Usaha di Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 (Ton)

Jenis Data	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Perikanan (ton)	33.844,05	37.228,45	42.740,97	41.747,65	
Produksi Perikanan Tangkap	29.907,05	32.930	37.540,70	36.027,34	
Produksi Perikanan Budidaya	3.907,05	4.297,75	5.200,27	5.702,31	

Sumber : Data Sekotral Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022

AA.

Produksi perikanan di Kota Bengkulu tahun 2021 sebesar 41.747,65 ton, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 42.740,97 ton, hal ini dikarenakan belum stabilnya sistem perekonomian di kota Bengkulu karena wabah virus covid-19, tetapi keberadaan sumber daya perikanan dan kelautan yang demikian besar merupakan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diketahui kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kota Bengkulu.

Selain produksi perikanan, kesejahteraan nelayan juga menjadi fokus utama yang perlu ditingkatkan. Kurangnya kapasitas permintaan pasar terhadap produk olahan hasil perikanan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan nelayan. Pelaku usaha pemasaran hasil perikanan di Kota Bengkulu dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.83
Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2021

Pedagang besar/perusahaan	6	50
Pedagang pengumpul (gudang)	40	130
Pedagang bermotor	61	61
Pedagang pengecer di PPI	116	174
Pedagang dalam kios pasar	233	300
Pedagang kios pinggir jalan	70	150
Jumlah	526	865

Sumber : Data Sektoral Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022

Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2021 pada Jenis Usaha Pedagang Motor dan Pedagang Dalam Kios Pasar menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2021 pada Jenis Usaha Pedagang Motor perusahaan/kelompok sebesar 61 dan Pedagang Dalam Kios Pasar berdasarkan jumlah pelaku usaha/terlibat dalam usaha(orang) sebesar 300.

Tingkat konsumsi ikan dapat digunakan untuk mengukur kapasitas permintaan pasar terhadap produk perikanan dimana semakin besar konsumsi ikan, maka semakin besar potensi permintaan pasar terhadap produk perikanan. Berikut adalah data mengenai tingkat konsumsi ikan di Kota Bengkulu :

Tabel 2.84
Perkembangan Tingkat Konsumsi Ikan Kota Bengkulu Tahun 2017-2021

Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	45,95	48,22	50,14	50,53	52,20	

Sumber : Data Sektoral Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022

Konsumsi ikan di Kota Bengkulu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami trend peningkatan, dalam kurun waktu lima tahun perkembangan tingkat konsumsi ikan di Kota Bengkulu meningkat sebesar 88,02 persen.

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Urusan penunjang pemerintahan menjadi penopang bagi berjalannya sistem tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bengkulu. Urusan penunjang terdiri dari aspek; perencanaan, penelitian dan pengembangan; kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; pengawasan; serta kesekretariatan. Aspek-aspek tersebut mengawal dan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsifitas.

2.3.4.1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program. Pada tahun 2007, Pemerintah Kota Bengkulu telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2007-2027 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 tahun 2007. Sedangkan di tahun 2018, disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023 melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2018,

42.

sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 85
Dokumen Perencanaan Kota Bengkulu Tahun 2019-2023

1	RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Bengkulu, 2022

2.3.4.2. Sekretariat Daerah

Akuntabilitas kinerja dilihat pula dari capaian nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah kota maupun perangkat daerah. Nilai SAKIP Pemerintah Kota Bengkulu mengalami peningkatan pada tahun 2017, yakni 52,02 dari sebelumnya 50,58 pada 2016. Kenaikan nilai ini belum mampu meningkatkan capaian nilai yang masih CC. Kondisi ini memperlihatkan belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota. Kondisi yang sama juga terdapat pada perangkat daerah, dimana perangkat daerah yang memperoleh SAKIP minimal BB masih fluktuatif. Capaian pada 2017 bahkan mengalami penurunan menjadi 50 persen OPD daripada tahun 2016 yang mencapai 73,81 persen. Persoalan belum optimalnya akuntabilitas kinerja ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan sebagai faktor paling besar yang membentuk kualitas SAKIP, penentuan indikator kinerja utama yang belum berorientasi pada hasil, hingga kualitas pengendalian, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan yang belum optimal. Atas kerja keras perangkat daerah di tahun 2020 dan 2021, Kota Bengkulu berhasil mendapat nilai SAKIP B dengan nilai 60,35 dan 61,14.

Tabel 2.86
Capaian Kinerja Indikator Bidang Pemerintahan Umum Kota Bengkulu
Tahun 2018-2021

No	Jenis Data	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota			B (60,35)		

A

2	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	67,5	73,81	50

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, 2022

2.3.4.3. Sekretariat Dewan

Pada pelaksanaan pemerintahan, Kota Bengkulu memiliki capaian di bidang kesekretariatan dewan. Bidang tersebut dapat ditinjau dari fasilitas dalam perumusan peraturan daerah dan Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pencapaian bidang kesekretariatan dewan Kota Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.87
Capaian Bidang Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2018-2021

No	Jenis Data	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Fasilitasi perumusan peraturan daerah					
	Rancangan Peraturan daerah (Raperda)	12	15	43	20	
	Peraturan Daerah (perda)	6	5	11	15	
2	Reses yang dilaksanakan	2	2	2	2	

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu (2022)

Pada periode dua tahun terakhir, fasilitasi perumusan peraturan daerah di Kota Bengkulu Raperda dan Perda mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 berhasil menetapkan 11 Peraturan Daerah, dan tahun 2021 berhasil menetapkan 15 Peraturan daerah dari 20 Rancangan Peraturan Daerah yang masuk.

2.3.4.4. Pengawasan/Inspektorat

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dapat ditunjang oleh keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat Daerah merupakan aparat pengawasan internal pemerintah yang memiliki peran dan posisi yang sangat strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Capaian kinerja pelaksanaan urusan Pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88
Capaian Kinerja Indikator Bidang Pengawasan Kota Bengkulu
Tahun 2018 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase kasus dan temuan yang diselesaikan					
	Temuan Inspektorat (%)	73,45	73,46	73,14	72,95	
	Temuan BPK RI-Perwakilan Provinsi Bengkulu (%)	56,95	73,78	77,26	80,44	
2	Tingkat/Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	2	2	2	
3	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 DC	3 DC	3	3	

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Bengkulu, 2022

Peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi. APIP Kota Bengkulu telah dapat mendorong penyelesaian kasus temuan sebanyak 73,56 persen pada tahun 2017. Namun, kemudian menurun menjadi 73,45 persen kasus yang dapat diselesaikan pada tahun 2018. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2021 menjadi 72,95 namun terjadi peningkatan sebesar 3.18 persen dengan penyelesaian temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu.

2.3.5 Unsur Pemerintahan Umum

2.3.5.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas Tahun 2018 –2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89
Jumlah Ormas Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

1	Jumlah Ormas Aktif	10	10	10	11	
2	Jumlah Ormas terdaftar	16	16	16	18	

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2022

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah menunjukkan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek tersebut dapat dilihat dari beberapa fokus, yaitu fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim usaha, dan fokus sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah dinilai dari tiga indikator utama, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, Nilai Tukar Petani (NTP) dan pengeluaran konsumsi non-pangan perkapita. Semakin besar nilai ketiga indikator tersebut, maka semakin besar kemampuan ekonomi suatu daerah. Deskripsi data mengenai ketiga indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan dan kebutuhan non makanan. Pengeluaran untuk konsumsi non-makanan di Kota Bengkulu secara umum lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan.

Tabel 2.90
Rata-Rata Pengeluaran Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Tahun 2020

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Pengeluaran
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen Teratas	
Makanan	446,196.00	731,990.00	1,088,080.00	688,988.00
Bukan Makanan	332,241.00	921,906.00	2,716,706.00	1,054,956.00
Jumlah Pengeluaran Kota Bengkulu	778,437.00	1,653,897.00	3,804,785.00	1,734,944.00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu 2021

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani (NTP)

Tabel 2.91
Nilai Tukar Petani Sub Sektor Pertanian Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks yang diterima petani (It)	125,80	129,11	120,10	142,81	
2	Indeks yang dibayar petani (Ib)	133,82	137,51	105,26	107,70	
3	Indeks nilai tukar petani	94,01	93,89	114,10	132,60	

Sumber : Dinas Pertanian, 2022

2.4.1.3. Pengeluaran konsumsi non-pangan perkapita

Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu Tahun 2020 terlihat bahwa Kelompok Komoditas makanan lebih besar dari Kelompok Bukan Makanan hanya pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dengan total pengeluaran perkapita sejumlah 778.437 Rupiah per kapita sebulan. Hal ini berarti bahwa pada kelompok penduduk pengeluaran 40 persen terbawah atau desil 4 memang masih membutuhkan support dari sisi pengeluaran makanan. Sedangkan pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah terlihat bahwa pengeluaran non makanan lebih banyak dari pengeluaran makanan. Pada kelompok 20 persen teratas terlihat pula bahwa konsumsi bukan makanan jauh lebih besar dari kelompok komoditas makanan. Dari total

Pengeluaran 20 persen teratas terlihat bahwa kelompok komoditas bukan makanan pengeluarannya mencapai 71,40 persen dari total pengeluaran.

Untuk rata-rata konsumsi kalori dan konsumsi protein per kapita per sehari Tahun 2020 terlihat bahwa konsumsi tertinggi berada pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas.

Tabel 2.92
Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Konsumsi Protein Per Kapita Sehari Tahun 2020

Uraian	Kelompok Pengeluaran			Total Pengeluaran
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen Teratas	
Jumlah Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari (Kcal)	1,737.39	2,040.29	2,365.10	1,984.16
Jumlah Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Sehari (gram)	50.04	62.83	75.99	60.35

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu 2020

2.4.2. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

Daya saing daerah di fasilitas wilayah/infrastruktur terus menerus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu tidak hanya melalui infrastruktur jalan dan jembatan namun juga pada bidang perhubungan dapat diketahui dari kondisi capaian pada level akses dan kualitas.

Tabel 2.93
Angka Kecelakaan dan Pelanggaran Berdasarkan Rincian Kota Bengkulu Tahun 2015-2019

No	Rincian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kecelakaan (kasus)	101	156			
2	Mati (orang)	27	33			
3	Luka berat (orang)	34	33			
4	Luka ringan (orang)	104	173			
5	Kerugian material (ribu rupiah)	150,000,000	255,270,000			

Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka Tahun 2016-2020

4A.

Kualitas layanan perhubungan di Kota Bengkulu belum terlalu baik. Kondisi tersebut diindikasikan dengan fluktuatifnya jumlah kasus kecelakaan yang terjadi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 terjadi 156 kasus kecelakaan dengan jumlah kematian sejumlah 33 kasus. Peningkatan kasus kecelakaan ini tidak hanya berasal dari faktor layanan perhubungan namun juga bergantung pada kondisi Pemberi isyarat lalu lintas (APIL) yang ada di Kota Bengkulu. Kondisi ini terus ditekan melalui peningkatan sarana prasarana perhubungan terutama APIL yang ada.

2.4.3. Fokus iklim berinvestasi

Daya saing daerah kota Bengkulu jika ditinjau dari fokus iklim berinvestasi, secara terus menerus Kota Bengkulu mengarah pada perbaikan sistem. Dimana saat ini melalui Perangkat Daerah DPMPSTSP sudah dilakukan pelayanan satu pintu dengan menggunakan sistem terpadu melalui aplikasi pelayanan yang tidak hanya memberikan kemudahan bagi yang ingin berinvestasi di Kota Bengkulu namun juga terus dilakukan upaya menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Kota Bengkulu.

Berdasarkan data BPS terlihat bahwa pertumbuhan perusahaan industri besar dan sedang di Kota Bengkulu tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebanyak 71,43 persen dimana tahun 2018 terdapat 7 perusahaan industri besar dan sedang, bertambah 5 menjadi 12 industri di tahun 2019. Selain itu Nilai produksi industri besar dan sedang pada tahun 2018 sebanyak 113 Milyar meningkat menjadi 279 Milyar di tahun 2019.

Kota Bengkulu dengan konsentrasi utama perekonomian pada usaha perdagangan barang dan jasa, untuk investasi di area Pariwisata, sebelum terjadi pandemi Covid-19 juga bertumbuh cukup baik dengan bertambahnya hotel berbintang di Kota Bengkulu dimana pada tahun 2021 terdapat 98 hotel dan penginapan yang tersebar di 9 kecamatan di Kota Bengkulu.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Daya saing daerah Kota Bengkulu dari fokus sumber daya manusia bila dilihat berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia Kota Bengkulu yang secara data merupakan salah satu cara untuk melihat keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Saat ini IPM Kota Bengkulu sudah masuk dalam kategori tinggi dan berada di atas IPM Nasional dan IPM Provinsi Bengkulu. Selain itu, unsur-unsur pembentuk IPM yang merupakan penilaian dari fokus SDM seperti angka harapan hidup, lama sekolah, Angka partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan

laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Bengkulu pada RPD Kota Bengkulu 2024-2026.

2.5. RINGKASAN EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN 2019-2023

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.95
Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023 Kota Bengkulu

No	Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Target di Periode RPJMD				Realisasi di Periode RPJMD				Realisasi Tingkat Capaian (%)			Tingkat Capaian Akhir
				2019	2020	2021	2021	2019	2020	2021	2021	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	BB	B	BB	BB	B	B							
		Peringkat pada Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	30	15	5	10	16	106.6667						
		Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPD, RLPPD, EPPD) Kota Se Indonesia	50	75	70	65	Belum Release	Belum Release							
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	0.42	0.32	0.34	0.37	0.74	0.74	0.841	231	217.6471	227.2973			
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Wtp						
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi	0.08	0	-0.02	-0.04	Belum Release	0	81.69						
4	Meningkatnya keterbukaan dan kualitas pelayanan publik	Peringkat keterbukaan informasi publik	I	III	II	II	I	I	I						
		Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	A	A	A	A	B	B							
		Nilai Kepatuhan penyelenggaraan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan (*Hasil Survey Ombudsman)	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona hijau						
5	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan	Indeks profesionalitas ASN	80	71	73	75	29	29	30.54	41	39.72603	40.72			

No	Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Target di Periode RPJMD			Realisasi di Periode RPJMD			Realisasi Tingkat Capaian (%)			Tingkat Capaian Akhir
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
6	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Persentase Kebijakan Daerah (Perda/Perkada) yang serasi dengan kebijakan Provinsi dan Pusat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Meningkatnya ketentraman dan keterlibatan masyarakat	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	85	70	85	75	75	75	100	107	107.1429	117.6471	
8	Meningkatnya Akses dan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Mantap	90	82.98%	85	86	85.34	80.86	98.57	10284	95.12941	114.6163	
9	Meningkatnya kualitas perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar kelayakan	85	65	70	75	65	65	65		92.85714	86.66667	
10	Meningkatnya akses perumahan dan pemukiman layak huni	Angka keselamatan lalu lintas	101	170	168	140	170	170	175	100	101.1905	125	
		Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0	0.0023	0.0017	0.0011	0.0053	0.0003	0.0013	230	17.64706	118.1818	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	15.31	10.49	11.81	13.07	87.99	87	95.92	839	736.6638	733.8944	
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan akses sanitasi layak	90	82	83	84	87.57	67	99.1	107	80.72289	117.9762	
11	Meningkatnya kualitas bangunan dan gedung	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK)	100	60	15	80	60	15	100	100	100		
		Persentase bangunan sesuai standar	95	60	65	74	0	98	87.36	0	150.7692	118.0541	
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukan	95	60	65	74	70	75	85	117	115.3846	114.8649	

No	Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Target di Periode RPJMD				Realisasi di Periode RPJMD				Realisasi Tingkat Capaian (%)			Tingkat Capaian Akhir
				2019	2020	2021	2021	2019	2020	2021	2021	2019	2020	2021	
12	Meningkatnya akses telekomunikasi dan internet	SST (Satuan Sambungan Telepon)	25.982	24.494	24.866	25.328	30.265	33.920	124	136411.2	0				
13	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana		108.88	0.53	104.36	108.8	106.62	100	20116.98	0				
14	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan RTH	Indeks Kualitas Air	68	50.5	63	64	43.33	38	45	60.31746	70.3125				
		Indeks Kualitas Udara	96	95	95	96	93.67	86.83	88.1	91.4	91.77083				
		Persentase RTH terhadap luas wilayah	9.2	9.15	9.16	9.17	46.16	45.44	9.2	496.0699	100.3272				
15	Meningkatnya sistem pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang tertangani	70	46.5	48	53	59.77	58.41	129	121.6875	110.2075				
16	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kebudayaan	Indeks Pendidikan	79.57	78.97	79.12	79.27	78.97	99.69	100	125.9985	126.1511				
		Persentase warisan budaya yang dilestarikan	100	82.71	88.87	89.11	75	108.11	91	121.6496	121.322				
		Usia Harapan Hidup	72.9	71.9	72	72.2	70.5	70.13	98	97.40278	97.22992				
17	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penghargaan Kota Sehat	Swasti Saba Wistara	Swasti Saba Wistara	Swasti Saba Wistara	Swasti Saba Wistara	Swasti Saba Wistara	tahapan verifikasi	Tidak tercapai						
18	Meningkatnya prestasi Olahraga di Kota Bengkulu	Peringkat Kota Bengkulu di PORPROV Bengkulu	Juara Umum	Juara Umum	Juara Umum	Juara Umum	Juara Umum	tidak diadakan	tidak diadakan						
19	Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda yang berprestasi dan mandiri TK.Provinsi	55	11	25	35	15	kegiatan tidak dilaksanakan	136	454.2857					
20	Meningkatnya kesehatan reproduksi	Laju Pertumbuhan Penduduk	95	90	92	93	1.39	1.39	2	1.51087	203.2258				
22	Meningkatnya keberdayaan PMKS	Persentase PMKS Mandiri	1.5	0.8	1	1.16	5.2	1	5.2	100	448.2759				
		Rasio PMKS terhadap jumlah penduduk	0.057	0.074	0.071	0.068	0.06	0.069	81	97.1831	88.23529				

No	Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Target di Periode RPJMD			Realisasi di Periode RPJMD			Realisasi Tingkat Capaian (%)			Tingkat Capaian Akhir
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
23	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	3	3	3	3	4	tidak ada	4	133		133.3333	
24	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Penghargaan Kota Layak Anak Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Muda 23.18	Pratama 20.38	Pratama 20.93	Muda 21.58	Pratama 15.01	Pratama 15.01	Pratama 24.974.920	74	71.71524	115731788.7	
26	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	5.49	3.67	3.89	4.17	5.95	5.95	15.833.190	162	152.9563	379692805.8	
27	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil	10	2	4	6	2.4	2.4		120	60	0	
28	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap PDRB	4.73	2.78	3.18	3.63		2.77	4.8	92	46.16667	0	
										0	0	132.2314	

No	Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD	Target di Periode RPJMD				Realisasi di Periode RPJMD				Realisasi Tingkat Capaian (%)			Tingkat Capaian Akhir
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	
29	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perikanan terhadap sektor pertanian	4.95	4.82	4.86	4.89		7.73	75.68	4.8		160	1557.202	98.15951	
30	Meningkatnya realisasi nilai penanaman modal	Nilai investasi (T)	1.32	1.087	1.142	1.199		1.809	1.809	0.834		166	158.4063	69.55796	
31	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	8.25	8.05	8.1	8.15		7.8	7.54			97	93.08642	0	
32	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	50.6		50.69	80		50.6	64.37				126.9876	0	
33	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5	6.3	6	5.7		5		6.34		79	0	111.2281	

A.

Tabel. 2.97
Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah Pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023 Kota Bengkulu

1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	B	BB	BB	BB	belum release	belum release	CC		
2	Angka konflik sosial	4	6	5	2	2	33.33333333	33.33333333	2	40	
3	Angka Kecelakaan	110	143	128	NA	156				121.875	
4	Rasio Permukiman Layak Huni	0	0.101	0.076	0.107	0.107	105.9405941	140.7894737	0.107	214	
5	Peningkat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.95	1.75	1.8	1.85	5	5	285.7142857	1.68	90.81081081	
6	Nilai SAKIP	bb	B	BB	BB	B	B		B		
7	Peningkat pada Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	50	30	15	5	15	15 besar				
8	Indeks Resiko Bencana	99.84	108.88	106.62	104.36	108.8	108.8	99.92652461	147.5	141.3376773	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70	67	69	70	59.26	59.26	88.44776119	85.88405797	0	
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79.57	78.97	79.12	79.27	79.67	79.67	100.8864126	80.54	101.6021193	
11	Angka Kemiskinan	16.68	18.68	18.18	17.68	18.09	18.09	96.84154176	17.89	101.1877828	
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	80	76	78	79	80.35	80.35	105.7238842	77.57	98.3164557	
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	7	5.97	6.3	6.63	5.43	5.43	90.95477387	3.47	52.33785822	
14	PDRB ADHB (dalam Juta rupiah)	31806071	21.279.176	23.528.466	26015514	23200950	2350181930	109.0312426	24974920	96.00010209	
15	PDRB ADHK (dalam Juta rupiah)	18159969	14.599.978	15.418.528	16282971	1534193	1530148850	10.50818707	15833190	97.23772154	
16	PDRB Per Kapita Per Bulan (dalam Juta Rupiah)	6.59	4.73	5.14	5.58	5.2	5.2	109.9365751		0	
17	Laju Inflasi	2.02	3.26	2.95	2.84	2.91	2.91	89.26380368	2.42	91.66666667	
18	Indeks Gini	0.32	0.37	0.36	0.34	0.39	0.39	105.4054054	0.38	111.7647059	

33	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	Persen	15.31	10.49	11.81	13.07	87.99	87.99	87.99	95.92	838.7988561	745.0465707	733.8944147	
34	Persentase Penduduk yang Mendapatkan akses sanitasi layak	Persen	90	82	83	84	87.57		87.54	99.1	106.7926829	105.4698795	117.9761905	
35	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100	60	80	80	60	60	60	100	100	75	125	
36	Persentase bangunan sesuai standar		95	60	65	74	0	0	0	87.36	0	0	118.0540541	
37	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peraturan		95	60	65	85	70	70	70	100	116.5666667	107.6923077	117.6470588	
38	SST (Satuan Sambungan Telepon)		25.982	24.494	24.866	25.328	30.265	33929			123.5608721	136.4473578	0	
39	Indeks Kapasitas Daerah		0.65	0.5	0.53	0.55	0.48	0.53			96	100	0	
40	Indeks Kualitas Air		68	50	63	64	43.33	38		45	86.66	60.31746032	70.3125	
41	Indeks Kualitas Udara		96	95	95	96	93.67	86.83		88.1	98.6	91.4	91.77083333	
42	Persentase RTH terhadap luas Wilayah	Persen	92	9.15	9.15	9.2	46.16	46.16		100	504.4808743	504.4808743	1086.956522	
43	Persentase volume sampah yang Tertangani		70	46.5	46.5	58.41	59.77	59.77		99	128.5376344	128.5376344	169.4915254	
44	Indeks Pendidikan		79.57	78.97	78.97	79.27	78.97	78.97		100	100	100	126.1511291	
45	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	100	82.71	82.71	108.11	75	75		100	90.67827349	90.67827349	92.49838128	
46	Usia Harapan Hidup	Persen	72.9	71.9	71.9	72.2	70.5	70.5		70.2	98.05285118	98.05285118	97.2299169	
47	Penghargaan Kota Sehat		swasti saba wistara	swasti saba wistara	ati Sabha Wist	tidak tercapai	swasti saba wistara	Swasti Sabha Wistara						
48	Pemngkat Kota Bengkulu di PORPROV Bengkulu		juara umum	juara umum	Juara Umum	tidak dilaksanakan	juara umum	Juara Umum						

A.

49	Persentase pemuda yang berprestasi dan mandiri TK. Provinsi	55	11	11	35	15	15	159	136.3636364	136.3636364	454.2857143	
50	Laju Pertumbuhan Penduduk	95	90	90	93	1.39	1.39	1.89	1.544444444	1.544444444		
51	Persentase PMKS Mandiri	Persen	1.5	0.8	1.16	5.2	5.2	5.2	650	650	448.2758621	
52	Rasio PMKS terhadap jumlah Penduduk	0.057	0.074	0.074	0.068	0.06	0.06	0.06	81.08108108	81.08108108	88.23529412	
53	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan Perempuan	3	3	3	3	4	4	4	133.3333333	133.3333333	133.3333333	
54	Penghargaan Kola Layak Anak	MUDA	pratama	Pratama	muda	pratama	Pratama	pratama				
55	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	23.18	20.38	20.38	21.58	15.01	15.01	24974920	73.65063788	73.65063788	115731788.7	
56	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industry pengolahan terhadap PDRB	5.49	3.67	3.67	4.17	5.95	5.95	15833190	162.1253406	162.1253406	379692805.8	
57	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	10	2	2	6	2.4	2.4		120	120	0	
58	Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil	10	3	3	7	2.77	2.77		92.33333333	92.33333333	0	
59	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap PDRB	4.73	2.78	2.78	3.63				0	0	0	
60	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor pertanian terhadap sektor Pertanian	4.95	4.82	4.82	4.89	7.73	7.73	4.8	160.373444	160.373444	98.1595092	

A.

61	Nilai investasi (T)		1.32	1.087	1.087	1.199	1.809	1.809	0.834	166.4213431	166.4213431	69.55796497	
62	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		8.25	8.05	8.05	8.15	7.8	7.8		96.89440994	96.89440994	0	
63	Indeks Ketahanan Pangan		50.6	50.71	50.71	50.67	50.6	50.6		99.78308026	99.78308026	0	
64	Tingkat Pengangguran Terbuka		5	6.3	6.3	5.7	4.29	4.29	6.34	68.0952381	68.0952381	111.2280702	

4 N.

Tabel 2.98
Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Program Pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023 Kota Bengkulu

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Target	Rp	2021	2022		2023		2021	2022		2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Rp	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Dinas Pendidikan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			
			Target	Rp	2021		2022		2021		2022	
					K	K	K	K	K	K	K	K
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Usia Harapan Hidup	71,77	72,9	1,124,940	72,2	72,5	72,9	100	100	100	100	
	Penghargaan Kota Sehat	Swasti Saba Wistara	Swasti Saba Wistara		Swasti Saba Wistara	Swasti Saba Wistara	Swasti Saba Wistara		Swasti Saba Wistara		Swasti Saba Wistara	
	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	94,39	100	5,468	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Kunjungan Ibu Nifas (KE3)	93	98		86	97	98	100	100	100	100	
	Persentase Deteksi Dini Ibu Hamil Resiko Tinggi Oleh Tenaga Kesehatan	94	100		97	98	100	100	100	100	100	
	Cakupan Pertolongan persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	95	100		98	99	100	100	100	100	100	
	Cakupan Penanganan Komplikasi Obstetri Maternal	64	75		70	72	75	100	100	100	100	
	Cakupan Penanganan Komplikasi Pada Ibu Hamil	64	75		70	72	75	100	100	100	100	
	Persentase Kunjungan Ibu Hamil minimal 4 kali (K4)	84,06	88		84	86	88	100	100	100	100	
	Cakupan imunisasi dasar lengkap	3	84	269	80	82	84	100	100	100	100	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan kunjungan Neonatus Lengkap	98	100		99	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Pelayanan Neonatal Komplikasi	97	100		98,5	99	100	100	100	100	100	
	Cakupan Pelayanan Kesehatalan Anak Balita	59,00%	74		68%	71,00%	74	100	100	100	100	
	Cakupan Penanganan Siswa Sekolah Dasar	88,64%	100		87%	98,00%	100	100	100	100	100	
	Cakupan Penanganan Siswa Sekolah Menengah Pertama	85,00%	100		94%	96,00%	100	100	100	100	100	
	Persentase kasus filariasis yang ditangani	0%	65%	4,552	65%	65%	65%	100	100	100	100	
	Persentase Kesembuhan TB	94,23%	100%		100%	100%	100%	100	100	100	100	
	Persentase Penemuan Kasus TB Anak 0 - 14 Tahun	40,30%	75%		75%	75%	75%	100	100	100	100	
	Persentase Penemuan Kasus TB Anak 0 - 14 Tahun	5,90%	12%		9%	10%	12%	100	100	100	100	
	Skriming HIV di Populasi Kunci	100%	100%		100%	100%	100%	100	100	100	100	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Ibu Hamil yang di Skriming HIV, Malaria, Hepatitis B	50%	70%		60%	65%	70%	100	100	100	100	

4 A.

Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
			Target	Rp	2021		2022		2023		2021		2022		2023	
					K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Rp
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Cakupan pelayanan orang dengan Diabetes Melitus	57.9	100	834	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu	0.05	0.5	1.442	0.3	0.4	0.5				100	100	100	100	100	
	Persentase Usia produktif mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Sekolah melaksanakan Kawasan Tanpa rokok	5	25		15	20	25				100	100	100	100	100	
	Prevalensi Hipertensi pada usia diatas 15 tahun	25.5	23.5		24.5	24	23.5				100	100	100	100	100	
	Prevalensi Merokok pada penduduk usia dibawah 18 tahun	5.9	5.5		5.7	5.6	5.5				100	100	100	100	100	
	Persentase penemuan penderita gangguan jiwa	2	5		3	3.5	5				100	100	100	100	100	
	Persentase penemuan penderita gangguan jiwa berat	0.5	2		1.2	1.6	2				100	100	100	100	100	
	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	100%	100%	6,815	100%	100%	100%				100	100	100	100	100	
	Persentase SDM yang terlatih	50	79	740	65	70	79				100	100	100	100	100	
Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar	70	90		80	85	90				100	100	100	100	100	
	Cakupan ketersediaan obat dan perbekal pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar	70%	95%	10,106	85%	90%	95%				100	100	100	100	100	
	Cakupan ketersediaan obat dan perbekal pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	65	100	11,618	100	100	100				100	100	100	100	100	
	Cakupan kunjungan Neonatal pertama	97.68%	100%	131	98.50%	99%	100%				100	100	100	100	100	
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Warga	Persentase pelayanan yang diberikan terhadap permintaan pelayanan Jemput sakit pulang sehat	90	90	1,846	90	90	90				100	100	100	100	100	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Pasien Masyarakat Miskin	100%	100%	6,079	100%	100%	100%				100	100	100	100	100	
Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase Cakupan Peserta JKN	100%	100%	61,790	100%	100%	100%				100	100	100	100	100	
	Persentase TPM memenuhi syarat Obat dan Makanan	50%	85%	337	75%	80%	85%				100	100	100	100	100	

A.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
								2021		2022		2023	
			Target	Rp	2021	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	91	98	82.884	93	95	98	100	100	100	100		
	Persentase peningkatan pelayanan lansia	89,50%	100%	359	96%	98%	100%	100	100	100	100		
	Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan	51,00%	60%		57%	58%	60%	100		100			
	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Lanjut Usia	25,00%	100%		70%	80%	100%	100		100			
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan	Persentase Balita Gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100	100	1.105	100	100	100	100	100	100	100		
	Persentase Posyandu Aktif	33,63%	75%	1.812	65%	70%	75%	100	100	100	100		
	Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS	75%	100%		85%	90%	100%	100		100			
	Persentase Kelurahan STBM	13,40%	100%	5.576	60%	80%	100%	100	100	100	100		
Program Penguatan Lingkungan Sehat	Cakupan penduduk dengan Akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas	86%	100%		96%	99%	100%	100		100			
	Rasio sarana prasarana pelayanan kesehatan Puskesmas yang baik	60%	90%	82.884	75%	80%	85%	100	100	100	100		
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,82	79,72	838.289	79,27	79,42	79,57	100	100	100	100		
	Usia Harapan Hidup	71,77	72,9	-	72,2	72,5	72,9	100	100	100	100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Perorangan Dan Upaya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Penghargaan Kota Sehat	Swasti Saba Wisata	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW		SSW			
	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Terpenuhi				100%	100%							
	Persentase Mutu SDM Kesehatan Meningkat				100%	100%							
	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Memiliki Izin				100%	100%							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
					Target	Rp	K	K	K	Rp	2021		2022		2023	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	persentase kapasitas SDM meningkat						100%	100%			K	K	K	K	K	Rp
RS HD																
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78.82	79.72	838,289	78.97			149,085	181.831	189,445	100	100	100	100	100		
Usia Harapan Hidup	71.77	72.9	745,984	71.9			27,500	50,000	58,500	100	100	100	100	100		
Penghargaan Kota Sehat	Swast Saba Wistara	Swast Saba Wistara		SSW						SSW				SSW		
Jumlah Gedung, alat kesehatan dan obat-obatan yang diadakan pelayanan BLUD	5		126,500	5			10,000	32,000	40,000	100	100	100	100	100		
Persentase SDM yang terlatih	90		75,000	100			15,000	15,000	15,000	100	100	100	100	100		
Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar	50	79	740	50			0	0	0	0	100	100	100	100		
Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar	70	90		70							100	100	100	100		
Cakupan ketersediaan obat dan perbekas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	65	100	11,618	100			2,500	3,000	3,500	100	100	100	100	100		
Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terleksana		100	283,685				70,145	46,091			100	100	100	100		
Cakupan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang Terpenuhi		100	248,321				12,250	4,815			100	100	100	100		
Dinas Perumahan dan Permukiman																
Rasio Permukiman Layak Huni		0.872		390,155			0.05	0.025	0	100	100	100	100	100		
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh		0.0029	0	122,413			0.0011	0.0005	0	100	100	100	100	100		
Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman		9.65%	15.31%				13.07%	14.27%	15.31%	100			100			

Usaha/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			
					2021		2022		2021		2022	
			Target	Rp	K	K	K	K	Rp	K	Rp	K
	Persentase penduduk yang mendapatkan akses sanitasi layak (Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK))	80	90		84	87	90	100		100		
		50	100		80	90	100	100		100		
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah rusak diperbaiki	31,52	62,1	4.469	0	0	62,1	0	0	0	0	
	Persentase rumah MBR rusak yang diperbaiki	10	50	410	0	0	35	0	0	0	0	
Program Lingkungan sehat perumahan	Backlog kepemilikan	75	100	1.304	0	0	5	0	0	0	0	
	Persentase Penanganan Kumuh yang terakomodir	10	14	116.230	0	0	14	0	0	0	0	
Salipol PP												
	Angka konflik sosial	3	4	4817	5	5	4	100	100	100	100	
	Persentase perda dan perkara yang ditekankan	-	85	4.817	100	85	85	117.647059	100	100	100	
	Persentase pelanggaran K3 yang dilangani	100	100	730	100	100	100	100	100	100	100	
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan patroli Salipol PP	48 kali	104 kali	871	72 kali	96 kali	104 kali	0	100	0	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan	Cakupan petugas lrmas per 1000 penduduk	1	1	990	1	1	1	100	100	100	100	
	Persentase Poskaming aktif	58	66		62	64	66	100		100		
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat(Pekat)	Persentase kasus pekat yang dilangani	0%	90%	172	80%	85%	90%	100	100	100	100	
	Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak	75%	85%	183	82%	84%	85%	100	100	100	100	
Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase perda dan perkara yang ditekankan				100	100						
	Persentase pelanggaran K3 yang dilangani				100	100						
Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Cakupan patroli Salipol PP				365	304						
	Cakupan petugas lrmas per 1000 penduduk				1	1						

AA.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
					2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			Target	Rp	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Rp
	Persentase pos kamling aktif				62	62										
Kegiatan :	Persentase penanganan gangguan ketertarikan dan ketertarikan umum				100	100										
Penanganan gangguan ketertarikan dan ketertarikan umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota																
Sub kegiatan :	Jumlah penertiban				270 kali	60 kali										
Pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertarikan umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan																
Penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertarikan umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kasus massa					0											
Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertarikan dan ketertarikan umum																
DPKP																
	Indeks Resiko Bencana	111.14	99.84	32063	104.36	102.1	99.84	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks Kapasitas Daerah	0.48	0.65	32,063	0.55	0.5	0.65	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Peningkatan kegiatan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rasio jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 30-5.000 liter pada WMM terhadap jumlah/luas pemukiman kebakaran	25	75	4.514	55	60	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	80			95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

A.

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
					2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			Target	Rp	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Rp
	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	13			35	45	60				100	100	100	100		
	Persentase evakuasi bahaya kebakaran	86			35	45	60				40.2298851	100	51.13636364	100		
BPSD																
	Indeks Resiko Bencana	111.14	99.84	32063	104.36	102.1	99.84				100	100	100	100		
	Indeks Kapasitas Daerah	0.48	0.65	32.063	0.55	0.6	0.65				100	100	100	100		
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase kekruhan langguh bencana	2.98	14.9	6.446	8.94	11.92	14.09				100	100	100	100		
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase bangunan terdampak bencana yang direhabilitasi	5	30%	7.828	15	20	25				100	100	100	100		
Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	Persentase penyediaan peralatan dan bahan pangan tepat waktu	45 menit	20 menit	13.275	35 menit	30 menit	25 menit				0	100	0	100		
Program Penanggulangan Korban Bencana	Persentase Penanggulangan Korban Bencana				95.36	29.61	100						29.6079678			
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota															
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian risiko Bencana yang dilegalkan															
Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana															
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				95.16	19.52							19.618278			
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang tersusun															
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana					0										

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
			Target	Rp	2021		2022		2023		2021		2022		2023	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota			87.21	0											
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun petugas Bencana															
Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana			90.41	67.04											
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA), Pelatihan kaji jitu pasca bencana yang dilaksanakan, Rencana rehab dan rekon pasca Bencana (R3P)				99.4											
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC/ Saigas PB yang dikembangkan kapasitas teknik dan manajerialnya			93.33	17.59											
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi															
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			100	81.47											
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pusdalops PB Kota Bengkulu yang beroperasi			96.41	61.12											
Penyediaan logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik untuk kawasan rawan bencana			99.6	99.82											
Dimas Sosial	Angka Kemiskinan	19.18	16.68	7271.8	17.68	17.18	16.68	0	0	0	0	0	0	0	0	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			
					2021		2022		2021		2022	
			Target	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Persentase PMKS Mandiri	0.6	1.5	7271.8	1.16	1.33	1.5	0	0	0		
	Rasio PMKS terhadap jumlah penduduk	0.074	0.057		0.088	0.063	0.057		0			
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos	Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	17000	15000	2,453	16000	15500	15000	482455	0	0		
Program Pemberdayaan Kelambagaan Kesos	Jumlah lembaga kesos yang diberdayakan	32	192	553	32	32	32	0	0	0		
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terbiasa	175	1050	1,138	175	175	175	0	0	0		
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS yang tertangani	17,000	15,000	967	16,000	15,500	15,000	0	0	0		
Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit Sosial (Eks Narkotika, PSK, Narkotika dan Penyakit Sosial Lainnya)	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang terbiasa	100	900	647	200	250	300	0	0	0		
Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang dibina	500	2,250	431	550	575	600	0	0	0		
Program Pengelolaan Anak Pemukiman	Jumlah TPU yang terkebla	3	16	1,083	3	3	3	0	0	0		
Diinas Tenaga Kerja												
	Indeks Gini	0.37	0.32	0.32	0.34	0.33	0.32	100	100	100		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.5	5	3,105	6.4	0	0	100	0	0		
Program Peningkatan kesempatan kerja	Persentase peningkatan wirausaha di bidang pariwisata, industri dan jasa	20%	30%	892	25%	26%	0%	100	100	100		
Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja terdidik	20%	47%	785	1,40%	2,91%	0%	100	6.47	100		
	Persentase kasus penyelesaian hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	61,69%	78%	608	50%	55%	0%	100	75.3	100		
	Persentase kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan	27,7%	45%	820	87%	77%	0%	100	191.428571	208.1081081		

AN.

Usan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melakui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			
			Target	Rp	2021		2022		2021		2022	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
DP3AP2K8												
Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	NA	NA	NA	40		40					
Program Peningkatan kualitas keluarga	Persentase Keluarga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	NA	NA	NA	45		50					
Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan pemerataan	jumlah kebijakan tentang peningkatan kualitas anak dan pemerataan yang disahkan	3	8	989	6		7		100	100	100	100
Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	persentase PKK aktif	55	75	1520	65		70		100	100	100	100
Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat	NA	NA	NA	4,2		4,2					
Program Pemberdayaan Dharma Wanita dan GOW	persentase DW aktif dalam pembangunan persentase GOW aktif dalam pembangunan	75	100	1982	90		95		100	100	100	100
Diras Pertanian					90		95		100	100	100	100
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,64	7	173516,32	6,83		6,97		100	100	100	100
	PDRB ADHB (dalam juta rupiah)	19.244,915(	31806070,8		26015514,1		28765452,93		100	100	100	100
	PDRB ADHB thn.2017 data statistik 2018)											
	PDRB ADHB (dalam juta rupiah)	13.824,883(	18159969		16282970,9		17195878,8		100	100	100	100
	PDRB ADHB thn.2017 data statistik 2018)											
	PDRB Per Kapita Per Bulan (dalam Juta Rupiah)	4,35	6,59		5,58		6,07		100	100	100	100
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	8,03	8,25	12,641	7,72		0		0	0	0	0
Program Penyediaan dan	Produksi padi	8,554	7,285	333	5,707		3,654		85,985385	52,52263907	38,4057871	

A.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
			Target	Rp	2021	K	K	2022	K	K	2021	K	Rp	K	Rp	2023
Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi ubi kayu	3.214	3.351		1.750	1.352		53.160.0832			39.988.16918					
	Produksi jagung	927	1.070		108	55		10.343.5407			5.1837.88578					
	Produksi Ubi Jalar	109	131		69	128		54.6			100					
	Produksi daging sapi	79.88	99	336	102	52		112.087912	179.104478	54.73684211	15.0684932					
	Produksi daging kambing	25.45	30	336	22	7		78.5714286	0	24.13793103	0					
	Produksi daging ayam	36	44	470	40	65		95.2380952	0	151.1627907	0					
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana pertanian	Penurunan tingkat serangan OPT	5	10	330	0	0		0	0	0	0					
	Rehab jaringan irigasi tersier	0	2.500	5.000	0	0		0	0	0	0					
	Facilitasi bermodalan usaha sektor pertanian	0	25	500	0	5		0	0	0	100					
	Kelompok tani penggunaan alisnitan pra panen sektor pertanian	0	50	400	45	40		90	0	0	80					
	Kelompok tani pengguna pupuk bersubsidi	50	50	400	20	15		40	0	0	30					
	Persentase standarisasi produk hasil olahan hasil pertanian	74	100	250	0	0		0	0	0	0					
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase sertifikasi unit usaha Peternakan	21.42	100	404	7.5	7.14		52.5210084	0	50	31.4431818					
	Persentase peningkatan pencegahan dan penanggulangan ternak	50	100	1.386	50	60		100	10.625	120	0.5625					
Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kemampuan kelas kelompok tani kelas "anjul"	88	118	2.496	15	98		14.1509434	7.15667311	87.5	24.1779497					
	Indeks Ketahanan Pangan	50.71	50.6	1.928	67.24	0		132.701796	36.8286445	0	0					
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketrampilan Petani	Ketersediaan pangan utama	1.12	3.07	512	1.54	0.94		51.1627907	18.1818182	30.81967213	18.8363636					
	Stabilitas harga pangan	13	13	570	13	13		100	0	100	0					
	Peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat (Skor PPH Kongsumi)	79.2	8020%	515	85.5	82.5		107.142857	124	103.125	211.8125					
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase sertifikasi produk pangan segar asal tumbuhan	0	15.00	331	2	1		65.6666667	0	33.33333333	10.2142857					
Dinas Lingkungan Hidup																
	IKLH	67	70	43.127	70	70		100	100	100	100					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
					Target		Rp		2021		2022		2023		2023	
									K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Indeks Kualitas Air	50	68	12,829					64	65	67	100	100	100		
	Indeks Kualitas Udara	95	96						96	96	96	100	100	100		
	Persentase RTH terhadap luas wilayah	9.14	9.2						9.17	9.18	9.19	100	100	100		
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kausakap Lingkungan	Cakupan air limbah yang dikelola	1	7	5,237					1	2	2	100	100	100		
Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (Kerati)	Indeks Pencemaran Udara	0-51	0-51	2,552					0-51	0-51	0-51	0-51	100	100		
	Persentase penambahan luas RTH	7.09	20%	5,040					1:05	2	1:05	100	100	100		
	Persentase volume sampah yang tertangani	45.69	70	26,718					53	60	65	100	113,211,459	100	113,193,968	
Program Pengelolaan Sampahan	Persentase peningkatan fasiltas pengurangan sampah	15	26	26,618					24	26	26	100	100	100		
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Rekomendasi pengajuan izin TPS LB3 dalam pengendalian B3 dan Limbah B3 serta Terkontrolnya limbah beracun dan ramah lingkungan	70	100	100					65	65	65	87	100	87	100	
DISDUKCAPIL																
	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	BB	2,750					BB	BB	BB	BB	100	BB	100	
	Peningkat keterbukaan informasi publik	III	I	15,687					I	I	I	I	100	I	100	
	Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	B	A						A	A	A	A		A		
	Nilai Kepatuhan penyelenggaraan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan ("Hasil Survey Qmbustman)	Zona Hijau	Zona Hijau						Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau		Zona Hijau		
Program Penataan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki e-KTP	90	99	14,777					97.53	98	99	102,663,158	51,943,4629	100	100	
	Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-tak terlingga	30.77	75	390					48.37	70	75	75,374,0458	10	100	100	
	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0-18 Tahun	84.33	98	300					89.67	90.75	98	100	13,333,3333	100	100	
	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	15	75	220					42.59	60	75	85.18	0	100	100	
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki e-KTP								97.53	98.33		102,663,158	97.83			

A.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						
			Target	Rp	2021		2022		2023		2023		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)				42.59		85.18								
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-tak terlingga				49.37		75.3740458	99.29							
	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0-18 Tahun				89.67		0								
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Dokumen Penyajian Data Kependudukan Skala Kota				100		78.6038111								
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat						0								
Dinas Perhubungan															
	Angka Kecelakaan	187	110	801.796	128	110	100	100	100	100	100	100	100		
	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar kelayakan	60%	85%	205.815	75%	85%		100	100	100	100	100	100		
	Angka keselamatan lalu lintas	250	101		140	147	101			100					
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di gant Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan	65	100	4.000	85	65	0	100	69.1162791	72.22222222	100				
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan diganti Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Arus orang/barang melalui terminal	1000	15.000	20.390	-	-	0	0	0	0	0	0	0		
Program Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Utama (LPJU) diganti Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan LPJU	40	50	110.000	10	10	0	100	100	100	58.0428571				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
					2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			Target	Rp	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Rp
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ diganti Program	Persentase fasilitas keselamatan perhubungan dalam kondisi baik	75	100	26,925	85	85	0	0	100	0	94.44444444	38.8888889				
			100		75	75	0	0	100		83.33333333					
			100	27,200	85	75	0	0	100	34.4827586	83.33333333	4.63793103				
Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor diganti Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diganti Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase angkutan yang dibina	75	100	6,300	85	66	0	0	100	31.0344828	73.33333333	8.05882353				
					90	70	0	0	100		73.68421053					
			451	2,250	10	10	0	0	100	60	100	100				
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan diganti Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase pelayanan perhubungan	5	100	8,750	85	75	0	0	100	16.1290323	83.33333333	100				
					90	90	0	0	100		94.73684211					
Program Peningkatan dan Penguasaan Lalu Lintas diganti Program KOMINFO	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	BB	268,421	BB	BB	BB	BB	BB	100	BB	100				
			I	51,391	I	I	I	I	I	100	I	100				
			A		A	A	A	A	A		A					
Program Peningkatan dan Penguasaan Lalu Lintas diganti Program KOMINFO	Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	B	Zona Hijau		Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau		Zona Hijau					
Program Pengembangan komunikasi, informasi, dan media masa	Persentase OPD yang menerapkan aplikasi e-government	NA	100	100	75	100	0	0	100	100	100	100				
			100	100	80	90	0	0	100	100	100	100				

Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
					2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			Target	Rp	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Rp
	Pengikat Sistem Pemerintah berbasis Elektronik (SPBE) SST (Sajian Sambungan Telepon)	1.74	1.95	1.95	1.85	1.8	1.95	1.85	1.95	1.95	100	100	100	100		
	Persentase ruang publik terlayani internet memadai	24,122	25,982	25,982	25,328	25,610	25,982	25,328	25,982	25,982	100	100	100	100		
	Persentase OPD terlayani internet memadai	22	100%	100%	22%	22%	0%	22%	0%	0%	100	100	100	100		
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	NA	100%	100%	20%	26%	0%	20%	0%	0%	100	100	100	100		
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	NA	100%	100%	20%	26%	0%	20%	0%	0%	100	100	100	100		
	Tingkat Keamanan Informasi pemerintah	NA	100%	100%	20%	26%	0%	20%	0%	0%	100	100	100	100		
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	NA	100%	100%	20%	26%	0%	20%	0%	0%	100	100	100	100		
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5.64	7	173516.32	96.6	65.11		96.6			6.86	1.967	10.70	10.12		
	PDRB ADHB (dalam Juta rupiah)	19,244.915 ("PDRB ADHB thn. 2017 data statistik 2018)	31806070.8		28015514.1	28765452.93	31806070.81	28015514.1								
	PDRB ADHB (dalam Juta rupiah)	13,824.883 ("PDRB ADHB thn. 2017 data statistik 2018)	18159969		16282970.9	17195878.8	18159969.02	16282970.9			100		100			

Usnes/Bidang Usnes Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
					2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			Target	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	K	Rp
	PDRB Per Kapita Per Bulan (dalam Juta Rupiah)	4.35	6.59		5.58	6.07	6.59									
	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	2	10	2785		8.5										
	Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil	3	10		97.77	80.77										
	Persentase peningkatan kualitas manajemen produksi koperasi	5%	10%	251												
	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah kearifan dalam daerah kota	5%	10%	251	96%	95.85%	0%									
	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah kearifan dalam daerah kota	5%	10%	251	99.16%	38.70%	0%									
	Persentase peningkatan pemantauan koperasi dan UKM yang kondusif	14%	18%	285												
	Persentase peningkatan akses bantuan permodalan Samisake	2	7%	350												
	Persentase sarana pemasaran UKM yang berkategori baik	10%	15%	465												
	Persentase UMKM yang benzin	10%	15%	465	85.77	60.77	-									
	Persentase produk unggulan UMK yang dikembangkan	2	10%	292												
	Persentase UMKM binaan yang meningkat omzetnya															
	DISPORA	79.72	838.289	78.97	149.085	181.831	185.445									
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)															

7

Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			
			Target	Rp	2021	K	2022	K	2021	K	2022	K
Peningkat Kota Bengkulu di PORPROV Bengkulu	Juara Umum	Juara Umum	90,338	Juara Umum	478	1,695	1,695	2,972,1864	Juara Umum	8,028,355,737	Juara Umum	Rp
Persentase kelompok olahraga terbina	50%	100%	5,338	60%	478	1,695	1,695	44,838,8802	104,444,444	151,614,1847	0	
Persentase fasilitas olahraga	0	90%	85,000	0	-	-	-	0	0	0	0	
Cakupan Pembinaan olahraga	0%	70%		0	-	-	-		0		0	
Persentase pemuda yang berprestasi dan mandiri TK Provinsi	11	55	5,391	11	398	591	591	3627%	0,28666667	51,277,45535	0	
Persentase Pemuda yang berpolensi dilembangkan	50%	100%	4,879	60%	398	398	398	4088%	44,444,4444	38,930,82243	0	
Persentase kelompok Pemuda Yang Terbina	50%	95%		0%					0		0	
Persentase Pemuda yang berwirausaha	33%	100%	220	0%	-	-	-	0	0	0	0	
Jumlah Pemuda Terbina	NA		292	0	-	-	-	0	0	0	0	
Jumlah Pemuda Terbina	NA	NA	-	0	-	193	193		107,777,778			
ARDA												
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78.82	79.72	838,289	78.97	149,085	181,831	189,445	100	100	100	100	
Indeks Pendidikan	78.82	79.57	247,621	78.97	49,532	50,636	51,742	100	100	100	100	
Persentase warisan budaya yang dilestarikan (dinas pendidikan)	82.71	100		82.71					100		100	
Jumlah Kecamatan yang mempunyai Pajok baca	1 Kec	9 Kec.	1,200	1 Kec	57,35	86,409	350	22,94	7 Kec.	22,136,33333	9 Kec.	
Indeks Reformasi Birokrasi	CC	BB	268,420,846	B	599,98,825	552,89,76625	603,41,75456	100	BB	100	BB	
Peningkat keterbukaan informasi publik	III	I	1,557	III	346	356	381	100	I	100	I	
Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	B	A		A-					A		A	

47

Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			
			Target	Rp	2021	K	2022	K	2021	K	2022	K
Nilai Kepatuhan penyelenggaraan terhadap penentuan komponen standar pelayanan ("Hasil Survey Ombudsman")	Zona Hijau	Zona Hijau										
Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku	25	90	356	25	4.3	-	79	5.97222222	0	0	100	
Persentase arsip yang telah diduplikasi dalam e-katalog	10	50	511	10	-	1.472	139	0	4	1.168253968	100	
Persentase arsip yang tersimpan dengan baik	20%		468	20%	1.5	43.065	103	1.59574466	14.2857143	43.94387755	100	
Persentase pelayanan informasi arsip	10%	95%	577	20%	-	-	-	0		0		
KELAUTAN												
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		5.64	7	173516.32	6.63	6.97	7	100	100	100	100	
PDRB ADHB (dalam Juta rupiah)		19.244.915 ("PDRB ADHB thn.2017 data statistik 2018)	31806070.8		26015514.1	28765452.93	31806070.81	100		100		
PDRB ADHK (dalam Juta rupiah)		13.824.883 ("PDRB ADHB thn.2017 data statistik 2018)	18159969		16282870.9	17195878.8	18159969.02	100		100		
PDRB Per Kapita Per Bulan (dalam Juta Rupiah)		4.35	6.59		5.58	6.07	6.59	100		100		
Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perikanan terhadap sektor pertanian		4.78	4.95	130.419.00	4.89	4.92	4.95	100	100	100	100	
Persentase armada/kapal penangkap ikan yang ber kondisi baik		45%	75%	1.000	63%	67%		105	205.428571	103.0769231	0	
Persentase sarana dan prasarana perikanan tangkap yang ber kondisi baik		35%	65%	750	52%	54%		104	0	98.18181818	41.6923077	
Persentase peningkatan SDM kelautan dan perikanan yang terampil		25%	45%	70	21%	23%		63.6363636	0	63.88888889	0	

f.

Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Peleaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			
					2021	2022	2023		2021	2022	2023	
			Target	Rp	K	K	K		K	Rp	K	Rp
	Persentase Koperasi nelayanKUB yang dapat di monitor (Berbadan Hukum)	15%	30%	40	14%	16%			63.6363636	0	64	0
	Persentase sarana prasarana TPI (tempat pelelangan ikan) yang berkondisi Baik	20%	45%	70	4%	4%			13.3333333	0	11.42857143	0
	Persentase sarana prasarana pengawasan kelautan dan perikanan yang berkondisi baik	15%	60%	60	17%	20%			56.6666667	0	50	0
	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terampil	25%	60%	60	35%	40%	50%		100	100	100	100
	Persentase SPDN (Solar Packet Dealer Nelayan)	30%	55%	65	40%	45%	50%		100	100	100	100
	Persentase wilayah terumbu karang yang dilindungi	55%	80%	100	65%	70%	75%		100	100	100	100
	Persentase alat tangkap yang berstandar SNI	30%	76%	70	50%	60%	70%		100	100	100	100
	Persentase kapal yang memiliki dokumen sesuai aturan	40%	70%	70	60%	65%	70%		100	100	100	100
	Persentase koperasi nelayanKUB yang dapat di monitor	50%	80%	70	65%	70%	75%		100	100	100	100
	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang paham terhadap peraturan perundang- undangan	40%	70%	50	55%	60%	65%		100	100	100	100
Program Pengembangan budidaya perikanan	Persentase sarana dan prasarana BBI (Balai Benih Ikan) yang berkondisi baik	50%	90%	1.200	60%	62%			85.71	0	77.5	0
	Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan yang berkondisi baik	50%	75%	1.200	56%	58%			93.33	8	89.23	20.82
	Persentase peningkatan akses bantuan pemodal	30%	80%	110	31%	31%			62	0	51.67	0
	Persentase budidaya ikan keramba yang berkembang	5%	20%	45	0%	0%			0	0	0	0
	Persentase pembudidaya ikanUPR yang terampil	20%	50%	85	25%	27%			83.33	0	77.14	0
	Persentase penyuluh perikanan bersertifikat	10%	25%	24	20%	20%	25%		100	100	100	100
	Persentase sarana dan prasarana penyuluh perikanan	5%	0%	-	10%	15%	15%		100	100	100	100

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
			Target	Rp	2021	2022	2023	2021		2022		2023	
					K	K	K	K	K	Rp	K	Rp	K
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang terampil	30%	55%	95	40%	45%		100	0	100	0		
	Persentase inovasi strategi pengolahan dan pemasaran yang diterapkan	35%	60%	80	43%	45%		100	0	93.75	0		
	Persentase peningkatan produksi olahan ikan	35%	55%	65	45%	47%		100	0	104.4444444	0		
	Persentase sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran pasca panen hasil perikanan yang ber kondisi baik	45%	65%	125,000	55%	58%		100	0	100	0		
	Persentase Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memiliki izin produksi	30%	45%	40	35%	38%		100	0	100	0		
PARIWISATA													
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5.64	7	173516.32	6.63	6.97	7		100			100	
	PDRB ADHB (dalam Juta rupiah)	19,244,915,1 ¹ PDRB ADHB thn.2017 data statistik 2018)	31806070.8		26015514.1	28765452.93	31806070.81						
	PDRB ADHK (dalam Juta rupiah)	13,824,883,1 ¹ PDRB ADHB thn.2017 data statistik 2018)	18159969		16282970.9	17195878.8	18159969.02						
	PDRB Per Kapita Per Bulan (dalam Juta Rupiah)	4.35	6.59		5.58	6.07	6.59						
	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor pariwisata (sektor Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi) terhadap PDRB	2.78	4.73	12,934	3.63	4.13	4.73						
Program Pengembangan destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	10%	90%	2.850	70%	85%	0						
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengembangan Ekonomi kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	NA											

A.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			
			Target	Rp	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
					K	K	K	K	K	K	Rp	Rp
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media promosi media cetak elektronik dan media lainnya	25%	100%	3,050	38%	0%	0					
	Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	-	100%	2,740	75%	90%	0					
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	10%	90%	557,003	10%	0%						
	Persentase peningkatan mitra kerjasama pengembangan dan pemasaran wisata	50%	80%	4,294	60%	70%	0					
Pendagri	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5.64	7	173516.32	6.63	6.97	7	100	100	100		
	PDRB ADHB (dalam juta rupiah)	19,244,915,1* PDRB ADHB thn.2017 data statistik 2018)	31806070.8		26015514.1	28765452.93	31806070.81	100	100			
	PDRB ADHK (dalam juta rupiah)	13,824,883,1* PDRB ADHB thn.2017 data statistik 2018)	18159969		16282970.9	17195878.8	18159969.02	100	100			
	PDRB Per Kapita Per Bulan (dalam juta Rupiah)	4.35	6.59		5.58	6.07	6.59	100	100			
	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19.83	23.18	4,454	21.58	22.33	23.18	100	100	100		
	Persentase peningkatan suplai barang	64%	72%	269	70%	72%	72%	100	100	100		
Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase pedagang yang terlatih	65%	73%	525	71%	73%	73%	100	100	100		
	Persentase peningkatan pasar tertib	65.50%	85.80%	2,446	85.80%	85.80%	85.80%	100	100	100		
Program Perindugan konsumen dan pengamanan perdagangan												
	Persentase peningkatan kemudahan akses bantuan modal	64%	72%	339	70%	72%	72%	100	100	100		
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	19%	39%	875	34%	39%	39%	100	100	100		

UsanaBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			
			Target	Rp	2021		2022		2021		2022	
					K	K	K	K	K	K	K	Rp
	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	3,67	5,49	1,911	4,17	5,19	5,49	100	100	100	100	
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pelaku IKM terlatih	75%	83%	383	81%	83%	83%	100	100	100	100	
Program Peningkatan kapasitas IPTEK	Persentase teknologi tepat guna yang diterapkan	80%	88%	776	86%	88%	88%	100	100	100	100	
Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif IKM	Persentase sentra IKM yang dikembangkan	45%	70%	752	60%	65%	70%	100	100	100	100	
SEKDA												
	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	BB	268,421	BB	BB		BB	100	BB	100	
	Nilai SAKIP	CC	BB	46,068	BB	BB		BB	100	BB	100	
	Peningkat pada Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	5		15	5		100		100		
	Peningkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD) Kota Se Indonesia	92	50		65	60		100		100		
Program pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP minimal "BB"	29,73	100	553	95	95		100	100	100	100	
	Peningkat keterbukaan informasi publik	III	I	51,391	I	I			100		100	
Program Kerjasama pembangunan	Persentase perusahaan yang telah menyalurkan CSR tepat sasaran	5	50	1,243	15	50		100	100	100	100	
	Persentase BUMD dengan kinerja baik	25	100	250	50	100		100	100	100	100	
	Persentase kerjasama antar daerah yang diindaklanjuti	100	100	580	100	100		100	100	100	100	
Program Penataan penggunaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan	Persentase peningkatan tertib pertanahan	70%	90%	11,051	80%	85%		100	100	100	100	
SEKWAN												

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
					2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			Target	Rp	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Rp
	Persentase Kebijakan Daerah (Perda/Perkadayang serasi dengan kebijakan Provinsi dan Pusat	100	100	101,667	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD																
Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat kepuasan layanan pada DPRD	55	100	35,000	80	90					100	139.785714	100	0		
	Persentase fasilitas rapat/ases DPRD tepat waktu	55	100	3,888	90.3	90					4.68010417	686.295503	100	0		
	Persentase kelengkapan bahan-bahan penyusunan Raporda	100	100		100	100					100		100			
	Persentase perda yang terpublikasi	100	100	381	100	100					100	5931.57895	100	0		
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat kepuasan layanan pada DPRD	55	100	35,000	80	67.75					100	139.785714	75.27777778	113.142857		
	Persentase fasilitas rapat/ases DPRD tepat waktu	55	100	3,888	90.3	70.83					112.875	686.295503	78.7	87.6530612		
	Persentase kelengkapan bahan-bahan penyusunan Raporda	100	100		100	20					100		20			
	Persentase perda yang terpublikasi	100	100	381	100	80					100	5931.57895	80	1718.75		
BAPPEDA																
	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	BB	268,421	BB	BB					BB	100	BB	100		
	Nilai SAKIP	CC	BB	46,068	BB	BB					BB	100	BB	100		
	Peringkat pada Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	5		15	5					100		100			
	Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPD, RUPPD, EPPD) Kota Se Indonesia	92	50		65	60					100		100			
Program Perencanaan pembangunan daerah	Nilai sub Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian SAKIP	19.31	26	11,370							87.72	100				
	Nilai sub Komponen pengukuran Kinerja pada penilaian SAKIP	10.87	17								83.2		100			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
			Target	Rp	2021		2022		2021		2022		2023	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Persentase capaian Program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi dan sangat tinggi	90			95		97		100		100			
	Persentase keselarasan muatan antara dokumen RKP, RPJMD, RKPD Provinsi dan RKPD Kota	98	100		100		100		100		100			
Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Persentase OPD Bidang Perencanaan Ekonomi dengan hasil Renja Predikat Kinerja Baik	100	100	2.010	100		100		100		100	100		
	Persentase kesesuaian program antara RKPD dengan KUA PPAS Bidang Perencanaan Ekonomi	100	100		100		100		100		100			
	Persentase kesesuaian program antara KUA-PPAS dengan APBD Bidang Perencanaan Ekonomi	100	100		100		100		100		100			
	Persentase hasil musrenbang Bidang Perencanaan Ekonomi yang diindaklanjuti	25	50		40		45		100		100			
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase OPD Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan hasil Renja Predikat Kinerja Baik	100	100	2.371	100		100		100		100	100		
	Persentase kesesuaian program antara RKPD dengan KUA PPAS Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	100		100		100		100		100			
	Persentase kesesuaian program antara KUA-PPAS dengan APBD Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	100		100		100		100		100			
	Persentase hasil musrenbang Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diindaklanjuti	25	50		40		45		100		100			
Program perencanaan Sosial Budaya	Persentase OPD Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dengan hasil Renja Predikat Kinerja Baik	100	100	4.041	100		100		100		100	950		1.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						
			Target	Rp	2021		2022		2023		2021		2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persentase kesesuaian program antara RKPD dengan KUA PPAS Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia	100	100			100	100					100	100				
	Persentase kesesuaian program antara KUA-PPAS dengan APBD Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia	100	100			100	100					100	100				
	Persentase hasil musrenbang Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti	25	50			40	45					100	100				
Program Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	NA	50	450	30	40					100	100	100	100			
Program Penelitian Pembangunan daerah	Persentase Implementasi rencana kegiatan	NA	100	9,026	100	100					100	100	100	100			
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai sub Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian SAKIP	NA			21,93	NA											
	Nilai sub Komponen pengukuran Kinerja pada penilaian SAKIP	NA			12,48	16											
	Persentase capaian Program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi dan sangat tinggi	NA															
	Persentase keselarasan muatan antara dokumen RKP, RPJMD, RKPD Provinsi dengan RKPD Kota	NA															
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	NA															
	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	NA															
BAPPENDA																	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-								
			Target	Rp	2021		2022		2023		2021		2022		2023		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	BB	268,421	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100	BB	BB	100			
	Indeks Kapasitas Fiskal	0.3	0.42	51,910	0.37	0.4	0.4				100	100	100	100			
	Opini BPK	WDP	WTP			WTP	WTP				WTP	WTP	WTP	WTP			
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan realisasi pajak dan retribusi daerah	3.40%	75%	3,000	15%	20%	20%				100	100	100	100			
	Persentase peningkatan realisasi pajak dan retribusi daerah	3.40%	75%	3,000	15%	20%	20%				100	100	100	100			
	Persentase peningkatan hasil BUMD	98.52%	100%	3,450	98.99%						66.67	2000	0	0			
BPKAD																	
	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	BB	268,421	BB	BB	BB				BB	100	BB	100			
	Indeks Kapasitas Fiskal	0.3	0.42	51,910	0.37	0.4	0.4				0.841						
	Opini BPK	WDP	WTP		WTP	WTP	WTP				WTP	WTP	WTP	WTP			
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase perangkat daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP	100	100	560	100	75	75				100	97.89	75	57.60			
	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	40,000	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu				Tepat Waktu	1.2 T	Tepat Waktu	1.2 T			
	Persentase aset daerah yang inventarisasi	95%	100%	2,400	100%	50%	50%				102	407.85 M	50.5	295.50 M			
	Proporsi belanja modal dan belanja operasional	69.71 28.62	68.03 31.97	2,500	12.64 87.36	12.19 87.81	12.19 87.81				12.64 87.36	269.98 m	12.19 87.81	151.99 m			
BKPSDM																	
	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	BB	268,421	BB	BB	BB				BB	100	BB	100			
	Indeks profesionalitas ASN	71	80	17,085	75	76	76				100	100	100	100			
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pejabat struktural yang telah diklat pim sesuai syarat jabatan	45.86	100	10,550	75	90	90				100	100	100	100			
	Persentase aparatur yang telah lulus diklat fungsional	10.99	100	1,500	40	75	75				100	100	100	100			
	Persentase aparatur yang telah lulus diklat teknis sesuai kebutuhan	2	10	630	6	8	8				100	100	100	100			
Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi	50	100	1,000	80	90	90				100	100	100	100			

A.

Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				
			Target	Rp	2021		2022		2023		2023		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persentase pelayanan kenaikan pangkat dan gaji berkala tepat waktu	100			100	100			100				
Program Pendidikan Kedisnasan	Persentase ASN mendapatkan Pendidikan Kedisnasan	90	100	1.580	90	100			100	100			
Program Fasilitas pindah tugas / purna tugas ASN	Jumlah ASN terfasilitasi	500	500	1.825	400	500			100	100			
Program Kepegawaian Daerah	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi	80			94.2	20.3		0%	104.666667	94.2132007	21.36842105	20.2624612	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase Aparatur yang telah lulus diklat PIM, diklat fungsional dan teknis sesuai syarat jabatan	70			93	33.4		0%	116.75	93.4331779	37.11111111	33.4237614	
INSPEKTORAT													
	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	BB	268,421	BB	BB			BB	100	BB	100	
	Nilai SAKIP	CC	BB	46,068	BB	BB			BB	100	BB	100	
	Peringkat pada Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	5		15	5			100		100		
	Peringkat Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD) Kota Se Indonesia	92	50		65	60			100		100		
Program Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KQH	Persentase OPD yang berkinerja baik	75	90	11,865	80	85			100	100	100	100	
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur penguasaan	Persentase ASN yang mengikuti diklat penjenjangan	100	100	1,632	100	100			100	100	100	100	
	Persentase Auditor/P2UPD yang mendapatkan sertifikasi sesuai dengan jenjang jabatan	94	100		100	100			100		100		
	Persentase auditor/P2UPD yang memenuhi angka kredit	93,54	100		100	100			100		100		
	Indeks Persepsi Korupsi	0	-0,08	300	NA	NA			NA	0	NA	0	

4A.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			
					2021		2022		2021		2022	
			Target	Rp	K	K	K	K	Rp	K	Rp	K
Program Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan			300					100		100	
	a) LHP BPK RI	56,95	90		80	85		100		100		
	b) LHP Inspektorat Provinsi	97,36	100		90	95		100		100		
	c) LHP Inspektorat Kota	73,20	100		90	80,27		100		84.49473684		
	Ketaatan para wajib LHKPN dalam menyampaikan laporan harta kekayaan	62,96	90		90	90		100		100		
	Persentase capaian tindak lanjut	80	80		80	80		100		100		
	Persentase capaian MCP renaksi KPK		75		75	75		100		100		
KECAMATAN GADING	Peningkat keterbukaan informasi publik	III	I	51,381	I	I		III	100	II	100	
	Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	B	A		A	A		A-		A		
	Nilai Kepatuhan penyelenggaraan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan ("Hasil Survey Ombudsman)	Zona Hijau	Zona Hijau		Zona Hijau	Zona Hijau		Zona Hijau		Zona Hijau		
	Persentase perangkat daerah yang telah menjalankan SOP dan SPP	100	100	450	100	100		100	100	100	100	
Program Peningkatan Kualitas kelembagaan pelayanan publik	Persentase OPD yang mendapatkan nilai pelayanan baik	50	100	250	100	100		100	100	100	100	
	Persentase kecamatan yang berkinerja prima	50	100	250	100	100		100	402920000	100	112588000	
	Persentase kelurahan yang berkinerja prima	50	100	250	100	100		100	3139690104	100	170570258	
	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	100	100	400	100	100		100	241785000	100	1669228191	
KECAMATAN TELUK	Persentase kelurahan yang menerapkan TTG	40	70	215	60	65		70	0	100	0	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertelaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71%	74%	9,263,124	132,39	92,57		218%	73%	9,090,403,235		

Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			
			Target	Rp	2021		2022		2023		2023	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	71%	74%	2,941.99	130.26	86.61	218%	2,028,996,900	73%	2,028,996,900		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	71%	74%	650.00	127.4	59.04	218%	1,010,094,467	73%	1,010,094,467		
KECAMATAN SELEBAR												
	Peningkat keterbukaan informasi publik	III	I	51,391	I	I	I	100	III	100	II	100
	Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	B	A		A	A	A		A-		A	
	Nilai Kepatuhan penyelenggaraan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan ("Hasil Survey Ombudsman")	Zona Hijau	Zona Hijau		Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau		Zona Hijau		Zona Hijau	
Program Peningkatan Kualitas kelembagaan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah yang telah menjalankan SOP dan SPP	100	100	450	0	0	0	0	0	0	0	0
	Persentase OPD yang mendapatkan nilai pelayanan baik	50	100	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Pengembangan kapasitas kecamatan dan kelurahan	Persentase kecamatan yang berkinerja prima	50	100	250	100	47	0	306	100	47	607,1892	
	Persentase kelurahan yang berkinerja prima	50	100	250	100	64	0	5014,88033	100	64	4147,83109	
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	100	100	400	100	62	0	104,5875	100	62	93,6564375	
	Persentase kelurahan yang menerapkan TTG	40	70	215	-	-	0	0	0	0	0	0
KECAMATAN MUARA												
	Peningkat keterbukaan informasi publik	III	I	51,391	I	I	I	100	III	100	II	100
	Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	B	A		A	A	A		A-		A	
	Nilai Kepatuhan penyelenggaraan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan ("Hasil Survey Ombudsman")	Zona Hijau	Zona Hijau		Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau		Zona Hijau		Zona Hijau	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
					2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			Target	Rp	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Rp
Program Peningkatan Kualitas kelembagaan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah yang telah menjalankan SOP dan SPP	100	100	450	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase OPD yang mendapatkan nilai pelayanan baik	50	100	250	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase kecamatan yang berkinerja prima	50	100	250	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	299.28	
	Persentase kecamatan yang berkinerja prima	50	100	250	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2656	
	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	100	100	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	282.5	
KECAMATAN RANTAU SAMBAH	Persentase kecamatan yang menerapkan ITG	40	70	215	71.42	71.42	71.42	70	119.033333	0	109.8769231	0	109.8769231	0		
	Sasaran : Meningkatnya keterbukaan dan kualitas pelayanan publik	Peringkat keterbukaan informasi publik	III	I	11.129	10.099	10.826	11.129	10.826	11.129	100	100	100	100	100	
		Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	B	A						A-				A		
		Nilai Kepatuhan penyelenggara n terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan (*Hasil Survey Ombudsman)	Zona Hijau	Zona Hijau						Zona Hijau				Zona Hijau		
	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah yang telah menjalankan SOP dan SPP	100	100	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	

Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
			Target	Rp	2021	K	K	2022	K	K	2021	K	K	2022	K	K
		Persentase OPD yang mendapatkan nilai pelayanan baik	50	100		50	50		50	50		50	100	100		
	Program Peningkatan Pengembangan kapasitas kecamatan dan kelurahan	Persentase kecamatan yang berkinerja prima	50	100		50	542		178	50		50	100	1083.956396		
		Persentase kelurahan yang berkinerja prima	50	100		50	1.332		1.180	50		50	100	2664.787788		
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	100	100		80	128		518	80		80	100	159.4719375		
		Persentase kelurahan yang menerapkan TTG	40	70		45	-		-	45		45	118.333333	0	109.230769	
KECAMATAN SUNGAI SERUT																
Sasaran : Meningkatkan keterbukaan dan kualitas pelayanan publik		Peningkat keterbukaan informasi publik	III	I		11,129	10,099		10,826	11,129		11,129	III	100	II	
		Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	B	A									A-		A	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						
			Target	Rp	2021	K	Rp	2022	K	Rp	2023	K	Rp		
		Nilai Kepatuhan penyelenggaraan n terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan ("Hasil Survey Ombusman)	Zona Hijau	Zona Hijau					Zona Hijau						
	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah yang telah menjalankan SOP dan SPP	100	100	90	90	90	90	100	100	100	100			
		Persentase OPD yang mendapatkan nilai pelayanan baik	50	100	50	50	50	50	100	100	100	100			
	Program Peningkatan Pengembangan kapasitas kecamatan dan kelurahan	Persentase kecamatan yang berkinerja prima	50	100	50	222.5	192.3					444.9	100		
		Persentase kelurahan yang berkinerja prima	50	100	50	1,500.10	971.86					3000.2	100		
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	100	100	80	169	217.7					211.2	100		
		Persentase kelurahan yang menerapkan TTG	40	70	45	-	-	-					119.033333	0	109.876923

A

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-			
			Target	Rp	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2023
					K	K	K	K	K	K	K	Rp
KECAMATAN KAMPUNG MELAYU												
	Sasaran : Meningkatkan keterbukaan dan kualitas pelayanan publik	Peningkat keterbukaan informasi publik	III	I	11,129	10,099	10,826	11,129	100	II		
		Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	B	A				A-		A		
		Nilai Kepuasan penyelenggara n terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan pelayanan (*Hasil Survey Ombudsman)	Zona Hijau	Zona Hijau				Zona Hijau		Zona Hijau		
	Program Peningkatan Kelembagaan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah yang telah menjalankan SOP dan SPP	100	100	90	-	-	90	0	100		
		Persentase OPD yang mendapatkan nilai pelayanan baik	50	100	50	-	-	50	0	100		
	Program Peningkatan Pengembangan kapasitas kecamatan dan kelurahan	Persentase kecamatan yang berkinerja prima	50	100	50	147,400	209,340	50	294,800	22		
		Persentase kelurahan yang berkinerja prima	50	100	50	1,500,082	1,665,732	50	3,000,164	75		

AA

Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
			Target	Rp	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
					K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Rp
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	100	100	80	165,964	630	80	100	21205	35					
		Persentase kelurahan yang melakukan	40	70	45	-	-	45	100	0	100					
KECAMATAN SINGARAN PATI																
Sasaran : Meningkatkan keterbukaan dan kualitas pelayanan publik		Peningkat keterbukaan informasi publik	III	I	11,129	10,099	10,826	11,129	III	100	II					
		Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	B	A					A-		A					
		Nilai Kepatuhan penyelenggara n terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan ("Hasil Survey Ombudsman)	Zona Hijau	Zona Hijau					Zona Hijau		Zona Hijau					
	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah yang telah menjalankan SOP dan SPP	100	100	90	90	90	90	100	100	100					
		Persentase OPD yang mendapatkan nilai pelayanan baik	50	100	50	50	50	50	100	100	100					

A.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan		Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
			Target	Rp	2021	K	2022	K	2023	K	2021	K	2022	K	2023	K
	Program Peningkatan Pengembangan kapasitas kecamatan dan kelurahan	Persentase kecamatan yang berkinerja prima	50	100	50	10,985,000	376,055,100				50	100	21,970,000	100		
		Persentase kelurahan yang berkinerja prima	50	100	50	2,033,673,061	#####				50	100	4,067,346,122	100		
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	100	100	80	94,577,500	135,454,675				80	100	118,221,875	100		
		Persentase kelurahan yang menerapkan TTG	40	70	45	45	45				45	100	100	100		

4/12

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2019 – 2023

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. Berdasarkan ketentuan peraturan dimaksud, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah selama periode RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Dari hasil tersebut dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode dimaksud. Capaian kinerja keuangan pada periode tersebut menjadi data dasar atau baseline data yang dibutuhkan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu periode tahun 2024 - 2026. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah ke depannya.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum komponen APBD Pemerintah Daerah Kota Bengkulu terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Secara umum, kinerja APBD Kota Bengkulu tahun 2019 hingga tahun 2022 menunjukkan realisasi pendapatan yang berfluktuasi, realisasi pendapatan tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan sebesar 8% dan 12%. Sedangkan realisasi komponen belanja daerah tahun 2019 hingga tahun 2021 tidak mencapai target tahunannya namun dengan penyerapan yang semakin membaik selama kurun waktu dua tahun terakhir. Untuk realisasi komponen penerimaan pembiayaan, tahun 2019 hingga tahun 2022 menunjukkan realisasi penerimaan pembiayaan hampir 90 persen, sedangkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan target dari tahun 2019 hingga 2021 tidak tercapai. Dalam perspektif perencanaan, kondisi tersebut menunjukkan penetapan target yang terlalu optimis. Lebih lanjut dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2019 – 2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PENDAPATAN	1.170.304.479.926.93	1.079.664.992.073.88	1.144.183.816.867.47	874.418.429.350.86
	Pendapatan Asli Daerah	182.798.143.645.88	155.149.376.261.88	175.333.124.668.47	141.655.912.478.68
	Pajak Daerah	107.116.708.227.83	92.048.716.649.53	98.243.153.678.96	82.593.150.686.00
	Retribusi Daerah	11.749.514.124.00	9.330.577.716.00	11.158.370.681.62	7.542.487.166.00
	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3.250.509.130.75	3.217.135.278.00	3.338.675.888.93	1.628.919.773.37
	Lain-lain PAD yang Sah	60.681.412.163.00	50.552.946.618.35	62.592.924.418.96	49.891.354.853.31
	Total Pendapatan Transfer	948.152.426.563.35	880.332.698.380.00	926.385.964.859.00	732.762.516.872.00
	Dana Perimbangan-Pendapatan Transfe			821.201.539.835.00	
	Dana Bagi Hasil Pajak		14.403.407.554.00	28.477.348.946.00	
	Dana Bagi Hasil SDA	575.806.200.00	6.876.249.779.00		
	Dana Alokasi Umum	711.412.979.000.00	647.053.589.000.00		
	Dana Alokasi Khusus	182.350.441.466.00	131.846.668.269		
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			41.993.727.340.00	
	Hibah	10.622.300.000.00	8.555.055.625.00	16.652.794.625.00	4.466.286.608.00
	Dana darurat				

Sumber : BPKAD Kota Bengkulu, 2022

17

3.1.1.1 Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk memahami kinerja keuangan daerah sebagai hasil dari pelaksanaan APBD maka diperlukan adanya analisis terhadap kinerja pendapatan daerah. Analisis tersebut meliputi jenis pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kemampuan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Secara garis besar pertumbuhan realisasi pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu periode 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Target dan Persentase Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bengkulu Tahun 2019-2021

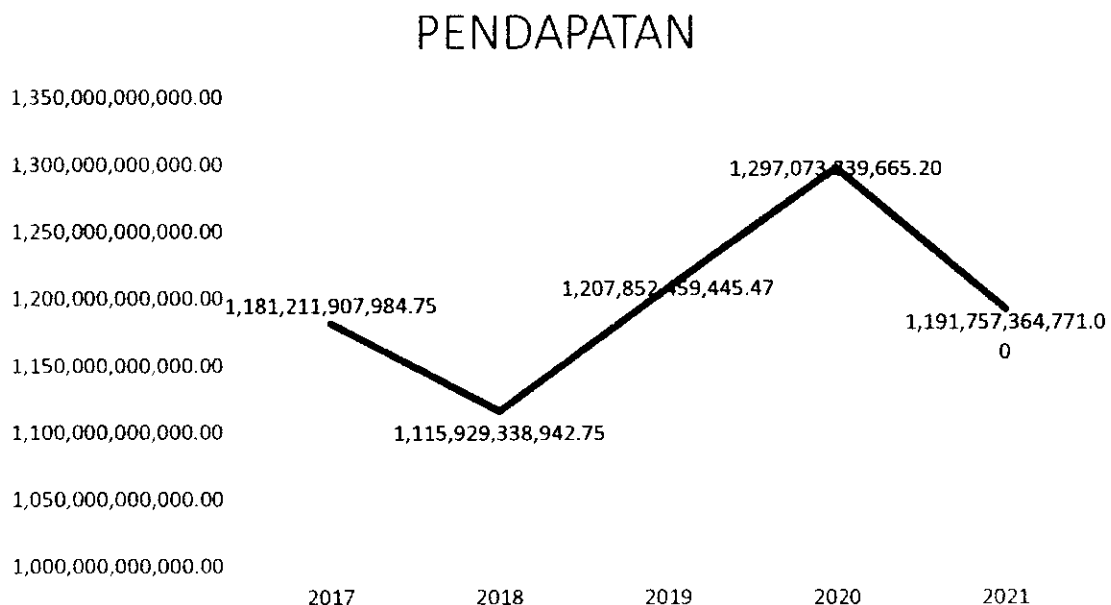
Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Bertambah/ (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Daerah	6.008.402.362.363,42	4.632.715.868.212,94	382	1.375.686.494.150,48
2018	1.115.929.338.942,75	1.096.906.666.865,88	94	19.022.672.076,87
2019	1.207.852.459.445,47	1.170.304.479.926,93	97	37.547.979.518,54
2020	1.297.073.339.665,20	1.079.664.992.073,88	83	217.408.347.591,32
2021	1.191.757.364.771,00	1.144.183.816.867,47	96	47.573.547.903,53
2022*	1.195.789.859.539,00	141.655.912.478,78	12	1.054.133.947.060,22
Belanja Daerah	6.246.808.893.060,23	5.208.291.604.138,09	416	1.038.517.288.922,14
2018	1.112.335.031.845,98	1.034.812.007.513,16	93	77.523.024.332,82
2019	1.259.367.552.282,03	1.133.892.824.539,56	90	125.474.727.742,47
2020	1.574.928.405.425,40	1.279.848.646.236,77	81	295.079.759.188,63
2021	1.183.449.028.466,82	1.075.461.856.405,61	91	107.987.172.061,21
2022*	1.116.728.875.040,00	684.276.269.442,99	61	432.452.605.597,01
Penerimaan Pembiayaan	191.837.300.658,58	371.433.731.895,81	215,6	(179.596.431.237,23)
2018	71.625.458.450,00	10.125.241.616,55	14	61.500.216.833,45
2019	58.626.012.752,56	58.625.412.091,56	100	600.661,00
2020	29.289.165.760,20	214.969.261.176,20	734	(185.680.095.416,00)
2021	27.296.663.695,82	27.296.663.695,82	100	-
2022*	5.000.000.000,00	60.417.153.315,68	120,8	(55.417.153.315,68)
Pengeluaran Pembiayaan	138.715.243.860,00	117.536.022.241,76	2,36	21.179.221.618,24
2018		12.445.598.466,76		(12.445.598.466,76)

4/11

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Bertambah/ (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	5.874.919.916,00	2.145.900.000,00	37	3.729.019.916,00
2020	15.000.000.000,00	3.309.059.975,00	22	11.690.940.025,00
2021	35.605.000.000,00	35.601.470.842,00	100	3.529.158,00
2022*	82.235.323.944,00	64.033.992.958,00	78	18.201.330.986,00

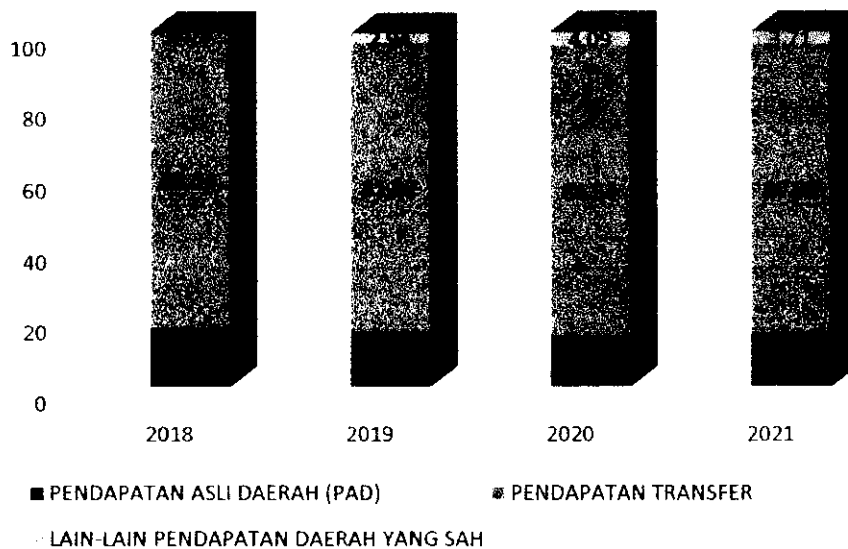
Sumber : BPKAD Kota Bengkulu, 2022

Gambar 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017-2021



Pada Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah Kota Bengkulu selama kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 1.207.852.459.445,47 dan tahun 2020 sebesar Rp 1.297.073.339.665,20 sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp 1.191.757.364.771,00 sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara, pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dihasilkan dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pendapatan pada masing-masing kelompok pendapatan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut;

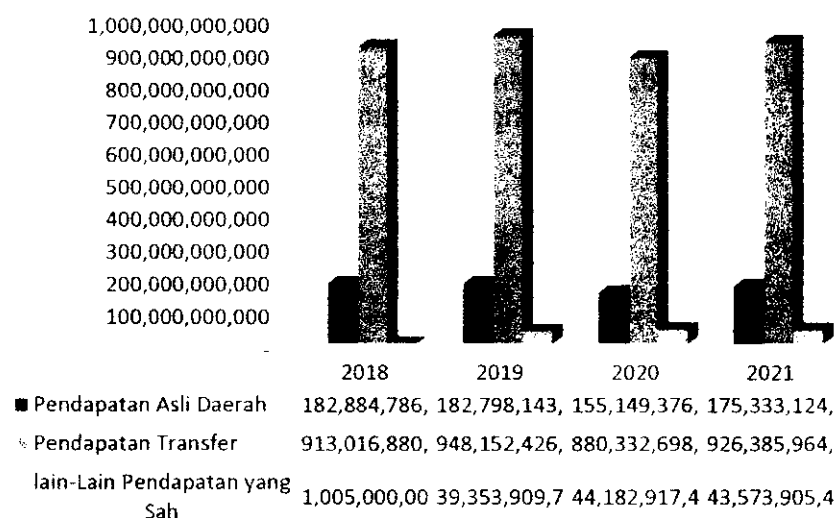
Gambar 3.2
Proporsi PAD, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Bengkulu Tahun 2018-2021



Jika dilakukan berdasarkan proporsi sumber pendapatan, dapat diketahui bahwa sumber pendapatan yang paling dominan berasal dari pendapatan transfer. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Kota Bengkulu pada periode 2018-2021 masih bergantung pada pendapatan transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian serta Dana Transfer pemerintah Provinsi Bengkulu dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi. Pada periode yang sama Pendapatan Asli Daerah menyumbang porsi rata-rata 15,49 % per tahun dengan pertumbuhan rata-rata minus 3,46%. Gambaran tentang fluktuasi pertumbuhan dan penurunan PAD beserta jenis-jenisnya yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada Gambar 3.3.

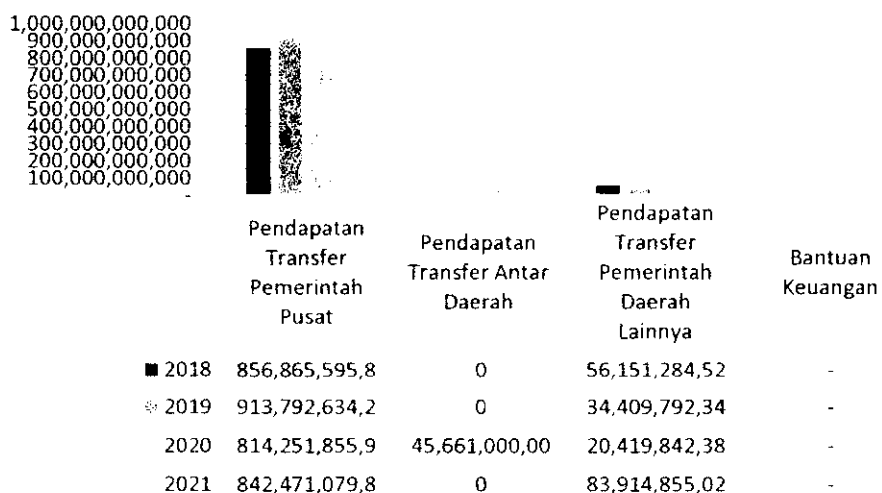
Gambar 3.3
Realisasi PAD beserta Jenis-jenisnya Kota Bengkulu Tahun 2018- 2021 Kota Bengkulu

AN



Pendapatan Transfer adalah kelompok pendapatan yang menyumbang porsi terbesar bagi pendapatan daerah. Rata-rata porsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan Kota Bengkulu tahun 2018 – 2021 sebesar 81,69% dengan rata-rata pertumbuhan 1,5% pertahun. Secara umum realisasi pendapatan transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat atau Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut;

Gambar 3.4.
Realisasi Pendapatan Transfer Kota Bengkulu Tahun Kota Bengkulu

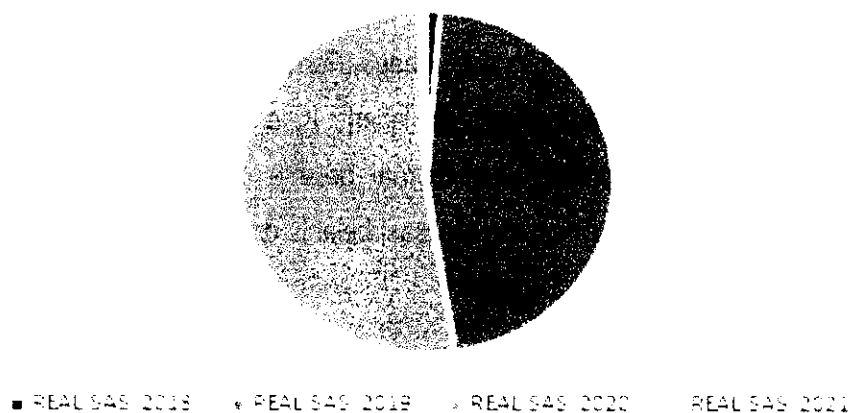


Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan kelompok pendapatan daerah yang terdiri dari (1) Pendapatan hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan (2) Pendapatan Dana

Kapitasi JKN pada FKTP NonBLUD. Rata-rata porsi yang disumbangkan oleh kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada periode 2018 – 2021 adalah sebesar 3,00% per tahun. Sedangkan realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut

Gambar 3.5.
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bengkulu Tahun Kota Bengkulu

. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota
Bengkulu
Tahun 2018-2021



3.1.1.2. Belanja

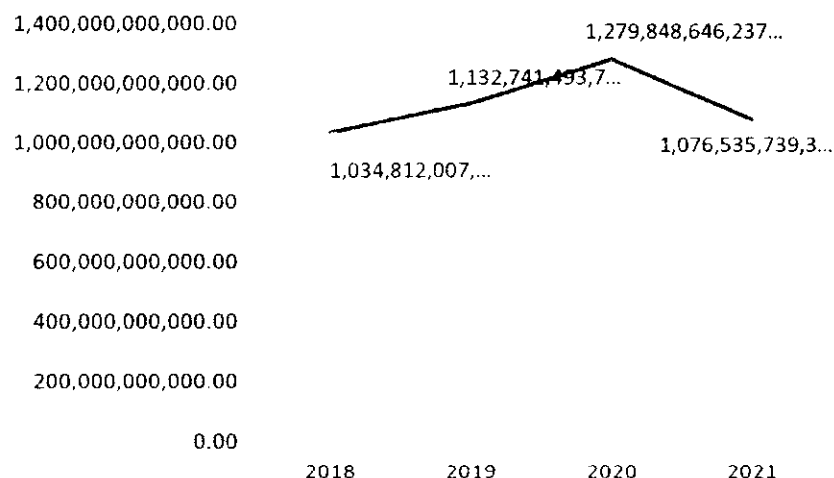
Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tidak terduga, (4) belanja transfer. Klasifikasi kelompok belanja dimaksud selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;

- d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah;
 - f. belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal; merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 3. Belanja Tidak Terduga; merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pengelolaan belanja daerah mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*Performance Budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Gambaran tentang realisasi belanja daerah Kota Bengkulu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut:

Gambar 3.6
Realisasi Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Kota Bengkulu

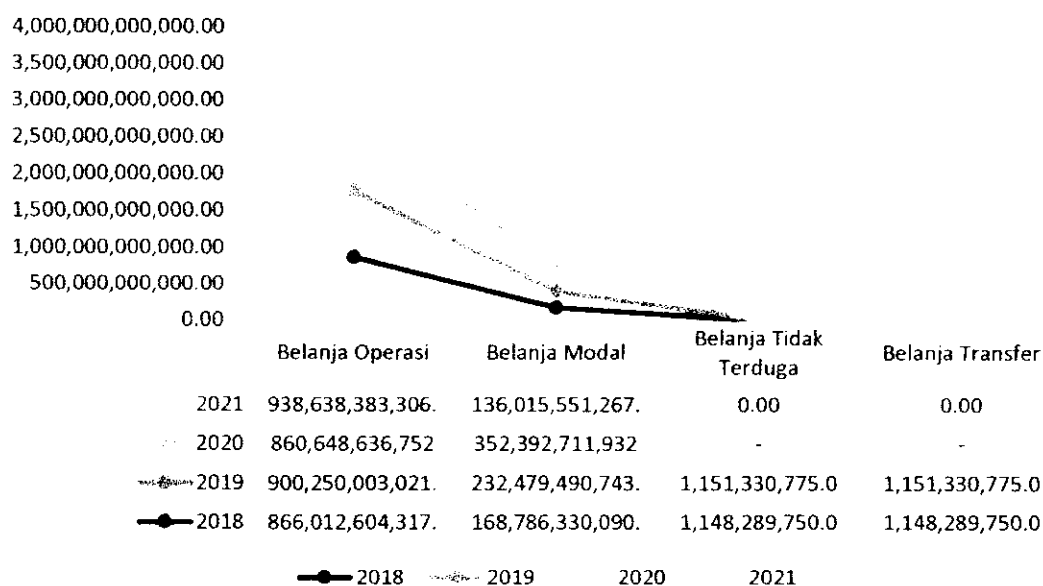


Pada Gambar 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah Kota Bengkulu selama kurun waktu 2018-2021 mengalami fluktuasi pertumbuhan dan penurunan dari tahun ke tahun dengan ritme yang sama dengan realisasi pendapatan daerah sebagaimana tersaji pada gambar 3.1. Pertumbuhan belanja daerah terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.132.741.493.764,59 dan tahun

A

2020 sebesar Rp.1.279.848.646.237,26 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.034.812.007.513,16 dan tahun 2021 sebesar Rp. 1.076.535.739.340,52 sebagai akibat dari adanya penyesuaian terhadap penurunan pendapatan daerah. Pada pelaksanaan APBD Tahun 2022 belanja daerah diestimasi mengalami pertumbuhan sebesar 4,53%. Secara rata-rata pendapatan daerah pada periode 2018 – 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0,85%. Pertumbuhan belanja daerah sebagaimana dimaksud dihasilkan dari kelompok (1) Belanja Operasi, (2) Belanja Modal, (3) Belanja Tidak Terduga, (4) Belanja Transfer. Realisasi belanja pada masing-masing kelompok belanja sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada gambar 3.7 berikut:

Gambar 3.7
Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kota Bengkulu Tahun Kota Bengkulu Tahun 2018-2021

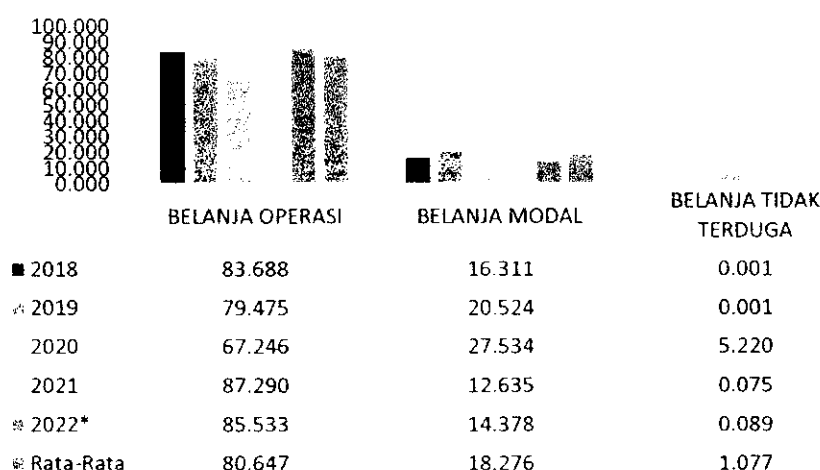


Pada periode 2018 – 2021 masing-masing kelompok belanja daerah mengalami fluktuasi penambahan dan penurunan. Belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar Rp34.237.898.704,12 dari Rp 866.012.604.317,17 Tahun 2018 menjadi Rp 900.250.003.021 pada tahun 2019 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp 938.638.383.306,51 dari Rp860.648.636.752,97 pada tahun 2020. Belanja Modal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sedangkan belanja Tidak Terduga hanya pada tahun 2018 dan tahun 2019. Begitu juga dengan Belanja Transfer. Perubahan kenaikan maupun proporsi yang signifikan pada kelompok belanja transfer, belanja tidak terduga dan belanja operasi disebabkan oleh adanya perubahan

4/11

regulasi pemerintah pusat yang mengatur tentang perubahan struktur belanja maupun perubahan arah prioritas belanja daerah. Gambaran tentang proporsi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dapat dilihat pada gambar 3.8 berikut:

Gambar 3.8
Proporsi Belanja Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kota Bengkulu Tahun 2018-2021

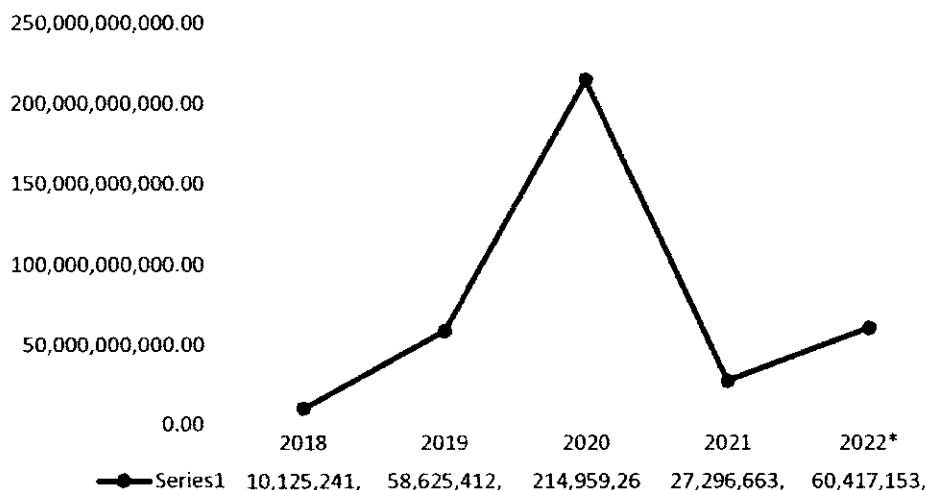


3.1.1.2. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang menghasilkan pembiayaan netto. Apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah. Kebijakan anggaran Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2018-2022 mengacu pada kebijakan anggaran surplus anggaran yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan yakni penyertaan modal pada perusahaan daerah pada APBD sehingga anggaran menjadi berimbang. Pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selalu terdapat penambahan pada penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dapat menambah SiLPA tahun berkenaan. Penambahan pada SiLPA berdampak pada peningkatan pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau kewajiban lain yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan maupun tambahan kegiatan baru. Penerimaan pembiayaan

daerah Kota Bengkulu selama kurun waktu tahun 2018 – 2022 sebagian besar bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada gambar 3.9 berikut.

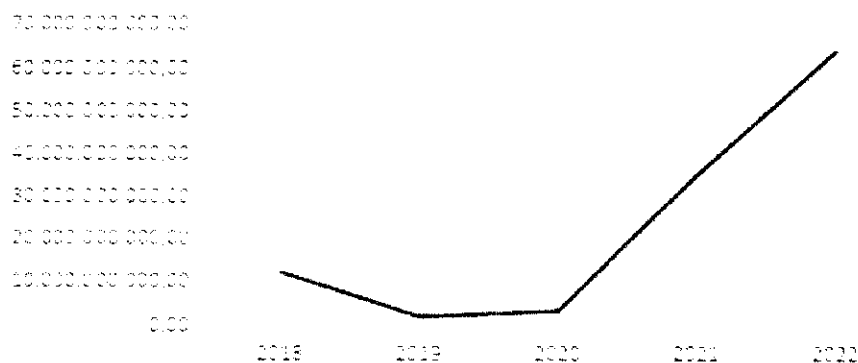
Gambar 3.9
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018-2022



Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal (investasi) pada PDAM serta pembentukan dana bergulir. Untuk mengetahui realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 3.10.

Gambar 3.10
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah kota Bengkulu Tahun 2018-2021

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota
Bengkulu
Tahun 2018-2021



Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar). Neraca Kota Bengkulu tahun 2018 - 2020 dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018-2021

NO	URAIAN	TAHUN				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	
1	ASET					
	Aset Lancar	133.718.816.987,00	201.258.194.577,00	102.489.581.699	207.463.609.221	-4,1%
	Investasi Jangka Panjang	106.254.667.697,00	86.154.544.677,00	107.827.420.569	112.305.801.183	0,3%
	Aset Tetap	1.354.242.496.640,00	1.447.716.283.246,00	1.677.663.413.777	1.690.851.785.240	7,0%
	Aswt Lainnya	204.697.562.353,00	104.374.421.000,00	104.374.421.000	26.712.061.000	-129,0%
	Jumlah Aset	1.798.913.543.677,00	1.839.503.443.500,00	1.992.354.837.045,00	2.037.333.256.644,00	4,0%
2	KEWAJIBAN					
	Kewajiban Jangka Pendek	10.286.854.924,00	22.903.575.068,00	98.183.386.988	97.704.132.944	43,8%

A.

NO	URAIAN	TAHUN				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	
	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	73.151.124.063	37.382.661.979	-96%
	Jumlah Kewajiban	10.286.854.924,00	22.903.575.068,00	171.334.511.051,00	135.086.794.923,00	38,3%
3	EKUITAS DANA	1.788.626.688.754,00	1.816.599.868.433,00	1.821.020.325.995	1.902.246.461.721	2,0%
	Jumlah Ekuitas Dana	1.788.626.688.754,00	1.816.599.868.433,00	1.821.020.325.995,00	1.902.246.461.721,00	2,0%
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.798.913.543.678,00	1.839.503.443.501,00	1.992.354.837.046,00	2.037.333.256.644,00	4,0%

Sumber : BPKAD Kota Bengkulu, 2022

Aset atau aktiva dalam akuntansi memiliki pengertian sebagai sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018 – 2022.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi realisasi terhadap anggaran Kota Bengkulu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Gambaran proporsi realisasi belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Bengkulu dalam kurun waktu 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut;

Tabel 3.4
Analisa Proporsi Belanja Terhadap Belanja Kota Bengkulu Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN					Rata-Rata
		2018	2019	2020	2021	2022*	
1	BELANJA OPERASI	866.012.604.317,16	900.250.003.021,28	860.648.636.752,97	939.712.266.241,00	956.281.759.576,00	904.581.053.982
	Belanja Pegawai	578.914.736.963,00	11.681.974.972,00	595.492.301.440	544.384.810.819	584.183.050.122	582.931.374.863
	Belanja Barang dan Jasa	255.436.630.900,16	6.073.228.049,28	256.601.279.688	363.828.665.271	341.924.657.547	298.772.892.291
	Belanja Bunga	0,00	0,00		11.492.699.287	7.891.895.306	3.876.918.919
	Belanja Hibah	30.821.236.454,00	10.622.300.000,00	8.555.055.625	16.652.794.625	20.379.186.000	17.406.114.541
	Belanja Bantuan Sosial	840.000.000,00	1.872.500.000,00		3.353.296.239	1.902.970.601	1.593.753.368
2	BELANJA MODAL	168.786.330.090,00	232.479.490.743,31	352.392.711.932	136.015.551.267	160.745.776.019	210.083.972.010
	Belanja Modal Tanah	29.975.000,00	18.336.000.000,00				3.673.195.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.433.045.206,00	74.227.618.856,00	78.007.275.730	36.280.277.712	44.505.967.980	53.690.837.097
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.379.788.095,00	36.134.439.350,59	64.740.407.375	17.128.299.985	54.900.935.988	38.056.774.159
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.711.810.609,00	89.354.667.400,72	208.999.732.827	70.084.580.458	44.617.336.980	105.553.625.655
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.231.711.180,00	14.426.765.136,00	645.296.000	12.522.393.112	16.721.535.071	9.109.540.100
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.073.106,00	12.000.000,00	66.807.297.552	807.921.832	1.000.000.000	13.728.058.498
	Belanja Tidak Terduga	13.073.106,00	12.000.000,00	66.807.297.552	807.921.832	1.000.000.000	13.728.058.498

Sumber : BPKAD Kota Bengkulu, 2022

Selanjutnya rasio prosentase antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dicermati pada tabel 3.5 berikut;

Tabel 3.5
Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah Tahun 2019-2022

Tahun	Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Pengeluaran Pembiayaan	Total Belanja Daerah	Total Belanja + Pengeluaran Pembiayaan	Proporsi Belanja Pegawai + Pengeluaran Pembiayaan
2018	578.914.736.963,00	12.445.598.467	1.034.812.007.513,16	1.047.257.605.979,92	591.360.335.429,76
2019	611.681.974.972,00	2.145.900.000	1.132.741.493.764,59	1.134.887.393.764,59	613.827.874.972,00
2020	595.492.301.440,00	3.309.859.975	1.279.848.646.237,26	1.283.158.506.212,26	598.802.161.415,00
2021	544.384.810.819,00	35.601.470.842	1.075.461.856.405,61	1.111.063.327.247,61	579.986.281.661,00
2022*	412.716.464.701,00	64.033.992.958	684.276.269.442,99	748.310.262.400,99	476.750.457.659,00

Sumber : BPKAD Kota Bengkulu, 2022

11

Berdasarkan data pada table 3.5 dapat diketahui bahwa rata-rata belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kota Bengkulu selama periode 2018-2022 adalah sebesar 53,48 %. Rasio ini mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir seiring dengan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan/atau Pegawai Negeri Sipil serta pemberlakuan pemberian Tambahan Penghasilan PNS (TPP)

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan menghasilkan Pembiayaan Netto. Apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah. Gambaran terkait dengan defisit riil anggaran Kota Bengkulu dalam periode Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut;

Tabel 3.6
Penutupan Defisit Riil Anggaran Tahun 2019-2022

NO	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Daerah	1.207.852.459.445,47	1.297.073.339.665,20	1.191.757.364.771,00	1.195.798.859.539.00
2	Belanja Daerah	1.260.603.552.282,03	1.574.964.405.425,40	1.183.449.028.466,82	1.117.027.535.595.00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.145.900.000.00	3.309.859.975.00	35.601.470.842.00	82.735.323.944.00
4	Defisit Riil	36.411.655.387.64	200.183.654.163.38	60.448.919.318.68	77.735.323.944.00
5	Penerimaan Pembiayaan Daerah	58.625.412.091.56	214.959.261.179.20	27.296.663.695.82	5.000.000.000
6	Sisa Lebih Pembiayaan Daerah	91.891.167.479.20	92.891.167.479.20	60.452.448.476.68	

Sumber : BPKAD Kota Bengkulu, 2022

3.2.3 Analisis Fiskal Daerah

A. Belanja Pegawai

Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Pemerintah Kota Bengkulu pada periode tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat pada 2 tahun terakhir.

4/11

Proporsi belanja pegawai pada tahun 2019 sebesar 54,00%, turun menjadi 46,53% pada tahun 2020, dan selanjutnya pada 2 tahun terakhir mengalami kenaikan yakni 50,62% tahun 2021 dan 60,31 ditahun 2022. Gambaran tentang Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Belanja Daerah	Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah
2018	578.914.736.963,00	1.034.812.007.513,16	55,94
2019	611.681.974.972,00	1.132.741.493.764,59	54,00
2020	595.492.301.440,00	1.279.848.646.237,26	46,53
2021	544.384.810.819,00	1.075.461.856.405,61	50,62
2022*	412.716.464.701,00	684.276.269.442,99	60,31

Sumber : BPKAD Kota Bengkulu, 2022

B. Belanja Modal

Rasio belanja modal Pemerintah Kota Bengkulu fluktuatif sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional serta kemampuan keuangan daerah. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun nonfisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Gambaran tentang rasio belanja modal Kota Bengkulu tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8

Tabel 3.8
Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah
2018	168.786.330.090,00	1.034.812.007.513,16	16,31
2019	232.479.490.743,31	1.132.741.493.764,59	20,52
2020	352.392.711.932,69	1.279.848.646.237,26	27,53
2021	136.015.551.267,09	1.075.461.856.405,61	12,65
2022*	83.347.108.286,68	684.276.269.442,99	12,18

Sumber : BPKAD Kota Bengkulu, 2022

C. Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut. Rasio kemandirian daerah Kota Bengkulu pada periode 2019 – 2022 tidak pernah melebihi 5%. Rasio kemandirian daerah tertinggi pada tahun 2019 sebesar 5,47% dan terus menurun menjadi 4,25% pada tahun 2022 atau masuk pada kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap alokasi Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Bengkulu masih sangat tinggi. Untuk meningkatkan kemandirian daerah kedepannya, Pemerintah Kota Bengkulu perlu melakukan strategi untuk meningkatkan PAD. Gambaran tentang kemandirian Kota Bengkulu tahun 2019 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Total Pendapatan	Total PAD	Rasio Kemandirian
1	2	3	4
2018	1.096.906.666.865,93	182.884.786.441,88	0,17
2019	1.170.304.479.927,23	182.798.143.645,58	0,16
2020	1.079.664.992.073,88	155.149.376.261,88	0,14
2021	1.144.183.816.867,47	175.333.124.668,47	0,15
2022*	1.195.798.859.539,00	141.655.912.478,68	0,12

Sumber : BPKAD Kota Bengkulu, 2022

D. Kemampuan Membiayai Belanja Daerah.

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Tabel 3.10
Rasio Kemampuan Membiayai Belanja Daerah Tahun 2018-2022

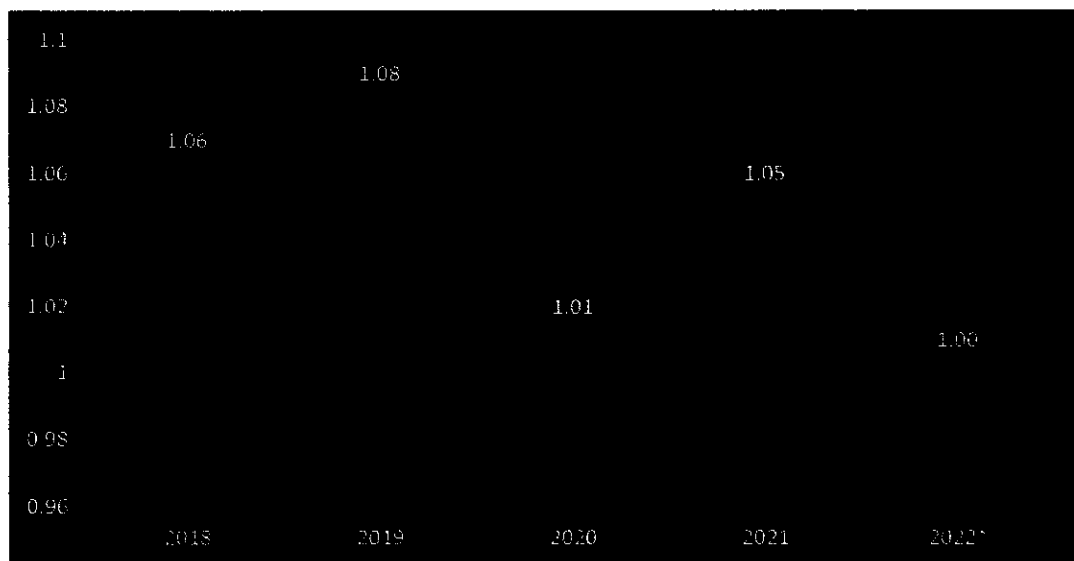
Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

1	2	3	4	5	6 (2+3)	7 (4+5)	8 (6/7)
2019	1.170.304.479.927,23	58.625.412.091,56	1.132.741.493.764,59	2.145.900.000,00	1.228.929.892.018,79	1.134.887.393.764,59	1,08
2020	1.079.664.992.073,88	214.959.261.176,20	1.279.848.646.237,26	3.309.859.975,00	1.294.624.253.250,08	1.283.158.506.212,26	1,01
2021	1.144.183.816.867,47	27.296.663.695,82	1.075.461.856.405,61	35.601.470.842,00	1.171.480.480.563,29	1.111.063.327.247,61	1,05
2022*	1.195.798.859.539,00	5.000.000.000,00	1.118.063.535.595,00	82.735.323.944,00	1.200.798.859.539,00	1.200.798.859.539,00	1

Sumber : BPKAD Kota Bengkulu, 2022

Kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah Kota Bengkulu pada periode 2019-2022 mengalami tren penurunan dan mencapai titik terendah pada tahun 2020 sebesar 1,01. Memperhatikan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi pinjaman daerah ataupun kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dikaji serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan ke depan

Gambar 3.11
Rasio Kemampuan Membiayai Belanja Daerah



3.3 Analisis Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan mencakup Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, proyeksi pendapatan, proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama, dan Penghitungan Kerangka Pendanaan. Analisis kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan untuk menghitung pendapatan dan penerimaan pembiayaan dan

pengalokasian belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan memperhitungkan kebutuhan yang bersifat periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2024-2026

Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan proyeksi yang cermat terhadap pendapatan untuk mendanai tindakan yang direncanakan melalui belanja daerah.

3.3.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam atas data pendapatan daerah 2019-2023 serta sejumlah regulasi terkini dari Pemerintah Pusat terkait Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Kelurahan. Gambaran tentang proyeksi pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut

Tabel 3.11
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

NO REK	URAIAN	TAHUN		
		PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	1,315,439,144,402.18	1,334,534,383,888.80	1,339,739,937,799.09
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	333,486,861,445.54	340,223,450,752.79	345,203,097,067.30
4.1.01	Pajak Daerah	210,526,186,084.00	214,736,709,805.68	216,968,287,378.17
4.1.02	Retribusi Daerah	42,278,796,000.00	43,124,371,920.00	43,572,527,157.60
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,685,207,833.54	6,885,764,068.55	6,891,780,755.60
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	73,996,671,528.00	75,476,604,958.56	77,770,501,775.93
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	980,062,282,956.64	992,326,433,136.01	992,547,615,731.79
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	897,944,704,630.00	906,924,151,676.30	907,013,946,146.76
4.2.01.01	Dana Perimbangan	897,944,704,630.00	906,924,151,676.30	907,013,946,146.76
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82,117,578,326.64	85,402,281,459.71	85,533,669,585.03
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	82,117,578,326.64	85,402,281,459.71	85,533,669,585.03
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,890,000,000.00	1,984,500,000.00	1,989,225,000.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,890,000,000.00	1,984,500,000.00	1,989,225,000.00

Proyeksi pendapatan yang disajikan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Walau demikian secara teknis dalam penyajiannya telah mempertimbangkan aspek-aspek yang sangat berpengaruh sehingga diharapkan proyeksi ini memiliki tingkat bias yang rendah dan dapat dijadikan acuan yang baik dalam rancangan kerangka pendanaan RPD Kota Bengkulu Periode 2024 – 2026.

3.3.1.2. Proyeksi Belanja Daerah

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa secara sederhana proyeksi belanja dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat yang menunjukkan keleluasaan yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Gambaran tentang proyeksi Belanja Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.12

Tabel 3.12
Proyeksi Belanja dan Pembiayaan Tahun 2024-2026

NO REK	URAIAN	TAHUN		
		PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	1,315,439,144,402.18	1,334,534,383,888.80	1,339,739,937,799.09
5.1	BELANJA OPERASI	1,043,873,955,748.63	1,052,844,720,207.27	1,053,103,329,003.56
5.1.01	Belanja Pegawai	632,839,066,858.23	639,167,457,526.81	639,230,741,433.50
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376,995,020,313.38	379,240,910,068.59	380,110,901,362.44
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	32,637,734,850.00	32,964,112,198.50	32,285,940,459.93
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,402,133,727.02	1,472,240,413.37	1,475,745,747.69
5.2	BELANJA MODAL	270,252,688,653.55	280,311,538,681.53	285,255,202,545.53
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51,417,052,723.27	51,931,223,250.50	54,013,613,885.80
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60,431,631,173.69	61,035,947,485.43	63,583,428,547.96
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	122,905,758,239.70	128,586,156,498.36	128,884,749,365.97
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35,498,246,516.89	38,758,211,447.24	38,773,410,745.80

A.

NO REK	URAIAN	TAHUN		
		PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
1	2	3	4	5
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,312,500,000.00	1,378,125,000.00	1,381,406,250.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,312,500,000.00	1,378,125,000.00	1,381,406,250.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	-	-	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	-	-

Secara umum proyeksi Belanja Kota Bengkulu Tahun 2024 – 2026 telah memperhitungkan kapasitas kemampuan keuangan riil dengan memasukan proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Proyeksi ruang fiskal daerah juga telah memperhitungkan belanja pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama berupa belanja pegawai yang diproyeksi mengalami pertumbuhan 1% per tahun sepanjang periode tahun 2024-2026.

3.3.2 Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam berbagai Kelompok Prioritas. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II.

Adapun ketentuan prioritas anggaran dialokasikan untuk mendanai sebagai berikut :

- 1) Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama yakni Belanja Pegawai;

- 2) Seluruh pendapatan yang bersumber dari DAK digunakan untuk mendanai belanja DAK baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada masing – masing perangkat daerah pengelola DAK;
- 3) Seluruh pendapatan hibah Dana BOS digunakan untuk mendanai Belanja BOS pada Dinas Pendidikan
- 4) Seluruh pendapatan yang bersumber dari JKN digunakan untuk belanja puskesmas pada Dinas Kesehatan;
- 5) Melaksanakan belanja mandatory khusus untuk memenuhi kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang.

Analisis permasalahan pembangunan daerah dilakukan terhadap semua urusan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis pohon kinerja. Sesuai dengan ketentuan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka permasalahan setiap urusan dianalisis berdasarkan kategorisasi masalah pokok, masalah dan akar masalah, sedangkan isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan masalah pokok pada setiap urusan dan mempertimbangkan isu strategis internasional, nasional dan provinsi.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas, sangat mendesak dan berpengaruh signifikan.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa mendatang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

4.1.1 Permasalahan Pokok Pemerintah Daerah

Permasalahan pokok merupakan permasalahan yang diprioritaskan menjadi agenda utama RPD yaitu:

1. Belum optimalnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan yang mengakibatkan tingginya kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan ekonomi.
2. Belum optimalnya kualitas sarana prasarana infrastruktur yang meliputi sistem jaringan jalan, kualitas lingkungan hidup dan penurunan risiko bencana guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar infrastruktur,
3. Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat, keberdayaan perempuan dan lembaga

- perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak, dan prevalensi stunting
4. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
 5. Belum optimalnya kinerja birokrasi dan Reformasi Birokrasi guna mendukung *Good Government* dan *Good Governance*.

4.1.2 Perumusan Permasalahan Tiap Urusan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan untuk penentuan program pembangunan daerah di Kota Bengkulu disesuaikan dengan bidang urusan yang tercantum pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permasalahan Pembangunan Daerah diuraikan berdasarkan hasil capaian kinerja penyelenggaraan tiap urusan pembangunan daerah. Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan sebagai berikut:

4.1.1.1 Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Bengkulu sudah baik dilihat dari angka kelulusan siswa tingkat SD dan SMP yaitu 98 – 100% dan dari harapan lama sekolah. Kota Bengkulu juga sudah memenuhi angka 16,03 lebih tinggi dari angka harapan lama sekolah Provinsi Bengkulu 13,67. Namun karena Kota Bengkulu merupakan ibu kota provinsi yang dijadikan pusat pendidikan terutama oleh kabupaten di sekitar Provinsi Bengkulu, maka meningkatkan mutu pendidikan yang ditunjang oleh guru yang berkualitas dan kreatif, sarana prasarana yang memadai, pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi menjadikan dunia Pendidikan di Kota Bengkulu siap untuk berdaya saing. Berikut ini identifikasi permasalahan pembangunan urusan pendidikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya layanan dan kualitas pendidikan	Kurang memadainya sarana dan prasarana Pendidikan	Rendahnya fasilitas pendukung pendidikan.
		Daya tampung ruang kegiatan belajar yang masih perlu ditingkatkan.
	Belum meratanya motivasi siswa untuk melanjutkan ke	Terbatasnya pemberian beasiswa bagi siswa yang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	jenjang pendidikan yang lebih tinggi	kurang mampu
	Kualitas pembelajaran yang belum optimal	Penerapan kurikulum yang belum maksimal
		Distribusi tenaga pengajar yang belum merata
		Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kreativitas guru.
Belum optimalnya pelestarian terhadap budaya lokal	Belum optimalnya pelestarian terhadap berbagai bentuk kebudayaan lokal	Kurangnya regulasi perlindungan cagar budaya
		Terbatasnya infrastruktur pelindung kebudayaan lokal
	Kurangnya internalisasi kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat	Kurangnya penguatan pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal
		Belum optimalnya apresiasi terhadap kebudayaan lokal.

4.1.1.2 Kesehatan

Sektor kesehatan berkontribusi penuh dalam penyiapan sumber daya manusia yang sehat, produktif dan mampu berkontribusi dalam pembangunan. Dari data jumlah kasus 10 penyakit terbanyak di Kota Bengkulu penyakit ISPA merupakan penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Kota Bengkulu di tahun 2021 yaitu sebanyak 4603 kasus. Secara umum, masih tingginya angka kejadian beberapa penyakit disebabkan oleh pola hidup sehat yang belum dianut oleh masyarakat. Rasio rumah sakit dan fasilitas kesehatan per 1.000 penduduk seperti rumah sakit 0,023, puskesmas 0,053, klinik 0,509, puskesmas pembantu 0,143 dan posyandu 0,602. Angka kesakitan di tahun 2021 mencapai 112,765 ini diakibatkan karena masih dalam masa pandemic covid-19. Untuk angka kematian balita meningkat dari 2,7 pada tahun 2020; menjadi 3,43 pada tahun 2021. Beberapa permasalahan bidang kesehatan sebagai berikut : (Data Prevalensi Stunting dan Keluarga Berisiko Stunting, Data Sarana dan Prasarana Pendukung Pencegahan Stunting)

Tabel 4.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Kurangnya dukungan pelayanan SPM	Kurangnya kualitas pendukung pelayanan kesehatan
		Kurangnya kualitas dan ketersediaan SDM kesehatan
		Kurangnya alat pendukung pelayanan kesehatan
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penerapan	Kurangnya promosi kesehatan Rendahnya kualitas sanitasi di

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	hidup bersih dan sehat	lingkungan rumah tangga
	Tingginya angka prevalensi stunting	Masih terdapat keluarga berisiko stunting
		Kurangnya sarana prasarana pendukung pencegahan stunting
		Kurangnya pengetahuan dan pendidikan gizi masyarakat
		Kurangnya promosi pencegahan untuk penurunan stunting
		Belum optimalnya pendataan warga yang berisiko stunting

4.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dari data Panjang jalan berdasarkan kondisi (km), kondisi jalan tahun 2021 dalam keadaan baik 591,084; sedang 232,720; rusak ringan 114,535; rusak berat 4,234. Dari data tersebut masih ditemui beberapa kondisi jalan yang masih memerlukan penanganan terutama pada wilayah yang sering terdampak banjir.

beberapa permasalahan masih ditemui seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas sarana prasarana infrastruktur	Belum optimalnya akses jalan dan jembatan antar kawasan	Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung jaringan jalan
	Belum optimalnya perencanaan pembangunan jalan dan jembatan.	Belum optimalnya kualitas konstruksi jaringan jalan.

4.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kawasan Perumahan di Kota Bengkulu dengan luas lebih kurang 5.899 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) hektar meliputi Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar, Kecamatan Kampung Melayu.

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diintervensi di Kota Bengkulu mengalami penurunan dalam periode 2 tahun terakhir, tahun 2019 : 149, tahun 2020 : 60, tahun 2021: 26 RTLH.

A.

Penurunan ini disebabkan karena kebijakan refocusing anggaran akibat pandemik covid-19. Kondisi tersebut menunjukkan penanganan RTLH masih perlu untuk ditingkatkan dengan memperhatikan faktor-faktor penunjang seperti sarana dan prasarana air bersih, sanitasi yang layak serta jalan lingkungan agar jumlah RTLH di Kota Bengkulu dapat terus ditekan.

Kawasan kumuh Kota Bengkulu tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bengkulu. Luasan kawasan kumuh di Kota Bengkulu pada tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 81 Tahun 2021 yang merupakan hasil pendataan tahun 2020 seluas 257,74 Ha yang tersebar di 73 RT. Masih banyaknya kawasan kumuh di Kota Bengkulu mengindikasikan bahwa cakupan rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan bangunan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya fasilitas pendukung perumahan seperti jalan lingkungan, akses terhadap air bersih dan sanitasi layak.

Belum optimalnya penataan pemukiman menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pemetaan permasalahannya dapat dilihat pada tabel berikut : (Data Kepemilikan Tanah Pemda dan Masyarakat yang bersertifikat

Tabel 4.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas sarana prasarana infrastruktur	Belum optimalnya penataan permukiman	Masih banyaknya rumah tidak layak huni
		Fasilitas permukiman tidak sesuai standar
		Belum optimalnya upaya pengentasan kawasan kumuh
		Belum ada dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman)

4.5.1. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum umum dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Upaya penciptaan ini dilakukan secara Bersama dengan melibatkan masyarakat melalui pembentukan dan pengaktifan Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Poskamling). Kondisi jumlah pelayanan poskamling di Kota Bengkulu dari tahun 2020 sampai tahun 2021 konstan yaitu cakupan pelayanan poskamling sebesar 46,83 persen.

Pemerintah Kota Bengkulu berusaha mengurangi konflik masyarakat dengan membina

lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat (LSM/Ormas) sebagai mitra pemerintah. Pembinaan kepada LSM/ormas menjadi penting untuk membantu pemerintah memberdayakan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pembinaan LSM/ormas, maka partisipasi sosial masyarakat dapat meningkat.

Menjaga ketentraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat bagi terlaksananya kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Permasalahan pembangunan daerah dalam urusan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai berikut :

Tabel 4.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Gangguan keamanan dan ketertiban	Masih tingginya pelanggaran terhadap Perda	Lemahnya pengawasan penegakan Perda
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi Perda
	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme
		Derasnya budaya asing yang masuk dan kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila
		Belum optimalnya dialog atau mediasi antar kelompok masyarakat untuk mencegah terjadinya ketidakharmonisan hubungan antar kelompok masyarakat

4.1.1.6 Sosial

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintah bidang sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar. Pembangunan sosial dijalankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu warga Negara dan menjamin akses masyarakat untuk mendapat pelayanan sosial.

Jumlah PPKS di Kota Bengkulu mengalami tren peningkatan, tahun 2020 dan tahun 2021 jumlah PPKS : 28,935, Jumlah PPKS yang tertangani tahun 2020 11,750, tahun 2021 : 17,121 . Jenis PPKS terbesar di Kota Bengkulu adalah keluarga miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Kota Bengkulu mengalami permasalahan tinggi penduduk PPKS. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor yaitu: belum optimalnya kualitas dan

A-

kuantitas pelayanan masalah sosial, belum optimalnya ketersediaan pelayanan sosial dalam menjangkau penerima layanan, belum optimalnya jumlah dan kompetensi pekerja sosial, rendahnya kuantitas lembaga sosial, belum optimalnya penanganan dan pemberian bantuan lanjut usia terlantar, rendahnya pendapatan PPKS, belum optimalnya pembinaan kepada anak cacat, dan penyandang disabilitas, belum optimalnya fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, belum optimalnya fasilitasi program keluarga harapan serta belum optimalnya pendampingan wanita rawan sosial ekonomi.

Masih tingginya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial (PPKS) disebabkan oleh beberapa masalah seperti tabel berikut :

Tabel 4.6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingginya angka kemiskinan	Masih tingginya beban pengeluaran	Perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin belum memadai
	Kantong kemiskinan masih tersebar di 9 (sembilan) kecamatan	Belum mutakhirnya data penduduk miskin.
		Masih banyaknya jumlah PPKS dan korban bencana

4.1.1.7 Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Bengkulu termasuk Kota yang rawan bencana, dua (2) potensi bencana di Kota Bengkulu yaitu: bencana tsunami dan banjir. Berdasarkan RTRW Kota Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu telah mengidentifikasi kawasan rawan bencana yang tersebar di beberapa wilayah dengan deskripsi sebagai berikut:

a. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Kawasan rawan bencana tsunami di Kota Bengkulu meliputi kawasan sepanjang pantai di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Sungai Serut, dan Kecamatan Kampung Melayu.

b. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir di Kota Bengkulu meliputi Kelurahan Tebeng, Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung, Kelurahan Bentiring, Kelurahan Rawa Makmur Kec Muarabangkahulu, Kelurahan Tanjung Jaya, Kelurahan Tanjang Agung, Kelurahan Sukamerindu, Kelurahan Semarang, Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut, Kelurahan Lingkar Barat

Kecamatan Gading Cempaka, Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu, dan Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban. Untuk itu masalah pokok yang diangkat belum optimalnya kesiapsiagaan baik pemerintah maupun masyarakat dalam pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang dapat dilihat dari akar masalah pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penurunan risiko bencana	Belum optimalnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kurangnya ketersediaan kualitas sarana dan prasarana kebencanaan

4.1.1.8 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Semakin bertambahnya penduduk dan padatnya permukiman menjadikan bahaya kebakaran juga semakin tinggi, untuk itu dibutuhkan pencegahan sedini mungkin dan penanggulangan apabila terjadi bahaya kebakaran, untuk itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna pencegahan dan penanggulangannya. Dari data yang disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, kasus kebakaran pada tahun 2021 sebanyak 66 kasus dan mengalami kecenderungan meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 92 kasus kebakaran.

Sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu terdiri dari *brandweer*, tangki, *Rescue* dan mobil tangga. Jumlah armada tertinggi yang dimiliki Kota Bengkulu yaitu *brandweer*. Sebagian besar armada *brandweer* dalam kondisi rusak ringan atau sebesar 77,8 persen dari jumlah total *brandweer*, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak berat. Seluruh armada tangki, *rescue*, mobil tangga dan mobil komando Kota Bengkulu dalam kondisi rusak ringan, sedangkan armada mobil operasional dalam kondisi baik. Masalah dan akar masalahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penurunan risiko bencana	Belum optimalnya pencegahan dini dan penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran	Kurangnya ketersediaan kualitas sarana dan prasarana bahaya kebakaran
		Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan

4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil dan mikro, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

4.1.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat pengangguran terbuka berkorelasi positif terhadap ketersediaan lapangan kerja dan keterampilan tenaga kerja. Besarnya tingkat pengangguran terbuka seringkali disebabkan oleh rendahnya serapan tenaga kerja di suatu daerah. Data mengenai tingkat pengangguran terbuka menjadi indikator paling penting di bidang ketenagakerjaan

Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5 persen dan 4,29. Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 2.53 persen menjadi 6,82. Penurunan terjadi pada 2021 sebesar 0.48 persen. Fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka ini mengindikasikan bahwa kebijakan penurunan pengangguran belum mampu menysasar akar masalah dengan baik. Pemetaan masalah dengan metode yang benar diperlukan untuk mengetahui penyebab fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bengkulu.

Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar meliputi urusan di bidang tenaga kerja adalah belum optimalnya penurunan tingkat pengangguran dan berakibat pada permasalahan pokok tingginya angka kemiskinan. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penurunan tingkat pengangguran	Belum optimalnya peningkatan kompetensi tenaga kerja	Kurangnya kualifikasi tenaga kerja
		Kurangnya penempatan tenaga kerja
		Adanya perselisihan ketenagakerjaan

4.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu indikator berdayanya masyarakat suatu daerah. Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu, Indeks Pembangunan Gender Kota Bengkulu

Tahun 2020 berada di angka 95,67 mengalami penurunan dari tahun 2019 yang berada di angka 96,97. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Bengkulu tahun 2020 sebesar 91.00 lebih kecil dari Kota Bengkulu.

Capaian IPG mengalami tren peningkatan. Capaian IPG Kota Bengkulu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu dan nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan pembangunan gender di Kota Bengkulu sudah optimal. Peningkatan IPG tersebut disebabkan adanya pemerataan pendidikan antara perempuan dan laki-laki di Kota Bengkulu.

Pembangunan peran perempuan pada sektor formal di Kota Bengkulu masih menjadi masalah pokok yaitu belum optimalnya keberdayaan perempuan dan lembaga perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak. Pada tabel berikut ini dapat dilihat masalah pokok, masalah, dan akar masalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya keberdayaan perempuan dan lembaga perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	Belum efektifnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Belum optimal peran serta perempuan dalam pemerintahan, masyarakat dan keluarga
		Belum optimalnya pemberdayaan lembaga dalam penguatan keluarga
	Belum efektifnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak
	Belum optimalnya fasilitasi dan pemenuhan hak anak	Belum optimalnya layanan pemenuhan hak anak

4.1.2.3 Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Bengkulu mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2019 namun di tahun 2020 terjadi penurunan skor PPH menjadi 82,1. Skor PPH Kota Bengkulu pada dua tahun terakhir mengindikasikan masih diperlukannya optimalisasi pola konsumsi pangan masyarakat. Upaya tersebut dapat dijalankan dengan pengembangan diversifikasi pangan lokal non-beras secara berkesinambungan. Lahan pertanian perkotaan juga tidak begitu luas maka dibutuhkan memaksimalkan fungsi lahan pertanian yang ada dan diperlukan inovasi-inovasi dalam teknologi pertanian perkotaan.

Masalah yang dihadapi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang

pangan adalah belum optimalnya ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan pendapatan	Belum optimalnya ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	Rendahnya ketersediaan bahan pangan pokok di Kota Bengkulu
		Keterbatasan lahan pertanian
		Rendahnya tingkat stabilitas harga pangan di Kota Bengkulu
		Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan

4.1.2.4 Pertanahan

Kepemilikan atas tanah dan bangunan dijadikan sebagai salah satu indikasi dari kesejahteraan masyarakat. Status kepemilikan tanah dan bangunan yang jelas di suatu daerah dapat meminimalisir terjadinya konflik atau sengketa tanah. Beberapa kasus ditemui terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah di beberapa wilayah seperti di Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Selebar dan Kecamatan Muara Bangkahulu.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain urusan pertanahan di Kota Bengkulu menjadi salah satu masalah pokok infrastruktur dan jaringan jalan terpadu dengan masih banyaknya aset tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat seperti tersebut dibawah ini :

Tabel 4.12
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terwujudnya sistem jaringan jalan yang baik dan terpadu	Masih banyak aset tanah Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat	Inventarisasi aset tanah yang belum jelas asal usulnya
		Belum optimalnya kemudahan perizinan pertanahan
		Belum optimalnya pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang

4.1.2.5 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi prioritas di

Kota Bengkulu yaitu permasalahan persampahan kota, pada tahun 2021 jumlah sampah yang mampu ditangani Pemerintah Kota Bengkulu adalah sejumlah 453 M³/hari. Ratusan ton sampah itu berasal dari sampah rumah tangga maupun pasar, yang terdiri atas sampah organik dan non organik. Pengangkutan ratusan ton sampah di 38 TPS di tiap kelurahan se- Kota Bengkulu dijalankan mengerahkan Mobil Amroll 12 unit dan dump truck 14 unit, L300 1 Unit dan roda tiga 1 unit dan dibantu pihak swasta dengan menggunakan 40 mobil carry. Permasalahan sampah yang muncul karena kapasitas TPA Air Sebakul yang overload untuk menampung sampah dan kendaraan operasional banyak yang rusak.

Semakin padatnya penduduk dan bertambah nya pemukiman penduduk, maka semakin optimal dibutuhkan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik terhadap pencemaran udara, air dan tanah serta timbunan sampah. Pemetaan permasalahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.13
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Kurangnya ketersediaan lahan untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau)
		Belum optimalnya penanganan pencemaran air dan udara
		Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap permasalahan lingkungan hidup
		Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

4.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dimana masih ditemukan belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester 1 tahun 2022 data wajib KTP Kota Bengkulu 263.680 jiwa; wajib KTP yang sudah rekam 259.816; wajib KTP yang belum rekam 3.864 jiwa. Untuk kepemilikan akta kelahiran wajib akta 118.329 jiwa; yang sudah memiliki akta 11.285 jiwa; yang belum memiliki akta 7.044 jiwa untuk usia 0-17 tahun.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa masih belum optimalnya pelayanan dibidang Kependudukan dan Pencatatan sipil seperti tersebut pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.14
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimal kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya kecamatan sebagai instansi pelayanan publik Sarana dan prasarana yang belum memadai Belum optimal kapasitas aparatur pelayanan

4.1.2.2 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dapat dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan program nasional untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Beberapa indikator dapat digunakan untuk melihat keberhasilan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diantaranya: cakupan peserta KB aktif, Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBD), dan persentase alat kontrasepsi yang digunakan penduduk. Cakupan KB aktif merupakan perbandingan antara jumlah peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS).

Cakupan peserta KB aktif di Kota Bengkulu menunjukkan tren yang fluktuatif. Data tahun 2022 masih bersifat sementara. Pada tahun 2021, baru 73,21 persen PUS di Kota Bengkulu yang berpartisipasi sebagai peserta KB aktif. Dengan capaian tersebut pemerintah Kota Bengkulu akan terus meningkatkan cakupan peserta KB sebagai upaya pengendalian penduduk.

Peran serta keluarga dalam menekan angka kelahiran guna pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih mejadi permasalahan di Kota Bengkulu dengan akar masalah dan masalah pokok pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.15
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya keberdayaan perempuan dan lembaga perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	Terbatasnya peran serta keluarga dalam menekan angka kelahiran	Belum optimalnya fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi tentang keluarga berencana.

A-

4.1.2.7 Perhubungan

Penyelenggaraan bidang urusan perhubungan dihadapkan pada masalah belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan, hal ini terlihat dari data alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) Kota Bengkulu di tahun 2018 berjumlah 14; tahun 2019 – 2022 berjumlah 17 hal ini menunjukan tidak ada penambahan APILL selama 4 tahun terakhir. Dari data Analisa dampak lalu lintas tahun 2019-2020 diadakan 2 kali rekayasa lalu lintas; 2021-2022 diadakan 1 kali rekayasa lalu lintas, sedangkan titik keramaian pada persimpangan bertambah dan dari beberapa titik yang mengalami keramaian dan macet pada waktu tertentu seperti pagi hari pada waktu pengantaran anak sekolah dan pada waktu siang dan sore hari penjemputan anak sekolah, dibutuhkan Analisa dampak lalu lintas (ANDALALIN) untuk pengaturan pada titik-titik macet tersebut.

Dari data Pengawasan dan penertiban angkutan telah dilakukan pengawasan dari tahun 2018-2021 masing-masing berjumlah 12 kali pertahun. Melihat begitu pesatnya perkembangan Kota Bengkulu jumlah pengawasan dan penertiban angkutan masih kurang terutama dengan adanya dengan angkutan yang melebihi tonase yang melewati jalan kota. Pemetaan permasalahannya sebagai berikut :

Tabel 4.16
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas sarana prasarana infrastruktur	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Belum memadainya fasilitas keselamatan transportasi
		Belum optimalnya pengawasan dan penertiban angkutan
		Belum optimalnya upaya rekayasa lalu lintas

4.1.2.8 Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 Kota Bengkulu dalam menerapkan Reformasi Birokrasi dan keterbukaan publik masih bernilai kurang dapat dilihat pada indeks SPBE Kota Bengkulu dengan nilai 1,68 dengan predikat kurang, ini disebabkan oleh masalah pokok, masalah dan akar masalah dibawah ini :

Tabel 4.17
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi	Belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis	Belum terlaksananya tata kelola SPBE yang terpadu

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
birokrasi	elektronik (SPBE)	Belum optimalnya pemberian pelayanan SPBE
		Belum terpenuhinya sumber daya SPBE yang kompeten
	Belum efektifnya pemanfaatan sarana prasarana teknologi informasi sebagai alat komunikasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat	Infrastruktur teknologi informasi belum menjangkau semua tempat pelayanan publik

4.1.2.9 Koperasi Usaha Kecil dan Mikro

Dari urusan koperasi usaha kecil dan mikro Kota Bengkulu permasalahan belum optimalnya pengelolaan dan permodalan koperasi, terbatasnya sarana dan pra sarana pengembangan UKM menjadi permasalahan untuk berkembangnya koperasi dan UKM di Kota Bengkulu. Dari data sectoral Dinas Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah koperasi aktif 814; koperasi tidak aktif 114; jumlah koperasi 928 dan persentase koperasi aktif sebesar 87,71 ini disebabkan oleh akar masalah dibawah ini :

Tabel 4.18
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Mikro

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan pendapatan	Belum optimalnya pengelolaan dan permodalan koperasi	Masih rendahnya jumlah koperasi sehat
		Rendahnya kapasitas manajerial koperasi dan UKM
		Rendahnya aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan usaha
	Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan UKM	Belum adanya rencana induk dan lahan sentra UKM
		Kurangnya promosi dan standarisasi produk unggulan UKM

4.1.2.10 Penanaman Modal

Masalah pokok yang dihadapi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan penanaman modal adalah masih rendahnya nilai pemerataan pendapatan dan belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Ditahun 2021 juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dari 481,48 Milyar rupiah ditahun 2020, turun sebesar 30,69 persen menjadi 694,71 Milyar rupiah ditahun 2021. Hal ini merupakan dampak dari pandemi covid-

19 yang masih melanda pada tahun 2021 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.19
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan pendapatan	Rendahnya nilai investasi	Belum optimalnya pelayanan perizinan secara terpadu
		Belum adanya rencana umum penanaman modal daerah
		Masih kurangnya daya tarik investor untuk berinvestasi
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pemanfaatan sistem perizinan online daerah	Belum optimalnya pemberian kemudahan perizinan investasi
		Belum optimalnya promosi dan perizinan

4.1.2.11 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kota Bengkulu dengan masalah pokok rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan rendahnya prestasi olahraga di Kota Bengkulu menjadi sorotan guna pemecahan masalah dan penentuan program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga. Pemetaan permasalahan seperti dibawah ini

Tabel 4.20
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Kurangnya pembinaan organisasi pemuda	Belum optimalnya pembinaan kepemimpinan pemuda
		Belum optimalnya pembinaan kader pemuda
Rendahnya prestasi olahraga di Kota Bengkulu	Kurangnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Belum optimalnya pembinaan terhadap atlet muda
		Kurangnya keikut sertaan atlet berkompetisi di luar daerah
		Kurangnya kompetisi penyelenggaraan olahraga

4.1.2.12 Statistik

Sejak tahun 2021 Dinas Statistik Kota Bengkulu merger dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Statistik mempunyai tugas dan fungsi tambahan sebagai pengelola data statistik sektoral Kota Bengkulu. Tugas dan fungsi Dinas Statistik Kota Bengkulu adalah mengelola data sektoral Kota Bengkulu dan sebagai walidata Kota Bengkulu.

A

Adapun masalah pokok, masalah dan akar masalah bidang statistik sebagai berikut :

Tabel 4.21
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral	Belum optimalnya koordinasi sinkronisasi pengumpulan pengolahan data sektoral
		Belum optimalnya SDM pengolah data statistik sektoral

4.1.2.13 Persandian

Belum optimalnya penerapan standar keamanan informasi menjadi permasalahan bidang persandian dan Belum optimalnya standar kompetensi SDM persandian dalam pemanfaatan aplikasi atau sistem elektronik menjadi akar masalah, ini disebabkan oleh masalah pokok, masalah dan akar masalah dibawah ini :

Tabel 4.22
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya penerapan standar keamanan informasi	Belum optimalnya standar kompetensi SDM persandian dalam pemanfaatan aplikasi atau sistem elektronik

4.1.2.14 Kebudayaan

Belum optimalnya pelestarian terhadap budaya lokal Kota Bengkulu menjadi permasalahan pokok untuk dipecahkan bersama yang disebabkan oleh masalah dan akar masalah tersebut dibawah ini :

Tabel 4.23
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelestarian terhadap budaya lokal	Belum optimalnya pelestarian terhadap berbagai kebudayaan lokal	Kurangnya regulasi perlindungan cagar budaya
		Terbatasnya infrastruktur pelindung budaya lokal
	Kurangnya internalisasi kebudayaan lokal dalam	Kurangnya penguatan pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	kehidupan masyarakat	
		Belum optimalnya apresiasi terhadap kebudayaan lokal

4.1.2.15 Perpustakaan

Perubahan budaya dan perilaku menuju digitalisasi menjadikan rendahnya budaya baca buku kalangan pelajar dan masyarakat, hal ini ditunjukkan dari data Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tahun 2022 bahwa jumlah kunjungan ke perpustakaan di tahun 2018 sebanyak 1427 terus menurun hingga 500 pengunjung di tahun 2021. Pelajar dan masyarakat sekarang lebih banyak mengakses android dan membaca bukupun sudah ada didalam e-book sehingga buku yang ada di perpustakaan daerah menjadi sepi pengunjung. Pemetaan permasalahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.24
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat	Terbatasnya jangkauan pelayanan perpustakaan	Kapasitas pengelolaan perpustakaan belum optimal
		Kurangnya sarana prasarana perpustakaan

4.1.2.16 Kearsipan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan pengawasan kearsipan terhadap Kementerian dan Lembaga tingkat pusat dan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Akreditasi Kearsipan, serta Pemerintah Provinsi melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Kementerian, Lembaga, tingkat pusat dan Pemerintah Provinsi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 388 Tahun 2021 dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Pemerintah kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi diverifikasi oleh ANRI. Kota Bengkulu dari hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2021 yang diverifikasi oleh ANRI, Kota Bengkulu mendapat kategori D (sangat kurang) peringkat 287 dari 508 Kabupaten/ Kota se Indonesia. Pemetaan permasalahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1.

Tabel 4.25
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Masih rendahnya kesadaran tentang budaya tertib arsip	Belum optimalnya perbaikan sistem administrasi dan informasi kearsipan
	Belum optimalnya sarana prasarana pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi	

4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah meliputi Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian. Berikut adalah beberapa persoalan urusan pilihan yang dihadapi oleh Kota Bengkulu.

4.1.3.1 Perikanan

Kota Bengkulu berada di sepanjang pesisir pantai Sumatera sehingga tak heran mata pencaharian penduduk sebagai nelayan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di Kota Bengkulu. Masalah pokok belum optimalnya pemerataan pendapatan yang disebabkan oleh masalah dan akar masalah seperti dibawah ini :

Tabel 4.26
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintah Bidang Perikanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan pendapatan	Rendahnya produksi sektor perikanan	Belum optimalnya produksi ikan tangkap
		Belum optimalnya produksi ikan budidaya
		Masih kurangnya pendampingan terhadap nelayan dalam pengelolaan perikanan
	Kurangnya kapasitas permintaan pasar terhadap produk-produk olahan hasil perikanan	Masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan
		Belum optimalnya pengelolaan produksi hasil perikanan

4.1.3.2 Pariwisata

Pariwisata merupakan penyumbang laju pertumbuhan ekonomi, namun sampai dengan saat ini sektor pariwisata masih belum berkontribusi secara maksimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing. Ini disebabkan oleh masalah pokok, masalah dan akar masalah berikut :

Tabel 4.27
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan pendapatan	Kurang pengembangan destinasi dan sistem pemasaran wisata	Kurang pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata
		Kurang pemberdayaan kelompok sadar wisata, sinergi kerjasama antara pelaku wisata, masyarakat dan pemerintah daerah
		Terbatasnya promosi budaya pendukung pariwisata di dalam maupun di luar daerah dan membuat kalender wisata
		Belum optimalnya sistem pemasaran wisata berbasis teknologi
	Belum optimalnya pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	Belum optimalnya pengembangan sumber daya alam
		Belum memenuhi standarisasi produk ekonomi kreatif

4.1.3.3 Pertanian

Dengan terbatasnya lahan Pertanian di perkotaan yaitu dengan memfungsikan lahan pertanian berkelanjutan dan pemanfaatan lahan pekarangan secara maksimal diharapkan akan membantu permasalahan pertanian di Kota Bengkulu. Pemetaan permasalahannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.28
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan pendapatan	Menurunnya kualitas dan produktivitas pertanian dan peternakan	Rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani
		Belum optimalnya akses terhadap bantuan permodalan
		Terbatasnya benih varietas unggul
		Belum optimalnya pemberantasan hama penyakit

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Terbatasnya penerapan iptek tepat guna
		Adanya alih fungsi lahan pertanian
		Kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan rumah sebagai lahan pertanian perkotaan
		Terbatasnya kapasitas SDM penyuluh pertanian
		Kurangnya integrasi jaringan irigasi tersier
		Kurang optimalnya pemakaian bibit unggul
		Kurangnya sumber daya penyuluh pertanian

4.1.3.4 Perdagangan

Urusan perdagangan dalam pemetaan permasalahan menjadi masalah pokok penyebab munculnya belum optimalnya pemerataan pendapatan ini disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut ini :

Tabel 4.29
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan pendapatan	Belum terwujudnya iklim perdagangan yang baik	Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar rakyat
		Rendahnya kualitas sarana distribusi barang
		Ketidakstabilan harga barang pokok dan barang penting

4.1.3.5 Perindustrian

Urusan perindustrian dalam pemetaan permasalahan menjadi masalah pokok penyebab munculnya belum optimalnya pemerataan pendapatan ini disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut ini :

Tabel 4.30
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemerataan pendapatan	Rendahnya nilai produksi industri kecil dan mikro	Belum tersedianya dokumen perencanaan industri
		Rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan industri kecil dan mikro

		Kurangnya orientasi pasar terhadap produk industri

4.1.3.6 Unsur pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur pendukung Urusan Pemerintahan meliputi urusan sekretariat daerah dan DPRD, pemetaan permasalahannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

a. Sekretariat Daerah

Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi masalah pokok pada unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, ini dapat dilihat dari belum optimalnya pelaksanaan penyederhanaan organisasi, pencapaian nilai reformasi birokrasi tahun 2018 dengan predikat c nilai 50,76 terjadi peningkatan sejak tahun 2019 – sekarang, begitu juga dengan nilai evaluasi SAKIP dari tahun 2018 predikat CC dengan nilai 53,49, terjadi peningkatan dari tahun 2019 – sekarang. Peningkatan nilai tersebut belum optimal karena masih belum terintegrasinya beberapa urusan terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, Monitoring Evaluasi dan pelaporan. Pemetaan permasalahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.31
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Masih adanya tumpang tindih antara tugas dan fungsi sekretariat daerah dengan perangkat daerah	Masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah
	Belum optimalnya kapasitas untuk merumuskan peraturan kepala daerah	Belum optimalnya pelaksanaan SOTK
	Belum optimalnya kemampuan pelaksanaan kebijakan daerah	Belum optimalnya kemampuan <i>Legal Drafting</i> (Pembentukan Peraturan)
		Belum optimalnya koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

b. Sekretariat Dewan

Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi masalah pokok pada unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Dewan Kota Bengkulu. Dari data capaian Bidang Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017-2021 terjadi fluktuasi terhadap data fasilitasi perumusan daerah Rancangan Peraturan daerah (Raperda), tahun 2020 43 Raperda yang diajukan, dan Peraturan Daerah (perda) tahun 2020 11 Perda yang disahkan tahun 2021 15 Perda yang disahkan. Untuk Reses telah dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu. Pemetaan permasalahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.32
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Dewan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya fasilitasi dalam perumusan peraturan daerah	Belum optimalnya fasilitasi penyediaan bahan-bahan pembahasan Raperda
	Belum optimalnya fasilitasi dalam tindak lanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat	Belum tersedianya mekanisme/prosedur pengaduan secara baku
		Belum optimalnya pelaksanaan dan hasil reses anggota DPRD

4.1.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan memiliki peran penting untuk mewujudkan tujuan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN di Kota Bengkulu. Sistem tata kelola pemerintahan meliputi beberapa urusan yaitu: urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan serta kesekretariatan. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi penunjang yang membangun tata kelola pemerintahan di Kota Bengkulu setelah dipetakan, ada beberapa permasalahan sebagai berikut :

4.1.4.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan urusan pemerintahan sebagai unsur penunjang pemerintahan yang memiliki peranan penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Pemetaan permasalahan urusan perencanaan pembangunan daerah seperti tersebut dibawah ini :

Tabel 4.33
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya keterpaduan antar dokumen perencanaan	Perencanaan sektoral pada masing-masing perangkat daerah yang belum berbasis pada perencanaan jangka menengah dan jangka panjang
		Ketersediaan data perencanaan pembangunan yang belum optimal
		Belum optimalnya kapasitas



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya keterpaduan antara perencanaan dengan penganggaran dan realisasi pembangunan	aparatur perencanaan
		Masih rendahnya tindak lanjut hasil penelitian dan pengembangan
		Belum padunya dokumen perencanaan dengan KUA-PPAS dan APBD
		Belum optimalnya tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam musrenbang
		Belum optimalnya pengendalian realisasi pembangunan

4.1.4.2 Keuangan

Kota Bengkulu mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat tahun berturut-turut sejak tahun 2018 - 2021. Prestasi tersebut tentunya tak lepas dari dukungan semua Perangkat Daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik. Namun dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Uursan Keuangan, masih terdapat beberapa permasalahan, pemetaan permasalahan pembangunan daerah urusan keuangan sebagai berikut :

Tabel 4.34
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya tidak lanjut hasil pemeriksaan keuangan	Belum optimalnya fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
	Belum optimalnya legalisasi aset daerah	Belum optimalnya identifikasi aset daerah yang belum memiliki kejelasan status
	Belum optimalnya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah	Belum adanya pelayanan pajak dan retribusi berbasis elektronik
		Belum optimalnya kemampuan aparatur pelayanan pajak dan retribusi daerah

4.1.4.3 Kepegawaian

Belum optimalnya pelaksanan birokrasi reformasi sebagai masalah pokok untuk urusan kepegawaian. Hasil penilaian indeks professional ASN Kota Bengkulu masih bernilai rendah dan perlu dijadikan pemecahan masalah oleh unsur kepegawaian. Adapun masalah dan akar masalah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

A

Tabel 4.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Penempatan pegawai pada setiap jabatan yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	Belum optimalnya penerapan analisis jabatan dan analisis beban kerja secara komprehensif
		Belum optimalnya sistem seleksi terbuka bagi jabatan struktural
	Belum optimalnya pelayanan kepegawaian	Belum optimalnya sistem informasi manajemen kepegawaian
		Belum optimalnya sistem verifikasi syarat kenaikan pangkat, jabatan, gaji dan tunjangan

4.1.4.4 Pendidikan dan Pelatihan

Belum optimalnya pelaksanaan birokrasi reformasi sebagai masalah pokok untuk urusan pendidikan dan pelatihan, dan belum optimalnya peningkatan kompetensi pegawai menjadi permasalahan di Kota Bengkulu. Adapun masalah dan akar masalah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.36
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya peningkatan kompetensi pegawai	Masih kurangnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN
		Belum optimalnya beasiswa pendidikan dan tugas belajar berdasarkan kebutuhan daerah

4.1.4.5 Penelitian dan Pengembangan

Sebagai unsur penelitian dan pengembangan daerah termasuk juga inovasi daerah, Kota Bengkulu sudah dapat maju di tingkat nasional dan menjadi juara tingkat nasional dengan meraih hadiah 3 (tiga) milyar dari sektor transportasi tahun 2020 dalam lomba *new normal covid-19* dan Kota Bengkulu juga berbenah diri untuk menempatkan inovasi di setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan. Pemetaan permasalahan urusan perencanaan pembangunan daerah seperti tersebut dibawah ini :

Tabel 4.37
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Masih rendahnya hasil penelitian dan pengkajian yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah	Belum adanya fungsional peneliti
		Minimnya dukungan anggaran untuk melakukan penelitian dan pengkajian
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas inovasi perangkat daerah dan masyarakat
		Masih minimnya kerja sama dengan perguruan tinggi dan institusi kelitbangan lainnya dalam penyelenggaraan kelitbangan

4.1.5 Unsur Pengawasan

Sistem pengendalian intern Kota Bengkulu telah menunjukkan perbaikan yaitu ditandai dengan kapabilitas APIP yang mencapai level 3 (tiga) namun masih disertai dengan beberapa catatan perbaikan seperti belum memaksimalkan Zona Integritas (ZI). Permasalahan urusan pengawasan di kota Bengkulu dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.38
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/ pemantauan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Belum optimal Inisiatif perangkat daerah dan keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem pengaduan
		Belum optimalnya perangkat daerah yang menjalankan SPIP
	Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Masih kurangnya peningkatan kapasitas bagi APIP
		Masih terdapat OPD yang belum menjalankan manajemen risiko
Sistem pengendalian intern pemerintah yang belum optimal		Belum melaksanakan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan	Belum optimalnya fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)

4.1.6 Unsur Kewilayahan

4.1.6.1 Kecamatan

Kecamatan di Kota Bengkulu berjumlah 9 (sembilan) kecamatan, dengan masing-masing kecamatan memiliki kelurahan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sungai Serut memiliki 7 (tujuh) Kelurahan
2. Kecamatan Muara Bangkahulu memiliki 7 (tujuh) kelurahan
3. Kecamatan Gading Cempaka Memiliki 5 (lima) Kelurahan
4. Kecamatan Ratu Agung memiliki 8 (delapan) Kelurahan
5. Kecamatan Teluk Segara memiliki 13 (tiga belas) Kelurahan
6. Kecamatan Selebar memiliki 6 (enam) Kelurahan
7. Kecamatan Ratu Samban memiliki 9 (sembilan) Kelurahan
8. Kecamatan Singaran Pati memiliki 6 (enam) Kelurahan\
9. Kecamatan Kampung Melayu memiliki 6 (enam) kelurahan

Tabel 4.39
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kecamatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat bidang pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan kemasyarakatan	Belum optimalnya informasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat
		Kurangnya sarana prasarana pendukung
	Belum optimalnya pemberdayaan kelurahan dan kemasyarakatan	Masih kurangnya kapasitas dan kualitas SDM kelurahan
		Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

4.1.7 Unsur Pemerintahan Umum

4.1.7.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan pembangunan daerah dalam urusan keamanan, ketertiban menjadi

permasalahan pokok dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa dan politik. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.40
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Gangguan keamanan dan ketertiban	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme
		Derasnya budaya asing yang masuk dan kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila
		Belum optimalnya dialog atau mediasi antar kelompok masyarakat untuk mencegah terjadinya ketidak harmonisan hubungan antar kelompok masyarakat

4.2 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

4.2.1.1 Pemulihan Ekonomi Global

Upaya pemulihan ekonomi menjadi isu global setelah berlangsungnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi perekonomian hampir di seluruh negara. Berdasarkan laporan dari International Monetary Fund (IMF), beberapa negara sudah mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus pada tahun 2020 seperti Perancis (-9,0 persen), Italia (-9,2 persen), Inggris (-10,0 persen), Singapura (-6,6 persen), India (-4,5 persen), dan lain sebagainya. Krisis fiskal menjadi permasalahan yang kemudian muncul di saat negara hanya memiliki ruang kebijakan yang terbatas seperti pada beberapa negara berkembang. Data World Bank menjelaskan bahwa selama tahun 2020

perdagangan dunia turun 13% – 32%, perjalanan internasional turun sampai 52%, dan pertumbuhan ekonomi dunia senilai -5,2%. Apabila kontraksi ini terus terjadi, selama dua tahun kedepan dunia diprediksi kehilangan output ekonomi senilai US\$ 12 triliun. Kondisi ini ikut diperparah dengan 195 juta orang kehilangan pekerjaan dan 420 – 580 juta orang menjadi miskin pada waktu yang sama. Oleh karena itu, penanganan permasalahan di sektor kesehatan menjadi langkah awal yang difokuskan pada beberapa negara untuk memulihkan perekonomiannya. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh keberhasilan program vaksinasi dan distribusinya secara universal. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi dan pemberian insentif untuk alokasi sumber daya yang efisien sebagai upaya pemulihan jangka menengah. Sementara itu, untuk jangka panjang perlu difokuskan pada penguatan kerja sama internasional, reformasi kerangka kebijakan, serta penanganan terhadap perubahan iklim. Perlu digarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi global sangat bergantung pada beberapa hal antara lain perkembangan kasus Covid-19 harian; ketidakmerataan akses vaksin; kecepatan pemulihan sektor terdampak langsung seperti pariwisata, transportasi, ekspor komoditas, dan lain-lain; lalu kecepatan normalisasi kebijakan moneter pada negara-negara maju. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi global diprediksi tidak merata serta sangat dipengaruhi oleh perkembangan pandemi di masa mendatang.

4.2.1.2 Pergeseran Peran Ekonomi Kawasan Asia – Pasifik dalam Perekonomian Global

Prospek ekonomi di kawasan Asia Pasifik tetap kuat dan bergeser ke arah yang lebih baik, setidaknya sebelum pandemi Covid-19 melanda semua negara. Kekuatan perekonomian Asia – Pasifik ditopang oleh keberadaan 41 persen penduduk dunia serta 50 persen transaksi internasional yang terjadi pada kawasan ini. IMF mendefinisikan perekonomian Asia – Pasifik selama beberapa dekade kebelakang yang lekat dengan permintaan domestik yang kuat, kemajuan teknologi, dan investasi swasta yang besar. Tren ini juga ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahap seiring dengan perkembangan pemulihan ekonomi. Berbagai kerjasama lintas negara yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerjasama tersebut antara lain Trans Pacific Partnership, ASEAN Regional Forum (ARF), Shanghai Cooperation Organization (SCO), East Asia Summit (EAS), dan Expand ASEAN Maritime Forum.

4.2.1.3 Keterbukaan Pasar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pemberlakuan MEA di kawasan ASEAN tetap menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia, bahkan Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu kedepan. MEA dengan prinsip perdagangan bebas akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan juga basis produksi.

ASEAN juga diharapkan menjadi wilayah yang stabil, sejahtera, dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi merata, kemiskinan yang berkurang, dan sosio-ekonomi beragam. Terdapat lima hal yang tidak dapat dibatasi peredarannya dalam pemberlakuan MEA yaitu arus barang, arus jasa, arus modal, arus investasi, dan arus tenaga kerja terlatih. Perluasan pangsa pasar Indonesia khususnya ekspor antar negara ASEAN, transfer teknologi, dan sebagainya menjadi dampak positif dari pemberlakuan MEA. Oleh karena itu, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, serta kompeten perlu ditingkatkan dan menjadi peluang kompetitif mengingat ketersediaannya yang cukup besar di Indonesia. Namun di sisi lain, kerjasama semacam ini dapat meningkatkan sifat konsumtif apabila bangsa Indonesia hanya sebagai penerima dampak bukan sebagai pemeran utama dalam MEA. Kerjasama MEA memang belum sepenuhnya diterapkan, namun kemudahan barang impor yang masuk serta gencarnya investasi dari luar sudah dapat dirasakan beberapa tahun kebelakang. Oleh karena itu, isu ini perlu direspon baik oleh pemerintah, pengusaha, dan stakeholder lainnya agar negara dan juga daerah dapat mempersiapkan dan mengambil peran dari pemberlakuan MEA.

4.2.1.4 Stabilitas Politik Global yang Dinamis

Kebijakan proteksi ekonomi Amerika Serikat, perang dagang dengan Tiongkok, diikuti dengan penarikan diri dari komitmen Trans Pacific Partnership (TPP) akan memberikan pengaruh pada inisiatif perdagangan dunia, termasuk Indonesia. Amerika dan Tiongkok merupakan salah satu negara tujuan ekspor komoditas sehingga secara tidak langsung kebijakan yang diambil kedua negara juga berdampak pada Indonesia, minimal dalam sektor perdagangan. Selain itu, ketegangan politik di Asia Timur dan Timur Tengah serta gerakan radikalisme dan terorisme yang berkembang dan sedang berkecambah di beberapa negara juga menjadi tantangan terhadap stabilitas politik dan keamanan baik global, regional, maupun nasional. Isu ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kedepan agar seluruh stakeholder lebih pro-aktif dalam mengantisipasi perubahan dan pergerakan tersebut.

4.2.1.5 Transformasi Teknologi dan Industri 4.0

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Manfaat transformasi ini dirasakan oleh seluruh negara baik maju maupun berkembang dilihat dari lekatnya teknologi digital dalam kehidupan masyarakatnya. Teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan selanjutnya adalah kemampuan dalam

mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Transformasi teknologi digital juga menandai dimulainya era industri 4.0 atau industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasi awan, serba internet, dan cetak tiga dimensi. Banyak perusahaan multinasional yang sudah bertransformasi dan memanfaatkan kecanggihan ini seperti yang bergerak dalam bidang transportasi, otomotif, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Pengaplikasian prinsip-prinsip dalam industri 4.0 diyakini akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Namun di sisi lain, tren ini juga berpotensi menyebabkan hilangnya 60 persen pekerjaan di dunia karena tergantikan oleh otomatisasi mesin. Isu ini harus direspon dengan baik dengan agar pemanfaatan teknologi dapat dilakukan secara maksimal, utamanya dalam mendukung perkembangan ekonomi dan juga kepentingan lainnya dari setiap negara.

Istilah industri 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair tanggal 4 – 8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, dimana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Pada level nasional sejumlah sektor industri telah siap memasuki era industri 4.0. beberapa diantaranya seperti industri semen, petrokimia, otomotif serat makanan dan minuman. Faktor penggerak yang harus diperkuat untuk menyambut industri 4.0 di Indonesia adalah peningkatan otomatisasi, komunikasi *machine to machine*, komunikasi *human to machine*, *artificial intelligence* (AI) serta pengembangan teknologi berkelanjutan.

4.2.1.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDG's)

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) merupakan deklarasi internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah menepatkan 17 TPB/ SDG's yang terdiri atas 169 target untuk mengukur pencapaian target.

SDG's menggantikan *Millenium Development Goals* (MDG's) yang tidak lagi berlaku terhitung akhir tahun 2015. Tujuan SDG's adalah seperangkat target yang berhubungan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) untuk tahun 2016 sampai dengan 2030 adalah :

1. Kemiskinan

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat

2. Kelaparan

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakan pertanian yang berkelanjutan

3. Kesehatan

Memastikan hidup yang sehat dan menggalakan kesejahteraan untuk semua usia.

4. Pendidikan

Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang

5. Wanita

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan

6. Air

Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesimbangan atas air dan sanitasi untuk semua orang

7. Energi

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern bagi semua orang

8. Ekonomi

Menggalakan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, berkelanjutan, lapangan kerja yang untuk dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang

9. Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakan industrialisasi berkesinambungan dan terbuka serta mendorong inovasi

10. Kesenjangan

Mengurangi kesenjangan didalam dan diantara negara

11. Komunitas

Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan

12. Konsumsi

Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan

13. Iklim

Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruh-pengaruh nya

14. Lautan yang berkesinambungan

Melestarikan dan menggunakan samudera, laut dan sumber-sumber daya maritim

secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari

15. Ekosistem

Melindungi, mengembalikan dan menggalakan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan dan memperlambat serta mengembalikan *degradasi* tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.

16. Institusi

Menggalakan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab serta terbuka disemua tingkatan

17. Kemitraan

Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Beberapa fokus pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun setidaknya sudah tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fokus tersebut juga menjadi isu yang berpengaruh terhadap agenda-agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial menjadi awal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Kemampuan stakeholder di daerah merupakan kunci dalam menerjemahkan isu-isu nasional secara baik sehingga respon yang diberikan dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan. Berikut merupakan isu-isu strategis nasional yang perlu dipertimbangan bagi pembangunan wilayah:

A. Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaannya selama lima tahun kedepan dilakukan secara bertahap, diantaranya melalui peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi perdagangan.

B. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan selama lima tahun kedepan dimulai dari mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, dilanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan, dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

C. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja terdampak pandemi.

D. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan selama lima tahun kedepan dimulai dari mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/ keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

E. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar selama lima tahun kedepan dimulai dari pemulihan pascapandemi Covid-19 dan selanjutnya diarahkan pada pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota

metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode peningkatan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur.

F. Membangun Lingkungan, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana non-alam seperti pandemi Covid-19 serta perubahan iklim diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana non alam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

G. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dimulai dari mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui penguatan integrasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik; penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerja sama pembangunan internasional; optimalisasi penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat kebijakan physical distancing; serta pemulihan pelayanan public

4.1.4 Isu Strategis Provinsi Bengkulu

4.1.4.1 Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Bengkulu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami perlambatan. Sempat mencapai sebesar 5,28% pada tahun 2016, ekonomi Bengkulu kemudian turun dan bergerak fluktuatif dikisaran 4,9%. Sejak tahun 2017, Ekonomi Bengkulu selalu berada dibawah rata-rata nasional. Perlambatan ekonomi tersebut mengakibatkan rendahnya daya saing Bengkulu. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asia Competitiveness Institute (ACI) Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS) menunjukkan daya saing Provinsi

411

Bengkulu menempati peringkat 29 dari 34 Provinsi di Indonesia. Peringkat tersebut sekaligus menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai daerah di Indonesia dengan nilai daya saing terendah di Sumatera. Kinerja daya saing tersebut diukur dengan 103 Indikator yang dikelompokkan dalam 4 aspek yaitu (1) stabilitas ekonomi makro, (2) perencanaan pemerintah dan institusi, (3) kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja, dan (4) kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur. Terlebih, pada tahun 2020-2021, akibat pandemic Covid-19 dan dampaknya, ekonomi Bengkulu tertekan sangat dalam hingga mencapai minus 0,02% pada tahun 2020. Dampak pandemic Covid-19 mungkin akan terus berlanjut selama beberapa tahun mendatang. Provinsi Bengkulu memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Bengkulu memiliki Pelabuhan Pulau Baai, berada disisi barat Sumatera dan berbatasan langsung dengan 4 (empat) provinsi besar di Sumatera. Dengan proyek jalan Tol Trans Sumatera ruas Bengkulu – Lubuk Linggau yang saat ini sedang dibangun, maka jika mampu dimanfaatkan dengan baik, ekonomi Bengkulu akan berkembang dan meningkat dengan pesat. Selain itu, investasi juga dapat diandalkan oleh Bengkulu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Share PMTB dalam PDRB Provinsi Bengkulu mencapai 40% lebih, yang menggambarkan bawah pembentukan modal di Provinsi Bengkulu cukup besar. Hal ini menandakan bahwa Bengkulu memiliki potensi yang layak dikembangkan sebagai tujuan investasi.

4.1.4.2 Kemiskinan, Kesejahteraan dan Daya Saing SDM

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu dapat dikatakan masih cukup rendah. Walaupun sudah menunjukan perbaikan yang signifikan, namun tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu masih dibawah rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan Bengkulu pada maret tahun 2021 mencapai 15,22%, jauh berada diatas rata-rata nasional yang sebesar 10,14%.

4.1.4.3 Pengembangan konektivitas serta pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pengembangan konektivitas serta pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan meliputi :

- a. Infrastruktur
- b. Ketahanan, Mitigasi dan Penanganan Bencana
- c. Pengembangan Konektivitas Daerah

d. Pembangunan Rendah Karbon dan Emisi Gas Rumah Kaca

4.1.4.4 Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif dan Kompetitif.

Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif dan Kompetitif meliputi:

- a. Hilirisasi Komoditas Unggulan
- b. Pembangunan Kemaritiman yang Integratif
- c. Pengembangan Pariwisata yang komprehensif dan kompetitif

4.1.4.5 Peningkatan Kinerja Birokrasi

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Indeks profesionalitas ASN di Provinsi Bengkulu masih rendah. Pada tahun 2020, Indeks Profesionalitas ASN baru mencapai 71,92. Abdi negara atau yang sekarang dikenal dengan nama Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan digariskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat mutlak diperlukan. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

4.1.4.6 Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi akibat Pandemi COVID-19

Mengembalikan ekonomi Bengkulu keposisi semula seperti sebelum terjadinya pandemic Covid-19 memerlukan langkah strategis yang terpadu untuk menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk masa depan. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), yaitu:

1. Penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan di fasilitas umum;
2. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat;
3. Perpaduan pembelajaran melalui daring dan luring;
4. Digitalisasi keuangan daerah dan UMKM;
5. Pembatasan jumlah pengunjung pada pelayanan kesehatan dan fasilitas umum;
6. Peningkatan digitalisasi pelayanan publik; dan

7. Efisiensi belanja barang dan jasa pemerintah. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Bengkulu dan memastikan masyarakat kembali memiliki ketahanan sosial pada diri, keluarga dan masyarakat.

4.1.5 Isu Strategis Kota Bengkulu

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Maka Kota Bengkulu mengangkat isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi

Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor potensial dan dapat dilihat dari PDRB Kota Bengkulu atas harga konstan mengalami fluktuasi. Dari tahun 2019 PDRB Kota Bengkulu 5,41, penurunan terjadi pada tahun 2020 karena adanya kondisi pandemi covid-19. Tahun 2021 mulai mengalami peningkatan sebesar 3,47. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal di Kota Bengkulu mempengaruhi kesiapan Kota Bengkulu dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.

Untuk itu pemerataan pendapatan bagi masyarakat Kota Bengkulu menjadi sasaran utama dalam mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator yang menjadi sasaran terwujudnya pemerataan pendapatan bagi masyarakat Kota Bengkulu ini dipengaruhi oleh :

a. Indeks Gini

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Di tahun 2021 koefisien gini Kota Bengkulu adalah 0,38 persen tidak mengalami kenaikan atau penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 juga di angka 0,38 persen, yang dimaknai bahwa tingkat ketimpangan Kota Bengkulu rendah karena kurang dari 0,4 berdasarkan nilai koefisien dari BPS Kota Bengkulu tahun 2021.

Beberapa sektor pembangunan di Kota Bengkulu seperti terbatasnya lahan pertanian, namun untuk ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, harus tetap terjaga untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.

Produksi perikanan di Kota Bengkulu tahun 2021 sebesar 41.747,65 ton, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 42.740,97 ton (*Sumber : Data Sektor Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022*), hal ini dikarenakan belum stabilnya sistem perekonomian di

Kota Bengkulu karena wabah virus covid-19, tetapi keberadaan sumber daya perikanan dan kelautan yang demikian besar merupakan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi terhadap PDRB Kota Bengkulu sector perikanan.

Sektor perdagangan mempunyai beberapa permasalahan yang ditandai dengan belum terwujudnya iklim perdagangan yang baik, hal tersebut disebabkan oleh manajemen pengelolaan pasar yang belum optimal, kualitas sarana distribusi barang yang masih rendah serta harga barang pokok dan barang penting yang tidak stabil.

Sektor perdagangan yang berkontribusi terhadap PDRB atas harga konstan Kota Bengkulu tahun 2021 adalah sebesar 24.974,92 milyar. Pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu Atas Harga Konstan mengalami fluktuasi. Penurunan terjadi pada tahun 2020 karena adanya kondisi pandemi COVID-19. Tahun 2021 mulai mengalami peningkatan PDRB sebesar 3,47. Faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu adalah pertumbuhan PDRB sektor potensial, seperti pertumbuhan PDRB perikanan, perdagangan, perindustrian dan jasa. Pada periode ke depan sektor pariwisata akan digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu.

Rendahnya nilai produksi industri kecil dan mikro ditandai dengan dokumen perencanaan industri yang belum tersedia, kapasitas SDM dan kelembagaan industri kecil dan mikro masih rendah serta orientasi pasar terhadap produk industri masih kurang. Kapasitas managerial koperasi dan UKM yang masih rendah, kemudian jumlah koperasi sehat yang masih rendah, aksesabilitas UKM pada teknologi dan permodalan usaha juga masih rendah merupakan permasalahan yang ditimbulkan dari sektor koperasi dan UKM dari data Dinas Koperas dan UKM kondisi jumlah koperasi yang ada 928 koperasi dan persentase koperasi yang berkualitas hanya 27% dari jumlah koperasi yang aktif.

Kondusifitas iklim investasi dipengaruhi oleh belum optimalnya pelayanan perizinan secara terpadu, belum adanya rencana umum penanaman modal daerah, dan masih kurangnya daya tarik investor.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan rilis data dari BPS tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka Kota Bengkulu adalah sebesar 6,34%, maka yang akan dilakukan pemerintah Kota Bengkulu guna menurunkan angka pengangguran adalah dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui menyediakan tenaga kerja yang siap berdaya saing, tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan peningkatan lapangan pekerjaan.

c. Capaian Jaringan Kota Kreatif

Kota Bengkulu berpeluang menjadi salah satu jaringan kota kreatif dunia yang ditetapkan oleh *UNESCO Creativ Cities Network* (UCCN) dalam hal ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Bersama 34 Kabupaten/ Kota Bengkulu ikut serta dalam usulan program kota kreatif Indonesia tahun 2022 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berdasarkan uji petik pihak Kementerian tahun 2019 pendapatan di sektor kuliner mencapai 7,2 milyar pertahun. Maka subsektor kuliner dipilih sebagai subsektor dari Kota Bengkulu. Untuk itu perlu dilakukan kedepannya oleh Pemerintah Kota Bengkulu antara lain :

- Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya ekonomi kreatif
- Meningkatkan kualitas produk lokal oleh usaha mikro dan memfasilitasi pengembangan pemasaran kerjasama usaha mikro dan kecil.

2. Optimalisasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Kota Bengkulu perlu dioptimalisasi melalui terwujudnya kualitas sarana dan prasarana infrastuktur, terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan terwujudnya penurunan risiko bencana.

Pada sektor pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Perlu peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata.
- b. Perlu penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.
- c. Terkait dengan infrastruktur dasar, berdasarkan data kondisi jaringan jalan dalam Kota Bengkulu, kondisi jalan baik pada tahun 2021 591,084 km yang baik, kondisi jalan sedang 232,720 km, kondisi jalan rusak ringan 114,535 km, kondisi jalan rusak berat 4,232 km dan jumlah kondisi jalan 942,567 km (*sumber data DPUPR tahun 2021*) untuk jembatan terdapat 14 titik jembatan dan berdasarkan data semua jembatan tahun 2021 dalam kondisi baik dan sedang sebesar 64,2% dari tota jembatan dalam kondisi baik sedangkan 35,7% sisahnya dalam kondisi sedang.
- d. Perlu peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan data dari Dinas Permukiman Kota Bengkulu tahun 2021 bahwa perumahan yang baik dan sehat merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, untuk itu pentingnya penyediaan infrastruktur perumahan rakyat dan permukiman adalah ketersediaan rumah layak huni. Intervrensi rumah tidak layak huni (RTLH) dilakukan setiap tahun melalui pendanaan daerah dan Pemerintah Pusat (DAK). RTLH yang diintervrensi di Kota Bengkulu tahun 2021 : 26 unit. Berdasarkan Surar Keputusan Walikota Bengkulu nomor 63 tahun 2017, lokasi lingkungan permukiman kumuh di Kota Bengkulu mencapai 961,59 ha yang tersebar di 9 Kecamatan dan 49 Kelurahan.
- e. Lingkungan hidup merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas

di Kota Bengkulu yaitu permasalahan persampahan kota, kapasitas tempat pembuangan akhir sampah di Air Sebakul yang *overload* untuk menampung sampah dan dukungan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional yang sudah tidak memadai, pengawasan dan pembinaan terhadap permasalahan lingkungan hidup kepada masyarakat yang belum optimal memunculkan permasalahan belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

- f. Penurunan risiko bencana menjadi sasaran dari tujuan mewujudkan pembangun infrastruktur berkelanjutan beberapa kawasan berpotensi bencana diidentifikasi menjadi 2 (dua) yaitu bencana tsunami dan banjir. Adapun strategi untuk memecahkan permasalahan belum optimalnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dibutuhkan peningkatan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana dan untuk belum optimalnya pencegahan dini dan penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran diperlukan strategi meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana.

3. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal di Kota Bengkulu dipengaruhi oleh layanan dan kualitas pendidikan, kualitas derajat kesehatan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, kehidupan masyarakat yang harmonis dan menurunnya kemiskinan. Untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Perlu peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan dorongan belajar bagi siswa (pemberian beasiswa pendidikan), peningkatan kualitas pembelajaran (kurikulum, pemerataan guru dan kualitas guru);
- b. Perlu peningkatan jangkauan pelayanan perpustakaan, perubahan budaya sekarang dan perilaku menuju digitalisasi menjadikan minat baca buku kalangan pelajar dan masyarakat menjadi rendah. Untuk itu diperlukan inovasi dalam meningkatkan jangkauan pelayanan perpustakaan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
- c. Perlu peningkatan perlindungan terhadap berbagai cagar budaya dan benda tak benda serta internalisasi kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 perlindungan terhadap bentuk kebudayaan lokal belum optimal dilihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 jumlah grup kesenian dan cagar budaya yang dibina ada 45 menunjukkan belum ada perkembangan yang signifikan.
- d. Perlu peningkatan kualitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga merupakan strategi yang akan dilakukan dalam memecahkan permasalahan pokok rendahnya prestasi olahraga dan rendahnya peran serta pemuda di Kota Bengkulu.

e. Perlu peningkatan pendukung pelayanan SPM kesehatan, yang merupakan strategi kesehatan yang akan dilakukan dalam memecahkan permasalahan belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat dan penekanan angka prevalensi stunting. Saat ini prevalensi stunting Kota Bengkulu mencapai 20% artinya disetiap 5 (lima) orang anak ada 1 (satu) yang terindikasi stunting (*sumber data media center Kota Bengkulu berdasarkan hasil rembuk stunting antara pemerintah Kota Bengkulu, Kejari, Polres, Kodim, Kemenag Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan perwakilan Universitas di Bengkulu*) dan ada 12 kelurahan yang menjadi lokus stunting di Kota Bengkulu sebagai berikut :

1. Kelurahan Kandang Limun
2. Kelurahan Sukarami
3. Kelurahan Pagar Dewa
4. Kelurahan Jalan Gedang
5. Kelurahan Sidomulyo
6. Kelurahan Padang Jati
7. Kelurahan Jembatan Kecil
8. Kelurahan Kebun Tebeng
9. Kelurahan Pasar Baru
10. Kelurahan Kebun Dahri
11. Kelurahan Malabro
12. Kelurahan Tanjung Jaya

f. Perlu peningkatan partisipasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan peran serta keluarga dalam menekan angka kelahiran yaitu dengan melaksanakan :

- Peningkatan peran serta perempuan dalam pemerintahan, masyarakat dan keluarga
- Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam Lembaga
- Peningkatan peran lembaga dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi tentang keluarga berencana
- Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak
- Peningkatan dan penguatan layanan pemenuhan hak anak

4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang belum optimal di Kota Bengkulu di sebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Tata kelola pemerintah yang baik meliputi profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan serta pelayanan publik yang prima.

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi aparatur serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi untuk mewujudkan *e-Government* menjadi hal cukup penting sebagai instrument komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan, penganggaran, implementasi, pengawasan dan pelaporan capaian. Dalam rangka mempertahankan kinerja akuntabilitas daerah, Pemerintah Kota Bengkulu akan terus meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten. Untuk konsisten nilai SAKIP Kota Bengkulu berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN-RB tahun 2021 dengan nilai 61,14 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B. tata kelola pemerintahan yang baik akuntabel dan bebas KKN akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional. Indeks profesionalitas ASN berdasarkan penilaian BKN adalah sebesar 50,88. Nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kota Bengkulu 1,68. Dari hasil penilaian baik indeks profesionalitas ASN maupun SPBE masih dalam kategori rendah namun kualitas pelayanan publik Kota Bengkulu mempunyai nilai 3,77 dengan kategori baik dari skala penilaian 0-4.

Tabel 4.42

Keterkaitan Isu Internasional, Isu Nasional, Isu Provinsi dan Isu Kota Bengkulu

Isu Internasional	Isu Nasional	Isu Provinsi	Isu Kota Bengkulu
Pemulihan Ekonomi Global	Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
Pergeseran Peran Ekonomi Kawasan Asia – Pasifik dalam Perekonomian Global		Pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19	
Keterbukaan Pasar dalam Masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Kemiskinan, Kesejahteraan dan Daya Saing SDM	kualitas sumber daya manusia

Isu Internasional	Isu Nasional	Isu Provinsi	Isu Kota Bangkulu
Ekonomi ASEAN (MEA)	Berkualitas dan Berdaya Saing		yang berdaya saing
		Hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan pariwisata yang komperensif dan kompetitif	
Stabilitas Politik Global yang Dinamis	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja birokrasi	tata kelola pemerintahan
	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
Tranformasi Teknologi dan Industri 4.0	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kinerja birokrasi	tata kelola pemerintahan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDG's)	Membangun Lingkungan, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengembangan konektivitas serta pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 – 2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan yang dimaksud dalam Rencana Pembangunan Daerah ini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada analisis isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu tiga tahun. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu tahun 2024 - 2026 penentuannya didasarkan pada:

a. Visi dan Misi RPJPD Kota Bengkulu

Visi Daerah

Pada Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu 2007-2027, Kota Bengkulu memiliki visi "**Kota Bengkulu Maju, Mandiri dan Madani**". Visi tersebut didukung oleh berbagai misi seperti berikut:

1. Mewujudkan Kota Bengkulu yang agamis dan berbudaya;
2. Mewujudkan Kota Bengkulu yang berkualitas dan berdaya saing serta mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan;
3. Mewujudkan Kota Bengkulu menjadi pusat layanan pendidikan; Mewujudkan perekonomian yang kokoh dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal melalui industri;
4. Mewujudkan Kota Bengkulu menjadi pusat jasa dan perdagangan;
5. Mewujudkan *Good Governance and Clean Government*;
6. Mewujudkan Kota Bengkulu yang aman, nyaman, dan indah secara berkelanjutan.

RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 memiliki empat tahapan. Tahapan tersebut dibagi dalam penekanan lima (5) tahunan (jangka menengah). Penekanan 5 tahunan tersebut menjadi acuan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penekanan 5 tahunan RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Penekanan 5 Tahun RPJPD Kota Bengkulu

Penekanan 5 Tahun Pertama (2007-2012)	Penekanan 5 Tahun Kedua (2012-2017)	Penekanan 5 Tahun Ketiga (2017-2022)	Penekanan 5 Tahun Keempat (2022-2027)
Pada RPJMD ke-1, Peningkatan aksesibilitas layanan dasar yaitu pada bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pembentukan landasan dalam rangka kemandirian ekonomi serta meningkatkan daya saing daerah terutama dalam sektor jasa dan perdagangan. Agenda meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung sektor perdagangan dan jasa melalui peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, pengembangan aksesibilitas pelayanan umum serta mewujudkan sistem transportasi untuk menunjang produktivitas dan mobilitas publik. Dalam rangka kelestarian lingkungan hidup serta mitigasi bencana, pada tahapan pertama ini lebih diarahkan pada perencanaan Kota Bengkulu sebagai daerah rawan bencana dengan melegalisasi serta mengimplementasikan rencana tata ruang wilayah kota. Keyword: menata dan membangun melalui konsolidasi dan pemantapan sektor-sektor peningkatan pembangunan	Pada RPJMD ke-2, pencapaian pembangunan lebih diarahkan pada pemantapan di segala bidang terutama dalam meningkatkan SDM. Pada tahap pemantapan ini masih difokuskan pada peningkatan kualitas SDM dengan kegiatan pemantapan pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada RPJMD ke-2 di sektor jasa dan perdagangan sudah ada peningkatan pada berbagai bidang: perikanan, kerajinan, industri pangan, pariwisata, pemasaran dan lain-lain. Peningkatan investasi daerah melalui peningkatan promosi dan kerjasama investasi dalam rangka mewujudkan pertahanan kelestarian lingkungan hidup juga merupakan target yang ingin dicapai dalam meningkatkan perekonomian Kota Bengkulu. Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan sektor jasa dan perdagangan diarahkan pada peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Untuk mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>, pada tahun ketiga RPJMD ke-2 hasil penilaian tata kelola keuangan dan aset daerah telah mencapai kualifikasi terbaik. Selain itu, untuk mencapai pelayanan publik yang prima harus didukung oleh aparat yang profesional, berwatak melayani dan taat hukum. Dalam rangka mitigasi bencana, pada tahapan	Pada RPJMD ke-3, SDM Kota Bengkulu mampu berdaya saing secara kompetitif serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Pada RPJMD ke-3 untuk sektor jasa dan perdagangan sudah memasuki tahap pemantapan dalam rangka kemandirian ekonomi serta kemampuan daya saing daerah. Pada tahap ini sudah tercipta strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi nasional sehingga mampu berdaya saing. Pada tahap ini telah terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, meningkatnya derajat kesehatan, menurunnya disparitas kesejahteraan antar kelompok masyarakat, masyarakat yang siap hidup berdampingan dengan kondisi wilayah yang rawan bencana. Harapan besar di akhir RPJMD ke-3 telah terwujud Kota Bengkulu yang sejuk, meriah, aman, rapi dan kenangan, dan didukung oleh tersedianya fasilitas air bersih yang higienis dan pengelolaan sampah yang baik. Keyword: peningkatan kualitas SDM, pemantapan dalam rangka kemandirian ekonomi serta kemampuan daya saing daerah	Pada RPJMD ke-4, Kota Bengkulu telah mapan dalam segala bidang, baik tingkat kualitas SDM, tingkat kemandirian ekonomi masyarakatnya serta tingkat kemampuan Kota Bengkulu dalam sektor jasa dan perdagangan yang mampu berdaya saing daerah, baik regional maupun Nasional. Di samping itu, Kota Bengkulu telah menjadi kota yang siap dalam mitigasi bencana melalui kesiapsiagaan masyarakat dan lingkungan hidup yang lestari. RPJMD ke-4, pencapaian pembangunan lebih diarahkan pada tahap lepas landas. Pada tahap ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat maju dengan kemandirian ekonomi menuju masyarakat madani, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi lokal dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Kota Bengkulu dengan didukung oleh kualitas SDM sudah mampu bersaing secara nasional Kota Bengkulu telah menjadi pusat perdagangan bagi kawasan Belajasumba dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang lengkap sehingga mampu bersaing secara regional. Keyword: pencapaian

Penekanan 5 Tahun Pertama (2007-2012)	Penekanan 5 Tahun Kedua (2012-2017)	Penekanan 5 Tahun Ketiga (2017-2022)	Penekanan 5 Tahun Keempat (2022-2027)
	kedua ini lebih diarahkan pada pemantapan kesiapan Kota Bengkulu sebagai daerah rawan bencana melalui penanaman benteng vegetasi sepanjang jalur-jalur evakuasi. Keyword: pemantapan di segala bidang terutama dalam meningkatkan SDM		pembangunan lebih diarahkan pada tahap lepas landas
Implementasi dalam RPJMD Kota Bengkulu			
RPJMD Kota Bengkulu 2008 -2013: Menuju Masyarakat Kota Bengkulu yang Bermartabat dan Makmur	RPJMD Kota Bengkulu 2013 -2018: Terwujudnya Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat, APBD untuk rakyat	RPJMD Kota Bengkulu 2019 -2023: Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat	

Pada periode 2019-2023, Kota Bengkulu berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Kota Bengkulu. Pada tahap ini, Kota Bengkulu diharapkan telah terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan meningkatnya pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, meningkatnya derajat kesehatan, menurunnya disparitas kesejahteraan antarkelompok masyarakat, dan masyarakat yang siap hidup berdampingan dengan kondisi wilayah yang rawan bencana. Pada akhir RPJMD ke-4, Kota Bengkulu diharapkan menjadi yang **sejuk, meriah, aman, rapi dan kenangan** dan didukung oleh tersedianya fasilitas air bersih yang higienis dan pengelolaan sampah yang baik telah terwujud. Pada kondisi ini, pemerintah dan masyarakat Kota Bengkulu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan guna mengoptimalkan potensi daerah. Namun pada penekanan keempat RPJPD tahun 2022-2027 Kota Bengkulu mapan dalam segala bidang, baik tingkat kualitas SDM, tingkat kemandirian ekonomi masyarakatnya serta tingkat kemampuan Kota Bengkulu dalam sektor jasa dan perdagangan yang mampu berdaya saing daerah, baik regional maupun nasional.

b. Analisis sasaran Pokok dan/atau Analisis Arah kebijakan RPJPD Kota Bengkulu Tahap Ke Empat

Pada RPJP Tahap ke-4, Kota Bengkulu telah mapan dalam segala bidang, baik tingkat kualitas SDM, tingkat kemandirian ekonomi masyarakatnya serta tingkat kemampuan

Kota Bengkulu dalam sektor jasa dan perdagangan yang mampu berdaya saing daerah, baik regional maupun Nasional. Di samping itu, Kota Bengkulu telah menjadi kota yang siap dalam mitigasi bencana melalui kesiapsiagaan masyarakat dan lingkungan hidup yang lestari.

RPJPD Tahap ke-4, pencapaian pembangunan lebih diarahkan pada tahap lepas landas. Pada tahap ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat maju dengan kemapanan ekonomi menuju masyarakat madani, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi lokal dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Kota Bengkulu dengan didukung oleh kualitas SDM sudah mampu bersaing secara nasional Kota Bengkulu telah menjadi pusat perdagangan bagi kawasan Belajasumba (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Barat) dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang lengkap sehingga mampu bersaing secara regional.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD 2019-2023, dari tujuan kualitas tata kelola pemerintahan dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja target nilai SAKIP adalah BB realisasi B; sasaran meningkatnya tata kelola keuangan daerah target indeks kapasitas fiskal 0,37 realisasi 0,84; opini BPK target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) realisasi WTP; dari sasaran meningkatnya keterbukaan dan kualitas pelayanan publik dengan indikator rata-rata nilai kepatuhan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan target zona hijau, realisasi zona hijau; dari sasaran kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi, realisasi mencapai 24,97% melampaui dari target 21,58%. Dari sasaran meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi targetnya 4,17% tercapainya 15,8%; dengan sasaran kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan indikator persentase koperasi yang meningkat Sisa Hasil Usaha (SHU) -nya target 6% realisasi mencapai 5 %; Dari sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dengan indikator persentase peningkatan kontribusi sektor pariwisata target 3,63 % realisasi 3,00 %.

Dari tujuan menurunnya risiko bencana sasaran meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana indikator risiko bencana target 104,36 realisasi 103 % Dari sasaran meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan RTH dengan indikator indeks kualitas air target 64 realisasi 45; kualitas udara target 96 realisasi 88,1; presentase RTH 9,17% realisasi 9,2%.

c. Isu Strategis Aktual

Rumusan tujuan pembangunan memperlihatkan operasionalisasi upaya

pemecahan penanganan isu strategis sedangkan sasaran menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu tahun 2024 – 2026 berdasarkan isu strategis aktual adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Sasaran

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kota Bengkulu sebagai Ibu Kota Provinsi Bengkulu dari sektor riil memiliki potensi yang baik di bidang perdagangan, industri dan jasa. Kontribusi PDRB sektor perdagangan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sumbangan atau peranan sektor ini terhadap perekonomian daerah Kota Bengkulu berjalan optimal.

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu di tahun 2020 yang pada tahun-tahun sebelumnya mengalami tren positif. Hal ini dikarenakan beberapa sektor unggulan seperti perdagangan, industri dan jasa terdampak pada pandemi covid -19 tersebut. Penurunan terjadi pada tahun 2020 di angka -0,25 karena adanya kondisi pandemi COVID-19. Tahun 2021 mulai mengalami peningkatan angka PDRB sebesar 3,47. Faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu adalah pertumbuhan PDRB sektor potensial, seperti pertumbuhan PDRB dengan indikator presentase pertumbuhan sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor perdangan dan sektor industri terhadap PDRB, presentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil dan nilai investasi dan indikator capaian jaringan kota kreatif melalui sektor pariwisata, koperasi dan UKM, perdagangan dan perindustrian menjadi sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kota Bengkulu menjadi salah satu jaringan kota kreatif bersama 34 Kabupaten/ Kota selndonesia tahun 2022 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berdasarkan uji petik pihak Kementerian tahun 2019. Pendapatan di sektor kuliner mencapai 7,2 milyar per tahun, maka subsektor kuliner dipilih sebagai subsektor dari Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu ke depannya harus meningkatkan dan mengembangkan sumber daya ekonomi

kreatif, meningkatkan kualitas produk lokal oleh usaha mikro dan memfasilitasi pengembangan pemasaran kerjasama usaha mikro dan kecil. Memfasilitasi pemasaran secara digitalisasi dan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak terkait guna pencapaian mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.

2. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan

Meningkatnya Pemerataan Ekonomi

Sasaran

1. Menurunnya Angka Kemiskinan
2. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan

Dari sasaran menurunkan angka kemiskinan, data angka kemiskinan Kota Bengkulu setiap tahunnya mengalami penurunan dari tahun 2018 18,82% tahun 2019 18,09% tahun 2020 17,65% sedikit meningkat pada tahun 2021 17,89%, sedangkan pada tahun 2022 menurun signifikan mejadi 15,73% dengan data terakhir jumlah penduduk miskin dari data BPS Kota Bengkulu 50,43 ribu jiwa, garis kemiskinan 785.905 rupiah tertinggi di Provinsi Bengkulu. Indikator angka kemiskinan diampu oleh beberapa sektor yaitu sektor ketahanan pangan dan pertanian, sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor perdagangan dan sektor industri, sektor koperasi dan UKM, sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sektor perumahan dan permukiman, sektor ketenagakerjaan, sektor sosial, sektor pendidikan dan kebudayaan, sektor kesehatan, dan sektor lingkungan hidup

Dari sasaran meningkatnya pemerataan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka berkorelasi positif terhadap ketersediaan lapangan kerja dan keterampilan tenaga kerja. Besarnya tingkat pengangguran terbuka seringkali disebabkan oleh rendahnya serapan tenaga kerja di suatu daerah. Data mengenai tingkat pengangguran terbuka menjadi indikator paling penting di bidang ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bengkulu mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 6,61 persen menjadi sebesar 4,29 persen di tahun 2019. Akan tetapi di tahun 2020 TPT Kota Bengkulu mengalami kenaikan menjadi 6,82 persen akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh sendi kehidupan dan perekonomian, dan kembali menurun pada tahun 2021 seiring dengan semakin membaiknya kondisi setelah pandemi. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesiapan tenaga kerja Kota Bengkulu untuk berdaya saing kiranya dapat meningkatkan pemerataan

ekonomi.

Guna meningkatnya pemerataan pendapatan, indikator inflasi mempunyai peran penting dalam pengendalian inflasi daerah terutama menghadapi isu global ekonomi internasional saat ini. Untuk itu tim pengendali inflasi daerah yang diampu oleh sektor ketahanan pangan dan pertanian, perdagangan dan industri, perikanan, koperasi dan UKM, ketahanan pangan dan pertanian, perizinan dan investasi.

3. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Tujuan

Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Publik
4. Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas
5. Menurunnya Risiko Bencana

Dari isu strategis optimalisasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, maka yang menjadi tujuan Pemerintah Kota Bengkulu adalah Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Infrastruktur berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek dari hulu ke hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya dan aspek lingkungan dari masyarakat sekitar.

Meningkatnya kualitas sarana prasarana infrastruktur menjadi sasaran pembangunan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang menjadi pemicu utama dari meningkatnya aktivitas dan juga kebutuhan ruang. Di kala kebutuhan naik namun ketersediaan ruang tidak mencukupi, maka penduduk akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, contohnya dengan eksploitasi kawasan permukiman secara berlebihan sehingga muncul kawasan kumuh (*slum area*), pemanfaatan sempadan sungai yang mengakibatkan kawasan liar (*squatter area*) sehingga timbul degradasi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah, ketidaksesuaian pemanfaatan tata ruang, dan keberadaan kawasan kumuh masih menjadi permasalahan terkait pemanfaatan ruang dan lingkungan di Kota Bengkulu.

Untuk itu perangkat daerah terkait perlu melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban tata ruang melalui rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan. Perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan masih terus diupayakan oleh pemerintah seiring dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan harus dapat meyakinkan kelangsungan hidup melalui pelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem yang tidak merusak lingkungan, hal ini sejalan dengan prinsip penanggulangan bencana. Oleh karenanya, sasaran penurunan risiko bencana sebagai bagian dari penanggulangan bencana dapat dikaitkan langsung dengan proses pembangunan berkelanjutan.

4. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Tujuan

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan
3. Meningkatnya Kualitas Derajat Masyarakat
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.
5. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis

Kualitas SDM melalui pelayanan dasar sektor pendidikan, prestasi olahraga dan Peran serta pemuda dalam pembangunan, kualitas Kesehatan, pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak, kehidupan masyarakat yang harmonis. Tujuan utama dari prioritas pembangunan ini adalah untuk menyejahterakan masyarakat Kota Bengkulu.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas SDM yang siap berdaya saing di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

- Layanan dan kualitas pendidikan
- Prestasi olahraga dan peran serta pemuda
- Derajat kesehatan masyarakat
- Keberdayaan perempuan dan lembaga perempuan serta perlindungan perempuan dan anak

- Gangguan keamanan dan ketertiban

5. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Bebas KKN

Sasaran

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel menjadi sasaran untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan di Kota Bengkulu. Krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi *covid-19* merupakan momentum yang tepat untuk berbenah secara komperensif, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien dan di saat bersamaan juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi. Permasalahan belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Bengkulu menjadi fokus dan tantangan Pemerintah Kota Bengkulu untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Bebas KKN.

Beberapa catatan dari Tim Evaluasi Kementerian RB terhadap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2021 yang perlu ditindaklanjuti antara lain adalah sebagai berikut:

- Implementasi reformasi birokrasi dan pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan belum memberikan dampak perubahan yang signifikan
- Agen perubahan belum semua memiliki rencana aksi perubahan yang konkret dan inovatif,
- Rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi belum terarah dan terukur
- Peta keterkaitan antara kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan PD belum disusun sehingga belum dapat mengidentifikasi kebijakan yang tidak harmonis dan kebijakan yang tumpang tindih.
- Peta proses bisnis yang ada sekarang belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi, serta rencana strategis Pemerintah Daerah. Selain itu penerapan *e-government* masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi sehingga belum mengungkit kinerja dan layanan.
- Belum optimalnya penguatan sistem manajemen sumber daya manusia antara lain mengenai tindak lanjut *assesment* sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai belum

menyeluruh dan tidak ada pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi

- Pelaksanaan kebijakan pengawasan internal dan integritas seperti penanganan gratifikasi, *whistleblowing system (WBS)*, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan masih bersifat formalitas dalam pelaksanaannya. Sehingga belum sepenuhnya efektif dalam mengawal organisasi untuk mewujudkan kinerja organisasi.
- Upaya pelayanan publik yang diberikan masih berada pada tahap pemenuhan standar minimal dan belum diarahkan pada pelayanan prima.

Tabel 5.2
Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bengkulu RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif				Laju Pertumbuhan Ekonomi	Indeks	3,47	5,1 - 5,25	5,3- 5,5	5,5 - 5,7	5,5 - 5,7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PERIKANAN, DINAS PARIWISATA, DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN , DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Terpadu SATU PINTU, SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah			Persentase pertumbuhan sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor perdagangan dan sektor industri terhadap PDRB; Persentase peningkatan kelas usaha mikro ke usaha kecil; Nilai Investasi							
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian	Persen	2	2,5	3	3,5	3,5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian	Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian	Persen	2	2,5	3	3,5	3,5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Persen	4,97	4,97	4,99	5,02	5,05	DINAS PERIKANAN

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
				Meningkatnya produksi dan nilai tambah perikanan	Pertumbuhan Produksi Sektor Perikanan	Persen	5	10	15	20	20	DINAS PERIKANAN
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD	Persen	10	10	15	20	20	DINAS PARIWISATA
				Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat	Persentase Kunjungan Wisatawan	Persen	5	5	7	10	10	DINAS PARIWISATA
					Persentase Lama Tinggal Wisatawan	Persen	3,5	3,5	4	4,5	4,5	DINAS PARIWISATA
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PAD	Persen	30,76	32	40	45	45	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
				Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Nilai rupiah sektor perdagangan	Rupiah (Milyar)	1,3 M	1,8 M	2,5M	2,7M	2,7M	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
				Meningkatnya kelancaran distribusi barang								
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PAD	Persen	6,5	6,6	6,65	7	7	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
				Meningkatnya pertumbuhan industri	Pertumbuhan IKM/UKM	IKM/UKM	82	85	87	92	92	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
					Pertumbuhan Industri Kreatif	Persen	2,5	2,8	3	3,5	3,5	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Persentase Koperasi Aktif	Persen	79	79	80	81	81	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

A.

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
				Meningkatnya kapasitas kelembagaan, pengelolaan dan modal koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	persen	27	29,5	32	34	34	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Persentase Realisasi Investasi	Persen	1,2	2	3	4	4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Meningkatnya konduktivitas iklim investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Tritun)	1,5	1,8	2	2,3	2,3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah				Capaian Jaringan Kota Kreatif	Persen	10	10	15	20	20	DINAS PARIWISATA, DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Persentase Parameter Kota Kreatif yang Dipenuhi	Persen	10	10	20	30	40	DINAS PARIWISATA
				Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah Parameter Kota Kreatif yang Dipenuhi	Jumlah Parameter	10	10	20	30	30	DINAS PARIWISATA
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Persentase UKM yang Aktif	Persen	90	92	93	95	95	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
				meningkatkan kualitas UKM	Persentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas	Persen	0,22	1,3	2,1	3	3	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
				Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan Meningkatkan kelancaran distribusi barang	Nilai rupiah sektor perdagangan	Rupiah (Milyar)	1,3 M	1,8 M	2,5M	2,7M	2,7M	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN

AA.

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
2	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi				Indeks Gini	Angka	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PERIKANAN, DINAS PARIWISATA, DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN, DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN Terpadu SATU PINTU, DINAS KETENAGAKERJAAN
		Menurunnya Angka Kemiskinan			Angka Kemiskinan	Persen	17,89	17,89	17,39	16,89	16,89	DINAS KETENAGAKERJAAN, DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS PARIWISATA, DINAS PERIKANAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN, DINAS SOSIAL, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Menurunnya Angka Kemiskinan		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	67,24	68,74	70,24	71,74	71,74	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	85,50	85,7	86	86,5	86,5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			Menurunnya Angka Kemiskinan		Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian	Persen	2	2,5	3	3,5	3,5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

1.

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
				Meningkatnya produksi pertanian	Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian	Persen	2	2,5	3	3,5	3,5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Menurunnya Angka Kemiskinan			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Persen	4,97	4,97	4,98	5,02	5,05	DINAS PERIKANAN
				Meningkatnya Produksi perikanan	Pertumbuhan Produksi Sektor Perikanan	Persen	5	10	15	20	20	DINAS PERIKANAN
		Menurunnya Angka Kemiskinan			Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD	Persen	10	10	15	20	20	DINAS PARIWISATA
				Meningkatnya kualitas pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan	Persen	5	5	7	10	10	DINAS PARIWISATA
					Persentase Wisatawan	Persen	3,5	3,5	4	4,5	4,5	DINAS PARIWISATA
		Menurunnya Angka Kemiskinan			Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PAD	Persen	30,76	32	40	45	45	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
				Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Nilai rupiah sektor perdagangan	Rupiah (Milyar)	1,3 M	1,8 M	2,5 M	2,7 M	2,7 M	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
		Menurunnya Angka Kemiskinan			Persentase Pertumbuhan Industri	Persen	6,5	6,6	6,65	7	7	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
				Meningkatnya pertumbuhan industri	Pertumbuhan IKM/UKM	IKM/UKM	82	85	87	92	92	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
					Pertumbuhan Industri Kreatif	Persen	2,5	2,8	3	3,5	3,5	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
		Menurunnya Angka Kemiskinan			Persentase Koperasi Aktif	Persen	79	79	80	81	81	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
				Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Yang Berkualitas	persen	27	29,5	32	34	34	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Menurunnya Angka Kemiskinan			Persentase Realisasi Investasi	Persen	1,2	2	3	4	4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Triliun)	1,5	1,8	2	2,3	2,3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Menurunnya Angka Kemiskinan			Persentase PPKS Yang Mendapatkan Pelayanan Perindungan dan Jaminan Sosial	Persen	33,53	49,76	65,99	82,22	82,22	DINAS SOSIAL

42.

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
				Meningkatnya Perlindungan Bagi Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Mandiri	Persen	5.2	5.27	5.3	5.4	5.4	DINAS SOSIAL
					Rasio PPKS Terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0.177	0.174	0.171	0.168	0.168	DINAS SOSIAL
					PPKS Yang Dilayani Dan Ditangani	Persen	88	91	93	95	95	DINAS SOSIAL
			Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur		Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	75	77	79	81	81	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur	Tingkat Kemertanian Jalan	Persen	85	86	87	88	88	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Rasio Bangunan Gedung Yang Laik Fungsi	Persen	14	21	28	34	34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	Persen	85	88	90	95	95	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Ha	1039	1039	1039	1039	1039	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Penduduk Berakses Air Minum Layak	Persen	61	65	67	70	70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak	Persen	80	82	83	86	86	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Meningkatnya Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	Persen	60	65	70	75	75	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik			persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen						DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik		persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen						DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Perangaran Kawasan Kumuh	Persen	50	55	60	65	65	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
			Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik		Persentase lahan aset PEMDA kota dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persen	NA	0,33	0,33	0,33	0,34	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	Persen	NA	0,33	0,33	0,34	0,34	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Meningkatnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,95	62,82	62,85	62,93	62,93	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,95	62,82	62,85	62,93	62,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	50,44	50,54	50,57	50,64	50,64	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88,03	88,13	88,23	88,33	88,33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	35,45	37,07	37,07	37,07	37,07	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	48,21	50	55	60	60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Capaian Pengelolaan Sampah	Persen	65	67	69,5	70	70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	65,44	37,77	37,04	37,03	37,03	DINAS KETENAGAKERJAAN
				Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja	Persen	3,97	4,10	4,50	4,72	4,72	DINAS KETENAGAKERJAAN
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,08	11,09	11,1	11,11	11,11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,03	16,04	16,05	16,06	16,06	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PEMUDA DAN OLARAGAA
				Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Persen	40,8	41,1	42,5	43,6	43,6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Angka Partisipasi Dalam Pendidikan SD/SMK	Persen	98,6	98,7	99,5	98,7	98,7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Persentase Partisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	1,52	1,51	1,52	1,49	1,49	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
			Meningkatnya Pelestarian Budaya		Persentase Peninggalan Bersejarah Yang Ditetapkan Menjadi Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	73	76	80	89	89	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Meningkatnya perlindungan terhadap warisan budaya	Jumlah Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Jumlah	8	8	8	8	8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	70.21	70.3	70.4	70.5	70.5	DINAS KESEHATAN
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka kematian ibu	Per-100.000 KH	98,02	50	49	48	48	DINAS KESEHATAN
					Angka kematian bayi	Per-100.000 KH	3,3	3,2	3,1	3	3	DINAS KESEHATAN
					Prevalensi Stunting	Persen	0,74	0,60	0,50	0,49	0,49	DINAS KESEHATAN
				Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prevalensi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, tidak menular dan KLB	Persen	30	29,8	29,6	29,4	29,4	DINAS KESEHATAN
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan	Cakupan Puskesmas Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
					Akreditasi Rumah Sakit	Peningkatan	Maoya	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	RSHD
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,19	86	87	88	88	RUMAH SAKIT HARAPAN DAN DOA
				Meningkatnya rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Cakupan Rumah Tangga Yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	40	45	55	60	60	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Pemerataan Pendapatan			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,34	6,2-8	6,5-8	5,8-5	5,8-5	DINAS KETENAGAKERJAAN
			Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	65,44	37,77	37,04	37,03	37,03	DINAS KETENAGAKERJAAN
				Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja	Persen	3,97	4,10	4,50	4,72	4,72	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
		Meningkatnya Pemerataan Pendapatan			Inflasi	Persen						DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DINAS PERIKANAN, DINAS KOPERASI DAN UKM, DINAS KETAHANAN DAN KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Meningkatnya Pemerataan Pendapatan			Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	67.24	68.74	70.24	71.74	71.74	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	85.50	85.7	86	86.5	86.5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian	Persen	2	2.5	3	3.5	3.5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Meningkatnya produksi pertanian	Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian	Persen	2	2.5	3	3.5	3.5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Persen	4.97	4.97	4.99	5.02	5.05	DINAS PERIKANAN
					Pertumbuhan Produksi Sektor Perikanan	Persen	5	10	15	20	20	DINAS PERIKANAN
				Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PAD	Persen	30.76	32	40	45	45	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
				Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Nilai rupiah sektor perdagangan	Rupiah (Milyar)	1,3 M	1,8 M	2,5M	2,7M	2,7M	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN
				Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Persentase Koperasi Aktif	Persen	79	79	80	81	81	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
				Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Yang Berkualitas	persen	27	29,5	32	34	34	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Persentase Realisasi Investasi	Persen	1,2	2	3	4	4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Triliun)	1,5	1,8	2	2,3	2,3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

47.

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
3	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan				Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	65,64	66,6	70,3	76,36	76,36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN, DINAS LINGKUNGAN HIDUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, DINAS PERHUBUNGAN
		Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur			Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	75	77	79	81	81	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DINAS PERHUBUNGAN
			Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur		Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	75	77	79	81	81	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	85	86	87	88	88	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Rasio Bangunan Gedung Yang Laik Fungsi	Persen	14	21	28	34	34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	Persen	85	88	90	95	95	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Ha	1039	1039	1039	1039	1039	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Penduduk Berakses Air Minum Layak	Persen	61	65	67	70	70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak	Persen	80	82	83	86	86	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Meningkatnya Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	Persen	60	65	70	75	75	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			Rasio Kelancaran Lalu lintas	Rasio	0,31	0,37	0,375	0,38	0,38	DINAS PERHUBUNGAN
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Rasio Kelancaran Lalu lintas	Rasio	0,31	0,37	0,375	0,38	0,38	DINAS PERHUBUNGAN

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
				Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan lalu lintas	Persentase Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	0.799	0.599	0.399	0.199	0.199	DINAS PERHUBUNGAN
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik			persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen						DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik		persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen						DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Penanganan Kawasan Kumuh	Persen	50	55	60	65	65	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik		Persentase lahan aset PEMDA kota dan lahan masyarakat yang bersitus legal	Persen	NA	0.33	0.33	0.33	0.34	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Meningkatnya kualitas penatalaksanaan tanah	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	Persen	NA	0.33	0.33	0.34	0.34	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Meningkatnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,95	62,82	62,85	62,93	62,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,95	62,82	62,85	62,93	62,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	50,44	50,54	50,57	50,64	50,64	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88,03	88,13	88,23	88,33	88,33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	35,45	37,07	37,07	37,07	37,07	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	48,21	50	55	60	60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan	Capaian Pengelolaan Sampah	Persen	65	67	69,5	70	70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Menurunnya Risiko Bencana			Indeks Risiko Bencana	Indeks	120	120	110	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
			Menurunnya Risiko Bencana		Persentase Penanganan Bencana	Persen	48	50	65	78	78	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

AM

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
				Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana	Persentase Penanganan Bencana	Persen	48	50	65	78	78	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Menurunnya Risiko Bencana		Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran Dan Penyelamatan	Menit	15	15	15	15	15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
				Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	95%	95%	95%	95%	95%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
4	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80.54	80.54	80.64	80.74	80.74	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11.08	11.09	11.1	11.11	11.11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Harapan Lama Sekolah	Tahun	16.03	16.04	16.05	16.06	16.06	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11.08	11.09	11.1	11.11	11.11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Harapan Lama Sekolah	Tahun	16.03	16.04	16.05	16.06	16.06	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Meningkatnya Kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Persen	40.8	41.1	42.5	43.6	43.6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Angka Partisipasi Dalam Pendidikan SD/SMP	Persen	98.6	98.7	99.5	98.7	98.7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Persentase Partisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	1.52	1.51	1.52	1.49	1.49	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

7.

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
			Meningkatnya Budaya Literasi Gemar Membaca Inovasi dan Kreativitas Masyarakat Dengan Pemanfaatan Perpustakaan yang Berbasis Industri Sosial		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	0	10	15	20	20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
				Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat	Persentase Pemustaka Yang Berkunjung Ke Perpustakaan	Persen	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			Meningkatnya Pelestarian Budaya		Persentase Peninggalan Bersejarah Yang Ditetapkan Menjadi Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	73	76	80	89	89	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Meningkatnya perlindungan terhadap warisan budaya	Jumlah Sani Budaya, Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Jumlah	8	8	8	8	8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan			Persentase Pemuda yang Berprestasi	Persen	35	35	45	55	55	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan		Persentase Pemuda yang Berprestasi	Persen	35	35	45	55	55	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Meningkatnya Pemuda yang Berprestasi	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Dibina	Persen	NA	10	20	30	30	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Peningkat Kota Bengkulu pada Kejuruan Tingkat Provinsi	Peningkat	Juara Umum	Juara Umum	Juara Umum	Juara Umum	Juara Umum	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
				Meningkatnya Prestasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	Persen	NA	10	14	20	20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

4/11

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80.54	80.54	80.64	80.74	80.74	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat			Angka Harapan Hidup	Tahun	70.21	70.3	70.4	70.5	70.5	DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT HARAPAN DAN DOA
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	70.21	70.3	70.4	70.5	70.5	DINAS KESEHATAN
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka kematian ibu	Per-100.000 KH	98.02	50	49	48	48	DINAS KESEHATAN
					Angka kematian bayi	Per-100.000 KH	3.3	3.2	3.1	3	3	DINAS KESEHATAN
					Prevalensi Stunting	Persen	0.74	0.60	0.50	0.49	0.49	DINAS KESEHATAN
				Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prevalensi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, tidak menular dan KLB	Persen	30	29.8	29.6	29.4	29.4	DINAS KESEHATAN
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan	Cakupan Puskesmas Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
					Akreditasi Rumah Sakit	Peringkat	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	RSHD
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85.19	86	87	88	88	RUMAH SAKIT HARAPAN DAN DOA
				Meningkatnya rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Cakupan Rumah Tangga Yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	40	45	55	60	60	DINAS KESEHATAN
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95.77	95.77	95.87	95.97	95.97	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

7.

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77.87	77.87	77.87	77.87	77.87	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Meningkatnya Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77.67	77.87	77.87	77.87	77.87	
			Peran Serta/ Sumbangsih Perempuan dalam pendapatan kerja	Persentase Sumbangan Perempuan dalam pendapatan kerja	Persentase	se	29.55	30	31	32	32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Persentase	se	28.13	28.4	28.6	29	29	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Persentase	se	21.15	21.25	22	23	23	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya	Predikat		NA	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan	Persen		100	100	100	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

42

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
				Meningkatnya pelayanan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindak kekerasan	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Pelugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Penghargaan Kota Layak Anak	Persen	100	100	100	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk				Predikat	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta TPPO		Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	Persen	100	100	100	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kalembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	Persen	100	100	100	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Persentase Kecamatan Layak Anak	Persen	33	55	66	75	75	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Menurunnya laju pertumbuhan penduduk		Persentase Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,79	1,67	1,64	1,58	1,58	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Meningkatnya Kapesertaan KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif	Persen	64,81	80	82	84	84	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				Indeks Rasa Aman	Indeks	NA	70	70	70	70	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis			Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Pengesakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	Persen	85	85	90	95	95	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis		Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Pengesakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	85	85	90	95	95	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Meningkatnya kualitas pelayanan ketertarikan, keterlibatan umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase Penindakan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	Persen	100	100	100	100	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Meningkatnya Harmoni Sosial, Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat		Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	75	75	80	85	85	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Meningkatnya Harmoni Sosial, Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	75	75	80	85	85	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Meningkatnya kondusifitas Masyarakat	Jumlah Kejadian Konflik Sosial Diwilayah Yang Dikondisikan	Persen	80	90	90	90	90	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Bebas KKN				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	B	B	B	SEMUA PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	2,75	3,0	3,1	3,2	3,2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, SEKRETARIAT DAERAH(BAGIAN PEMERINTAH, ORGANISASI, PEMBANGUNAN, KESRA, HUKUM), DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	B	B	BB	BB	BB	SEMUA PERANGKAT DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH(BAGIAN ORGANISASI DAN ADMISTRASI PEMBAGUNAN) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	2,75	3,0	3,1	3,2	3,2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, SEKRETARIAT DAERAH(BAGIAN PEMERINTAH, ORGANISASI, PEMBANGUNAN, KESRA, HUKUM), DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
				Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP Daerah	Nilai	11,41	12,41	12,91	12,91	12,91	SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen	55	60	65	75	75	SEKRETARIAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
					Persentase Rancangan Perda Dan Perkada Yang Diharmonisasi	Persen	63	65	68	70	70	SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan Capaian Ikk LPPD Secara Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai Ikm Minimal B	Nilai	NA	B	B	B	B	SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Kebijakan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
					Rata-Rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah	Persen	NA	75	80	85	85	SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Produk Hukum Daerah yang Disahkan	Persen	40	45	55	60	60	SEKRETARIAT DPRD
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel			Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Persentase Raperda Yang Disetujui Bersama	Persen	61,11	50	55	60	60	SEKRETARIAT DPRD
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi Dan Akuntabel			Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai Komponen perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pada SAKIP Daerah	Nilai	51,22	53,92	55,32	58,82	58,82	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Penetapan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai Perencanaan Kinerja	Nilai	23,53	24,53	24,93	24,93	24,93	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Meningkatnya capaian target pembangunan	Nilai Pengukuran Kinerja	Nilai	14,48	15,48	15,98	17,48	17,48	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Nilai pencapaian kinerja	Nilai	13,21	13,91	14,41	16,41	16,41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Tingkat Keselarasan Program RKPD Dengan RPD	Persen	NA	100	100	100	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Persentase indikator sasaran RPD yang mencapai target	Persen	63	70	75	80	80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4/11

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
					Indeks Profesionalitas ASN	Angka	50	60	62	65	65	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Profesionalitas ASN	Angka	50	60	62	65	65	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
				Meningkatnya Kualitas Aparatur Pemerintahan	Persentase Jumlah ASN yang Kompeten	Persen	60	60	60	60	60	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	59,37	59,57	59,75	59,90	59,90	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Predikat IGA	Predikat	Terinova tif	Terinova tif	Terinova tif	Terinova tif	Terinova tif	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Dimintaikan	Persen	NA	20	40	60	60	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	NA	20	10	10	40	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
				Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar	Cakupan PD Yang Mempunyai Tata Kelola Kearsipan Dengan Baik	Persen	2,56	38,46	64,10	100	100	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel			Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15,32	19,06	19,06	19,06	19,06	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPD Tahun N-1	Temuan dan Rekome ndasi	Temuan =22; Rekome ndasi=64	Temuan =20; Rekome ndasi=60	Temuan =18; Rekome ndasi=58	Temuan =18; Rekome ndasi=58	Temuan =18; Rekome ndasi=58	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Control For Prevention (MCP) KPK	Nilai	75	75	77	80	80	INSPEKTORAT DAERAH
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai komponen evaluasi kinerja pada SAKIP daerah							INSPEKTORAT DAERAH
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola keuangan	Nilai komponen evaluasi kinerja pada SAKIP daerah	Nilai	7,61	7,91	8,41	8,41	8,41	INSPEKTORAT DAERAH
				Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat Provinsi Dan Inspektorat Daerah Kota	Persen	85	85	90	90	90	INSPEKTORAT DAERAH

77.

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026	2026		
					Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	INSPEKTORAT DAERAH	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkriteria tinggi dan akuntabel			Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1.6	1.8	1.9	2	2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkriteria tinggi dan akuntabel		Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Meningkat	Informasi	Informasi	Informasi	Informasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
				Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	NILAI	NA	80	85	90	90	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
				Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	NILAI	NA	50	75	90	90	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
				Pengembangan aplikasi dan Statistik	Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NILAI	1.0	1.2	1.30	1.5	1.5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkriteria tinggi dan akuntabel			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Rata-Rata	83.55	84.17	85	85.83	85.83	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, RUMAH SAKIT HARAPAN DAN DOA, SETDA (BAGIAN ORGANISASI)	
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkriteria tinggi dan akuntabel		Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Terhadap Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan	Nilai	A-	A-	A	A	A	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
				Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	IKM Kinerja PTSP	Nilai	84.0	84.5	85.0	85.5	85.5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Terhadap Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan	Nilai	B	A-	A-	A	A	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	IKM Kinerja Dukcapil	Indeks	81.46	82	83	84	84	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Rata- Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	82.16	89.25	91.86	94.50	94.50	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (Hak	Persen	32.26	48.39	64.52	100.00	100.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Persentase Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	80	82	84	86	86	KECAMATAN SUNGAI SERUT
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu	Persen	80	80	82	85	85	KECAMATAN SUNGAI SERUT
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Persentase Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu	Persen	81	81	83	85	85	KECAMATAN RATU AGUNG
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Prosentase Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu	Persen	81	81	82	83	83	KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Prosentase Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu	Persen	80	80	83	85	85	KECAMATAN SELEBAR

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH
								2024	2025	2026		
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Prosentase Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu	Persen	80	81	82	83	83	KECAMATAN MUARA BANGKA HULU
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Prosentase Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu	Persen	80	80	82	85	85	KECAMATAN GADING CEMPAKA
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Prosentase Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu	Persen	81	81	82	83	83	KECAMATAN RATU SAMBAN
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Prosentase Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu	Persen	83	83	84	85	85	KECAMATAN SINGARAN PATI
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Prosentase Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu	Persen	80	80	82	85	85	KECAMATAN TELUK SEGARA

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Recana Pembangunan Daerah (RPD) ini adalah dokumen peralihan terhadap RPJMD yang akan berakhir jangka waktu penggunaannya di Kota Bengkulu pada tahun 2023, penyusunan ini sesuai peraturan tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir di tahun 2023. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini memperhatikan penyesuaian target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta kesesuaian strategi dan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) sampai dengan Tahun 2027 dan menjadi bagian yang krusial dalam mencapai tujuan pembangunan sekaligus akan menjadi tahap persiapan penyusunan RPJP berikutnya. Oleh sebab itu, penentuan strategi dan arah kebijakan RPD akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan dalam 3 (tiga) tahun ke depan mulai dari 2024 sampai 2026 sekaligus menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas daerah selama 3 (tiga) tahun 2024-2026 yang dijabarkan sebagai berikut:

6.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mengatasi permasalahan serta mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, analitik, realistis dan komprehensif. Strategi yang akan diwujudkan dalam kebijakan dan program merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebagai upaya mencapai tujuan akhir pembangunan. Perumusan strategi pembangunan disusun berdasarkan kerangka analitik terhadap faktor lingkungan strategi. Hasil pembangunan yang telah dicapai pada periode sebelumnya harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan, perkembangan zaman serta kemajuan teknologi. Dengan demikian, maka rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang akan dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun mulai dari 2024 sampai 2026. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program

prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan kota Bengkulu ditunjukkan pada tabel 6.1.

Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pembangunan Kota Bengkulu Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	Peningkatan Perlindungan Lahan dan Ketersediaan Air
			Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Pertanian
			Peningkatan Kualitas dan Kesehatan Ternak
			Penguatan Pemberdayaan Kelembagaan Pertanian
			Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata
		Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan
			Peningkatan Nilai Tambah Perikanan
			Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian
		Mengembangkan Pariwisata berbasis masyarakat	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
			Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pariwisata
			Pengembangan Produk Lokal yang Mendukung Pariwisata
		Meningkatkan iklim perdagangan yang kondusif	Pemberian Kemudahan Penerbitan Izin Perdagangan
			Peningkatan Promosi Pemasaran Produk dalam Negeri
			Peningkatan Kerjasama Pertumbuhan Usaha Ekspor
		Meningkatkan kelancaran distribusi barang	Pengembangan Sarana Prasarana Distribusi
			Peningkatan Kelancaran Suplai Barang Penting dan Barang Pokok
		Meningkatkan pertumbuhan industri	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri
			Pengembangan Sarana Prasarana Distribusi
			Pengelolaan Kawasan Industri

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
			Pembangunan Kawasan Industri Terintegrasi dan Pengembangan Klaster Industri Kreatif
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan, pengelolaan, dan modal koperasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM
			Pengembangan Kualitas Koperasi dan UKM
			Peningkatan Pembinaan dan Akses Permodalan Koperasi
			Peningkatan SDM Perkoperasian
		Meningkatkan kondusitifitas iklim investasi	Peningkatan Kemudahan Perizinan dan Penanaman Modal
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Penyediaan Regulasi Penanaman Modal
			Penyelenggaraan Promosi
			Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
		Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif
		Meningkatkan kualitas UKM	Peningkatan Kualitas Produk Lokal oleh Usaha Mikro
			Fasilitasi Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Usaha Mikro dan Kecil
		Meningkatkan iklim perdagangan yang kondusif	Pemberian Kemudahan Penerbitan Izin Perdagangan
			Peningkatan Promosi Pemasaran Produk dalam Negeri
			Peningkatan Kerjasama Pertumbuhan Usaha Ekspor
			Pengembangan Sarana Prasarana Distribusi

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan kelancaran distribusi barang	Peningkatan Kelancaran Suplai Barang Penting dan Barang Pokok
Meningkatnya Pemerataan Ekonomi	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan penguatan ketahanan pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan
			Peningkatan Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan
		Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	Peningkatan Perlindungan Lahan dan Ketersediaan Air
			Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Pertanian
			Peningkatan Kualitas dan Kesehatan Ternak
			Penguatan Pemberdayaan Kelembagaan Pertanian
			Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata
		Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan
			Peningkatan Nilai Tambah Perikanan
			Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian
		Mengembangkan Pariwisata berbasis masyarakat	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
			Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pariwisata
			Pengembangan Produk Lokal yang Mendukung Pariwisata
		Meningkatkan iklim perdagangan yang kondusif	Pemberian Kemudahan Penerbitan Izin Perdagangan
			Peningkatan Promosi Pemasaran Produk Dalam Negeri
			Peningkatan Kerjasama Pertumbuhan Usaha Ekspor
		Meningkatkan kelancaran distribusi barang	Pengembangan Sarana Prasarana Distribusi
			Peningkatan Kelancaran Suplai Barang Penting dan Barang Pokok
		Meningkatkan pertumbuhan industri	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			- Pengembangan Sarana Prasarana Distribusi - Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Industri - Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri - Pembangunan Kawasan Industri Terintegrasi dan Pengembangan Klaster Industri Kreatif
		Meningkatkan Kapasitas kelembagaan, pengelolaan, dan modal koperasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM
			Pengembangan Kualitas Koperasi Dan UKM
			Peningkatan Pembinaan dan Akses Permodalan Koperasi
			Peningkatan SDM Perkoperasian
		Meningkatkan kondusitifitas iklim investasi	Peningkatan Kemudahan Perizinan dan Penanaman Modal
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Penyediaan Regulasi Penanaman Modal
			Penyelenggaraan Promosi
			Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
		Meningkatkan pelayanan dan penanganan PPKS	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Berbasis Keluarga
			Peningkatan Sarana Prasarana Penanggulangan Masalah Sosial dan Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kesejahteraan Sosial
			Pemberdayaan Masyarakat dan Relawan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan
			Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelompok Difabel

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pembangunan Infrastruktur Ramah Difabel
			Peningkatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
			Peningkatan Fasilitas Program Keluarga Harapan
			Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur yang Lebih Merata
		Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kawasan
			Penyediaan Infrastruktur yang Mendukung Pertumbuhan Kawasan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Laik dan Aman
		Meningkatkan Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	Peningkatan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang
			Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatkan kualitas rumah dan kawasan permukiman	Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang
			Penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
	Meningkatnya lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup
			Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan Ekosistem
			Pengawasan dan Ketersediaan Informasi Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Pengurangan dan penanganan sampah
		Menyediakan tenaga kerja yang kompetitif	Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
			Penyiapan Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar
			Peningkatan Lapangan Kerja
			Peningkatan Hubungan Industrial yang Harmonis
		Meningkatkan fasilitas pendidikan	Pembaharuan sarana dan prasarana pendidikan
			Peningkatan koordinasi dengan sekolah nonpemerintah
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan pendidikan berbasis digital
		Meningkatkan manajemen tata kelola pendidikan dan tenaga pendidikan	Peningkatan manajemen tata kelola pendidikan
			Pemerataan / redistribusi tenaga pendidik
		Meningkatkan perlindungan terhadap berbagai cagar budaya benda tak benda	Penguatan Aspek Regulasi Perlindungan Cagar Budaya
		Internalisasi kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan Apresiasi Terhadap Kebudayaan Lokal dan Sejarah
		Meningkatkan pendukung Pelayanan SPM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
			Peningkatan Kapasitas SDM
			Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan
		Menurunkan angka prevalensi stunting	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Untuk Penderita Stunting
			Peningkatan Gizi Masyarakat
			Penyediaan Sarana Prasarana
			Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Remaja
			Promosi Percepatan Penurunan Stunting
			Penajaman Verifikasi dan Validasi Data

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan PHBS	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Peningkatan Kualitas Sanitasi di Lingkungan Rumah Tangga
	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Menyediakan tenaga kerja yang kompetitif	Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
			Penyiapan Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar
			Peningkatan Lapangan Kerja
			Peningkatan Hubungan Industrial yang Harmonis
	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Meningkatkan penguatan ketahanan pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan
			Peningkatan Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan
	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	Peningkatan Perlindungan Lahan dan Ketersediaan Air
			Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Pertanian
			Peningkatan Kualitas dan Kesehatan Temak
			Penguatan Pemberdayaan Kelembagaan Pertanian
			Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata
		Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan
			Peningkatan Nilai Tambah Perikanan
			Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian
		Meningkatkan iklim perdagangan yang kondusif	Pemberian Kemudahan Penerbitan Izin Perdagangan
			Peningkatan Promosi Pemasaran Produk Dalam Negeri
			Peningkatan Kerjasama Pertumbuhan Usaha Eksport
			Pengembangan Sarana Prasarana Distribusi

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan kelancaran distribusi barang	Peningkatan Kelancaran Suplai Barang Penting dan Barang Pokok
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan, pengelolaan, dan modal koperasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM
			Pengembangan Kualitas Koperasi dan UKM
			Peningkatan Pembinaan dan Akses Permodalan Koperasi
			Peningkatan SDM Perkoperasian
		Peningkatan kondusifitas iklim investasi	Peningkatan Kemudahan Perizinan dan Penanaman Modal
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Penyediaan Regulasi Penanaman Modal
			Penyelenggaraan Promosi
			Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur yang Lebih Merata
			Penyediaan Infrastruktur yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kawasan
			Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur yang Lebih Merata
			Penyediaan Infrastruktur yang Mendukung Pertumbuhan Kawasan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Laik dan Aman
		Meningkatkan Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	Peningkatan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang
			Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

A.

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatkan kenyamanan dan keselamatan lalu lintas	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatkan kualitas rumah dan kawasan permukiman	Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang
	Meningkatnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
			Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup
		Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan Ekosistem
	Menurunnya Risiko Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	Pengawasan dan Ketersediaan Informasi Lingkungan Hidup
			Pengurangan dan penanganan sampah
			Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan
			Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
			Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
			Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
			Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
			Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
		Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Bahaya Kebakaran
			Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bahaya Kebakaran

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Perumusan Dan Pengawasan Pelaksanaan SOP Penanganan Bahaya Kebakaran
			Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas SDM dalam Penanganan Bahaya Kebakaran
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatkan fasilitas pendidikan	Pembaharuan sarana dan prasarana pendidikan
			Peningkatan koordinasi dengan sekolah non pemerintah
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan pendidikan berbasis digital
		Meningkatkan manajemen tata kelola pendidikan dan tenaga pendidikan	Peningkatan manajemen tata kelola pendidikan
			Pemerataan / redistribusi tenaga pendidik
		Meningkatkan jangkauan pelayanan perpustakaan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perpustakaan
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
		Meningkatkan perlindungan terhadap berbagai cagar budaya benda tak benda	Penguatan Aspek Regulasi Perlindungan Cagar Budaya
		Internalisasi kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan Apresiasi Terhadap Kebudayaan Lokal dan Sejarah
	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Pembinaan Generasi Muda Untuk Peningkatan Peran dan Partisipasi dalam Pembangunan
			Peningkatan Kapasitas Kepemudaan
		Meningkatkan prestasi olahraga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
			Pengembangan Sistem Pembinaan Olahraga Menuju Peningkatan Prestasi Atlet
			Peningkatan Kompetisi Penyelenggaraan Olahraga
	Meningkatnya Kualitas Derajat		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan pendukung Pelayanan SPM	Peningkatan Kapasitas SDM
			Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan
		Menurunkan angka prevalensi stunting	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar untuk Penderita Stunting
			Peningkatan Gizi Masyarakat
			Penyediaan Sarana Prasarana
			Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Remaja
			Promosi Percepatan Penurunan Stunting
			Penajaman Verifikasi dan Validasi Data
		Meningkatkan PHBS	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan
			Peningkatan Kualitas Sanitasi di Lingkungan Rumah Tangga
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan Peran Serta Perempuan dalam Pemerintahan, Masyarakat, dan Keluarga.
			Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Lembaga
		Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Penguatan Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan fasilitas dan pemenuhan hak anak	Peningkatan dan Penguatan Layanan Pemenuhan Hak Anak
			Menyediakan Layanan Ramah Anak
		Meningkatkan peran serta keluarga dalam menekan angka kelahiran	Peningkatan Fasilitas, Advokasi, Sosialisasi, Edukasi, Informasi, Komunikasi Tentang Keluarga Berencana
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	Meningkatkan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan PERKADA	Peningkatan Sosialisasi dan Patroli Trantibmas
			Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Perda

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan Pembinaan Masyarakat Terhadap Kesatuan Bangsa	Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
			Peningkatan Nilai Nilai Budaya Bangsa dan Pancasila Sebagai Filter Pengaruh Budaya Asing
			Memaksimalkan Dialog Antar Kelompok Masyarakat
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
			Peningkatan Fasilitas Kerjasama Daerah
			Peningkatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum
			Pengaturan Tata Laksana Perangkat Daerah
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
			Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam
			Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Meningkatkan fasilitas pembahasan produk hukum	Penataan Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan
		Meningkatkan kualitas perencanaan daerah	Peningkatan sinergitas perencanaan ditingkat daerah dengan perangkat daerah
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Pengembangan instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur	Peningkatan dan Pemenuhan Kualitas/Kompetensi Sumber Daya Aparatur

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
yang berkinerja tinggi dan akuntabel	yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatkan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Prioritas Penganggaran Kelitbangan
			Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah
			Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan	Peningkatan Tata Kelola Kearsipan
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah
		Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah	Optimalisasi Pengelolaan Aset-Aset Daerah
			Optimalisasi Sumber Sumber Pembiayaan dan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
			Optimalisasi Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Pemerintahan
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Layanan Publik
			Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Informasi dan Komunikasi
			Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
			Peningkatan Pengamanan Informasi
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatkan kualitas layanan pemerintah Kepada masyarakat	Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan
		Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
		Meningkatkan penataan administrasi	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial,

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		bidang pemerintahan, sosial, pembangunan dan kemasyarakatan	Pembangunan dan Kemasyarakatan
			Peningkatan sarana prasarana pendukung
			Peningkatan Fasilitas kecamatan dalam setiap bentuk pelayanan public
		Penempatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	Peningkatan kapasitas aparatur kelurahan
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat kelurahan
		Meningkatkan penataan administrasi bidang pemerintahan, sosial, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan dan Kemasyarakatan
			Peningkatan sarana prasarana pendukung
			Peningkatan Fasilitas kecamatan dalam setiap bentuk pelayanan publik
		Penempatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	Peningkatan kapasitas aparatur kelurahan
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat kelurahan
		Meningkatkan penataan administrasi bidang pemerintahan, sosial, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan dan Kemasyarakatan
			Peningkatan sarana prasarana pendukung
			Peningkatan Fasilitas kecamatan dalam setiap bentuk pelayanan publik
		Penempatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	Peningkatan kapasitas aparatur kelurahan

A-

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat kelurahan
		Meningkatkan penataan administrasi bidang pemerintahan, sosial, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan dan Kemasyarakatan
			Peningkatan sarana prasarana pendukung
			Peningkatan Fasilitas kecamatan dalam setiap bentuk pelayanan publik
		Penempatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	Peningkatan kapasitas aparatur kelurahan
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat kelurahan
		Meningkatkan penataan administrasi bidang pemerintahan, sosial, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan dan Kemasyarakatan
			Peningkatan sarana prasarana pendukung
			Peningkatan Fasilitas kecamatan dalam setiap bentuk pelayanan publik
		Penempatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	Peningkatan kapasitas aparatur kelurahan
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat kelurahan
		Meningkatkan penataan administrasi bidang pemerintahan, sosial, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan dan Kemasyarakatan
			Peningkatan sarana prasarana pendukung
			Peningkatan Fasilitas kecamatan dalam setiap bentuk pelayanan publik

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penempatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Kelurahan
		Meningkatkan penataan administrasi bidang pemerintahan, sosial, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan dan Kemasyarakatan
			Peningkatan sarana prasarana pendukung
			Peningkatan Fasilitas kecamatan dalam setiap bentuk pelayanan publik
		Penempatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Kelurahan
		Meningkatkan penataan administrasi bidang pemerintahan, sosial, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan dan Kemasyarakatan
			Peningkatan sarana prasarana pendukung
			Peningkatan Fasilitas kecamatan dalam setiap bentuk pelayanan publik
		Penempatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	Peningkatan kapasitas aparat kelurahan
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat kelurahan
		Meningkatkan penataan administrasi bidang pemerintahan, sosial, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan dan Kemasyarakatan
			Peningkatan sarana prasarana pendukung

A.

TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan Fasilitas kecamatan dalam setiap bentuk pelayanan publik
			Peningkatan kapasitas aparatur kelurahan
			Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat kelurahan

6.2 Kebijakan

Kebijakan pembangunan ini merupakan kondisi yang ingin dicapai pada setiap tahun pelaksanaan pembangunan. Pencapaian pembangunan tahunan merupakan tahapan pembangunan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam 3 (tiga) tahun sampai akhir periode RPD. Arah kebijakan memberikan pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan tahunan Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 digambarkan sebagai berikut:

Kebijakan Pembangunan Kota Bengkulu Tahun 2024-2026



Handwritten signature

1. Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Pembangunan pada tahun 2024 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu *Menstabiliskan Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Pelayanan dasar dan Kualitas berdemokrasi.*

2. Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Pembangunan pada tahun 2025 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu *Peningkatan Pembangunan yang Merata, Inklusif dan Berkelanjutan.*

3. Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan pada tahun 2026 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu *Penguatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Bebas KKN.*

6.3. Program Prioritas

Perumusan program pembangunan daerah dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah) merupakan tahap yang sangat penting karena akan menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas, dimana program prioritas secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dan diselaraskan dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJP Kota Bengkulu 2007-2027, ditetapkan program prioritas pembangunan Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 sebagai instrumen untuk melaksanakan RPD Kota Bengkulu. Program prioritas ini menjadi instrumen dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahunan Kota Bengkulu. Secara lebih detail gambaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 sebagai berikut

Fokus pada Tahun 2024:

1. Menjaga stabilitas dan Meningkatkan Produksi Sektor Unggulan
2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
4. Reformasi Birokrasi dalam Perwujudan Tata Kelola yang Baik
5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

6. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu secara Demokratis

Fokus pada Tahun 2025 :

1. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
2. Peningkatan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi baru berdasarkan fungsi Kewilayahan
3. Pengembangan Sumber Daya Untuk mendukung terciptanya Investasi
4. Pemantapan Kualitas Sumber Daya manusia yang unggul dan berdaya saing
5. Pemerataan Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup
6. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Focus pada Tahun 2026 :

1. Reformasi Birokrasi melalui penguatan inovasi dan penerapan Teknologi
2. Penguatan Stabilitas Wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya
3. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing
4. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Ketahanan Bencana
5. Penguatan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Daerah dengan memperbaiki Kelestarian Lingkungan
6. Peningkatan lapangan Kerja dan Investasi.

Pada Tabel 6.2 dapat dilihat program pembangunan daerah yang disertakan pagu indikatif Kota Bengkulu per sasaran dan tujuan yang akan dicapai pemerintah Kota Bengkulu pada Tahun 2024-2026.



Tabel 6.2
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Bengkulu Tahun 2024-2026

KODE	Tujuan/Strategi Program Pembangunan Daerah	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJPD	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJPD				GPO Pemanggang Jeneb
					2024			2025			2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	3	4	6	7	5,1 - 5,25	24.053.783,558	5,3 - 5,5	24.703.280,947	10	11	12	14	15	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PERIKANAN, DISPERDAGRIN, DISPAR, BAPENDA, DINAS KOPERASI, SETDA (BAGIAN PEREKONOMIAN)
1.a	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Indeks	3,47						20.962.050,227				52.196.670,880	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PERIKANAN, DISPERDAGRIN, DISPAR, BAPENDA, DINAS KOPERASI, SETDA (BAGIAN PEREKONOMIAN)
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Perikanan	Persentase ketahanan sarana perikanan	Persen	65	65		915.000,000	70	933.300.000		75	933.717,981	2.182.017,981.00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Perikanan	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Persen	80	82		2.125.000,000	83	2.167.500.000		84	2.168.470,722	6.450.970,722.00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Produk Daging	Ton	238	240			290			260				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	50	60		535.000,000	70	545.700,000		80	545.944,393	1.528.644,393.00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Perikanan	Persentase fasilitas penanggulangan bencana	Persen	85	87		485.000,000	90	504.900,000		95	505.126,121	1.305.026,121.00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5	Program Perikanan Usaha Perikanan	Persentase jumlah rekomendasi usaha perikanan yang diterbitkan	Persen	100	100		225.000,000	100	229.500,000		100	229.602,782	684.102,782.00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6	Program Penyuluhan Perikanan	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh dan petani	Persen	30	35		647.000,000	40	658.840,000		45	660.235,556	1.967.175,556.00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
7	Program Pengendalian Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	18,12	19,03		1.115.000,000	19,88	1.002.918,937		20,88	824.814,639	2.942.733,576.00		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
8	Program Pengendalian Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	Ton	6,00	6,30		425.098,000	6,62	446.353,850		6,95	468.677,648	1.340.124,588.00		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
9	Program Pengendalian Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase produk perikanan yang dijual	Persen	5	10		60.000,000	15	63.000,000		20	66.150,000	189.150,000.00		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
10	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Persen	NA	2		1.185.000,000	3	1.335.000,000		4	1.305.000,000	3.825.000,000.00		DINAS PARIWISATA
11	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	NA	30		470.000,000	35	490.000,000		40	560.000,000	1.520.000,000.00		DINAS PARIWISATA
12	Program Perburuan Dan Pemasaran Perikanan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	35,97	35,97		39.981,000	45,2	42.847,500		53	44.132,925	126.971,425.00		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
13	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Persen	38,2	38,2		150.452,960	38,2	161.199,600		40	166.035,588	477.885,148.00		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KODE	Tujun/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		OPD Penanggung Jawab	
					2024		2025		2026		2027			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Program Stabilitas Harga Barang Keluaran Pokok Dan Barang Pening	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Persen	9	10	413.718.200	11	433.269.500	12	448.567.595	12	1.293.555.285,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
15	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	Juta US\$	NA	0,5	1.027.600.000	0,7	1.101.000.000	1	1.134.030.000	1	3.262.630.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
16	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbangan, dan pertimbangannya (UUP) bertanda tara sah yang beredar	Persen	25,7	29	190.798.720	33	204.427.200	37	210.560.016	37	606.765.935,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
17	Program Penguasaan Dan Pengembangan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPKN yang ditetapkan dalam RPKN pertumbuhan industri kreatif	Persen	0	10	377.496.440	20	388.356.900	25	400.007.607	25	1.165.930.947,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
18	Program Penguasaan Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemanfaatan dan pengawasaan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	33	35	7.578.200	37	10.000.000	40	10.300.000	40	27.874.200,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
19	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi persetujuan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota	Persen	NA	2,7	95.000.000	4,4	96.900.000	5,50	97.866.000	5,50	289.769.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECL DAN MENENGAH	
20	Program Penguasaan Dan Penguasaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota	Persen	5	11	598.350.000	12	610.317.000	14	616.420.170	14	1.825.087.170,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECL DAN MENENGAH	
21	Program Penguasaan Koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dimiliki keanggotaannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota	Persen	1	3,7	170.000.000	5,5	173.400.000	6	175.134.000	6	518.534.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECL DAN MENENGAH	
22	Program Pendidikan Dan Latihan Peningkatan Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota	Persen	33,5	36,1	519.410.000	38,6%	531.798.200	41,41%	538.116.162	41,41%	1.893.324.382,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECL DAN MENENGAH	
23	Program Pemberdayaan Dan Penguasaan Koperasi	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan pembinaan	Persen	37,7	40,25	400.000.000	42,7%	408.000.000	45%	412.080.000	45%	1.220.080.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECL DAN MENENGAH	
24	PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	Capaian Kinerja Pengembangan Ikum Penanaman Modal	Persen	30	50	220.000.000	75	405.000.000	100	30.000.000	100	655.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU	
25	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	48	58	260.000.000	68	200.000.000	78	380.000.000	78	780.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU	
25	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	100	100	200.000.000	100	235.000.000	100	310.000.000	100	745.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU	

KODE	Tujuan/Kasus/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD				OPD Penanggung Jawab
					2024		2025		2026		2027		2028		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1b	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Capaian jaringan Kota kreatif	Persen	10	10	3.715.433.012	15	3.741.210.720	20	3.776.651.597	20	11.235.295.329	DINAS PARIWISATA		
27	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	30	30	340.000.000	35	300.000.000	40	300.000.000	40	940.000.000.00	DINAS PARIWISATA		
28	Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah CST	10	10	290.000.000	15	300.000.000	20	300.000.000	20	860.000.000.00	DINAS PARIWISATA		
29	Program Pemberdayaan usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro	Pemertasaan UKM Yang Benzin	Persen	1,09	2,21	1.355.460.000	3,5	1.362.169.200	4,3	1.375.790.892	4,3	4.093.420.082.00	DINAS KOPERASI DAN UKM		
30	Program Pengembangan UKM	Pemertasaan UKM Biruan Yang Meningkatkan Omsetnya	Persen	0,22	1,64	1.448.530.412	3,71	1.477.603.020	4,8	1.492.379.050	4,6	4.418.612.482.00	DINAS KOPERASI DAN UKM		
31	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Persen	2	2	281.342.600	2,25	301.438.500	2,5	310.481.655	2,5	863.282.755.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
2.	Meningkatnya Pemertasaan Ekonomi	Indeks Gini	Angka	0,38	0,38	4.255.000.000	0,37	4.186.231.261	0,36	4.638.264.161	0,36	13.078.495.422	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
2a	Merumahnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	17,89	17,89	3.315.000.000	17,39	3.159.578.704	16,89	3.598.264.161	16,89	10.072.842.966	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
1	Program Pengkayaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan Dan Kemendirian Pangan	Pemertasaan jumlah pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	20	20	350.000.000	25	357.000.000	30	357.159.884	30	1.064.159.884	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemertasaan ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	89	90	685.000.000	92	688.700.000	93	699.012.915	93	2.082.712.915	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
3	Program Pemertasaan Ketahanan Pangan	Pemertasaan Desa Rantai Rantai Pangan	Persen	4,5	4	65.900.000	2	66.700.000	1	66.738.829	1	254.438.820.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pemertasaan jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	80	85	115.000.000	90	117.300.000	95	117.352.533	95	345.652.533.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS Yang Terpapah Kebutuhan Dasarnya	Persen	29	41	925.000.000	52	954.876.714	64	1.060.000.000	64	2.839.876.714.00	DINAS SOSIAL		
6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persen	41	52	275.000.000	70	250.000.000	81	360.000.000	81	875.000.000.00	DINAS SOSIAL		
7	PROGRAM PEMANGKATAN BENCANA	Pemertasaan korban Yang Mendapatkan Perangatan Bencana	Persen	86	81	580.000.000	83	570.000.080	85	648.000.000	85	1.798.000.000.00	DINAS SOSIAL		
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Di Bina	Persen	100	100	300.000.000	100	225.000.000	100	280.000.000	100	805.000.000.00	DINAS SOSIAL		
2b	Meningkatnya Pemertasaan pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,34	6,26	940.000.000	6,58	1.026.652.557	5,8-5	1.040.000.000	5,8-5	3.006.652.557	DISNAKER		

A.

KODE	Tujuan/Rencana Program Pembangunan Daerah	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kersangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			OPD Penanggung Jawab	
					2024			2025			2026				
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET		RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	DISNAKER
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen	Dokumen	NA	1	100.000.000	0	186.652.557	0	200.000.000	0	486.852.557.00	0		
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Person	Person	NA	0,011	200.000.000	0,022	200.000.000	0,026	200.000.000	0,026	600.000.000.00	0,026	DISNAKER	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Person	Person	45,64	49,82	200.000.000	36,42	200.000.000	60	200.000.000	60	600.000.000.00	60	DISNAKER	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Person	Person	50	52	440.000.000	55	440.000.000	56	440.000.000	56	1.320.000.000.00	56	DISNAKER	
		Dokumen	Dokumen	1	1		1		1		1				
2c	Meningkatnya Pemerataan pendapatan	Indeksi	person	5,92	2,5-5,5	0	2,3-5	0	2,2-4,8	0	2,2-4,8	0			
3	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Indeksi	Indeksi	65,64	66,6	418.611.321.453	70,3	428.090.925.660	76,36	436.262.316.983	76,36	1.282.964.564.078	76,36	DRUPKP, DPTK, DLH, BPBD	
3a	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur	Person	Person	75	77	388.734.195.032	79	409.273.423.226	81	418.135.245.118	81	1.226.142.863.376	81	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	Program Pengembangan Permukiman	Person	Person	85	86	4.800.000.000	87	4.807.000.000	88	4.812.070.000	88	9.619.070.000.00	88	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Person	Person	85	86	49.530.000.000	87	49.840.200.000	88	49.845.402.000	88	148.215.602.000.00	88	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Person	Person	40	55	152.330.000.000	65	152.330.000.000	75	152.330.000.000	75	456.980.000.000.00	75	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Person	Person	89	100	476.000.000	100	485.520.000	100	491.191.200	100	1.452.711.200.00	100	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
7	Program Pengkayaan Sumber Daya Air (Sda)	Person	Person	17	17	1.000.000.000	18	1.020.000.000	19	1.040.400.000	19	3.060.400.000.00	19	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
8		Ha	Ha	1039	1039		1039		1039		1039		1039	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
9	Program Pengalihan Dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Person	Person	61	65	5.610.000.000	67	5.671.200.000	70	5.689.556.000	70	16.980.756.000.00	70	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
10	Program Pengembangan Sistem Dan Pengkayaan Persampahan Regional	Person	Person	12	13	320.000.000	14	326.400.000	15	327.272.603	16	973.672.603.00	16	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

KODE	Tujuan/Rencana Program Pembangunan Daerah	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJPD	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJPD		
					2024		2025		2026		Target		Rp
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Program Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Persen	48.4	51.7	4,800,000,000	54.2	4,826,500,000	55.07	4,945,107,500	56.67	14,474,607,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
12	Program Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	80	82	5,100,000,000	83	5,151,000,000	86	5,202,510,000	88	15,453,510,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
13	Program Pemetaan Banjir-ban Dan Lingkungannya	Luas kawasan terdampak banjir-ban dan lingkungan	Persen	65	66	150,178,100,000	70	152,802,254,000	74.4	171,117,459,743	74.4	482,232,802,743.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
14	Program Penyelenggaraan Perawatan Ruang	Cakupan pemertanian, pemertanian, pengawasan dan pengendalian perataan ruang	Persen	55	64	2,225,000,000	73	2,240,540,000	73	2,247,310,700	73	6,712,850,700.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3b	Meningkatnya Kualitas Kinerja Laki Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio kelancaran Laki Lintas	Rasio	0.31	0.37	5,332,980,250	0.375	5,699,828,455	0.38	5,886,932,750	0.38	16,918,722,455	DINAS PERHUBUNGAN
1	Program Penyelenggaraan Laki Lintas Dan Angkutan Jalan	Rasio Kinerja Laki Lintas Kota	Angka	0.74	0.75	5,282,980,250	0.78	5,949,828,455	0.80	5,836,932,750	0.80	16,769,722,455.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	Program Pengkajian Pelayaran	Persentase Terpaparnya kapal dengan kondisi baik	Persen	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	150,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
3c	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasana Publik	Persentase penyelenggaraan dan pemertanian ruang	Persen	60	65	4,249,587,266	70	4,106,055,147	75	4,203,050,446	75	12,556,692,859	Disperkimin
1	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Persen	NA	0.833	1,816,221,286	0.825	1,582,443,466	0.555	1,631,115,638	0.555	4,838,760,370.00	Disperkimin
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	50	55	780,000,000	60	792,828,265	65	800,000,000	65	2,382,826,265.00	Disperkimin
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni	Persen	50	55	550,000,000	60	561,000,000	65	570,000,000	65	1,681,000,000.00	Disperkimin
4	Program Pengkajian Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PU)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	NA	0.26	715,000,000	0.263	729,300,000	0.265	740,660,000	0.265	2,184,960,000.00	Disperkimin
5	Program Pengawasan Hak-hak atas tanah	Legalitas penyalagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikorupsi/korupsi)	Persen	NA	0.33	210,933,000	0.33	180,151,660	0.34	189,159,243	0.34	580,243,903.00	Disperkimin
6	Program Pengkajian Laki Lokal	Jumlah Laki Lokal yang diakibatkan	Persen	NA	0.33	135,761,000	0.33	100,000,000	0.34	100,000,000	0.34	335,761,000.00	Disperkimin
7	Program Pengkajian Tanah Kosong	Persentase penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persen	NA	0.39	90,600,000	0.33	30,333,756	0.34	37,316,532	0.34	158,450,288.00	Disperkimin
8	Program Penanganan Tanah Kosong	Persentase Penanganan Tanah Kosong	Persen	NA	0.33	140,852,000	0.33	120,000,000	0.34	134,779,033	0.34	395,631,033.00	Disperkimin
3d	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berbudaya	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Angka	81.85	82.82	15,389,231,946	82.88	15,185,498,040	82.85	14,560,586,936	82.85	45,135,316,922	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Au Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemeriksaan Kelas Air di Sungai Bengulu	Kelas sungai	4.0	4.0	1,287,238,005	3.0	1,330,388,905	3.0	1,393,961,806	3.0	3,991,799,716.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Bengkulu	ISPU	95.0	96.0		96.0		96.0		96.0		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Program Pengkajian Kelembagaan Hayati (Kehati)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	40	40.1	2,491,783,000	40.12	2,616,382,850	40.13	2,740,972,300	40.13	7,848,147,950.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A.

KODE	Tujuan/Sasaran Program Peningkatan Daerah	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			OPD Penanggung Jawab	
					2024		2025		2026		Target	Rp	Target		Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3	Program Peningkatan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Angka	1	1	237.554.600	1	249.432.330	2	261.310.080	2	748.296.990,00			
4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	50	75	224.195.000	77	235.404.750	80	246.614.500	90	705.214.250,00			
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Capaian penilaian pengendalian limbah B3	Persen	50	70	28.470.000	75	29.993.500	90	31.317.000	90	89.680.500,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Pertambangan Dan Pengkajian Lingkungan Hidup (Pph)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan	Persen	75	80	452.817.850	80	475.458.743	85	488.088.635	85	1.428.376.228,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
7	Program Peningkatan Pengadaan Lingkungan Hidup	Cakupan Penyelamatan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	29.851.200	100	31.133.760	100	32.616.320	100	93.401.260,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8	Program Pengalihan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	58	80	10.857.512.291	81,5	10.217.192.402	82,7	9.355.695.315	82,7	30.230.400.008,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3a	Memerumnya Risiko Bencana	INDEX RISIKO BENCANA	Indeks	120	120	4.487.994.475	110	3.632.004.394	100	3.598.484.909	100	11.686.393.778,00		BPRD, DPKD	
1	Program Peninggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	65	75	3.627.894.475	85	2.682.004.394	95	2.636.484.309	95	8.826.383.778,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan keselamatan terhadap bencana	Persen	65	75		85		95		95			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
2	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	87	87	860.000.000	87	970.000.000	90	930.000.000	90	2.760.000.000,00		DAMKAR	
4	Meningkatnya Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saling	INDEX PEMBANGUNAN MANUSIA	Indeks	80,54	80,54	147.847.052.248	80,54	151.767.377.556	80,74	151.986.031.071	80,74	451.800.460.875		DIKBUD	
4a	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah	tahun	11,08	11,08	68.750.355.632	11,1	71.068.430.139	11,11	71.207.488.804	11,11	211.026.254.675		DIKBUD	
			tahun	16,03	16,04		16,05		16,06		16,06			DIKBUD	
1	Program Peninggalaan Pendidikan	Persentase pencapaian SPN sarana dan prasarana pendidikan	Persen	24	30	67.265.300.000	40	68.610.744.857	50	69.682.558.334	50	206.556.502.991		DIKBUD	
2		persentase pencapaian SPN pendidikan (selajori kualitas pendidikan)	Persen	70	75		78		80		80			DIKBUD	
3	Program Peninggalaan Kurikulum	persentase siswa PKBM yang lulus	Persen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	225.000.000,00		DIKBUD	
4	Program Pendidikan Dan Tenaga Pendidik	Persentase guru bersertifikat	Persen	86	87	150.000.000	87,5	150.000.000	87,5	175.000.000	87,5	475.000.000,00		DIKBUD	

KODE	Tujuan/Sasaran Program Pengembangan Daerah	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPDP	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pembiayaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPDP				OPD Penanggung Jawab		
					2024		2025		2026		Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5	Program Pembinaan Perpustakaan	persentase perpustakaan yang mendapat pembinaan	Persen	28	60	480.055.632	76	447.685.482	86	431.910.570	86	1.359.651.684,00	PERPUS				
		survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan	Nilai IKM	62	70		75		80		80		PERPUS				
6	Program Pelestarian Dan Pengabdian Cagar Budaya	persentase cagar budaya yang di lestarikan	Persen	21	89	100.000.000	90	100.000.000	95	110.000.000	95	310.000.000,00	DIKBUD				
7	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional lokal yang di bina	Jumlah	6	6	250.000.000	6	250.000.000	6	288.000.000	6	788.000.000,00	DIKBUD				
8	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pengembangan budaya lokal yang dibina	Jumlah	4	4	250.000.000	4	255.000.000	4	255.000.000	4	760.000.000,00	DIKBUD				
9	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah lokal yang dibina	Jumlah	2	2	180.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000	2	550.000.000,00	DIKBUD				
4b	Memperkuat Prestasi Olahraga dan Peran serta Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda yang Berprestasi	Persen	35	35	4.358.153.635	45	4.438.153.635	55	4.416.353.635	55	13.212.690.905	DISPORA				
1	Program Pengembangan Kapasitas Komunitas	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	80	80	350.000.000	90	400.000.000	100	448.200.000	100	1.198.200.000,00	DISPORA				
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Seng Kepemudaan	Persentase Pemuda yang obina berprestasi	Persen	18,05	20	770.000.000	20	755.000.000	25	715.000.000	25	2.240.000.000,00	DISPORA				
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Seng Kedahngan	Persentase pengembangan kapasitas daya seng kepemudaan	Persen	100	100	688.153.635	100	688.153.635	100	688.153.635	100	2.064.460.905,00	KESBANGPOL				
4c	Memperkuat Kualitas Daerah Kedahngan	Jumlah prestasi olahraga	Medali	128	150	2.550.000.000	150	2.595.000.000	150	2.565.000.000	150	7.710.000.000,00	DISPORA				
1	Memperkuat Kualitas Daerah Kesehatan Masyarakat	ANGKA HARAPAN HIDUP	Tahun	70,21	70,3	74.738.542.981	70,4	76.260.793.782	70,5	76.982.208.532	70,5	227.361.545.295,00	DINKES, RSHO				
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Terpenuhi	Persen	100	100	1.888.546.998	100	1.981.974.348	100	2.080.073.066	100	5.860.594.414,00	RSHD				
		Cakupan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan terpenuhi	Persen	57,75	100	70.078.424.003		71.452.510.749		71.455.989.749		212.886.634.501,00	DINKES				
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Memiliki Izin	Persen	100	100	686.655.025	100	700.129.045	100	700.180.292	100	2.086.954.382,00	DINKES				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Persentase Mutu SDM Kesehatan Meningkat	Persen	75	76	82.523.300	77	84.141.404	78	84.145.159	78	250.809.863,00	DINKES				
4	Program Pambudayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pelaksanaan Promotif Tingkat Kota	Persen	60	65	2.022.383.554	70	2.052.038.235	75	2.052.130.265	75	6.148.552.155,00	DINKES				

KODE	Tajuk/Rencana Program Peningkatan Daerah	Indikator Kerja	Satuan	Kontrol Kinerja Penguji Awal RPJPD	Capaian Kinerja Program dan Kemajuan Pelaksanaan												Kontrol Kinerja pada akhir periode RPJPD	
					2024			2025			2026			2027			Tertarget	Rp
					Tertarget	Rp	Indeks	Tertarget	Rp	Indeks	Tertarget	Rp	Indeks	Tertarget	Rp	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.2	Meningkatnya Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saling	INDEX PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	Indeks	95.77	11,140,739.025	95.87	11,663,106,546	95.97	11,885,688,372	95.97	11,885,688,372	95.97	11,885,688,372	95.97	11,885,688,372	95.97	34,503,634,843	DP3AP2KB
4.3	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peningkatan Bagi Perempuan Dan Anak	INDEX PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	Indeks	77.87	8,084,826,560	77.87	8,484,252,732	77.87	8,506,364,904	77.87	8,506,364,904	77.87	8,506,364,904	77.87	8,506,364,904	77.87	25,080,833,740.00	DP3AP2KB
1.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Prangkat daerah yang melaksanakan PPRG	persen	40%	820,000,000	85	860,000,000	75	852,358,110	75	852,358,110	75	852,358,110	75	852,358,110	75	2,532,369,110.00	DP3AP2KB
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	persen	4.2	485,000,000	5	481,364,904	7	506,364,904	7	506,364,904	7	506,364,904	7	506,364,904	7	1,452,729,008.00	DP3AP2KB
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penggiatan kemandirian	persen	50	55,000,000	70	75,000,000	60	75,000,000	60	75,000,000	60	75,000,000	60	75,000,000	60	200,000,000.00	DP3AP2KB
4	Program Koordinasi Pemertintah Daerah Dalam	Persentase administrasi kearahwalidasa	persen	26	50,000,000	53	55,000,000	67	75,000,000	67	75,000,000	67	75,000,000	67	75,000,000	67	180,000,000.00	DP3AP2KB
5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Persen	40	350,000,000	65	350,000,000	75	350,000,000	75	350,000,000	75	350,000,000	75	350,000,000	75	1,050,000,000.00	DP3AP2KB
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Anak Yang Memerlukan Perlindungan	Persian	0.00031	250,000,000	0.0002	285,000,000	0.00022	275,142,616	0.00022	275,142,616	0.00022	275,142,616	0.00022	275,142,616	0.00022	820,142,616.00	DP3AP2KB
4a	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peningkatan Bagi Perempuan Dan Anak dan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Pengurangan Kota Layak Anak	Pipikal	Pratama	3,054,913,275	Madya	3,183,943,914	Madya	3,183,943,914	Madya	3,183,943,914	Madya	3,183,943,914	Madya	3,183,943,914	Madya	9,422,801,103	DP3AP2KB
1	Program Pengendalian Sistem Data Gender Anak	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender anak	persen	45	134,164,340	65	139,164,340	75	139,164,340	75	139,164,340	75	139,164,340	75	139,164,340	75	412,495,020.00	DP3AP2KB
2	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase kebijakan tentang peningkatan kualitas anak yang diadukan	persen	0.88	265,000,000	1.28	305,000,000	1.35	305,000,000	1.35	305,000,000	1.35	305,000,000	1.35	305,000,000	1.35	875,000,000.00	DP3AP2KB
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana(Kb)	Calupun akseptor KB Adif	Nilai	36370	2,235,748,635	36900	2,318,778,574	37500	2,318,778,574	37500	2,318,778,574	37500	2,318,778,574	37500	2,318,778,574	37500	8,875,308,083.00	DP3AP2KB
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Keluarga Sejahtera (KS)	persen	30	150,000,000	45	150,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000	50	450,000,000.00	DP3AP2KB
5	Program Pengendalian Penduduk	Persentase TFR	persen	2.2	270,000,000	2.1	270,000,000	2.1	270,000,000	2.1	270,000,000	2.1	270,000,000	2.1	270,000,000	2.1	810,000,000.00	DP3AP2KB
4.3	Meningkatnya Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saling	INDEX RASA AMAN	Indeks	NA	3,540,188,600	70	3,488,270,455	70	3,433,525,280	70	3,433,525,280	70	3,433,525,280	70	3,433,525,280	70	10,461,985,335	SATPOL, KESBANINGPOL
4f	Meningkatnya Kelangkaan Masyarakat Yang Harmonis	Persentase masyarakat yang mendapat layanan akseptor KB Adif yang pengisian hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	persen	100%	3,540,188,600	100%	3,488,270,455	100%	3,433,525,280	100%	3,433,525,280	100%	3,433,525,280	100%	3,433,525,280	100%	10,461,985,335	SATPOL
1	Program Peningkatan Kolaborasi Dan Keterbacaan Umum	Persentase peningkatan pengujian kefektifan dan keterbacaan umum Persentase pos kamling aktif	Persien	50	1,365,949,000	60	1,242,000,000	65	1,132,000,000	65	1,132,000,000	65	1,132,000,000	65	1,132,000,000	65	3,738,949,000.00	SATPOL
			Persien	65	65	66	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67		SATPOL

KODE	Tugas/Rencana Program Peningkatan Daerah	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPDP	Capaian Kinerja Program dan Kompleks Peningkatan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPDP			OPD Peninggatang Jawab
					2024			2025			2026			
					TARGET	RP	TARGET	TARGET	RP	TARGET	TARGET	RP	TARGET	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Perda dan Perkada	Persen	70	75		80		80		80		SATPOL	
2	Program Peningkatan Peran Patal Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Patal Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	90	90	1.318.755,100	90	1.318.755,100	90	1.318.755,100	90	3.958.286.300,00	KESBANGPOL	
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Pengembangan Karakter Kebangsaan	Persen	90	90	98.900,300	90	98.900,300	90	100.000,000	90	297.800.600,00	KESBANGPOL	
4	Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Ormas	Cakupan pembinaan ormas	Persen	90	90	68.527,000	81	68.527,000	92	102.520,800	92	241.574.800,00	KESBANGPOL	
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Kaderan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Cakupan pokja dalam upaya pembinaan dan pengembangan kaderan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	80	80	261.982,800	80	261.982,800	80	265.248,380	80	789.214.980,00	KESBANGPOL	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional serta peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	persen	90	90	425.075,400	90	497.105,255	90	515.000,000	90	1.437.180.655,00	KESBANGPOL	
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Bebas KKN	INDEX REFORMASI BIKORABAI	INDEX	CC	CC	71.807.859,205	B	73.007.919,498	B	73.059.200,302	B	217.874.978,993	Semua Perangkat Daerah	
5a	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi Dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	2,75	3,0	133.773.856,150	3,1	132.610,068,763	3,2	133.046,159,352	3,2	395.866,079,651	SEKRETARIAT DAERAH	
		Nilai Akurabel Kinerja Internal Pemerintahan (AKIP)	Nilai	B	B		BB		BB		BB			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kota	Persentase perencanaan dan pengalokasian keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persen	90%	90	53.477.368,379	95	54.813,946,702	100	54.893,936,803	100	182.985,251,884,00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
		Capaian Nilai Akurabilitas Kinerja Internal Pemerintahan (AKIP)	Persen	75	75		80		85		85		SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki keterampilan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100	100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keterlaksanaan data pendukung dokumen LPDP tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Persen	95	95	4.280.964,680	95	4.332.864,336	95	4.354.528,958	95	12.077.357,884,00	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
		Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Persen	63	65		65		70		70		SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM	
		Persentase Kelengkapan dan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang disediakan	Persen	100	100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

A.

KODE	Tipe/Besaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					2024			2025			2026		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET
1	3	2	4	8	7	2.413.131,072	100	2.437.262,383	100	2.449.448,695	100	7.299.842.150,00	15
			Person	100	100								SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SDA
			Person	50	50								SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4			Person	100	100	19.150.154,858	100	19.823.352,003	100	19.892.026,796	100	58.865.543,658,00	SEKRETARIAT DPRD
5			Person	100	100	48.920.854,621	100	47.599.098,065	100	47.584.347,771	100	142.074.310,457,00	SEKRETARIAT DPRD
6			Person	80	80	2.165.561,985	82	2.208.873,204	83	2.230.861,936	83	6.805.387.105,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Person	80	80		82		83		83		
7			Person	100	100	1.592.805,651	100	1.624.962,070	100	1.540.308,591	100	4.856.376.712,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Person	100	100		100		100		100		
			Person	100	100		100		100		100		
			Angka	50	60	1.081.887,307	62	2.000.000,000	65	2.025.000,000	65	5.906.887,307	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
7			Person	60	62	1.270.000,000	65	1.275.000,000	67	1.300.000,000	67	3.845.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
			Person	55	57		58		60		60		
8			Person	75	80	611.887,307	85	725.000,000	90	725.000,000	90	2.061.887,307,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.b			Person	58,37	58,57	1.575.000,000	59,75	1.616.500,000	59,80	1.652.835,000	59,80	4.846.435,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1			Person	NA	15	925.000,000	30	843.500,000	45	952.835,000	45	2.821.435,000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	Tajuk/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJPD	Capaian Kinerja Program dan Kampanye Pendidikan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJPD				OPD Penanggung Jawab				
					2024		2025		2026		Target		Rp			Target		Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
2	Program Pengkaderan Arap	Tingkat ketersediaan arap sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	33	52	600.000.000	53	625.000.000	54	650.000.000	54	1.875.000.000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						
3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arap	Tingkat ketersediaan dan keutuhan arap	Persen	0	10	50.000.000	13	50.000.000	15	50.000.000	15	160.000.000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						
5.c	Memplukanya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi Dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	predikst	WTP	WTP	15.026.143.371	WTP	14.975.805.748	WTP	15.083.822.085	WTP	45.085.771.204	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH						
1	Program Pengkaderan Keuangan Daerah	Pendapatan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	8.823.764.978	Tepat Waktu	5.860.240.277	Tepat Waktu	7.029.942.680	Tepat Waktu	20.813.847.935.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH						
		Penyampaian raperta pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu								
		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	91	96		100		100		100								
2	Program Pengkaderan Barang Mlik Daerah	Persentase akurasi data barang mlik daerah Tahun n-1	Persen	1.3	1.4	2.164.670.635	1.5	2.352.651.506	1.54	2.376.178.021	1.54	6.893.500.362.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH						
3	Program Pengkaderan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD	Persen	74,22	79	6.037.707.556	84	5.862.813.965	89	5.677.801.384	89	17.378.422.807.00	BAPENDA						
5.d	Memplukanya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi Dan Akuntabel	Nilai Rate-Rate Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nila	75	75	2.244.825.210	77	2.207.034.000	80	1.741.743.045	80	6.193.802.265	INSPEKTORAT DAERAH						
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase peningkatan ketelaan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Persen	100	100	1.313.245.210	100	1.234.984.000	100	1.068.683.045	100	3.617.922.255.00	INSPEKTORAT DAERAH						
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistansi	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Persen	25	100	831.580.000	100	972.050.000	100	672.050.000	100	2.575.580.000.00	INSPEKTORAT DAERAH						
5.e	Memplukanya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi Dan Akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1.6	1.8	10.793.008.931	1.9	11.005.868.467	2	11.111.727.183	2	32.910.604.011.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program, prioritas pemerintahan dan pemerintahan daerah Kota	Persen	75	75	4.875.523.348	80	4.973.033.815	85	5.022.764.153	85	14.871.321.316.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2	Program Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Persen	1	1.2	4.885.755.983	1.3	5.085.471.103	1.5	5.136.325.814	1.5	15.207.552.900.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100		100		100		100		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						

A.

KODE	Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Kerja Pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kendali Kinerja pada akhir periode RPD			OPD Penanggung Jawab	
					2024		2025		2026		Target	Rp	Target		Rp
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					
1	3	3	4	8	7	8	9	11	12	13	14	15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	70	75	475.000,000	75	484.500,000	80	489.345,000	80	1.448.845,000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintahan	Persen	50	60	456.729,000	70	462.863,579	80	463.292,216	80	1.382.884.795,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
5.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas Tinggi Dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	83,55	84,17	43.743,882,293	85,00	44.819,211,241	85,83	45.121,907,989	85,83	133.865,001,523	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	100	190.000,000	100	200.000,000	100	236.000,000	100	625,000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	Program Pengadaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	100	100	25,000,000	100	26,000,000	100	26,000,000	100	75,000,000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
3	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	76,79	86,00	1.125,000,000	89,33	925,000,000	92,67	925,000,000	92,67	2.975,000,000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
4	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	99,63	99,5	550,000,000	99,63	550,000,000	99,75	600,000,000	99,75	1.700,000,000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
5	Program Pengadaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Dokumen Pelayanan Dalam Kependudukan Skala Kota	Persen	100	100	1.250,000,000	100	1.320,000,000	100	1.395,000,000	100	3.965,000,000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
6	Program Pengadaan Profil Kependudukan	Persentase Pemertan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna Masyarakat	Persen	100	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	225,000,000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	2.350.180,600	86	2.905.784,000	87	2.765.784,000	87	7.721.748.600,00	KECAMATAN SUNGAI SERUT		
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kapasitas Masyarakat	Persen	85	85	1.160.000,000	86	1.295.000,000	87	1.365.000,000	87	3.820.000,000,00	KECAMATAN SUNGAI SERUT		
9	Program Koordinasi Kemitraan Dan Keterlibatan Umum	Cakupan Koordinasi Kemitraan dan Keterlibatan	Persen	85	85	272.550,000	86	320.000,000	87	350.000,000	87	942.550,000,00	KECAMATAN SUNGAI SERUT		
10	Program Penyelenggaraan Usulan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	85	85	30.483,450	86	38.886,398	87	44.045,112	87	114.426.960,00	KECAMATAN SUNGAI SERUT		
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	2.042.313,545	86	2.083.159,816	87	2.103.981,414	87	6.229.464.775,00	KECAMATAN RATU AGUNG		
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kapasitas Masyarakat	Persen	85	85	2.150.000,000	86	2.193.000,000	87	2.214.930,000	87	6.557.930,000,00	KECAMATAN RATU AGUNG		

Handwritten signature/initials

KODE	Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPDP	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPDP			OPD Penanggung Jawab	
					2024		2025		2026		Target	Rp	Target		Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
13	Program Koordinasi Kelentraman Dan Kelurahan Umum	Cakupan Koordinasi Kelentraman dan Kelurahan	Persen	85	85	240.000.000	86	244.800.000	87	247.248.000	87	732.048.000.00	KECAMATAN RATU AGUNG		
14	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	85	85	70.412.710	86	71.820.964	87	72.538.174	87	214.772.848.00	KECAMATAN RATU AGUNG		
15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	2.400.325.000	86	2.424.520.500	87	2.424.367.537	87	7.248.413.037.00	KECAMATAN KAMPUNG MELAYU		
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	85	85	1.140.000.000	86	1.180.000.000	87	1.180.000.000	87	3.500.000.000.00	KECAMATAN KAMPUNG MELAYU		
17	Program Koordinasi Kelentraman Dan Kelurahan Umum	Cakupan Koordinasi Kelentraman dan Kelurahan	Persen	85	85	212.550.000	86	212.550.000	87	212.550.000	87	637.650.000.00	KECAMATAN KAMPUNG MELAYU		
18	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	85	85	30.000.000	86	30.000.000	87	30.000.000	87	90.000.000.00	KECAMATAN KAMPUNG MELAYU		
19	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	3.982.049.197	86	3.769.189.734	87	3.823.422.224	87	11.574.661.155.00	KECAMATAN SELEBAR		
20	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	85	85	900.000.000	86	945.000.000	87	930.750.000	87	2.475.750.000.00	KECAMATAN SELEBAR		
21	Program Koordinasi Kelentraman Dan Kelurahan Umum	Cakupan Koordinasi Kelentraman dan Kelurahan	Persen	85	85	60.000.000	86	63.000.000	87	64.000.000	87	187.000.000.00	KECAMATAN SELEBAR		
22	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	85	85	90.000.000	86	94.500.000	87	96.000.000	87	280.500.000.00	KECAMATAN SELEBAR		
23	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	2.265.010.346	86	2.286.510.300	87	2.313.010.300	87	6.864.530.846.00	KECAMATAN MUARA BANGKAHULU		
24	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	85	85	1.182.500.000	86	1.206.150.000	87	1.238.000.000	87	3.826.680.000.00	KECAMATAN MUARA BANGKAHULU		
25	Program Koordinasi Kelentraman Dan Kelurahan Umum	Cakupan Koordinasi Kelentraman dan Kelurahan	Persen	85	85	374.482.189	86	411.880.535	87	419.014.866	87	1.205.387.280.00	KECAMATAN MUARA BANGKAHULU		
26	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	85	85	18.000.000	86	18.360.000	87	18.500.000	87	55.860.000.00	KECAMATAN MUARA BANGKAHULU		
27	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	2.056.983.876	86	2.228.521.476	87	2.482.423.478	87	8.767.928.828.00	KECAMATAN GADING CEMPAKA		
28	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	85	85	1.440.000.000	86	1.275.000.000	87	945.000.000	87	3.860.000.000.00	KECAMATAN GADING CEMPAKA		
29	Program Koordinasi Kelentraman Dan Kelurahan Umum	Cakupan Koordinasi Kelentraman dan Kelurahan	Persen	85	85	212.550.000	86	212.550.000	87	212.550.000	87	637.650.000.00	KECAMATAN GADING CEMPAKA		
30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	85	85	30.000.000	86	30.000.000	87	30.000.000	87	90.000.000.00	KECAMATAN GADING CEMPAKA		

KODE	Tugas/Hasil Program Pembangunan Daerah	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
					2024		2025		2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	1.845.285.380	86	2.029.313.918	87	1.881.945.310	87	5.757.044.600.00
32	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	85	85	1.470.000.000	86	1.511.000.000	87	1.720.000.000	87	4.701.000.000.00
33	Program Koordinasi Kelembagaan Dan Keterlibatan Umum	Cakupan Koordinasi Kelembagaan dan Keterlibatan	Persen	85	85	380.000.000	86	279.000.000	87	310.400.000	87	969.400.000.00
34	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	85	85	75.000.000	86	75.000.000	87	90.000.000	87	240.000.000.00
35	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	2.092.105.000	86	2.215.784.000	87	2.322.500.000	87	6.530.390.000.00
36	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	85	85	3.070.000.000	86	3.350.000.000	87	3.460.000.000	87	9.870.000.000.00
37	Program Koordinasi Kelembagaan Dan Keterlibatan Umum	Cakupan Koordinasi Kelembagaan dan Keterlibatan	Persen	85	85	588.000.000	86	593.000.000	87	315.000.000	87	1.496.000.000.00
38	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	85	85	120.500.000	86	128.500.000	87	129.000.000	87	378.000.000.00
39	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	3.090.500.000	86	3.152.310.000	87	3.183.633.100	87	8.426.643.180.00
40	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	85	85	2.595.000.000	86	2.816.300.000	87	2.642.463.000	87	7.823.763.000.00
41	Program Koordinasi Kelembagaan Dan Keterlibatan Umum	Cakupan Koordinasi Kelembagaan dan Keterlibatan	Persen	85	85	486.880.000	86	496.617.000	87	591.583.776	87	1.485.081.376.00
42	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	85	85	35.000.000	86	35.700.000	87	36.057.000	87	106.757.000.00

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Daerah untuk memenuhi layanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dimuat dalam Bab VII. Selain itu, bab ini juga memuat target program dan pagu indikatif yang merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan. Jumlah dana yang tersedia mengacu pada bab III RPD ini terutama mengenai kerangka pendanaan yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada bagian berikut.

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan saat ini. Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagaimana diuraikan pada bab III, maka kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah disajikan pada tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
Kota Bengkulu

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN			
5	BELANJA DAERAH	Rp 1.315.439.144.402,18	Rp 1.334.534.383.888,80	Rp 1.339.739.937.799,09
5 1	BELANJA OPERASI	Rp 1.043.873.955.748,63	Rp 1.052.844.720.207,27	Rp 1.053.103.329.003,56
5 1 0	Belanja Pegawai	Rp 632.839.066.858,23	Rp 639.167.457.526,81	Rp 639.230.741.433,50
5 1 0	Belanja Barang dan Jasa	Rp 376.995.020.313,38	Rp 379.240.910.068,59	Rp 380.110.901.362,44
5 1 0	Belanja Bunga	-	-	-
5 1 0	Belanja Hibah	Rp 32.637.734.850,00	Rp 32.964.112.198,50	Rp 32.285.940.459,93
5 1 0	Belanja Bantuan Sosial	Rp 1.402.133.727,02	Rp 1.472.240.413,37	Rp 1.475.745.747,69
5 2	BELANJA MODAL	Rp 270.252.688.653,55	Rp 280.311.538.681,53	Rp 285.255.202.545,53
5 2 0	Belanja Modal Tanah	Rp -		
5 2 0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 51.417.052.723,27	Rp 51.931.223.250,50	Rp 54.013.613.885,80
5 2 0	Belanja Modal Gedung dan	Rp 60.431.631.173,69	Rp 61.035.947.485,43	Rp 63.583.428.547,96
5 2 0	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 122.905.758.239,70	Rp 128.586.156.498,36	Rp 128.884.749.365,97
5 2 0	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 35.498.246.516,89	Rp 38.758.211.447,24	Rp 38.773.410.745,80
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp 1.312.500.000,00	Rp 1.378.125.000,00	Rp 1.381.406.250,00
5 3 0	Belanja Tidak Terduga	Rp 1.312.500.000,00	Rp 1.378.125.000,00	Rp 1.381.406.250,00

Pada tabel 7.1. terlihat proyeksi belanja daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp1.315.439.144.402,18, yang terbagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dari proyeksi belanja daerah tersebut, belanja operasi memiliki porsi paling banyak, sebesar 79,36% (dengan belanja pegawai mencapai 48,11% dan belanja barang jasa sebesar 28,66% dari belanja daerah), belanja modal sebesar 20,54%, dan belanja tidak terduga sebesar 0,1%.

Proyeksi belanja daerah tersebut meningkat 1,45% pada tahun 2025 menjadi Rp1.334.534.383.888,80, Dari proyeksi belanja daerah tersebut, belanja operasi sebesar 78,89%, belanja modal sebesar 21%, belanja tidak terduga sebesar 0,47%, dan belanja transfer sebesar 0,03%.

Pada tahun 2026 proyeksi belanja daerah meningkat sebesar 1,45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menjadi Rp1.339.739.937.799,09, dengan 78,61% belanja operasi, 21,29% belanja modal, dan 0,1% belanja tidak terduga.

Dari proyeksi belanja 2024-2026 tersebut terlihat bahwa proporsi Belanja Pegawai menurun seiring tahun, yaitu 48,11% pada 2024, 47,89% pada tahun 2025, dan tahun 2026 menjadi 47,71%.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah dalam bab ini hanya mencantumkan sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu, meskipun pada dasarnya ketercapaian target kinerja program tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu, melainkan bisa dari berbagai sumber pendanaan lain, seperti APBN maupun pendanaan lainnya. Kerangka pendanaan ini akan menjadi acuan dalam menyusun kebutuhan pendanaan program. Program-program yang telah disusun pagu indikatifnya kemudian menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendanaan di atas, pada tabel 7.2. ditampilkan indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan untuk tahun 2024 hingga tahun 2026.

7.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Kesetaraan. Program ini dioperasionisasikan dalam bentuk pembangunan unit sekolah baru, perpustakaan sekolah, sarana dan prasarana utilitas sekolah, penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan perlengkapan sekolah, perlengkapan siswa, mebel sekolah alat peraga siswa, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kapasitas pengelola dana BOS, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, baik di tingkat pendidikan dasar, menengah pertama, PAUD maupun pendidikan kesetaraan. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan APM SD dan SMP, APK PAUD, persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi serta beberapa indikator lain yang merupakan standar pelayanan minimum dalam urusan pendidikan.

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan untuk melakukan pemerataan dari segi kuantitas maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan kesetaraan. Program ini dioperasionisasikan dengan melakukan pemetaan dan perhitungan terhadap jumlah pendidik dan tenaga kependidikan baik di satuan pendidikan dasar, PAUD maupun pendidikan kesetaraan. Program ini dilakukan untuk meningkatkan persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk memenuhi kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Layanan tersebut difokuskan pada layanan rumah sakit dan puskesmas sesuai standar. Cakupan layanan yang diberikan diantaranya pemeriksaan ibu hamil, pelayanan ibu bersalin, pelayanan bayi baru lahir, pelayanan balita, penanganan penyakit menular dan tidak menular, pencegahan stunting dan balita kurang gizi, penanganan Covid-19, jaminan kesehatan warga miskin, peningkatan kesehatan lingkungan serta memberikan layanan screening kesehatan kepada warga negara usia pendidikan dasar, usia produktif, dan lanjut usia.

b. Program Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Kesehatan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi SDM kesehatan melalui berbagai kegiatan baik berupa pendidikan non formal bersertifikasi maupun dalam upaya pemenuhan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan dan sebagainya.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan baik kesehatan personal maupun lingkungan sekitar. Upaya yang akan dilakukan yaitu membentuk desa siaga aktif mandiri dan menerapkan Germas pada masing-masing desa.

d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan untuk memastikan obat dan makanan yang beredar sudah lolos uji sesuai standar kesehatan. Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu memastikan sarana produksi IRTP memenuhi standar dan syarat perijinan, Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat hygiene sanitasi, serta fasilitasi pelayanan kefarmasian memenuhi standar dan syarat perijinan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- f. Program Pengembangan Permukiman
- g. Program Penyelenggaraan Jalan
- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- b. Program Penanggulangan Bencana
 - c. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
6. Sosial
- Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pemberdayaan Sosial
 - b. Program Rehabilitasi Sosial
 - c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - d. Program Penanganan Bencana

7.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja
- c. Program Hubungan Industrial

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Program Perlindungan Perempuan
- c. Program Perlindungan Khusus Anak

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

4. Pertanahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Izin Lokasi
- b. Program Pengelolaan Tanah Kosong
- c. Program Penatagunaan Tanah
- d. Program Pengurusan Hak-hak atas tanah

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- h. Program Pengelolaan Persampahan
- i. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk
- b. Program Pencatatan Sipil
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- b. Program Pengelolaan Pelayaran

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Program Aplikasi Informatika

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- d. Program Pendidikan dan Latihan Koperasi
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- g. Program Pengembangan UMKM

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Penanaman Modal
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- c. Program Promosi Penanaman Modal
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorai

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan

- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- c. Program Pembinaan Sejarah
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

7.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- b. Program Pemasaran Pariwisata
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian
- f. Program Penyuluhan Pertanian

4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - d. Program Pengembangan Ekspor
 - e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
5. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

7.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Administrasi Umum
- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- c. Program Perekonomian dan Pembangunan

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

7.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Kepegawaian Daerah
- 4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

 - a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

7.2.6. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan

- 1. Inspektorat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

 - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal, sehingga mampu meningkatkan capaian opini BPK ke WTP. Dalam rangka mewadahi fungsi kontrol masyarakat, program ini juga memiliki target kinerja berupa persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Beberapa kerangka kegiatan teknis berupa pengawasan kinerja pemerintah daerah, review laporan kinerja dan keuangan, monitoring dan evaluasi TLHP, pengawasan desa dan pengawasan untuk tujuan tertentu.
 - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan untuk menopang kinerja outcome berupa maturitas SPIP dan WBK/WBBM. Indikator kinerja di dalam program ini berupa capaian nilai MCP, indeks manajemen resiko, dan kapabilitas APIP. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, serta pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah.

7.2.7. Unsur Kewilayahan

- 1. Kecamatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan. Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan terkait pelayanan administrasi maupun pelayanan sarana dan prasarana umum, dengan orientasi hasil berupa meningkatnya indeks kepuasan masyarakat di setiap kecamatan. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan berupa koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan,

11

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan, serta koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan untuk menopang pelaksanaan peran strategis Kecamatan, yakni pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Program ini memiliki indikator kinerja yang berperan dalam pengentasan kemiskinan, yakni persentase stimulus bagi masyarakat miskin/berpenghasilan rendah yang tepat sasaran di lingkup kecamatan. Indikator kinerja didalam program ini juga terkait tindak lanjut hasil koordinasi pemberdayaan masyarakat. Kerangka kegiatan untuk menjalankan pemberdayaan masyarakat, antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa atau kelurahan, pemberdayaan masyarakat kelurahan serta pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Salah satu fungsi Kecamatan yakni menyelenggarakan pemerintahan umum di wilayahnya. Pemerintahan umum di wilayah Kecamatan diarahkan untuk penguatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, serta pembinaan kerukunan antar dan intra umat beragama dalam rangka menjaga kohesivitas sosial di wilayah Kecamatan.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kecamatan memiliki peran strategis sebagai intermediary antara pemerintah daerah dengan desa. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas desa di dalam menjalankan kewenangannya, serta membangun sinergi antara pembangunan daerah dengan desa. Kerangka kegiatan teknis yang akan dijalankan berupa fasilitasi administrasi pemerintahan dan keuangan desa.

7.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. Kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dengan membangun koordinasi dan kerjasama pada bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan. Program ini dilaksanakan

untuk meningkatkan persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.

- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik. Kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dengan menerapkan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase penanganan fasilitasi bidang politik dalam negeri.

- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dengan membangun koordinasi dan kerjasama pada bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase masyarakat yang paham terhadap pembinaan ormas.

- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

- e. Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dengan membangun koordinasi dan kerjasama pada bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik di daerah, serta melaksanakan forum koordinasi antar pimpinan daerah tingkat kabupaten. program ini dilaksanakan untuk menekan angka potensi konflik sosial.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah dan Kebutuhan Pendanaan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (output/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
X												
X												
X	XX											
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		771.314.998,706	100%	785.941.145,076	100%	794.280.459,435	100%	2.351.536.604,218	Semua perangkat daerah (kecuali Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang memiliki nama program berbeda dan telah menjadi bagian dari tugas dan fungsi masing-masing)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				380.024.907,723		383.242.237,120		383.916.867,418		1.147.184.012,281	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			87.490.300,000		89.835.744,657		89.932.559,334		207.258.602,980	
1	01	01	Program Pengelolaan Pendidikan	24%	87.265.300,000	30%	88.810.744,657	40%	89.682.558,334	50%	206.558.602,980	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	70%		75%		78%		80%		
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	75.000,000	100%	75.000,000	100%	75.000,000	100%	225.000,000	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			150.000,000	87,5%	150.000,000	87,5%	175.000,000	87,5%	475.000,000	
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	57,75%	74.738.542,982	100%	76.260.793,783	100%	76.362.208,534	100%	227.381.545,299	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Harapan dan Doa
					71.946.971,003	100%	73.414.485,098	100%	73.515.772,816	100%	218.877.228,917	

AN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	
		Cakupan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Yang Terpenuhi	100%	100%		100%		100%		100%			
1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Mutu SDM Kesehatan Meningkat	75%	76%	82,523,300	77%	84,141,404	78%	84,145,158	78%	250,809,863	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Harapan dan Doa	
1 02 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Memiliki Izin	100%	100%	686,685,025	100%	700,129,045	100%	700,160,293	100%	2,086,954,363		
1 02 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pelaksanaan Promotif Tingkat Kota	60%	65%	2,022,383,654	70%	2,062,038,235	75%	2,062,130,266	75%	6,146,552,156		
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				228,191,000,000		228,688,360,000		228,843,820,003		878,733,160,003		
1 03 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	1039 Ha	1039 Ha	1,000,000,000	19%	1,020,000,000	19%	1,040,400,000	19%	3,060,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase panjang jaringan litigasi kondisi baik	1039 Ha	1039 Ha				1039 Ha		1039 Ha			
1 03 03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota yang layak	100%	65%	5,610,000,000	67%	5,671,200,000	70%	5,689,556,000	89%	16,980,756,000		
1 03 04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	100%	13%	320,000,000	14%	326,400,000	16%	327,272,603	16%	973,672,603		
1 03 05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	80%	82%	5,100,000,000	83%	5,151,000,000	86%	5,202,510,000	86%	15,453,510,000		
1 03 06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	49.40%	51.70%	4,800,000,000	54.29%	4,826,500,000	56.67%	4,848,107,500	53.57%	14,474,607,500		
1 03 07	Program Pengembangan Permukiman	Tingkat kemitatan infrastruktur permukiman	85%	86%	4,800,000,000	87%	4,807,000,000	88%	4,812,070,000	88%	14,419,070,000		
1 03 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah yang laik fungsi	40%	55%	152,330,000,000	65%	152,330,000,000	75%	152,330,000,000	75%	456,990,000,000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1 03 09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	60%	66%		70%		74.40%		74%		
1 03 10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat keselamatan jalan kota	80%	86%	49,530,000,000	87%	49,840,200,000	88%	49,845,402,000	88%	149,215,602,000	
1 03 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	90%	100%	476,000,000	100%	485,520,000	100%	491,191,200	100%	1,452,711,200	
1 03 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	55%	64%	2,225,000,000	73%	2,240,540,000	73%	2,247,310,700	73%	6,712,850,700	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				3,671,221,266		3,673,455,583		3,741,795,638		11,086,472,487	
1 04 02	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	3 kecamatan (Beda dengan Rensira)	3 kecamatan	1,616,221,266	3 kecamatan	1,592,443,466	3 kecamatan	1,631,115,638	3 kecamatan	4,839,780,370	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1 04 03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	50%	55%	790,000,000	60%	790,712,117	65%	800,000,000	65%	2,380,712,117	
1 04 04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni	50%	55%	550,000,000	60%	561,000,000	65%	570,000,000	65%	1,661,000,000	
1 04 05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	NA	0.26%	715,000,000	0.263%	729,300,000	0.265%	740,680,000	0.265%	2,184,980,000	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAPAN DAN KETERIBTAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5,853,843,475		4,874,004,394		4,898,484,909		15,428,332,778	
1 05 02	Program Peningkatan Keterampilan dan Keterbacaan Umum	Persentase penanganan gangguan ketertarikan dan ketertarikan umum	50%	55%	1,365,949,000	60%	1,242,000,000	65%	1,132,000,000	65%	3,739,949,000	Sabot PP
		Persentase pos kafil	65%	65%		65%		67%		67%		
		Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Peraturan	70%	75%		75%		80%		80%		
1 05 03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	65%	75%	3,627,894,475	85%	2,662,004,394	85%	2,636,484,909	95%	8,926,383,778	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			Peringkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Rp	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	65%	75%		85%		95%		95%			
1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non-Kebakaran	Persentase pelayanan per yelamatan dan evakuasi korban kebakaran	87%	97%	860.000.000	87%	970.000.000	96%	930.000.000	90%	2.760.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				2.080.000.000		1.899.878.704		2.338.000.000		6.317.878.704		
1 06 02	Program Pemberdayaan sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	100%	100%	300.000.000	100%	225.000.000	100%	280.000.000	100%	805.000.000		
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	29%	41%	925.000.000	52%	854.878.704	64%	1.060.000.000	64%	2.839.878.704	Dinas Sosial	
1 06 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	41%	52%	275.000.000	70%	250.000.000	91%	350.000.000	91%	875.000.000		
1 06 06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban yang mendapatkan penanganan bencana	88%	91%	580.000.000	95%	570.000.000	95%	648.000.000	95%	1.798.000.000		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				53.978.539,481		54.949.389,319		54.812,629,880		163.690.538,681		
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				940.000.000		1.026.652.557		1.040.000.000		3.006.652.557		
2 07 02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	100%	100%	100.000.000		186.652.557		200.000.000		486.652.557	Dinas Ketenagakerjaan	
2 07 03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,11%	0,022%	200.000.000	0,026%	200.000.000	0,026%	200.000.000	0,026%	600.000.000		
2 07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan dalam dari luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	45,64%	49,62%	200.000.000	55,42%	200.000.000	60%	200.000.000	60%	600.000.000		

7

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2 07 05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP-PKB LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Lurufar sesuai BPJS Ketenagakerjaan).	4	52%	440,000,000	55%	440,000,000	56%	440,000,000	56%	1,320,000,000	-13
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1,769,164,340		2,024,164,340		1,986,666,066		5,789,994,746	
2 08 02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	40%	60%	820,000,000	65%	860,000,000	75%	852,359,110	75%	2,532,359,110	DP3AP2KB
2 08 03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan PPO	40%	60%	350,000,000	65%	350,000,000	75%	350,000,000	75%	1,050,000,000	
2 08 04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pengujian kelengkapan	50%	60%	50,000,000	70%	75,000,000	80%	75,000,000	80%	200,000,000	
2 08 05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender anak	45%	60%	134,164,340	85%	139,164,340	75%	139,164,340	75%	412,493,020	
2 08 06	Program Pemanfaatan Hak Anak (PHA)	Persentase keblakian tentang peningkatan kualitas anak yang disahkan	0.68%	1.18%	285,000,000	1.28%	305,000,000	1.35%	305,000,000	1.35%	875,000,000	
2 08 07	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio anak yang memberikan perlindungan khusus anak	0.00031	0.0003	150,000,000	0.00028	295,000,000	0.00027	276,142,616	0.00085	720,142,616	
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1,235,000,000		1,259,700,000		1,280,284,161		3,754,984,161	
2 09 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	20%	20%	350,000,000	25%	357,000,000	30%	357,159,884	30%	1,084,159,884	Dinas Kelautan Pangan dan Pertanian
2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	89%	90%	685,000,000	92%	696,700,000	93%	699,012,915	93%	2,082,712,915	
2 09 04	Program Peranginan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	4.5%	4%	85,000,000	2%	86,700,000	1%	86,738,829	1%	259,438,829	

4/10

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
2 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	80%	85%	115.000.000	90%	117.300.000	90%	117.352.533	95%	349.652.533	Dinas Lingkungan Hidup
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				578.366.000		430.485.416		461.254.808		1.470.106.224	
2 10 02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Jumlah izin Lokasi yang dikeluarkan	0%	0,33%	135.781.000	0,33%	100.000.000	0,33%	100.000.000	0,33%	335.781.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
2 10 08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase penyelesaian Masalah Tanah Kosong	0%	0,33%	90.800.000	0,33%	30.333.756	0,33%	37.316.532	0,33%	158.450.288	
2 10 10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah	0%	0,33%	140.852.000	0,33%	120.000.000	0,34%	134.779.033	0,34%	395.631.033	
2 10 12	Program Pengurusan Hak-hak atas tanah	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Penda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	NA	0,33%	210.833.000	0,33%	180.151.660	0,33%	189.159.243	0,33%	580.243.903	
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				15.389.231.946		15.185.498.040		14.580.586.935		45.135.316.921	
2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	100%	100%	224.195.000	100%	235.404.750	100%	246.614.500	100%	706.214.250	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemeriksaan Kelas Air di Sungai Bungkulu	4	4	1.267.236.005	3	1.330.599.905	3	1.393.961.806	3	3.991.799.716	
		Proses Standar Pemukiman Ldura (SLRU) di Kota Bangkulu	95	96		96		96		96%		
2 11 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	40%	40,1%	2.491.793.000	40,12%	2.616.382.650	40,13%	2.740.972.300	40,13%	7.849.147.950	
2 11 05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan penataan pengelolaan limbah B3	50%	70%	28.470.000	75%	29.893.500	90%	31.317.000	90%	89.680.500	
2 11 06	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan	75%	80%	452.817.850	80%	475.458.743	85%	488.099.635	85%	1.426.376.228	
2 11 08	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	1	1	237.554.600	1	248.432.330	2	261.310.060	2	748.296.990	

A.

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPO (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPO		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
2 11 10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan Penyelesaian Pengaduan lingkungan Hidup	100%	100%	29.651,200	100%	31.133,760	100%	32.616,320	100%	93.401,280	
2 11 11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase umrah sampah yang terdampar	58%	60%	10.657,512,291	61.5%	10.217,192,402	62.7%	9.355,695,315	62.7%	30.230,400,008	
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL				3,000,000,000		2,870,000,000		2,995,000,000		8,965,000,000	
2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	76.79%	86	1,125,000,000	86.33%	925,000,000	92.67%	925,000,000	92.67%	2,875,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	98.63%	99.5%	550,000,000	98.63%	550,000,000	98.75%	600,000,000	99.75%	1,700,000,000	
2 12 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Dokumen Penyelesaian Data Kependudukan Skala Kota	100%	100%	1,250,000,000	100%	1,320,000,000	100%	1,395,000,000	100%	3,965,000,000	
2 12 05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan oleh Lembaga Pengguna Masyarakat	100%	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	225,000,000	
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				515,000,000		536,364,904		581,364,904		1,632,729,808	
2 13 04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase administrasi pemerintahan/desa	26%	40%	50,000,000	53%	55,000,000	67%	76,000,000	67%	180,000,000	DPJAP2KB
2 13 05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	4.2%	4.6%	465,000,000	5%	481,364,904	7%	506,364,904	7%	1,452,729,808	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2,655,748,935		2,739,779,574		2,739,779,574		8,135,308,083	
2 14 02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase TFR	2.2	2.2	270,000,000	2.1	270,000,000	2.1	270,000,000	2.1	810,000,000	DPJAP2KB
2 14 03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan akseptor KB Akut	36370	36650	2,235,748,935	36900	2,319,779,574	37500	2,319,779,574	37500	6,875,308,083	
2 14 04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera (KS)	30	40	150,000,000	45	150,000,000	50	150,000,000	50	450,000,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				5,332,860,250		5,699,828,455		5,886,932,750		16,918,722,455	
2 15 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas Kota	0.74	0.75	5,282,960,250	0.78	5,649,828,455	0.8	5,836,932,750	0.8	16,769,722,455	Dinas Perhubungan
2 15 03	Program Pengadaan Pelayaran	Persentase terpeliharanya kapal dengan kondisi baik	100%	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	150,000,000	
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9,861,278,331		10,058,504,918		10,159,089,957		30,075,874,215	
2 16 02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota	75%	75%	4,875,523,348	80%	4,973,033,815	85%	5,022,764,153	85%	14,871,321,316	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03	Program Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	1%	1.2%	4,985,755,983	1.3%	5,085,471,103	1.5%	5,136,325,814	1.5%	15,207,552,899	
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%		100%		100%		100%		
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4,686,850,412		4,760,187,420		4,807,789,294		14,234,827,127	Dinas Koperasi dan UMKM
2 17 02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi pemberian izin usaha simpan pinjam yang diberikan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota	N/A	2.5%	95,000,000	4.4%	96,900,000	5.5%	97,869,000	5.5%	289,769,000	
2 17 03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota	5%	11%	598,350,000	12%	610,317,000	14%	616,420,170	14%	1,825,087,170	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
2 17 04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah kaanggotaan dalam	33,6%	37%	170.000.000	35%	173.400.000	6%	175.134.000	5%	518.534.000	
2 17 05	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah kaanggotaan dalam daerah	33,6%	36,1%	619.410.000	38,6%	631.798.200	41,41%	638.116.182	41,41%	1.889.324.382	
2 17 06	Program Pemberdayaan dan Perindugan Koperasi	Persentase koperasi dalam akses pasar akses pembiayaan, standarsasi, dan kemitraan	37,7%	43,35%	400.000.000	42,7%	408.000.000	45%	412.080.000	45%	1.220.080.000	
2 17 07	Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM)	Persentase UKM yang besar	11,9%	12,1%	1.335.243.000	12,5%	1.352.169.290	13,3%	1.375.730.892	13,3%	4.173.429.132	
2 17 08	Program Pengembangan UMKM	Persentase UKM besar yang merupakan pengusaha	0,22%	1,64%	1.448.630.412	3,7%	1.477.653.320	4,6%	1.492.379.650	4,6%	4.115.615.490	
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				835.000.000		1.065.000.000		980.000.000		2.880.000.000	
2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100%	100%	190.000.000	100%	200.000.000	100%	235.000.000	100%	625.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Capaian Kinerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal	30%	50%	220.000.000	75%	405.000.000	100%	30.000.000	100%	655.000.000	
2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi	48%	58%	200.000.000	68%	200.000.000	78%	380.000.000	78%	780.000.000	
2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	200.000.000	100%	235.000.000	100%	310.000.000	100%	745.000.000	
2 18 06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	75.000.000	
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA				4.358.153.635		4.438.153.635		4.416.353.635		13.212.860.905	
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang berprestasi	18,5%	20%	770.000.000	20%	755.000.000	25%	715.000.000	25%	2.240.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Terpadu	100%	100%	688.153.635	100%	688.153.635	100%	688.153.635	100%	2.064.460.905	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Pemangkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
2 19 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi olahraga	128 Medali	150 Medali	2.550.000.000	100 Medali	2.595.000.000	150 Medali	2.565.000.000	150 Medali	7.710.000.000	
2 19 04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi pramuka yang aktif	80%	80%	350.000.000	90%	400.000.000	100%	448.200.000	100%	1.198.200.000	
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN				475.000.000		484.500.000		489.345.000		1.448.845.000	
2 20 02	BIDANG STATISTIK				475.000.000		484.500.000		489.345.000		1.448.845.000	
2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	70%	75%	475.000.000	75%	484.500.000	80%	489.345.000	80%	1.448.845.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN				456.729.000		482.863.579		463.292.216		1.382.884.795	
2 21 02	BIDANG PERSANDIAAN				456.729.000		482.863.579		463.292.216		1.382.884.795	
2 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat koamanan informasi pemerintah	50%	60%	456.729.000	70%	482.863.579	80%	463.292.216	80%	1.382.884.795	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN				760.000.000		785.000.000		843.000.000		2.408.000.000	
2 22 02	BIDANG KEBUDAYAAN				760.000.000		785.000.000		843.000.000		2.408.000.000	
2 22 03	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pengembangan budaya lokal yang dibina	100%	100%	250.000.000	100%	255.000.000	100%	255.000.000	100%	760.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 04	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional lokal yang dibina	100%	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	288.000.000	100%	788.000.000	
2 22 05	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah lokal yang dibina	100%	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	190.000.000	100%	550.000.000	
2 22 06	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang di lestarikan	90%	89%	100.000.000	90%	100.000.000	95%	110.000.000	95%	310.000.000	
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN				480.055.632		447.685.482		431.910.570		1.359.651.684	
2 23 02	BIDANG PERPUSTAKAAN				480.055.632		447.685.482		431.910.570		1.359.651.684	
2 23 02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang mendapat pembinaan	28%	60%	480.055.632	78%	447.685.482	86%	431.910.570	86%	1.359.651.684	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan	60%	70%		75%		80%		80%		
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN				650.000.000		675.000.000		700.000.000		1.975.000.000	
2 24	BIDANG KEARSIPAN				650.000.000		675.000.000		700.000.000		1.975.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
2 24 02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	33%	52%	600,000,000	53%	625,000,000	54%	650,000,000	54%	1,875,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dari keutuhan arsip	0%	10%	50,000,000	13%	50,000,000	15%	50,000,000	15%	100,000,000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				11,316,047,120		11,620,652,087		11,589,849,217		34,526,548,424	
3 25	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1,600,099,000		1,512,272,887		1,359,636,287		4,472,088,174	
3 25 03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	18.12 ton	19.03 ton	1,115,000,000	19.88 ton	1,002,918,937	20.98 ton	824,814,639	20.98 ton	2,942,733,576	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	6 ton	6.3 ton	425,099,000	6.82 ton	446,353,950	6.95 ton	466,671,648	6.95 ton	1,340,124,595	
3 25 06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase produksi perikanan yang dijual	5%	10%	60,000,000	15%	63,000,000	20%	66,150,000	20%	199,150,000	
3 26	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARAWISATA				2,285,000,000		2,425,000,000		2,465,000,000		7,175,000,000	
3 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	NA	2%	1,185,000,000	3%	1,335,000,000	4%	1,305,000,000	4%	3,825,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 03	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	NA	30%	470,000,000	35%	490,000,000	40%	560,000,000	40%	1,520,000,000	
3 26 04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Peningkatan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Peningkatan Hak Kekayaan Intelektual	30%	30%	340,000,000	35%	350,000,000	40%	390,000,000	40%	940,000,000	
3 26 05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Jumlah CBT)	10%	10%	290,000,000	15%	300,000,000	20%	390,000,000	20%	890,000,000	
3 27	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN				4,942,000,000		5,040,840,000		5,043,087,555		15,025,937,555	
3 27 02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	65%	65%	915,000,000	70%	933,300,000	75%	933,717,981	75%	2,782,017,981	Dinas Kelautan Pangan dan Pertanian
3 27 03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	80%	82%	2,125,000,000	83%	2,167,500,000	84%	2,168,470,722	84%	6,460,970,722	
		Produksi Daging	236 ton	240 ton		250 ton		260 ton		260 ton		

AN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
3 27 04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	50%	60%	535,000,000	70%	545,700,000	80%	545,944,393	80%	1,626,644,393	
3 27 05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitas penanggulangan bencana	85%	87%	495,000,000	92%	504,900,000	95%	505,126,121	95%	1,505,026,121	
3 27 06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diberikan	100%	100%	225,000,000	100%	229,500,000	100%	229,602,782	100%	684,102,782	
3 27 07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh dan petani	30%	35%	647,000,000	40%	659,940,000	45%	660,235,556	45%	1,987,175,556	
3 30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN				2,103,903,480		2,244,182,300		2,311,807,769		6,559,893,549	
3 30 02	Program Perizinan dan Perdagangan Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	35.97%	35.97%	39,991,000	45.2%	42,847,500	53%	44,132,925	53%	126,971,425	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	38.2%	38.2%	150,452,960	38.2%	161,199,600	40%	166,035,588	40%	477,688,146	
3 30 04	Program Stabilitas Harga Barang Keluaran Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	9.0%	10.0%	413,718,200	11.0%	433,269,500	12.0%	446,567,585	12%	1,293,555,285	
3 30 05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	NA	US\$ 0.5 juta	1,027,600,000	US\$ 0.7 juta	1,101,000,000	US\$ 1 juta	1,134,030,000	US\$ 1 juta	3,262,630,000	
3 30 06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase capaian alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	25.70%	29%	190,798,720	33%	204,427,200	37%	210,560,016	37%	605,785,936	
3 30 07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	2%	2%	281,342,800	2.25%	301,438,500	2.5%	310,481,655	2.5%	893,262,755	
3 31	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN				385,044,640		398,356,900		410,307,607		1,193,706,147	
3 31 02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIK yang ditetapkan dalam RPK	0%	10%	377,466,440	20%	388,356,900	25%	400,007,607	25%	1,165,630,947	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Pertumbuhan Industri	6.50%	7.12%		7.5%		7.5%		7.5%		
		Pertumbuhan Industri Kreatif	2.50%	2.8%		3.0%		3.5%		3.5%		

2

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPDP (tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPDP		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
3 31 03	Program Pengembangan tzn Usaha Industri KabupatenKota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	33%	35%	7.578,200	37%	10.000,000	40%	10.300,000	40%	27.878,200	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				128.251.493,620		128.776.523,480		129.174.288,725		384.202.385,835	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH				60.180.484,141		61.384.073,422		61.687.914,157		183.262.451,719	
4 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupatenKotaProgram Administrasi Umum	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	90%	90%	53.477.358,379	95%	54.513.946,702	100%	54.893.936,803	100%	162.985.251,885	Sekretariat Daerah
	Nama program disesuaikan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75%	75%		80%		85%		85%		
		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelengkapan tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	100%		100%		100%		100%		
4 01 02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPDP tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	95%	95%	4.289.964,680	95%	4.332.864,337	95%	4.354.528,659	95%	12.977.357,885	
		Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	63%	65%		68%		70%		70%		
		Persentase Kebijakan dan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		
4 01 03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.413.131,072	100%	2.437.262,363	100%	2.449.448,695	100%	7.299.842,149	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	50%	50%		52%		53%		53%		
4 02	SEKRETARIAT DPRD				66.071.029,479		67.392.450,068		67.476.374,569		200.938.854,116	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (tahun 2021)	Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp		target	Rp		target	Rp		target	Rp		
				-5-	-6-		-7-	-8-		-9-	-10-		-11-	-12-		
-1-	-2-	-3-	-4-													-13-
4 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Keterperluan Layanan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100%	46.920.864,621		100%	47.569.098,065	100%	100%	47.594.347,771		100%	142.074.310,457		
4 02 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rata-rata Persentase keterperluan layanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan Perda	100%	100%	19.150.164,858		100%	19.823.352,003	100%	100%	19.892.026,798		100%	58.865.543,659		Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				21.591.408,593			21.752.841,023			21.933.627,712			65.277.877,328		
5 01	PERENCANAAN				3.758.367,916			3.833.535,274			3.871.870,627			11.403.773,817		
5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian subdansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan	80%	80%	2.165.561,965		82%	2.208.873,204	83%	83%	2.250.961,936		83%	6.605.397,106		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase indikator sasaran Rendra Perangkat Daerah yang mencapai target	80%	80%			82%			83%			83%			
5 01 03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renja PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	1.592.805,951		100%	1.624.662,070	100%	100%	1.640.908,691		100%	4.958.376,712		
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renja PD bidang perekonomian dan SDA	100%	100%			100%			100%			100%			
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%			100%			100%			100%			
5 02	KEUANGAN				15.026.143,370			14.975.805,748			15.083.822,085			45.085.771,203		
5 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pendapatan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu			Tepat Waktu			Tepat Waktu			Tepat Waktu			Badan Pengelolaan
		Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu			Tepat Waktu			Tepat Waktu			Tepat Waktu			

A.

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
		Presentase Realisasi Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	91%	96%	6,823,764,978	100%	6,860,240,277	100%	7,029,842,680	100%	20,813,847,934	
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100%	100%	2,164,670,835	100%	2,352,651,506	100%	2,376,178,021	100%	6,893,500,362	
5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Realisasi PAD	74,22%	79%	6,037,707,558	84%	5,662,913,965	89%	5,677,801,364	89%	17,378,422,907	Badan Pendapatan Daerah
5 03	KEPEGAWAIAN				1,270,000,000		1,275,000,000		1,300,000,000		3,845,000,000	
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan formasi ASN	66%	67%	1,270,000,000	65%	1,275,000,000	67%	1,300,000,000	67%	3,845,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan
		Peta Kompetensi ASN	59%	57%		58%		60%		60%		
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				611,897,307		725,000,000		725,000,000		2,061,897,307	
5 04 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Presentase Pegawai Struktural yang telah lulus diklat/program fungsional/diklat teknis yang memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi	75%	80%	611,897,307	85%	725,000,000	90%	725,000,000	90%	2,061,897,307	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				925,000,000		943,500,000		952,935,000		2,821,435,000	
5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDA	NA	15%	925,000,000	30%	943,500,000	45%	952,935,000	45%	2,821,435,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				2,244,825,210		2,207,034,000		1,741,743,045		6,193,602,255	
6 01	INSPEKTORAT DAERAH				2,244,825,210		2,207,034,000		1,741,743,045		6,193,602,255	
6 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase pemantauan pelaksanaan peraturan yang berlaku	100%	100%	1,313,245,210	100%	1,234,984,000	100%	1,068,693,045	100%	3,617,922,255	Inspektoral
6 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Presentase Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi unsur Pemerintahan Daerah	100%	100%	991,580,000	100%	972,050,000	100%	672,050,000	100%	2,575,680,000	
7	UNSUR KEMILAYAHAN				40,528,882,293		41,723,311,241		41,868,907,989		124,121,101,522	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
7 01	KECAMATAN				40.528.882,293		41.723.311,241		41.868.907,989		124.121.101,522	
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kecamatan yang berkinerja prima	85%	85%	2.400.525.000	86%	2.424.520.500	87%	2.426.367.537	87%	7.251.413,037	Kecamatan Kampung Melayu
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	85%	85%	1.140.000.000	86%	1.180.000.000	87%	1.180.000.000	87%	3.500.000.000	
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	85%	85%	212.550.000	86%	212.550.000	87%	212.550.000	87%	637.650.000	
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase urusan pemerintahan umum	85%	85%	30.000.000	86%	30.000.000	87%	30.000.000	87%	90.000.000	
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kecamatan yang berkinerja prima	85%	85%	2.265.010.346	86%	2.286.510.300	87%	2.313.010.300	87%	6.864.530.946	Kecamatan Muara Bangkahulu
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	85%	85%	1.182.500.000	86%	1.208.150.000	87%	1.238.000.000	87%	3.628.650.000	
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	85%	85%	374.492.189	86%	411.880.535	87%	419.014.566	87%	1.205.387.290	
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase urusan pemerintahan umum	85%	85%	18.000.000	86%	18.360.000	87%	19.500.000	87%	55.860.000	
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kecamatan yang berkinerja prima	85%	85%	2.092.106.000	86%	2.215.784.000	87%	2.322.500.000	87%	6.630.390.000	Kecamatan Singaran Pati
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	85%	85%	3.070.000.000	86%	3.350.000.000	87%	3.450.000.000	87%	9.870.000.000	
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	85%	85%	588.000.000	86%	593.000.000	87%	315.000.000	87%	1.486.000.000	
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase urusan pemerintahan umum	85%	85%	120.500.000	86%	128.500.000	87%	129.000.000	87%	378.000.000	
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kecamatan yang berkinerja prima	85%	85%	2.350.180.600	86%	2.605.784.000	87%	2.765.784.000	87%	7.721.748.600	Kecamatan Sungai Serut
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	85%	85%	1.150.000.000	86%	1.296.000.000	87%	1.365.000.000	87%	3.820.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			Peringkat Daerah Pemangku Jomb
				target	Rp	target	target	Rp	target	target	Rp	target	target	Rp	target	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-				
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	85%	85%	272.550,000	86%	87%	320.000,000	87%	87%	350.000,000	87%	87%	942.550,000	87%	
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase urusan pemerintahan umum	85%	85%	30.493,450	86%	87%	38.988,398	87%	87%	44.045,112	87%	87%	113.528,960	87%	
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85%	85%	3.090.500,000	86%	86%	3.152.310,000	86%	86%	3.183.833,100	86%	86%	9.425.643,100	86%	Kecamatan Teluk Segara
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	85%	85%	2.585.000,000	86%	86%	2.616.300,000	86%	86%	2.642.463,000	86%	86%	7.823,763,000	86%	
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	85%	85%	486.880,000	86%	86%	496.617,600	86%	86%	501.583,776	86%	86%	1.485.081,376	86%	
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85%	85%	35.000,000	86%	86%	35.700,000	86%	86%	36.057,000	86%	86%	106.757,000	86%	
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan	85%	85%	3.982,049,197	86%	86%	3.789,189,734	86%	86%	3.823,422,224	86%	86%	11.574,681,155	86%	Kecamatan Salebar
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan Terpenuhi	85%	85%	900.000,000	86%	86%	945.000,000	86%	86%	630.750,000	86%	86%	2.475,750,000	86%	
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Terpenuhi	85%	85%	60.000,000	86%	86%	63.000,000	86%	86%	64.000,000	86%	86%	187.000,000	86%	
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terpenuhi	85%	85%	90.000,000	86%	86%	94.500,000	86%	86%	96.000,000	86%	86%	280.500,000	86%	
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85%	85%	2.056,983,876	86%	86%	2.226,521,476	86%	87%	2.482,423,476	87%	87%	6.767,928,828	87%	Kecamatan Gading Cempaka
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	85%	85%	1.440.000,000	86%	86%	1.275.000,000	86%	87%	945.000,000	87%	87%	3.660.000,000	87%	
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	85%	85%	212.550,000	86%	86%	212.550,000	86%	87%	212.550,000	87%	87%	637.650,000	87%	
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85%	85%	30.000,000	86%	86%	30.000,000	86%	87%	30.000,000	87%	87%	90.000,000	87%	
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85%	85%	2.042,313,545	86%	86%	2.083,159,816	86%	87%	2.103,991,414	87%	87%	6.229,464,775	87%	Kecamatan Ratu Agung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	85%	85%	2,150,000,000	86%	2,193,000,000	87%	2,214,930,000	87%	6,557,930,000	
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Keteniban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Keteniban Umum	85%	85%	240,000,000	86%	244,800,000	87%	247,248,000	87%	732,048,000	
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85%	85%	70,412,710	86%	71,820,964	87%	72,539,174	87%	214,772,848	
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kecamatan yang berkinerja prima	85%	85%	1,845,285,380	86%	2,029,813,918	87%	1,881,945,310	87%	5,757,044,608	Kecamatan Ratu Samban
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	85%	85%	1,470,000,000	86%	1,511,000,000	87%	1,720,000,000	87%	4,701,000,000	
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Keteniban Umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	85%	85%	380,000,000	86%	279,000,000	87%	310,400,000	87%	968,400,000	
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum	85%	85%	75,000,000	86%	75,000,000	87%	90,000,000	87%	240,000,000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				2,174,240,680		2,248,270,455		2,301,525,280		6,722,036,335	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2,174,240,680		2,248,270,455		2,301,525,280		6,722,036,335	
8 01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Pengembangan Karakter Kebangsaan	90%	90%	98,900,300	90%	98,900,300	90%	100,000,000	90%	297,800,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	Program Penguatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Penguatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	90%	90%	1,318,755,100	90%	1,318,755,100	90%	1,318,755,100	90%	3,858,265,300	
8 01 04	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	90%	90%	68,527,000	91%	69,527,000	92%	102,520,800	92%	241,574,800	
8 01 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan bina dalam upaya Pembinaan dan Pengembangan Ketenahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	80%	80%	261,982,800	80%	261,982,800	80%	265,249,380	80%	789,214,980	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	90%	90%	425,075,400	90%	497,105,255	90%	515,000,000	90%	1,437,180,655	
					1,315,439,144,402		1,334,534,383,888		1,339,738,937,789		3,989,713,466,089	

47

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran/ potret organisasi dimasa kini maupun yang akan datang.

Guna melihat capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu maka perlu adanya penetapan indikator kinerja. Indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah ini berupa Indikator Kinerja Makro Daerah, Indikator Kinerja Utama Daerah (sasaran daerah) dan Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (sasaran perangkat daerah).

Indikator Kinerja Makro Daerah bertujuan menggambarkan keberhasilan penyelenggaran pemerintahan daerah secara umum. Indikator Kinerja Makro Kota Bengkulu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Makro Kota Bengkulu Tahun 2024 – 2026

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,69	5,70-5,75	5,76-5,80	5,81 - 5,90	5,81 - 5,90
2	Inflasi	Persen	5,92	5,50	4,00	3,70	3,70
3	Rasio Gini	Angka	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34
4	Angka Kemiskinan	Angka	15,73	15, 25	15,00	14,76	14,76
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,13	5,95	5,87	5,73	5,73
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,99	81,25	81,35	81,40	81,40

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja			Kondisi Akhir	Keterangan
				2024	2025	2026		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,47	5,1-5,25	5,3-5,5	5,5 - 5,7	5,5-5,7	IKU PEMDA
2	Inlasi	Persen	5,92	5,50	4,00	3,70	3,70	IKU PEMDA
3	Indeks Gini	Angka	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	IKU PEMDA
4	Persentase pertumbuhan sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor perdagangan dan sektor industri terhadap PDRB	Persen	54,23	56,7	69,64	80,52	80,52	IKU PEMDA
5	Capaian Jaringan Kota Kreatif	Persen	NA	10	15	20	20	IKU PEMDA
6	Angka Kemiskinan	Persen	15,73	15,25	15,00	14,76	14,76	IKU PEMDA
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	65,64	66,6	70,3	76,36	76,36	IKU PEMDA
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,13	5,95	5,87	5,73	5,73	IKU PEMDA
9	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	75	77	79	81	81	IKU PEMDA
10	Rasio Kelancaran Lalulintas	Rasio	0,31	0,37	0,375	0,38	0,38	IKU PEMDA
11	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang	Persen						
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	61,95	62,82	62,85	62,93	62,93	IKU PEMDA
13	Indeks Risiko Bencana	Indeks	120	120	110	100	100	IKU PEMDA
14	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,99	81,25	81,35	80,40	80,40	IKU PEMDA
15	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,08	11,09	11,1	11,11	11,11	IKU PEMDA
16	Harapan Lama sekolah	Tahun	16,03	16,04	16,05	16,06	16,06	IKU PEMDA
17	Persentase Pemuda yang Berprestasi	Persen	35	35	45	55	55	IKU PEMDA
18	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,21	70,3	70,4	70,5	70,5	IKU PEMDA
19	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,77	95,77	95,87	95,97	95,97	IKU PEMDA
20	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77,67	77,87	77,87	77,87	77,87	IKU PEMDA
21	Penghargaan Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	pratama	madya	madya	nindya	nindya	IKU PEMDA
22	Indeks Rasa Aman	Indeks	NA	70	70	70	70	IKU PEMDA

7

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja			Kondisi Akhir	Keterangan
				2024	2025	2026		
23	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100	IKU PEMDA
24	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	85	85	90	95	95	IKU PEMDA
25	Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	75	75	80	85	85	IKU PEMDA
26	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	B	B	B	IKU PEMDA
27	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Angka	2,75	3,0	3,1	3,2	3,2	IKU PEMDA
28	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	IKU PEMDA
29	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	50	60	62	65	65	IKU PEMDA
30	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	59,37	59,57	59,75	59,90	59,90	IKU PEMDA
31	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU PEMDA
32	Nilai Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	75	75	77	80	80	IKU PEMDA
33	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1.6	1.8	1.9	2	2	IKU PEMDA
34	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,55	84,17	85	85,83	85,83	IKU PEMDA

42

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Bengkulu

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	Indeks	80,54	80,54	80,54	80,74	80,74	TUJUAN	DKBUD, DINAS ARDA, DISPOKA, KESEHATAN, RSHD
	Rata rata lama sekolah	Tahun	11,08	11,09	11,1	11,11	11,11	IKU PEMDA	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
	harapan lama sekolah	Tahun	16,03	16,04	16,05	16,06	16,06	IKU PEMDA	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
	Angka partisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	40,8	41,1	42,5	43,6	43,6	IKU PD	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
	Angka partisipasi dalam pendidikan SD/SMP	Persen	98,6	98,7	99,5	98,7	98,7	IKU PD	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
	Persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	1,52	1,51	1,52	1,49	1,49	IKU PD	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
	Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Persen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	IKU PD	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Persentase seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	73	76	80	89	89	IKU PD	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Persentase Pemuda yang Berprestasi	Persen	35	35	45	55	55	IKU PEMDA	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase Organisasi Kepemuda yang Dibina	Persen	NA	10	20	30	30	IKU PD	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Peningkatan Prestasi Olahraga	peningkat	NA	10	14	20	20	IKU PD	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	ANGKA HARAPAN HIDUP	Tahun	70,21	70,3	70,4	70,5	70,5	IKU PEMDA	DINKES, RSHD
	Angka kematian ibu	Per-100.000 KH	98,02	50	49	48	48	IKU PD	DINKES
	Angka kematian bayi	Per-100.000 KH	3,3	3,2	3,1	3	3	IKU PD	DINKES

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kota Bengkulu

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	Indeks	80,54	80,54	80,64	80,74	80,74	80,74	TUJUAN	DIKBUD, DINAS ARDA, DISPORA , KESEHATAN, RSHD
	Rata rata lama sekolah	Tahun	11,08	11,09	11,1	11,11	11,11	11,11	IKU PEMDA	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
	harapan lama sekolah	Tahun	16,03	16,04	16,05	16,06	16,06	16,06	IKU PEMDA	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
	Angka partisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	40,8	41,1	42,5	43,6	43,6	43,6	IKU PD	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
	Angka partisipasi dalam pendidikan SD/SMP	Persen	98,6	98,7	99,5	98,7	98,7	98,7	IKU PD	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
	Persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	1,52	1,51	1,52	1,49	1,49	1,49	IKU PD	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
	persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	Persen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	IKU PD	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Persentase seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	73	76	80	89	89	89	IKU PD	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Persentase Pemuda yang Berprestasi	Persen	35	35	45	55	55	55	IKU PEMDA	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase Organisasi Kepemuda yang Dibina	Persen	NA	10	20	30	30	30	IKU PD	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Peningkatan Prestasi Olahraga	peringkat	NA	10	14	20	20	20	IKU PD	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	ANGKA HARAPAN HIDUP	Tahun	70,21	70,3	70,4	70,5	70,5	70,5	IKU PEMDA	DINKES, RSHD
	Angka kematian ibu	Per-100.000 KH	98,02	50	49	48	48	48	IKU PD	DINKES
	Angka kematian bayi	Per-100.000 KH	3,3	3,2	3,1	3	3	3	IKU PD	DINKES

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prevalensi Stunting	Persen	0,74	0,60	0,50	0,49	0,49	IKU PD	DINKES
	Prevalensi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, tidak menular dan KLB	Persen	30	29,8	29,6	29,4	29,4	IKU PD	DINKES
	Cakupan Puskesmas Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	IKU PD	DINKES
	Akreditasi Rumah sakit	peringkat	madya	paripurna	paripurna	Paripurna	paripurna	IKU PD	RSHD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	85,19	86	87	88	88	IKU PD	RSHD
	cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Persen	40	45	55	60	60	IKU PD	DINKES
	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	indeks	95,77	95,77	95,87	95,97	95,97	TUJUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	indeks	77,67	77,87	77,87	77,87	77,87	IKU PEMDA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Sumbangan Perempuan dalam pendapatan kerja	Persentase	29,55	30	31	32	32	IKU PD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Persentase	28,13	28,4	28,6	29	29	IKU PD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Persentase	21,15	21,25	22	23	23	IKU PD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
	Predikat anugrah parahita ekapraya	predikat	NA	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	IKU PD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100	100	100	100	100	IKU PD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Penghargaan Kota Layak Anak	category	pratama	madya	Madya	nindya	nindya	IKU PEMDA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	Persen	100	100	100	100	100	IKU PD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Kecamatan Layak Anak	Persen	33	55	66	75	75	IKU PD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase peserta KB aktif	persen	64,81	80	82	84	84	IKU PD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	INDEKS RASA AMAN	Indeks	NA	70	70	70	70	TUJUAN	SATPOL dan KESBANGPOL
	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	persen	100	100	100	100	100	IKU PEMDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase perda dan perkada yang ditegakan	persen	85	85	90	95	95	IKU PEMDA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Penindakan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	persen	100	100	100	100	100	IKU PD	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	75	75	80	85	85	IKU PEMDA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Masyarakat Yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	persen	70	75	80	85	85	IKU PD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Jumlah kejadian konflik sosial diwilayah yang dikondisikan	persen	80	90	90	90	90	IKU PD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	Indeks	3,47	5,1 - 5,25	5,3 - 5,5	5,5 - 5,7	5,5 - 5,7	TUJUAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PERIKANAN, DISPERDAGRIN, DISPAR, BAPENDA, DINAS KOPERASI, SETDA (BAGIAN PEREKONOMIAN)
	Persentase pertumbuhan sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor perdagangan dan sektor industri terhadap PDRB	Persen	54,23	56,7	69,64	80,52	80,52	IKU PEMDA	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PERIKANAN, DISPERDAGRIN, DISPAR
	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	Persen	0	0,25	0,3	3,5	3,5	IKU PD	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	5	10	15	20	20	IKU PD	DINAS PERIKANAN
	Persentase Kunjungan Wisatawan	Persen	NA	5	7	10	10	IKU PD	DINAS PARIWISATA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja			Kondisi Akhir	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Lama Tingkat Wisatawan	Persen	NA	3,5	4,0	4,5	4,5	IKU PD	DINAS PARIWISATA
	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Rupiah (Miliar)	21,17	21,43	21,65	21,93	21,93	IKU PD	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Pertumbuhan IKM/UKM	Angka	82	85	87	92	92	IKU PD	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Pertumbuhan industri kreatif	Persen	2,5	2,8	3	3,5	3,8	IKU PD	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Capaian Jaringan Kota Kreatif	Persen	NA	10	15	20	20	IKU PEMDA	DINAS PARIWISATA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Jumlah parameter Kota Kreatif yang dipenuhi	jumlah parameter	NA	10	20	30	30	IKU PD	DINAS PARIWISATA
	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	0,22	1,3	2,1	3	3	IKU PD	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	85,5	85,7	86	86,5	86,5	IKU PD	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	Persen	0	0,25	0,3	3,5	3,5	IKU PD	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	5	10	15	20	20	IKU PD	DINAS PERIKANAN
	Persentase Kunjungan Wisatawan	Persen	NA	5	7	10	10	IKU PD	DINAS PARIWISATA
	Persentase Lama Tingkat Wisatawan	Persen	NA	3,5	4,0	4,5	4,5	IKU PD	DINAS PARIWISATA
	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Rupiah (Miliar)	21,17	21,43	21,65	21,93	21,93	IKU PD	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Pertumbuhan IKM/UKM	Angka	82	85	87	92	92	IKU PD	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Pertumbuhan industri kreatif	Persen	2,5	2,8	3	3,5	3,8	IKU PD	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	27	29,5	32	34	34	IKU PD	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Triliun)	1,5	1,8	2	2,3	2,3	IKU PD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	INDEKS GINI	Angka	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	TUJUAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS PERIKANAN, DISPERDAGRIN, DISPAR, BAPENDA, DINAS KOPERASI, SETDA (BAGIAN PEREKONOMIAN)

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Angka Kemiskinan	persen	17,89	17,89	17,39	16,89	16,89	IKU PEMDA	DISNAKER, DINAS KOPERASI DAN UKM, DINAS PARIWISATA, DINAS PERIKANAN, DKP DAN PERTANIAN, DINASOS, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DINAS SOSIAL, PUPR, PERKIM dan DLH
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	85,5	85,7	86	86,5	86,5	IKU PD	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	Persen	0	0,25	0,3	3,5	3,5	IKU PD	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	5	10	15	20	20	IKU PD	DINAS PERIKANAN
	Persentase Kunjungan Wisatawan	Persen	NA	5	7	10	10	IKU PD	DINAS PARIWISATA
	Persentase Lama Tinggal Wisatawan	Persen	NA	3,5	4,0	4,5	4,5	IKU PD	DINAS PARIWISATA
	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Rupiah (Miliar)	21,17	21,43	21,65	21,93	21,93	IKU PD	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Pertumbuhan IKM/UKM	Angka	82	85	87	92	92	IKU PD	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Pertumbuhan industri kreatif	Persen	2,5	2,8	3	3,5	3,8	IKU PD	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	27	29,5	32	34	34	IKU PD	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Triliun)	1,5	1,8	2	2,3	2,3	IKU PD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase PPKS Mandiri	Persen	5,2	5,27	5,3	5,4	5,4	IKU PEMDA	DINAS SOSIAL
	Rasio PPKS terhadap jumlah penduduk	Persen	0,177	0,174	0,171	0,168	0,168	IKU PEMDA	DINAS SOSIAL
	PPKS yang dilayani dan ditangani	Persen	88	91	93	95	95	IKU PD	DINAS SOSIAL
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,34	6,2-6	6-5,8	5,8-5	5,8-5	IKU PEMDA	DINAS TENAGA KERJA
	Persentase Serapan Tenaga Kerja	Persen	3,97	4,1	4,5	4,72	4,72	IKU PD	DINAS TENAGA KERJA
II	Aspek Pelayanan Umum								

No	Aspek/Urutan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	Persentase pencapaian SPM sarana dan prasarana pendidikan	Persen	24	30	40	50	50			DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
	Persentase pencapaian SPM pendidikan (kategori kualitas pendidikan)	Persen	70	75	78	80	80			DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
	Persentase siswa PKBM yang lulus	Persen	100	100	100	100	100			DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
2	Persentase guru bersertifikat	Persen	86	87	87,5	87,5	87,5			DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100			RSHD
	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Memiliki Izin	Persen	100	100	100	100	100			DINKES
	Persentase Mutu SDM Kesehatan Meningkat	Persen	75	76	77	78	85			DINKES
3	Cakupan Pelaksanaan Promotif Tingkat Kota	Persen	60	65	70	75	80			DINKES
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	Tingkat kemandapan infrastruktur permukiman	Persen	85	86	87	88	88			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Tingkat kemandapan jalan kota	Persen	85	86	87	88	88			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

7

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen	40	55	65	0,75	0,75		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	99	100	100	100	100		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	17	17	18	19	19		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Ha	1039	1039	1039	1039	1039		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota yang layak	Persen	61	65	67	70	70		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	Persen	12	13	14	16	16		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Persen	49,4	51,7	54,2	56,67	56,67		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	80	82	83	86	86		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Persen	60	66	70	74,4	74,4		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Persen	55	64	73	73	73		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Persen	NA	0,833	0,625	0,555	0,555		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	50	55	60	65	65		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase rumah layak huni	Persen	50	55	60	65	65		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	NA	0,260	0,263	0,265	0,265		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Persentase penanganan gangguan ketertaman dan ketertiban umum	Persen	50	55	60	65	65		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase pos kamling aktif	Persen	65	65	66	67	68		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Persen	70	75	80	80	80		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	100	100	100	100	100		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila Dan Pengembangan Karakter Kebangsaan	Persen	65	90	90	90	90		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Persen	80	90	91	92	92		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Persen	80	88	89	90	90		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik Sosial	Persen	70	100	100	100	100		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	65	75	85	95	95		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	65	75	85	95	95		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	87	87	87	90	90		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	Jumlah PPKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	29	41	52	64	64		DINAS SOSIAL
	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	41	52	70	91	91		DINAS SOSIAL
	Persentase korban yang Mendapatkan Penanganan Bencana	Persen	100	100	100	100	100		DINAS SOSIAL
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang di Bina	Persen	100	100	100	100	100		DINAS SOSIAL
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Dokumen	NA	1	0	0	0		DINAS TENAGA KERJA
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat (Kompetensi)	Persen	13,76	14	15	17	17		DINAS TENAGA KERJA

No	Aspek/Urutan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	Persen	45,64	49,62	55,42	60	60		DINAS TENAGA KERJA
	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di selesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Persen	50	52	55	56	56		DINAS TENAGA KERJA
	Dokumen Upah Minimum Kota (UMK)	Dokumen	1	1	1	1	1		DINAS TENAGA KERJA
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	40%	60	65	75	75		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persen	4,2	4,6	5	7	7		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	Persen	50	60	70	80	80		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase administrasi kelurahan/desa	Persen	26	40	53	67	67		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase OPD yang telah responsif gender	Persen	40	60	65	75	75		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus anak	Persen	0,00031	0,00030	0,00028	0,00027	0,00027		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender anak	Persen	45	60	65	75	75		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase kebijakan tentang peningkatan kualitas anak yang disahkan	Persen	0,00031	0,00030	0,00028	0,00027	0,00027		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
	Persentase infrastruktur Pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	NA	20	25	30	30		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	89	90	92	93	95		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	4,5	4	2	1	1		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	80	85	90	95	95		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Persen	NA	0,33	0,33	0,34	0,34		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Jumlah Izin Lokasi yang dikeluarkan	Persen	NA	0,33	0,33	0,34	0,34		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persen	NA	0,33	0,33	0,34	0,34		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase Penatagunaan Tanah	Persen	NA	0,33	0,33	0,34	0,34		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
	Penentuan Kelas Air di Sungai Bengkulu	Kelas sungai	4,0	4,0	3,0	3,0	3		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Bengkulu	ISPU	95,0	96,0	96,0	96,0	96,0		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	40	40,1	40,12	40,13	40,13		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Angka	1	1	1	2	2		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Aspek/Urutan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	50	75	77	80	100		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	50	70	75	90	100		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Persen	75	80	80	85	85		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	100	100		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	58	60	61,5	62,7	65		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	76,79	86,00	89,33	92,67	92,67		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	98,63	99,5	99,63	99,75	99,75		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Dokumen Penyajian Data Kependudukan Skala Kota	Persen	100	100	100	100	100		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	Cakupan akseptor KB Aktif	Nilai	36370	36650	36900	37500	37500		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Keluarga Sejahtera (KS)	Persen	30	40	45	50	50		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase TFR	Persen	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
	Rasio Konektivitas Kota	Angka	0,74	0,75	0,78	0,80	0,80		DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Terpeliharanya kapal dengan kondisi baik	Persen	100	100	100	100	100		DINAS PERHUBUNGAN
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota	Persen	75	75	80	85	85		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Persen	1	1,2	1,3	1,5	1,5		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota	Persen	0	2,7	4,4	5,5	5,5		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota	Persen	5	11	12	14	14		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

42

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota	Persen	1	3,7	5,5	6	6		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota	Persen	33,6	36,1	38,6	41,41	41,41		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Persen	37,7%	40,25	42,7%	45%	45%		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase UMKM yang berizin	Persen	1,09	2,21	3,50	4,3	4,3		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase UMKM binaan yang meningkatkan omsetnya	Persen	0,22	1,64	3,71	4,6	4,6		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	30	50	75	100	100		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase peningkatan investasi	Persen	48	58	68	78	78		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	100		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	100	100	100	100		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Persen	100	100	100	100	100		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
	Persentase organisasi pramuka yang aktif	Persen	80	80	90	100	100		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase Pemuda yang berprestasi	Persen	18,05	20	20	25	25		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Jumlah prestasi olahraga	Medali	128	150	150	150	150		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

A.

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	NA	70	80	90	90		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	50	60	70	80	80%		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
	Persentase cagar budaya yang di laksanakan	Persen	81	89	90	95	100		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase kesenian tradisional lokal yang di bina	Jumlah	6	6	6	6	6		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase pengembangan budaya lokal yang dibina	Jumlah	4	4	4	4	4		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Sejarah lokal yang dibina	Jumlah	2	2	2	2	2		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
	Persentase perpustakaan yang mendapat pembinaan	Persen	29	60	78	86	86		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan	Nilai IKM	62	70	75	80	80		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	33	52	53	54	54		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	Persen	NA	10	13	15	15		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	Produksi perikanan tangkap	Ton	18,12	19,03	19,98	20,98	20,98			DINAS PERIKANAN
	Produksi perikanan budidaya	Ton	6,00	6,30	6,62	6,95	6,95			DINAS PERIKANAN
	Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	5	10	15	20	20			DINAS PERIKANAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Persen	NA	2	3	4	4			DINAS PARIWISATA
	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	NA	30	35	40	40			DINAS PARIWISATA
	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	NA	30	35	40	40			DINAS PARIWISATA
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah CBT	NA	10	15	20	20			DINAS PARIWISATA
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Persen	65	65	70	75	80			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Ketersediaan sarana peternakan	Persen	60	70	75	78	80			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Persen	80	82	83	84	85			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	50	60	70	80	80			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Produksi Daging	Ton	236	240	250	260	260			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase fasilitas penanggulangan bencana	Persen	85	87	90	95	100			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

2.

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh dan petani	Persen	30	35	40	45	60		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	35,97	35,97	45,2	53	53		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Persen	38,2	38,2	38,2	40	40		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Persen	9	10	11	12	12		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Nilai ekspor	juta US\$	NA	0,5	0,7	1	1		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	Persen	25,7	29	33	37	37		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Persen	2	2	2,25	2,5	2,5		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk tunan indikator pembangunan industri dalam RPIPN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	0	10	20	25	25		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	33	35	37	40	40		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

47.

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	SEKRETARIAT DAERAH								
	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persen	NA	90	95	100	100		SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	NA	75	80	85	90		SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI
	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	NA	100	100	100	100		SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI
	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPDP tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Persen	95	96	97	98	98		SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Persen	63	65	68	70	70		SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM
	Persentase Kebijakan dan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	100	100	100		SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100		SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SDA
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	Persen	NA	50	52	53	53		SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2	SEKRETARIAT DEWAN								

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rata-rata persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda	Persen	100	100	100	100	100		SEKRETARIAT DPRD
	Rata-rata persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda	Persen	100	100	100	100	100		SEKRETARIAT DPRD
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	PERENCANAAN								
	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	NA	80	82	83	83		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai target	Persen	NA	80	82	83	83		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	NA	100	100	100	100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	Na	100	100	100	100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	Na	100	100	100	100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	KEUANGAN								

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN. PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN. PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	91	96	100	100	100		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN. PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	1,3	1,4	1,5	1,54	1,6		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN. PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi PAD	Persen	74,22	79	84	89	89		BADAN PENDAPATAN DAERAH
3	KEPEGAWAIAN								
	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	60	62	65	67	67		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Peta Kompetensi ASN	Persen	55	57	58	60	60		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	Persentase Aparatur yang Telah lulus Diklat PIM, Diklat fungsional dan teknis Sesuai Syarat Jabatan	Persen	75	80	85	90	90		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDA	Persen	NA	15	30	45	45		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
	INSPEKTORAT DAERAH								
	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Persen	100	100	100	100	100		INSPEKTORAT DAERAH

No	Aspek/Usuan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase PD yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Usuan Pemerintahan Daerah	Persen	25	100	100	100	100		INSPEKTORAT DAERAH
G	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN								
1	KECAMATAN SUNGAI SERUT								
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	86	87	87		KECAMATAN SUNGAI SERUT
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	45	46	47	48	48		KECAMATAN SUNGAI SERUT
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	100	100		KECAMATAN SUNGAI SERUT
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100		KECAMATAN SUNGAI SERUT
2	KECAMATAN RATU AGUNG								
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	86	87	87		KECAMATAN RATU AGUNG
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	45	46	47	48	48		KECAMATAN RATU AGUNG
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	100	100		KECAMATAN RATU AGUNG
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100		KECAMATAN RATU AGUNG
3	KECAMATAN KAMPUNG MELAYU								
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	86	87	87		KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	45	46	47	48	48		KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	100	100		KECAMATAN KAMPUNG MELAYU

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100			KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
4	KECAMATAN SELEBAR									
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	86	87	87			KECAMATAN SELEBAR
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	45	46	47	48	48			KECAMATAN SELEBAR
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	100	100			KECAMATAN SELEBAR
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100			KECAMATAN SELEBAR
5	KECAMATAN MUARA BANGKAHULU									
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	86	87	87			KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	14	15	16	17	17			KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	100	100			KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100			KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
6	KECAMATAN GADING CEMPAKA									
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	86	87	87			KECAMATAN GADING CEMPAKA
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	45	46	47	48	48			KECAMATAN GADING CEMPAKA
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	100	100			KECAMATAN GADING CEMPAKA
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100			KECAMATAN GADING CEMPAKA
7	KECAMATAN RATU SAMBAN									

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	86	87	87		KECAMATAN RATU SAMBAN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	45	46	47	48	48		KECAMATAN RATU SAMBAN
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	100	100		KECAMATAN RATU SAMBAN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100		KECAMATAN RATU SAMBAN
8	KECAMATAN SINGARAN PATI								
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	85	85	86	87	87		KECAMATAN SINGARAN PATI
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	45	46	47	48	48		KECAMATAN SINGARAN PATI
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	100	100		KECAMATAN SINGARAN PATI
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100		KECAMATAN SINGARAN PATI
9	KECAMATAN TELUK SEGARA								
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	95	95	94	92	92		KECAMATAN TELUK SEGARA
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	45	45	47	48	48		KECAMATAN TELUK SEGARA
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	100	100		KECAMATAN TELUK SEGARA
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100		KECAMATAN TELUK SEGARA
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	80	80	81	82	82		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Pengembangan Karakter Kebangsaan	Persen	60	90	90	90	90		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Persen	80	90	91	92	92		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Persen	80	90	91	92	92		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persen	80	90	91	92	92		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
III	Aspek Daya Saing								
	Indeks Reformasi Birokrasi	INDEKS	CC	CC	B	B	B	TUJUAN	Samua Perangkat Daerah
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Nilai	2,75	3,0	3,1	3,2	3,2	IKU PEMDA	SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	IKU PEMDA	SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP Daerah	Nilai	11,41	12,41	12,91	12,91	12,91	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	55	60	65	75	75	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	Persen	63	65	68	70	70	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH

7.

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja				KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	Nilai	NA	B	B	B	BB	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH	
	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH	
	Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Persen	NA	75	80	85	85	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH	
	Persentase Raporda yang Disetujui Bersama	Persen	61,11	50	55	60	55	IKU PD	SEKRETARIAT DPRD	
	Nilai Perencanaan Kinerja	Nilai	23,53	24,53	24,93	24,93	24,93	IKU PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Nilai Pengukuran Kinerja	Nilai	14,48	15,48	15,98	17,48	17,48	IKU PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Nilai pencapaian kinerja	Nilai	13,21	13,91	14,41	16,41	16,41	IKU PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPD	Persen	NA	100	100	100	100	IKU PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Persentase indikator sasaran RPD yang mencapai Target	Persen	63	70	75	80	80	IKU PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Persentase Jumlah ASN yang Kompeten	Persen	60	60	60	60	60	IKU PD	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
	Indeks Inovasi Daerah	INDEKS	59,37	59,57	59,75	59,90	59,90	IKU PEMDA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	NA	20	40	60	60	IKU PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	Persen	2,56	38,46	64,10	100	100	IKU PD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU PEMDA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	15,32	19,06	19,06	19,06	19,06	IKU PD	BPKAD, BAPENDA	

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Temuan dan Rekomendasi	Temuan=2; Rekomendasi=64; persemer 1=11; Rekomendasi asi	Temuan=2; Rekomendasi=64; persemer 1=11; Rekomendasi asi	Temuan=2; Rekomendasi=60; persemer 1=10; Rekomendasi asi	Temuan=1; Rekomendasi=58; persemer 1=8; Rekomendasi asi	IKU PD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	75	75	77	80	80	IKU PEMDA	INSPEKTORAT DAERAH
	Nilai komponen evaluasi kinerja pada SAKIP daerah	Nilai	7,61	7,91	8,41	8,41	8,41	IKU PD	INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah Kota	Persen	85	85	90	90	90	IKU PD	INSPEKTORAT DAERAH
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	IKU PD	INSPEKTORAT DAERAH
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	INDEKS	1,6	1,8	1,9	2	2	IKU PEMDA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Index kualitas layanan informasi publik	NILAI	NA	80	85	90	90	IKU PD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Nilai Indeks Pembangunan TIK	NILAI	NA	50	75	90	90	IKU PD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	1,0	1,2	1,3	1,5	1,5	IKU PD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	INDEKS	83,55	84,17	85	85,83	85,83	IKU PEMDA	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, RSHD
	IKM Kinerja PTSP	Nilai	84,0	84,50	85	85,50	85,50	IKU PD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	IKM RSHD	Indeks	85,19	86	87,00	88,00	88,00	IKU PD	RSHD

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IKM Kinerja DUJUCAPIL	Nilai	81,46	82	83	84	84	IKU PD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	82,16	89,25	91,88	94,50	94,50	IKU PD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama (Hak Akses Data)	Persen	32,26	48,39	64,52	100	100	IKU PD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Pelayanan di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	IKU PD	KECAMATAN SUNGAI SERUT
	Persentase Pelayanan di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	IKU PD	KECAMATAN RATU AGUNG
	Persentase Pelayanan di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	IKU PD	KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
	Persentase Pelayanan di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	IKU PD	KECAMATAN SELEBAR
	Persentase Pelayanan di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	IKU PD	KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
	Persentase Pelayanan di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	IKU PD	KECAMATAN GADING CEMPAKA
	Persentase Pelayanan di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	IKU PD	KECAMATAN RATU SAMBAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Pelayanan di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	IKU PD	KECAMATAN SINGARAN PATI
	Persentase Pelayanan di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	IKU PD	KECAMATAN TELUK SEGARA
	INDEKS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	INDEKS	65,64	66,6	70,3	76,36	76,36	TUJUAN	DPUPR, DPRKPP, DLH, BPBD, DINAS PERHUBUNGAN
	INDEKS KUALITAS INFRASTRUKTUR	Persen	75	77	79	81	81	IKU PEMDA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN DINAS PERHUBUNGAN
	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	85	86	87	88	88	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase angka kecelakaan lalu lintas	Persen	0,799	0,599	0,399	0,199	0,199	IKU PD	DINAS PERHUBUNGAN
	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	14	21	28	34	34	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	85	88	90	95	95	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Ha	1039	1039	1039	1039	1039	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penduduk berakses air minum layak	Persen	61	65	67	70	70	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Penduduk berakses sanitasi yang layak	Persen	80	82	83	86	86	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Penanganan kawasan kumuh	Persen	50	55	60	65	65	IKU PD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	80	75,07	75,1	75,2	75,2	IKU PEMDA	DPUPR, DPRKPP
	Persentase Penyelenggaraan dan Penataan Ruang	Persen	60	65	70	75	75	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Persen	NA	0,33	0,33	0,34	0,34	IKU PD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Aspek/Usan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	KONDISI AWAL	Target Kinerja			KONDISI AKHIR	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Angka	61,95	62,82	62,85	62,93	62,93	IKU PEMDA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	50,44	50,54	50,57	50,64	50,64	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88,03	88,13	88,23	88,33	88,33	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	35,45	37,07	37,07	37,07	37,07	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	48,21	50	55	60	60	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Capaian pengelolaan sampah	Persen	65	67	69,5	70	70	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	INDEKS RISIKO BENCANA	Indeks	120	120	110	100	100	IKU PEMDA	BPBD, DPKP
	Persentase Penanganan Bencana	Persen	48	50	65	78	78	IKU PD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	95	95	95	95	95	IKU PD	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

BAB IX

PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 Kota Bengkulu merupakan dokumen perencanaan pengganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bengkulu tahun 2019-2023 yang akan berakhir seiring dengan masa jabatan walikota saat ini.

Dokumen RPD ini diperlukan selain sebagai guideline bagi P.J. Kepala Daerah mendatang juga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024-2026. Memperhatikan kondisi tersebut, Kota Bengkulu melalui Bappeda Kota Bengkulu perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai pedoman umum perencanaan pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya dalam merencanakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD, perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat tujuan, strategi, arah kebijakan, program, & kegiatan sesuai dengan tugas & fungsi masing-masing PD untuk kemudian menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD setiap tahunnya.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu sebagai berikut :

- 1) Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis 2024-2026 dan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.
- 2) Badan/ Dinas /Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan/ Dinas/ Unit Satuan Kerja masing-masing.
- 3) Badan/ Dinas/ Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu harus memastikan konsistensi antara dokumen RPD dengan Rencana Strategis Badan/ Dinas/ Unit Satuan Kerja.

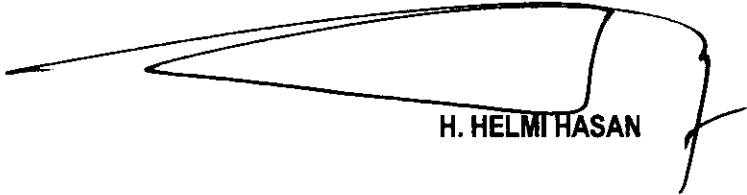
- 4) Bappeda melaksanakan pemantauan, pengendalian & evaluasi yang didasari dari pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil RKPD setiap tahun.
- 5) Keselarasan dan kesesuaian antara dokumen perencanaan serta dokumen penganggaran dijadikan sebagai bahan dalam menentukan tingkat keberhasilan Pemerintah Kota Bengkulu.

9.2. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Daerah disusun untuk 2024-2026 ini selanjutnya diturunkan dalam renstra PD bisa menjadi pedoman bagi pejabat Walikota selama masa transisi. RPD ini juga bisa dijadikan referensi dalam pembuatan RPJMD saat terpilihnya Walikota & Wakil Walikota Bengkulu yang baru.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Periode transisi juga digunakan dalam menyelesaikan isu-isu strategis yang belum diselesaikan serta menyelesaikan permasalahan regulasi aturan yang belum disesuaikan pada masa RPJMD sebelumnya.

WALIKOTA BENGKULU



H. HELMI HASAN